

DAYA TARIK INVESTASI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2004

Persepsi Dunia Usaha

Regional Investment Attractiveness Business Perception



Peringkat 214 Kabupaten/Kota di Indonesia & Gambaran
Permasalahan Dunia Usaha

*Rating to 214 Regencies/Cities in Indonesia & Problems on Business
Environment*

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah *The Regional Autonomy Watch*

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, disingkat **KPPOD** adalah lembaga independen yang melakukan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah terkait aktivitas perekonomian. Secara resmi KPPOD didirikan tanggal 1 Maret 2001 oleh tiga unsur lembaga: dunia usaha, lembaga penelitian, dan media masa, yang terdiri dari 7 (tujuh) institusi yaitu **KADIN-Indonesia**, **CSIS** (Centre For Strategic And International Studies), **LPEM-FEUI** (Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), **Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya**, **Harian The Jakarta Post**, **Harian Bisnis Indonesia** dan **Harian Suara Pembaruan**.

Pembentukan KPPOD tersebut merupakan respon terhadap suatu eksperimen besar bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Dalam pandangan unsur unsur pendiri KPPOD, tujuan paling mendasar dari penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat di setiap daerah otonom. Untuk itu, melalui kegiatan kegiatannya, KPPOD berusaha ikut serta membangun ekonomi rakyat dengan mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan dan praktek pemerintahan pusat dan daerah yang mengancam perekonomian nasional.

Sejak pendiriannya, sampai saat ini KPPOD telah melakukan berbagai jenis kegiatan dalam bentuk:

1. Kajian ribuan Peraturan Daerah mengenai aktivitas perekonomian, khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitasnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Pemeringkatan tahunan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar daerah, sejak tahun 2001; dan pemberian KPPOD *Award* kepada daerah daerah peringkat terbaik sejak tahun 2002.
3. Sosialisasi hasil hasil kegiatan KPPOD mengenai topik topik aktual pelaksanaan otonomi daerah melalui: *Newsletter* KPPOD yang terbit dua bulan sekali sejak Juni 2001, yang disebarluaskan ke pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi seluruh Indonesia dan berbagai *stakeholder* pembangunan daerah lainnya; seminar/lokakarya mengenai pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia; *talk show* TV/Radio, Dll.



KADIN INDONESIA



LPEM - FEUI



PRASETIYA MULYA
business school

The Jakarta Post

Bisnis Indonesia

SUARA PEMBARUAN

DAYA TARIK INVESTASI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2004

Persepsi Dunia Usaha

Regional Investment Attractiveness Business Perception



Peringkat 214 Kabupaten/Kota di Indonesia & Gambaran
Permasalahan Dunia Usaha

*Rating to 214 Regencies/Cities in Indonesia & Problems on Business
Environment*

Tim Peneliti

Research Team

Koordinator Peneliti/*Principal Investigator:*

P. Agung Pambudhi, MM

Nara Sumber/*Resource Persons:*

Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro

Dr. Hadi Soesastro

Dr. Djisman Simanjuntak

Anggota Peneliti/*Research Associates:*

Sigit Murwito, S.Sos

Robert EndiJaweng S.IP

Sri Mulyono, MSs

Agus Widodo, S.Sos

Peneliti Lapangan/*Area Researchers:*

Aan Eko Widiarto, SH, Mhum.; Agustinus Lumen; Bramuda Mahardhika SH.; Dr. Arifin Bakti;

Dr. Grevo Gerung; Dr. Rafael Purtomo Somaji; Drs. H. Bernard, M.Si.; Eddy Ratno Susanto ST.;

Hendri Benyamin SE.; Herman Buedoyo, SE.; Idham Cholid,ME.; Ir. Jumli, M.Sc.;

J. Septer Manufandu; Laode Azadi M.Si.; Murbanto Sinaga, MA.; Nanang Farid Syam, S.Sos.;

Nursia Sinaga, S.Sos.; Paulina P. Mada.; Prihartini Budi Astuti, SE.; Ruslan Sangadji;

Sukasmento, MSi.; Taufik Hidayat SP.; Taufiqurrahman, SE, MSc.; Teguh Hadi Priyono, SE, Msi.;

Unang Atmaja, MSc.; Y. Wasi Gede Puraka, S.Sos.; Yosef Prihanto, SE.; Yuliana Nona Sangbidang;

Yusep Hendarsyah, S.IP.; Yustinus Vena Handono; Zainal Abidin, MM.; Zet Ena, SE

Asisten Peneliti/*Research Assistants:*

Regina Retno Budiastuti, SH

F. Sundoko

Kurniawaty Septiany Musdar

Kata Pengantar - KPPOD

Foreword

Empat tahun perjalanan otonomi daerah (otda) ditandai dengan berbagai peristiwa penting, positif maupun negatif, yang dapat digunakan sebagai acuan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan otda. Dari segi positif, terlihat adanya *political will* beberapa daerah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, juga muncul upaya perbaikan pelayanan publik (usaha) dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap/terpadu. Sayangnya sisi negatif otonomi daerah justru lebih mendominasi, diantaranya tentang perebutan kewenangan antar daerah-daerah otonom dengan pemerintah pusat, hubungan tidak harmonis antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, politik uang dalam pemilihan kepala daerah, pertentangan eksekutif dan legislatif, arogansi pimpinan daerah, pemekaran wilayah yang sangat pesat dan kontroversial, kebijakan daerah yang mendorong ekonomi biaya tinggi, dan berbagai peristiwa lainnya.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) yang hadir sepanjang usia otda tersebut, berusaha mewujudkan visinya untuk ikut serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di era otonomi ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya. Dalam salah satu kegiatan tahunannya, KPPOD mengadakan penelitian mengenai “Pemeringkatan Daya Tarik Investasi

The four-year journey of regional autonomy (otda) is characterized by a range of important events, negative or positive, which can be used as reference for evaluation for its better implementation. From positive aspect, we can see the growing political will in some regions involving the public in planning the development of their areas, likewise the manifestations of efforts intended for improvement of public service (business) by applying one-stop-service in business licensing process. Unfortunately, the negative aspects of regional autonomy are indeed more dominant, such as, among others, competition over authority between autonomous regions and central government, inharmonious relationship between Regency/City and Province, money politics in the election of heads of regions, conflict between the executive and legislative, arrogance of regional leaders, speedy and controversial expansion of territory, regional policy pushing high-cost economy, and other numerous upshots.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/Regional Autonomy Watch), which is existing all along with the age of otda, is seeking to realize its vision of partaking in the creation of conducive business climate in the era of autonomy through various activities. As one of its annual activity, KPPOD conducted a “Rating on Investment

Kabupaten/Kota Tahun 2004” yang meliputi 161 Kabupaten dan 53 Kota di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pemeringkatan keempat, setelah sebelumnya melaksanakannya di 90 Kabupaten/Kota di tahun 2001, 134 Kabupaten/Kota di tahun 2002, dan 200 Kabupaten/Kota di tahun 2003.

Selain untuk referensi para pelaku usaha dalam mempertimbangkan keputusan investasinya, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi yang sehat antar daerah-daerah otonom dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian. Antusiasme kalangan dunia usaha untuk mempelajari hasil penelitian tersebut di tahun-tahun sebelumnya dan beragam tanggapan dari daerah-daerah otonom, serta liputan media yang luas semakin mendorong KPPOD untuk melakukan kegiatan tersebut secara reguler. Dari kegiatan itu diharapkan menjadi salah satu alat bantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otoda yang sedang dan akan terus berlangsung.

Dalam penelitian di tahun 2004 ini, kriteria yang digunakan untuk menilai daya tarik investasi daerah dipertahankan sama dengan kriteria yang digunakan tahun 2002 yang terdiri dari 5 faktor, 14 variabel dan 42 indikator; demikian juga dengan bobot masing-masing kriteria. Hal itu dimaksudkan untuk dapat melihat perkembangan daya tarik investasi daerah dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan studi tersebut yang dilaksanakan oleh tim peneliti tetap KPPOD juga didukung sejumlah nara sumber dan para koordinator peneliti daerah dari berbagai institusi penelitian dan perguruan tinggi, serta para *Interviewer* di masing-masing daerah penelitian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil studi (evaluasi internal maupun adopsi dari berbagai kritik dan saran pada pemeringkatan tahun sebelumnya), kelemahan-kelemahan masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu kami akan sangat berterimakasih apabila ada masukan dari para pembaca untuk tujuan perbaikan kualitas studi, dan terutama agar hasil pemeringkatan yang disosialisasikan secara luas dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Attractiveness of Regencies/Cities for Year 2004” covering 161 Regencies and 53 Cities in Indonesia. The study is the fourth rating; the first was in 2001 covering 90 Regencies/Cities, the second was in 2002 with 134 Regencies/Cities, while the third was in 2003 with 200 Regencies/Cities.

Apart from being a reference for business players in weighing investment decision, said activity is intended to induce healthy competition among autonomous regions in facilitating economic activities. Likewise, the activity is expected to become one of the means to assist principal parties to evaluate the otoda, the program that is on-going and will continue to go on.

The enthusiasm of the business community to study the result of research in previous years and a mixture of comments from autonomous regions, as well as wide media coverage drive KPPOD to do the same activity regularly.

In this year’s research, the criteria used to assess the investment attractiveness of regions is same to the criteria used in year 2002 and 2003 consisting of 5 factors, 14 variables and 42 indicators; the same applies to the weight of each criterion. This is on purpose to see the development in the attractiveness to investment of regions from year to year.

This study, which is conducted by the same research team from KPPOD, is supported by a number of resource persons, area researchers/coordinators from various research institutions and research academe, as well as interviewers from each research area. Even though various efforts have been done to increase the quality of the result of this study (internal evaluation and adaptation of various suggestions and critics over the rating of previous years), weaknesses are still inevitable. Accordingly, we appreciate it very much if there are inputs from our readers to enhance the quality of this study, and if there are efforts to widely disseminate this study as positive contribution to the society.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada para responden pelaku usaha yang memberikan input utama dalam penelitian ini, pemerintah daerah di daerah penelitian yang telah memberikan data-data pendukung yang diperlukan, begitu juga kepada Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Otonomi Daerah, dan kepada The Asia Foundation yang secara konsisten mendukung kegiatan tahunan KPPOD ini.

We express our deep gratitude to our respondents from the business society who provided us first-hand input, to local governments that shared us supporting data, to the Ministry of Home Affairs especially the Directorate General for Regional Autonomy, and to The Asia Foundation that consistently supported this rating.

Atas Nama Tim Peneliti/*On behalf of the Research Team*
Koordinator/*Principal Investigator*

P. Agung Pambudhi

Kata Pengantar - Asia Foundation

Foreword

Otonomi daerah adalah reformasi pemerintahan yang mempunyai dampak ekonomi. Dengan adanya delegasi wewenang kepada pemerintah daerah, maka pengusaha akan lebih banyak berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, bukan lagi dengan pemerintah pusat. Perubahan ini terjadi dengan berbagai masalah, seperti adanya peningkatan jumlah dan besarnya pungutan, berbagai kasus korupsi, dan munculnya peraturan daerah yang menghambat dunia usaha.

Pada saat bersamaan, desentralisasi juga membuka banyak kesempatan emas bagi pemerintah daerah. Pendelegasian pemerintahan membuka peluang bagi pemerintah daerah meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembangunan ekonomi daerah untuk penciptaan lapangan kerja. Banyak contoh terbaik yang telah dilakukan pemerintah daerah. Misalnya, kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur yang telah berhasil menurunkan biaya perijinan hingga 30 persen dan mengurangi lama waktu pengurusan sampai 40 persen. Pemerintah Yogyakarta membuat sistem penyampaian keluhan melalui berbagai media

Regional autonomy was undertaken as a governance reform, with economic impact given secondary consideration. But the significant rights and responsibilities devolved to local governments means that most businesses now deal almost entirely with the local, not central, government. This process has not gone without hiccups—proliferation of levies and user fees, cases of wide-scale corruption, and poor policy choices are all real problems that must be addressed.

However, decentralization is also an important opportunity. Devolving governance to communities creates new possibilities to increase the well-being of citizens by fostering innovation, increasing transparency and accountability, and developing regional economies that generate employment outside of Jakarta. There are many examples now of best practice by local governments. Take for example Sidoarjo, East Java that has reduced the cost of business licensing by 30% and processing time by 40%. Local governments like Yogyakarta that have created online complaint mechanisms to improve their local services. Or Sragen in Central Java, that was able to increase local revenue by over 400% in three years, without raising fees or taxes,

komunikasi seperti sms, telepon, email, dan internet untuk mendapat masukan guna memperbaiki pelayanan publik. Sedangkan kabupaten Sragen dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sampai 400 persen dalam tiga tahun dengan komitmen membasmi korupsi dan tanpa menaikkan pungutan atau pajak daerah.

Studi pemeringkatan daya tarik investasi ini merupakan upaya mengidentifikasi contoh terbaik yang ada dan menyebarkannya sehingga pemerintah daerah lain dapat melakukan hal yang sama. Pemeringkatan ini diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk dapat berbuat lebih baik lagi dan menyediakan suatu tolok ukur untuk upaya tersebut. Dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) di masa mendatang, pemerintah daerah akan langsung dievaluasi hasil kerja nyatanya dalam membangun ekonomi daerah oleh para pemilih. Kami berharap survei ini akan memotivasi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja mereka dan meningkatkan pemahaman bagaimana pengusaha menilai suatu daerah sebagai tempat berinvestasi.

Asia Foundation sangat bangga bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemeringkatan tahunan ini, yang mendapat dukungan penuh dari *United States Agency for International Development* (USAID). Kegiatan pemeringkatan ini merupakan bagian dari upaya Asia Foundation untuk mendukung perbaikan iklim usaha di Indonesia. Sejak tahun 1996, Asia Foundation telah bekerjasama dengan pengusaha dan pemerintah daerah untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Beberapa program yang Asia Foundation laksanakan diantaranya: peningkatan kualitas layanan perijinan usaha, memfasilitasi pembuatan peraturan dengan partisipasi masyarakat, dan mendukung asosiasi usaha kecil dan menengah untuk melakukan advokasi kebijakan usaha yang lebih baik. Survei

through their commitment to end corruption.

This ranking allows us to identify and disseminate this best practice in the hopes that other local governments will take up the challenge. The ranking is intended to urge local governments to strive to do better and to give them concrete benchmarks for doing better. With direct elections of Governors, Mayors, and Regents fast approaching, local governments will soon be judged in a very concrete way on their economic performance. We hope that the survey results will motivate local governments to improve their performance and to better understand how local investors view their areas as investment sites.

The Asia Foundation is proud to support this annual ranking, with generous support from the United States Agency for International Development. The ranking is part of our broader efforts to improve the business environment in Indonesia. Since 1996, we have worked with business owners and local governments across the country to reduce barriers to trade and investment. Our programs streamline business licensing, facilitate the drafting of economic regulation in a participatory and impact-conscious way, and support small business associations to advocate for better economic policies. This survey informs much of our work and we hope that it is as useful to the reader as well, as we work together to make Indonesia an investor-friendly, prosperous country.

KPPOD ini memberikan informasi mengenai berbagai upaya untuk memperbaiki iklim usaha dan kami berharap survei ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi investor dan meningkatkan kemakmuran.

Douglas E. Ramage

Representative to Indonesia
The Asia Foundation
Jakarta

Erin Thébault Weiser

Director for Economic Programs
The Asia Foundation
Jakarta

March 2005

Daftar Isi

Table of Contents

i	JUDUL PENELITIAN/ <i>Title</i>
iii	TIM PENELITI/ <i>Research Team</i>
v	KATA PENGANTAR - KPPOD/ <i>Foreword</i>
ix	KATA PENGANTAR - ASIA FOUNDATION/ <i>Foreword</i>
xiii	DAFTAR ISI/ <i>Table of Contents</i>
xv	DAFTAR GAMBAR/ <i>List of Diagram</i>
xvi	DAFTAR TABEL/ <i>List of Table</i>
xvii	DAFTAR LAMPIRAN/ <i>List of Appendix</i>
1	BAB I. PENDAHULUAN/ <i>Introduction</i>
1	A. LATAR BELAKANG/ <i>Background</i>
4	B. TUJUAN PENELITIAN/ <i>Purpose of Study</i>
4	C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN/ <i>Significance of Study</i>
5	BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN/ <i>Analitical Framework</i>
13	BAB III. METODOLOGI PENELITIAN/ <i>Research Methodology</i>
13	A. RUANG LINGKUP PENELITIAN/ <i>Research Scope</i>
14	B. DATA PENELITIAN/ <i>Research Data</i>
14	B.1. Jenis Data/ <i>Types of Data</i>
14	B.1.1. Data Primer/ <i>Primary Data</i>
14	B.1.2. Data Sekunder/ <i>Secondary Data</i>
19	B.2. Pengumpulan Data/ <i>Data Collection</i>
19	B.2.1. Teknik Pengumpulan Data/ <i>Data Collection Method</i>
21	B.2.2. Profil Responden/ <i>Profile of Respondents</i>
22	B.3. Pengolahan Data dan Analisis Data/ <i>Data Processing and Analysis</i>
22	B.3.1. Pembobotan Faktor, Variabel dan Indikator/ <i>Weighting of Factors, Variables and</i>

	<i>Indicators</i>
24	B.3.2. Klasifikasi Intensitas Tiap Indikator/ <i>Classification of Intensity for Each Indicator</i>
25	B.3.3. Penentuan Nilai Intensitas Tiap Indikator dan Peringkat/ <i>Determination of Intensity Weight of Each Indicator and Rank</i>
27	BAB IV. DAYA TARIK INVESTASI 214 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2004/ <i>Investment Attractiveness of 214 Regencies/Cities in Indonesia, 2004</i>
27	A. PERINGKAT 161 KABUPATEN DAN PERINGKAT 53 KOTA DI INDONESIA / <i>Rank of 161 Regencies and 53 Cities in Indonesia</i>
28	A.1. Peringkat Berdasarkan Kriteria Umum/ <i>General Ranking</i>
31	A.2. Peringkat Berdasarkan Faktor Kelembagaan/ <i>The Institutional Ranking</i>
37	A.3. Peringkat Berdasarkan Faktor Sosial Politik/ <i>The Socio-Political Ranking</i>
42	A.4. Peringkat Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/ <i>The Economic Dynamism Ranking</i>
46	A.5. Peringkat Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/ <i>The Labour and Productivity Ranking</i>
49	A.6. Peringkat Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/ <i>The Physical Infrastructure Ranking</i>
53	B. PERUBAHAN PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI/ <i>Changes In Ranking</i>
57	BAB VI. PENUTUP/<i>Conclusion</i>
57	A. KESIMPULAN/ <i>Conclusion</i>
62	B. SARAN/ <i>Recommendation</i>
65	LAMPIRAN/<i>Appendix</i>

Daftar Gambar

List of Diagram

- 6 Diagram 1 : Hirarki Faktor & Variabel Pemeringkatan/*Hierarchy of Rating Factors and Variables*
- 22 Diagram 2-6 : Bobot Faktor; Variabel; Indikator Pemeringkatan/*Weighting of Rating Factors, Variables and Indicators*
- 29 Grafik 1. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Kategori Umum (Nilai Total)/*Ranking Based on the Overall Score*
- 32 Grafik 2. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Kelembagaan/*Ranking Based on the Institutional Score*
- 35 Diagram 7 : Tingkat Kebermasalahan Perda/*Regional Regulation by Level of Problems Created*
- 35 Diagram 8 : Kualitas Perda Menurut Pelaku Usaha/*Quality of Regional Regulation According to Business Operators*
- 36 Diagram 9 : Jenis Pelanggaran Perda/*Type of Violions in Regional Regulation*
- 37 Diagram 10 : Perda Menurut Jenis Kebermasalahan/*Regional Regulation by Type of Problems*
- 39 Grafik 3. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Ranking Based on the Socio-Political Score*
- 43 Grafik 4. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Ranking Based on the Regional Economic Dynamism Score*
- 47 Grafik 5. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/*Ranking Based on the Labour and Productivity Score*
- 50 Grafik 6. : Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Ranking Based on the Physical Infrastructure Score*

Daftar Tabel

List of Table

- 7 Tabel 1. : Daftar Faktor - Variabel - Indikator Untuk Pemeringkatan Tahun 2004/*List of Factors - Variables - Indicators for 2004 Ratings*
- 14 Tabel 2. : Daftar Data Jenis Data Dan Sumber Data Yang Digunakan Untuk Pemeringkatan Tahun 2004/*List of Types of Data and Sources of Data Use in the 2004 Ratings*
- 21 Tabel 3. : Profil Responden/*Respondent Profile*
- 28 Tabel 4.a. : Rata-Rata Skor Peringkat Umum/*Average Scores for General Ratings*
- 30 Tabel 4.b. : Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Kategori Umum/*Best and Worst - Overall*
- 32 Tabel 5.a. : Rata-rata Skor Faktor Kelembagaan/*Average Scores for Institutional Factors*
- 34 Tabel 5.b. : Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Kelembagaan/*Best and Worst - the Institutional Factors*
- 38 Tabel 6.a. : Rata-Rata Skor Faktor Sosial Politik/*Average Scores for Socio-Political Factors*
- 40 Tabel 6.b. : Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Best and Worst - Socio-Political Factor*
- 43 Tabel 7.a. : Rata-Rata Skor Peringkat Faktor Ekonomi/*Average Scores for Regional Economic Dynamism Factor*
- 44 Tabel 7.b. : Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Best and Worst - Regional Economic Dynamism*
- 46 Tabel 8.a. : Rata-Rata Skor Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/*Average Scores for Labour & Productivity Factor*
- 48 Tabel 8.b. : Kelompok Peringkat A Dan E Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/*Best and Worst - Labour & Productivity*
- 50 Tabel 9.a. : Rata-rata Skor Faktor Infrastruktut Fisik/*Average Scores for Physical Infrastructure Factor*

- 51 Tabel 9.b. : Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Best and Worst - Physical Infrastructure*
- 54 Tabel 10.a. : Statistik Perubahan Peringkat/*Statistics of Change in Rating*
- 54 Tabel 10.b. : Daerah yang Mengalami Peningkatan dari Peringkat C pada Tahun 2003 Menjadi Peringkat A pada Tahun 2004 Berdasarkan Kategori Umum/*Regions Experiencing Overall Improvement From Ranking C in 2003 to Ranking A in 2004*

Daftar Lampiran

List of Appendix

- 65 Lampiran 1 : Statistik Daerah Penelitian/*Statistic of Rating Area*
- 67 PERINGKAT DAERAH/*Rank of Region* :
- 67 Lampiran 2.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Kategori Umum/*Rank of 53 Cities Based on the General Score*
- 68 Lampiran 2.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Kategori Umum/*Rank of 161 Regencies Based on the Overall Score*
- 70 Lampiran 3.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan/*Rank of 53 Cities Based on the Institutional Score*
- 71 Lampiran 3.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan/*Rank of 161 Regencies Based on the Institutional Score*
- 73 Lampiran 4.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Rank of 53 Cities Based on the Socio-Political Score*
- 74 Lampiran 4.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Rank of 161 Regencies Based on the Socio-Political Score*
- 76 Lampiran 5.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Rank of 53 Cities Based on the Economic Dynamism Score*
- 77 Lampiran 5.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Rank of 161 Regencies Based on the Economic Dynamism Score*
- 79 Lampiran 6.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/*Rank of 53 Cities Based on the Labour & Productivity Score*
- 80 Lampiran 6.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/*Rank of 161 Regencies Based on the Labour & Productivity Score*
- 82 Lampiran 7.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Rank of 53 Cities Based on the Physical Infrastructure*
- 83 Lampiran 7.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Rank of 161 Regencies Based on the Physical Infrastructure*
- 85 Lampiran 8 : Statistik Perubahan Peringkat Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2004/*Statistics of Changes in Rating of Regencies/Cities, 2003 - 2004*
- 86 Lampiran 9.1 : Hirarkhi Bobot Faktor, Variabel, Indikator Pemeringkatan/*Weighting of Rating Factors, Variables and Indicators*

- 91 Lampiran 9.2 : Penghitungan Nilai Intensitas Dengan Metode AHP/*Calculation of the Value of Indicators Using AHP Method*
- 94 INTENSITAS INDIKATOR DATA PRIMER/*Intensity of Primary Indicators***
- 94 Lampiran 10.A : Intensitas Indikator Faktor Kelembagaan 53 Kota/*The Intensity of 53 Cities of the Institutional Indicators*
- 95 Lampiran 10.B : Intensitas Indikator Faktor Kelembagaan 161 Kabupaten/*The Intensity of 161 Regencies of the Institutional Indicators*
- 98 Lampiran 11.A : Intensitas Indikator Faktor Sosial Politik 53 Kota/*The Intensity of 53 Cities of Socio-Political Indicators*
- 99 Lampiran 11.B : Intensitas Indikator Faktor Sosial Politik 161 Kabupaten/*The Intensity of 161 Regencies of Socio-Political Indicators*
- 102 Lampiran 12.A : Intensitas Indikator Faktor Infrastruktur Fisik 53 Kota/*The Intensity of 53 Cities of Physical Infrastructure Indicators*
- 103 Lampiran 12.B : Intensitas Indikator Faktor Infrastruktur Fisik 161 Kabupaten/*The Intensity of 161 Regencies of Physical Infrastructure Indicators*
- 106 INTENSITAS INDIKATOR DATA SEKUNDER/*Intensity of Secondary Indicators***
- 106 Lampiran 13 : Variabel Keuangan Daerah/*Regional Finance Variables*
- 106 Lampiran 13.A : Variabel Keuangan Daerah 53 Kota/*Regional Finance of 53 Cities*
- 107 Lampiran 13.B : Variabel Keuangan Daerah 161 Kabupaten/*Regional Finance of 161 Regencies*
- 110 Lampiran 14 : Faktor Ekonomi Daerah/*Regional Economic Dynamism*
- 110 Lampiran 14.1 : Variabel Potensi Ekonomi/*Economic Potential*
- 110 Lampiran 14.1.A : Variabel Potensi Ekonomi 53 Kota/*Economic Potential of 53 Cities*
- 111 Lampiran 14.1.A.1 : Intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi 53 Kota/*The Intensity of 53 Cities of Growth Indicators*
- 112 Lampiran 14.1.B : Variabel Potensi Ekonomi 161 Kabupaten/*Economic Potential of 161 Cities*
- 115 Lampiran 14.1.B.2 : Intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi 161 Kabupaten/*The Intensity of 161 Regencies of Growth Indicators*
- 118 Lampiran 14.2 : Struktur Ekonomi Daerah/*Economic Structure*
- 118 Lampiran 14.2.A : Variabel Struktur Ekonomi Daerah 53 Kota/*Economic Structure of 53 Cities*
- 119 Lampiran 14.2.B : Variabel Struktur Ekonomi Daerah 161 Kabupaten/*Economic Structure of 161 Regencies*
- 122 Lampiran 15 : Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/*Labour and Productivity*
- 122 Lampiran 15.1 : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja/*Availability of Manpower*
- 122 Lampiran 15.1.A : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja 53 Kota/*Availability of Manpower of 53 Cities*
- 123 Lampiran 15.1.B : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja 161 Kabupaten/*Availability of Manpower of 161 Regencies*
- 126 Lampiran 15.2 : Variabel Biaya Tenaga Kerja/*Labour Cost*
- 126 Lampiran 15.2.A : Variabel Biaya Tenaga Kerja 53 Kota/*Labour Cost of 53 Cities*
- 127 Lampiran 15.2. B : Variabel Biaya Tenaga Kerja 161 Kabupaten/*Labour Cost of 161 Regencies*
- 130 Lampiran 15.3 : Variabel / Indikator Produktivitas Tenaga Kerja/*Productivity of Labour*
- 130 Lampiran 15.3.A : Variabel Indikator Produktivitas Tenaga Kerja 53 Kota/*Productivity of Labour of 53 Cities*
- 131 Lampiran 15.3.B : Variabel Indikator Produktivitas Tenaga Kerja 161 Kabupaten/*Productivity of Labour of 161 Regencies*

I. Pendahuluan

Introduction

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2001 hingga 2004, di Indonesia terjadi beberapa peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal daerah. Tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Selama 4 tahun pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi beberapa perubahan dalam tata pemerintahan di berbagai daerah. Pelaksanaan otonomi daerah disambut oleh pemerintah daerah dengan melakukan pembenahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata kelembagaan pemerintahan, dan pembenahan di bidang perencanaan perekonomian, serta kemasyarakatan, dan sebagainya. Hal lain yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran wilayah. Jika awal pelaksanaan otonomi daerah tercatat kurang lebih ada 375 daerah kabupaten dan kota, maka dalam waktu empat tahun telah berkembang menjadi 440 kabupaten dan kota. Perubahan-perubahan yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah ini sudah barang tentu berpengaruh dalam kehidupan di tingkat lokal dan hingga tingkat nasional. Hingga tahun ke-4 pelaksanaan otonomi daerah belum dapat dikatakan

A. BACKGROUND

Between 2001 and 2004, Indonesia experienced several important events in the life of the nation, at both the national and regional levels. The year 2001 was a milestone in Indonesia's decentralization process, marking the start of implementation of regional autonomy. During the four years of implementation of regional autonomy, numerous changes in the patterns of government have been made in many regions. The regional governments welcomed regional autonomy by reordering various aspects of their existence - by altering the structures of government institutions, reorienting economic and social planning, and so on. Another important trend that accompanied the implementation of regional autonomy was the partitioning of regions. At the start of implementation of regional autonomy there were around 375 regencies and cities; four years later, this had grown to 440 regencies and cities. These changes associated with the implementation of regional autonomy have, of course, affected life, from the local to the national level. By the fourth year, it was evident that the implementation of regional autonomy was not yet proceeding entirely as had been expected; there were still many weaknesses in the process of its implementation from the central level to the regions. Consequently, in late 2004 amendments were made to the laws that served as the legal umbrella for regional

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih dijumpai beberapa kelemahan dalam proses pelaksanaannya dari tingkat pusat hingga di daerah. Namun demikian, pada akhir tahun 2004 dilakukan revisi terhadap Undang-undang yang menjadi payung pelaksanaan otonomi daerah, yakni UU. No.22 dan 25 tahun 1999, menjadi UU No.32 dan 33 Tahun 2004.

Sementara itu di akhir tahun 2003 hingga menjelang akhir 2004, Indonesia disibukkan dengan pesta demokrasi untuk pemilihan secara langsung anggota legislatif dari level kabupaten/kota hingga tingkat pusat, serta pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Pesta demokrasi ini telah merubah peta perpolitikan dan kehidupan politik di Indonesia. Di beberapa daerah, perubahan kepemimpinan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kurun waktu 2001 – 2004 beberapa daerah telah terlebih dahulu mengalami pergantian kepala daerah, walau prosesnya belum dipilih secara langsung seperti pada pemilu presiden tahun 2004, namun hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi lokal. Secara historis pergantian kepemimpinan di berbagai level pemerintahan sedikit banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan dalam tata pemerintahan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kesibukan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pesta demokrasi selama tahun 2004, bukan berarti berhenti untuk dalam pembangunan sektor kehidupan bernegara lainnya, terutama dalam membangun perekonomian. Walau harus diakui pula, bahwa kondisi politik tersebut sedikit banyak berpengaruh pada aspek perekonomian baik secara nasional maupun di tingkat lokal daerah. Dilihat dari indikator makro ekonomi Indonesia selama tahun 2001 hingga tahun 2004, terlihat perkembangan yang cukup memberikan harapan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 mencapai 4,5%, konsumsi terus meningkat, ekspor tumbuh secara positif, kecenderungan penurunan laju inflasi, nilai tukar rupiah yang semakin menguat dan stabil, dan cadangan devisa juga terus meningkat, serta

autonomy, Laws Number 22 and 25 of 1999, which were revised through Laws Number 32 and 33 of 2004.

Meanwhile, from late 2003 through late 2004, Indonesia was busy with its “festival of democracy” – the direct election of legislators at all levels from regencies/cities to the central government level, as well as Indonesia’s first-ever direct presidential election. This festival of democracy has changed the political map and political life of Indonesia. In many regions, there have been changes in leadership during the implementation of regional autonomy. Between 2001 and 2004, many regions had already replaced the heads of the regions. Even though this was not done through direct elections, as with the 2004 presidential election, it did have some impact on local political and economic conditions. Historically, changes in leadership at the various levels of government have affected the direction of policy, whether political, economic, or social.

The Indonesian nation’s preoccupation with its elections during 2004 did not halt the development of other aspects of public life, such as economic development. However, it must be acknowledged that the political situation did to some extent affect the economy, at both the national and local levels. Indonesia’s macroeconomic indicators for 2001 through 2004 show very promising developments. Economic growth in 2004 reached 4.5%, consumption continued to rise, exports grew positively, the inflation rate tended to decline, the Rupiah exchange rate strengthened and stabilized, foreign exchange reserves grew, and the composite share price index rose. These facts might indicate that Indonesia’s economy is steadily improving. Yet other economic indicators show less promising developments. The realization of investments, both foreign and domestic, showed a slight decline in 2004

membaiknya indeks harga saham gabungan. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik. Namun demikian indikator ekonomi yang lain memperlihatkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Dilihat dari perkembangan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN selama tahun 2004 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2003. Apakah hal ini berarti daya tarik investasi Indonesia selama tahun 2004 mengalami penurunan ?

Kondisi ekonomi makro secara nasional tentunya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tingkat daerah. Dinamika ekonomi dan politik diberbagai tingkat pemerintahan juga memberikan andil yang besar dalam perkembangan ekonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, telah mendorong banyak daerah untuk melakukan berbagai perubahan dalam kebijakan pembangunan daerahnya. Namun demikian dari 440 kabupaten / kota menggambarkan perkembangan yang tidak merata. Beberapa pemerintah daerah juga telah sadar akan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pentingnya peran investasi dalam pembangunan ekonomi di daerah.

Dari pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota yang dilakukan oleh KPPOD, sejak tahun 2001, hingga tahun 2003, dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian daerah, terutama iklim investasi, ditemukan sejumlah persoalan yang masih mengganjal dalam daya tarik investasi di daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia. Seperti apakah peringkat daya tarik daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi dalam persepsi dunia usaha di tahun 2004 ? Apakah ada perubahan peringkat daya tarik investasi kabupaten/kota tahun 2003 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut ? Sebagai agenda tahunan, pada tahun 2004 KPPOD kembali melakukan pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Indonesia. Pemeringkatan ini dimaksudkan untuk terus mengikuti perkembangan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia.

compared with 2003. Could this mean that Indonesia's investment attractiveness also declined during 2004?

Certainly, macroeconomic conditions at the national level affect economic conditions at the regional level. The economic and political dynamics at the various levels of government also play a significant role in regional economic development. The implementation of regional autonomy has encouraged many regions to effect changes in their regional development policies. However, the 440 regencies/cities show an uneven pattern of development. Many regional governments have now come to realize the importance of sustainable economic development, and the importance of the role of investment in economic development in their regions.

The Investment Attractiveness Ratings of Regencies/Cities carried out by Regional Autonomy Watch from 2001 to 2003 indicate that regional economic conditions, particularly the investment climate, display a number of problems that reduce the investment attractiveness of regencies and cities in Indonesia. What are the perceptions of the business community regarding the investment attractiveness of regencies/cities in 2004? Have there been changes in the investment attractiveness ratings of the regencies/cities compared with previous years, and what factors have produced these changes? As it does every year, in 2004 Regional Autonomy Watch again rated the Investment Attractiveness of Regencies/Cities in Indonesia. These ratings are aimed at tracking developments in the investment climate in various regions of Indonesia.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Membuat pemeringkatan daya tarik investasi daerah berdasarkan persepsi dunia usaha.
2. Melihat perubahan peringkat daya tarik investasi daerah kabupaten/kota, dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Dapat membantu daerah-daerah dalam melihat daya tariknya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek.
2. Mendorong kompetisi antar daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Sebagai suatu panduan bagi kalangan dunia usaha atau investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

B. AIMS OF THE RESEARCH

1. *To produce ratings of investment attractiveness of the regions based on the perceptions of the business community.*
2. *To look at changes in the regencies/cities' investment attractiveness ratings and the factors that produced these changes.*

C. SIGNIFICANCE OF THE RESEARCH

1. *It will help the regions to know the level of their attractiveness for investment, examined from various angles.*
2. *It will promote competition between regions to create a conducive investment climate.*
3. *It will serve as a guide for the business community and investors in making investment decisions.*

II. Kerangka Pemikiran

Conceptual Framework

Daya tarik investasi suatu negara atau suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya tarik investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial, dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya tarik investasi suatu negara atau daerah. Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi daerah yang bersangkutan. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan

The investment attractiveness of a country, or of a region, is not created in a vacuum. The creation of investment attractiveness proceeds continuously over time, and is influenced by many aspects. Economic, political, institutional, social, and cultural factors are among the many factors that affect the investment attractiveness of a country or a region. In the context of regional development, investment plays an important role in promoting economic growth. Generally speaking, investment, whether domestic or foreign, requires a healthy investment climate as well as ease and clarity regarding investment procedures. A region's investment climate is also influenced by the macroeconomic conditions of the region concerned. All these conditions can motivate the private sector to participate in activating the economy.

In general, the amount and type of investment that enters a region depends on the attractiveness of the region for investment and the existence of a conducive investment climate. A region's success in increasing its attractiveness for investment depends in part on the region's capability to formulate policies related to investment and the business community and to

investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain kondisi makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas.

Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan daya tarik daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, dari pemahaman studi literatur, opini para pelaku usaha, masukan para ahli dan hasil pemeringkatan yang dilakukan KPPOD sebelumnya; variabel-variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut : I. Kelembagaan, II. Sosial Politik, III. Perekonomian Daerah, IV. Tenaga Kerja dan Produktivitas, V. Infrastruktur Fisik, seperti terlihat pada Diagram 1. di bawah ini.

improving the quality of public services. Other important matters to consider in connection with efforts to attract investment, aside from conducive macroeconomic conditions, are the development of human resources and of infrastructure in the widest sense.

Based on an identification of ranks and elements for the purpose of rating the investment attractiveness of regencies/cities, derived from an understanding of the literature, the opinions of business operators, input from experts, and the ratings produced by Regional Autonomy Watch in previous years, the variables that affect a region's investment attractiveness can be grouped into five (5) categories, as follows: I. Institutions, II. Social/Political, III. Regional Economy, IV. Labour and Productivity, and V. Physical Infrastructure, as shown in Diagram 1 below.

Diagram/Figure 1.
Hirarki Faktor & Variabel Pemeringkatan/Hierarchy of Rating Factors & Variables



Penjabaran dan pengembangan kelima faktor/kelompok variabel tersebut ke dalam masing-masing indikator dari setiap variabel, dilakukan juga atas dasar studi literatur, diskusi dengan para ahli dan kalangan dunia usaha. Adapun Faktor, Variabel, dan Indikator yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2004 ini adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

The elaboration and development of these five factors/ sets of variables into the respective indicators for each variable was also done on the basis of the literature study and discussions with experts and with the business community. The Factors, Variables, and Indicators used for the 2004 ratings are as explained in the table below.

Tabel/Table. 1

DAFTAR FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR UNTUK PEMERINGKATAN TAHUN 2004
LIST OF FACTORS - VARIABLES - INDICATORS FOR 2004 RATINGS

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
A. FAKTOR KELEMBAGAAN /INSTITUTIONAL FACTOR		
1. Variabel Kepastian Hukum /Legal Certainty Variable		
1	Konsistensi Peraturan yang Mengatur Kegiatan Usaha <i>Consistency of Regulations that Regulate Business Activities</i>	Mengukur kepastian, kejelasan, dan konsistensi pemberlakuan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur kehidupan berusaha. <i>Measures certainty, clarity, and consistency of application of regional regulations and other policies that regulate business life.</i>
2	Penegakan Hukum <i>Law Enforcement</i>	Mengukur kepastian hukum seperti perlindungan atas pelaksanaan kontrak kerja dan hak kepemilikan, konsistensi keputusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha. <i>Measures legal certainty, such as protection for the performance of work contracts and ownership rights, and consistency of court decisions, particularly in connection with the business community.</i>
3	Pungli di luar Birokrasi terhadap Kegiatan Usaha <i>Non-bureaucratic Illegal Levies on Business Activities</i>	Melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai praktik-praktik pungutan ilegal yang dilakukan oleh orang, kelompok orang/ masyarakat di luar birokrasi, yang mengganggu kegiatan usaha. <i>Looks at how the regional government handles various types of illegal levies imposed by individuals or groups/ communities outside the bureaucracy, which impede business activities.</i>
4	Hubungan Eksekutif – Legislatif <i>Executive-Legislative Relationship</i>	Melihat dampak dari kondisi hubungan antara DPRD dan Pemda terhadap pelayanan publik dan kepastian berusaha. <i>Examines the impact of the state of relations between the DPRD [Regional Assembly] and Pemda [Regional Executive] on public services and on business certainty.</i>
2. Variabel Aparatur dan Pelayanan/Apparatus and Services Variable		
5	Birokrasi Pelayanan terhadap Dunia Usaha <i>Bureaucracy of Services for the Business Community</i>	Mengukur kemudahan pelayanan birokrasi dan profesionalisme aparat pemda dalam melakukan pelayanan terhadap dunia usaha. <i>Measures ease of services of the bureaucracy and professionalism of local government officials in providing services to the business community.</i>
6	Penyalahgunaan Wewenang <i>Abuse of Authority</i>	Mengukur distorsi perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan terhadap dunia usaha. <i>Measures distortions in the behavior of local government officials in providing services to the business community.</i>
3. Variabel Keuangan Daerah/Regional Finance Variable		
7	Struktur Pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap Dunia Usaha <i>Structure of Regional Government Fees from the Business Community</i>	Melihat struktur berbagai pungutan yang berlaku di daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah. <i>Examines the structure of the various fees applying in the region, especially regional taxes and levies.</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
8	Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Usaha	Mengukur komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, yang tercermin dari pengalokasian dana untuk anggaran pembangunan.
	<i>Regional Government's Commitment to Providing Support Facilities for the Business Community</i>	<i>Measures the regional government's commitment to constructing physical infrastructure needed to support business activities, as reflected in the allocation of funds for development budget.</i>
4. Variabel Perda/Regional Regulations Variable		
9	Peraturan Produk Hukum Daerah (Pajak dan Retribusi)	Mengukur kualitas kebijakan / produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah (Perda, SK Bupati/Wali Kota dan Sebagainya) khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha. Beberapa aspek yang dinilai dari peraturan / kebijakan daerah tersebut adalah aspek yuridis, filosofi, substansi, maupun prinsip dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari pemberlakuan produk hukum tersebut. Beberapa hal yang dilihat adalah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan, pungutan, penetapan harga, ketenagakerjaan dan sebagainya.
	<i>Regional Legal Products/Regulations (Taxes and Levies)</i>	<i>Measures the quality of policy/ legal products produced by the regional government (Regional Regulations (Perda), Decrees of Regents/Mayors, etc.), particularly in connection with the business community. Among the aspects on which regional regulations/policies are evaluated are the juridical aspect, philosophy, substance, principles, and impact that could arise from the application of these legal products. Matters examined include regulations related to services, fees, setting of prices, Labour matters, and so on.</i>
B. FAKTOR KONDISI SOSPOL/SOCIAL/POLITICAL FACTOR		
1. Variabel Keamanan/Security Variable		
10	Gangguan Keamanan terhadap Aktivitas Dunia Usaha	Mengukur hambatan kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha.
	<i>Disturbances to Security of Business Community Activities</i>	<i>Measures obstacles to business activity resulting from security disturbances.</i>
11	Gangguan Keamanan terhadap Masyarakat Lingkungan Sekitar Tempat Kegiatan Usaha	Mengukur hambatan keamanan dan rasa aman masyarakat di lingkungan kegiatan usaha.
	<i>Disturbances to Security of Local Communities near Places of Business</i>	<i>Measures obstacles to public security and feelings of security of communities near places of business.</i>
12	Kecepatan Aparat Menanggulangi Gangguan Keamanan	Mengukur kualitas aparat keamanan dalam menangani gangguan keamanan / ketertiban umum, serta jaminan dan perlindungan keamanan yang dapat diberikan oleh aparat keamanan di daerah.
	<i>Officials' Reaction Time in Responding to Security Disturbances</i>	<i>Measures quality of security apparatus in handling security/ public order disturbances, and security guarantees and protection that local security apparatus can provide.</i>
2. Variabel Sospol/Socio-political Variable		
13	Partisipasi Masyarakat / Dunia Usaha dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Mengukur keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi masyarakat / dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya (dunia usaha). Mengukur keterbukaan / peluang masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
	<i>Participation by the Public/ Business Community in Formulating Regional Government Policy</i>	<i>Measures openness of the bureaucracy to participation by the public/ business community in formulation of policy that affects their interests. Measures openness/ opportunities for the public to take part in overseeing the implementation of policies.</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
14	Potensi Konflik di masyarakat	Mengukur potensi hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik sosial di lingkungan usaha.
	<i>Potential for Social Conflicts</i>	<i>Measures potential obstacles to business activities resulting from social conflicts in the business environment.</i>
15	Stabilitas Politik	Mengukur hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik politik yang ada di daerah.
	<i>Political Stability</i>	<i>Measures obstacles to business activities resulting from political conflicts that exist in the region.</i>
16	Intensitas Unjuk Rasa	Mengukur intensitas kegiatan unjuk rasa yang dapat menghambat / mengganggu kelancaran kegiatan usaha.
	<i>Frequency/ Intensity of Demonstrations</i>	<i>Measures the intensity of demonstrations that could impede/ disrupt the smooth execution of business activities.</i>
3. Variabel Budaya Masyarakat/Cultural Variable		
17	Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha	Mengukur daya dukung masyarakat terhadap kegiatan usaha dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kegiatan usaha, masuknya investasi dari luar daerah dan para pendatang yang melakukan kegiatan usaha / bekerja di daerahnya.
	<i>Openness of the Public to the Business Community</i>	<i>Measures public supportiveness for business activities, as seen from public acceptance of the presence of business activities, entry of investment from outside the region, and outsiders/ newcomers who carry out business activities or work in the region.</i>
18	Perilaku Masyarakat yang Non Diskriminasi	Mengukur daya dukung masyarakat sekitar tempat usaha dilihat dari perlakuannya terhadap orang lain dari luar secara sama tanpa melihat perbedaan yang ada (suku, agama, ras, gender dan sebagainya)
	<i>Non-Discriminatory Public Behavior</i>	<i>Measures supportiveness of communities near places of business as seen from their equal treatment of others from outside the region, without discriminating on the basis of actual differences (ethnic group, religion, race, gender, etc.)</i>
19	Adat Istiadat Masyarakat Daerah	Melihat daya dukung nilai-nilai dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat yang mendukung produktivitas.
	<i>Local Community Traditions</i>	<i>Examines the supportiveness of traditional values and customs existing in the local community as they affect productivity.</i>
20	Etos Kerja Masyarakat Daerah	Mengukur daya dukung penduduk, masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja di daerah yang menunjukkan etos kerja dan semangat kerja keras dan dapat bersaing secara sehat.
	<i>Work Ethic of the Local Community</i>	<i>Measures the supportiveness of local residents, communities, business operators, and workers in the region that demonstrates a work ethic, spirit of hard work, and ability to compete in a healthy way.</i>
C. FAKTOR EKONOMI DAERAH/REGIONAL ECONOMY FACTOR		
1. Variabel Potensi Ekonomi/Economic Potential Variable		
21	Daya Beli Masyarakat	Mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari penghasilan rata-rata masyarakat.
	<i>Public Buying Power</i>	<i>Measures level of prosperity as seen from average local incomes.</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
22	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Melihat potensi ekonomi daerah dari proyeksi perkembangan / pertumbuhan perekonomian di daerah.
	<i>Regional Economic Growth</i>	<i>Examines the potential of the regional economy through projections of economic growth/development in the region.</i>
23	Kesejahteraan dan Produktivitas Masyarakat	Mengukur kesejahteraan dan produktivitas, kualitas hidup penduduk di daerah.
	<i>Public Welfare and Productivity</i>	<i>Measures welfare, productivity, and quality of life of local residents.</i>
2. Variabel Struktur Ekonomi/Economic Structure Variable		
24	Nilai Tambah Sektor Primer	Untuk melihat struktur perekonomian daerah dan yang berbasis pada SDA.
	<i>Added Value of Primary Sector</i>	<i>Examines structure of regional economy and its natural resource base.</i>
25	Nilai Tambah Sektor Sekunder	Mengukur struktur perekonomian daerah yang sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif, dan industrialisasi.
	<i>Added Value of Secondary Sector</i>	<i>Measures regional economic structure's habits in productive economic activities, and industrialization.</i>
26	Nilai Tambah Sektor Tersier	Mengukur Kemampuan Jasa Lembaga Keuangan dalam perekonomian daerah.
	<i>Added Value of Tertiary Sector</i>	<i>Measures capability of financial institutions' services in the regional economy.</i>
D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN/LABOUR FACTOR		
1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja/Labour Availability Variable		
27	Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif	Mengukur besarnya penduduk usia produktif yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja pada kegiatan usaha.
	<i>Availability of Work Force of Productive Age</i>	<i>Measures number of residents of productive age needed as work force for business activities.</i>
28	Ketersediaan Tenaga Kerja Berpengalaman Berpendidikan Minimal SLTP	Mengukur ketersediaan tenaga kerja yang sudah berpengalaman sebagai tenaga kerja pada sektor kegiatan usaha secara formal.
	<i>Availability of Experienced Work Force with Minimum Junior High School Education</i>	<i>Measures availability of experienced workers to serve as work force for formal business activities.</i>
29	Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja	Mengukur ketersediaan pencari kerja untuk mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
	<i>Availability of Job Seekers</i>	<i>Measures availability of job seekers to fill job openings as needed by the business community.</i>
2. Variabel Biaya Tenaga Kerja/Labour Cost Variable		
30	Biaya Tenaga Kerja berdasarkan Aturan Formal	Mengukur tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan berdasarkan aturan formal sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.
	<i>Labour Costs as Based on Formal Standards</i>	<i>Measures overall levels of compensation for workers, based on formal standards, as the costs expended by business operators.</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
31	Biaya Tenaga Kerja Aktual	Mengukur biaya tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor usaha yang sesungguhnya akan dikeluarkan oleh pengusaha.
	<i>Actual Labour Costs</i>	<i>Measures Labour costs by business sector as actually expended by business operators.</i>
3. Variabel Produktivitas & Kualitas Tenaga Kerja/Labour Productivity & Quality Variable		
32	Produktivitas Tenaga Kerja	Mengukur Produktivitas pekerja sektor manufaktur.
	<i>Labour Productivity</i>	<i>Measures productivity of workers in the manufacturing sector.</i>
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR/INFRASTRUCTURE FACTOR		
1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur/Infrastructure Availability Variable		
33	Ketersediaan Jalan	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur untuk Transportasi Darat
	<i>Availability of Roads</i>	<i>Measures availability of infrastructure for land transportation</i>
34	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur Transportasi Laut
	<i>Availability of Sea Ports</i>	<i>Measures availability of infrastructure for sea transportation</i>
35	Ketersediaan Pelabuhan Udara	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur Transportasi Udara.
	<i>Availability of Airports</i>	<i>Measures availability of infrastructure for air transportation.</i>
36	Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpo	Mengukur Ketersediaan Sarana Komunikasi.
	<i>Availability of Telephone Lines (Connections)</i>	<i>Measures availability of communication facilities.</i>
37	Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik	Mengukur Ketersediaan Listrik untuk Sebagai sumber Energi untuk Aktivitas Usaha.
	<i>Availability of Electricity Lines (Connections)</i>	<i>Measures availability of electricity as an energy source for business activities.</i>
2. Variabel Kualitas Infrastruktur/Infrastructure Quality Variable		
38	Kualitas Jalan	Mengukur kualitas infrastruktur fisik yang tersedia di daerah, sebagai penunjang kegiatan usaha.
	<i>Quality of Roads</i>	<i>Measures quality of physical infrastructure available in the region as support for business activities.</i>
39	Akses & Tipe Pelabuhan Laut	Mengukur kemudahan akses, kelancaran, dan kapasitas sarana transportasi laut, sebagai penunjang kegiatan usaha.
	<i>Access to and Types of Seaports</i>	<i>Measures ease of access, smooth flow, and capacity of sea transportation facilities as support for business activities.</i>
40	Akses & Tipe Pelabuhan Udara	Mengukur kemudahan dan kelancaran sarana transportasi udara yang tersedia di daerah untuk mempermudah aktivitas bisnis / usaha.
	<i>Access to and Types of Airports</i>	<i>Measures ease and smooth flow of air transportation facilities available in the region to facilitate business activities.</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	KETERANGAN NOTES
41	Kualitas Sambungan Telpon <i>Quality of Tele-phone Connections</i>	Mengukur kualitas kelancaran sarana komunikasi di daerah <i>Measures quality and smooth operation of communication facilities in the region.</i>
42	Kualitas Suplai Listrik <i>Quality of Electricity Supply</i>	Mengukur kualitas sumber energi sarana pendukung kegiatan usaha. <i>Measures quality of electric power as a support facility for business activities.</i>

III. Metodologi Penelitian

Research Methodology

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada daerah-daerah Kabupaten dan Kota, dengan pertimbangan bahwa otonomi daerah menempatkan daerah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Perkembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia telah menempatkan daerah Kabupaten/Kota pada posisi strategis dalam persaingan antar negara dalam memperebutkan investasi.

Pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun 2004 dilakukan terhadap 214 daerah (163 Kabupaten dan 51 Kota) di 29 Propinsi dari 440 daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Dari 214 Kabupaten / Kota tersebut, 200 daerah diantaranya merupakan daerah Kabupaten/Kota yang telah diperingkat pada tahun 2003, artinya ada penambahan 14 daerah. Penambahan daerah ini didasarkan pada pertimbangan untuk semakin memperluas cakupan penelitian, serta agar semakin banyak daerah yang terwakili.

A. SCOPE OF THE RESEARCH

This research is focused on Regency- and City-level regions, because the regional autonomy policy places this level of administration as the spearhead of public services and development. Decentralization policy in Indonesia has placed these regions in a strategic position in international competition to seek investment.

In 2004, investment attractiveness ratings of regencies/cities in Indonesia were done for 214 regions (163 regencies and 51 cities) in 29 provinces, out of the 440 regencies and cities throughout Indonesia. Of these 214 regency/city regions, 200 were among those that were rated in 2003, while 14 were added this year. The reasons for increasing the number of regions evaluated were to expand the scope of the research and to increase the number of regions represented.

B. DATA PENELITIAN

B.1. Jenis Data

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan gabungan antara data primer berupa data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan kepada narasumber pelaku usaha di daerah, serta data sekunder berupa *existing statistic data*.

B.1.1. Data Primer,

- Data bobot faktor, variabel, dan indikator yang mempengaruhi daya tarik terhadap investasi, berdasarkan persepsi dunia usaha.
- Data persepsi dunia usaha berkaitan dengan daya tarik investasi suatu daerah, yang diperoleh melalui survei lapangan (*face to face interview*) maupun *mailing*.

B.1.2. Data Sekunder

Berupa data-data statistik daerah (*existing statistic data*) yang dikumpulkan pada penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya adalah Perda, Statistik Ekonomi, Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Demografi dan sebagainya. Daftar data secara lengkap bisa dilihat pada Tabel di bawah ini

B. RESEARCH DATA

B.1. Types of Data

The data used for this research comprised a combination of primary data, in the form of qualitative data obtained by conducting field surveys of business operator informants in the regions, and of secondary data in the form of existing statistical data.

B.1.1. Primary Data

- Data on weightings of factors, variables, and indicators that influence attractiveness for investment, based on the perceptions of the business community.
- Data on the business community's perceptions regarding a region's investment attractiveness, obtained from field surveys conducted through both face-to-face interviews and mailings.

B.1.2. Secondary Data

Existing statistical data collected in previous research and from reports provided by the governments, among them Regional Regulations (Perda), Statistics on Economy, Labour Matters, Demographics, and so on. A complete list of these data can be seen in the Table below.

Tabel/Table. 2
DAFTAR DATA JENIS DATA DAN SUMBER DATA
YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERINGKATAN TAHUN 2004
LIST OF TYPES OF DATA AND SOURCES OF DATA USED IN THE 2004 RATINGS

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
A. FAKTOR KELEMBAGAAN/INSTITUTIONAL FACTOR			
1. Variabel Kepastian Hukum/Legal Certainty Variable			
1	Konsistensi Peraturan <i>Consistency of Regulations</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
2	Penegakan Hukum <i>Law Enforcement</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
3	Pungli di luar Birokrasi <i>Extra-Bureaucratic Illegal Levies</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
4	Hubungan Eksekutif – Legislatif <i>Executive-Legislative Relations</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
2. Variabel Aparatur dan Pelayanan/<i>Apparatus and Services Variable</i>			
5	Birokrasi Pelayanan <i>Service Bureaucracy</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
6	Penyalahgunaan Wewenang <i>Abuse of Authority</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
3. Variabel Keuangan Daerah/<i>Regional Finance Variable</i>			
7	Rasio Penerimaan Retribusi terhadap Pajak <i>Ratio of Fees to Taxes in Revenues</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	APBD Kab./Kota Tahun 2002 <i>2002 Regency/City Budget</i>
8	Rasio Anggaran Pembangunan terhadap APBD <i>Ratio of Development Budget to Regional Budget (APBD)</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	APBD Kab./Kota Tahun 2002 <i>2002 Regency/City Budget</i>
4. Variabel Perda/<i>Regional Regulation (Perda) Variable</i>			
9	Peraturan Produk Hukum Daerah (Pajak dan Retribusi) <i>Regional Legal Products/ Regulations (Taxes and Levies)</i>	Analisis Perda <i>Analysis of Perda</i>	Perda, SK Kepala Daerah Kab/Kota <i>Perda, Decrees of Heads of Regencies/Cities</i>
B. FAKTOR KONDISI SOSPOL/<i>SOCIAL/POLITICAL CONDITIONS FACTOR</i>			
1. Variabel Keamanan/<i>Security Variable</i>			
10	Gangguan Keamanan terhadap Dunia Usaha <i>Disruptions of Business Community Security</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
11	Gangguan Keamanan terhadap Masyarakat <i>Disruptions of Public Security</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
12	Kecepatan Aparat Menanggulangi Gangguan Keamanan <i>Officials' Reaction Time in Responding to Security Disturbances</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
2. Variabel Sospol /<i>Social/Political Variable</i>			
13	Partisipasi Masyarakat <i>Public Participation</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
14	Potensi Konflik di masyarakat <i>Potential for Community Conflict</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
15	Stabilitas Politik <i>Political Stability</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
16	Intensitas Unjuk Rasa <i>Intensity of Demonstrations</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
3. Variabel Budaya Masyarakat/Local Culture Variable			
17	Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha <i>Openness of the Public toward the Business Community</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
18	Non Diskriminasi (Perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa melihat perbedaan yang ada) <i>Non-Discriminatory Public Behavior</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
19	Adat Istiadat Masyarakat Daerah <i>Local Community Traditions</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
20	Etos Kerja Masyarakat Daerah <i>Work Ethic of the Local Community</i>	Data Primer <i>Primary Data</i>	Persepsi Dunia Usaha <i>Business Community Perceptions</i>
C. FAKTOR EKONOMI DAERAH/REGIONAL ECONOMY FACTOR			
1. Variabel Potensi Ekonomi/Economic Potential Variable			
21	PDRB Perkapita <i>Per Capita GRDP</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	PDRB Perkapita Kab./Kota Tahun 2003 <i>Regency/City per capita GRDP, 2003</i>
22	Laju Pertumbuhan PDRB <i>GRDP Growth Rate</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	PDRB Kab./Kota atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 s/d 2003 <i>Regency/City GRDP Based on Constant Prices, 1999 through 2003</i>
23	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) <i>HDI (Human Development Index)</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	IPM Kab./ Kota Tahun 2002 <i>Regency/City HDI, 2002</i>
2. Variabel Struktur Ekonomi/Economic Structure Variable			
24	Nilai Tambah Sektor Primer <i>Added Value of Primary Sector</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	PDRB Kab./Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 <i>Regency/City GRDP Based on Prevailing Prices, 2003</i>
25	Nilai Tambah Sektor Sekunder <i>Added Value of Secondary Sector</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	PDRB Kab./Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 <i>Regency/City GRDP Based on Prevailing Prices, 2003</i>
26	Nilai Tambah Sektor Tersier <i>Added Value of Tertiary Sector</i>	Data Sekunder <i>Secondary Data</i>	PDRB Kab./Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 <i>Regency/City GRDP Based on Prevailing Prices, 2003</i>
D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN/LABOUR FACTOR			
1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja/Labour Availability Variable			
27	Rasio Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Jumlah Penduduk	Data Sekunder	BPS Pusat : Sakernas Tahun 2003

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
27	<i>Ratio of Residents of Productive Age to Total Residents</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>Central Statistical Agency: National Labour Force Survey, 2003</i>
28	Rasio Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP terhadap Jumlah Tenaga Kerja	Data Sekunder	BPS Pusat : Sakernas Tahun 2003
	<i>Ratio of Junior-High-School-Educated Workers to Total Work Force</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>Central Statistical Agency: National Labour Force Survey, 2003</i>
29	Rasio Penduduk Pencari Kerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja	Data Sekunder	BPS Pusat : Sakernas Tahun 2003
	<i>Ratio of Job Seekers to Total Work Force</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>Central Statistical Agency: National Labour Force Survey, 2003</i>
2. Variabel Biaya Tenaga Kerja/Labour Cost Variable			
30	UMP/UMK	Data Sekunder	APINDO : Daftar UMP dan UMK Daerah Di Indonesia Tahun 2003
	<i>UMP [Provincial Minimum Wage]/ UMK [Regency/City Minimum Wage]</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>APINDO (Indonesian Employers Association): List of UMP and UMK by Regions in Indonesia, 2003</i>
31	Upah Yang Diterima Pekerja	Data Sekunder	BPS Pusat : Sakernas Tahun 2003
	<i>Wages Received by Workers</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>Central Statistical Agency: National Labour Force Survey, 2003</i>
3. Variabel Produktivitas dan Kualitas TK/Labour Productivity and Quality Variable			
32	Produktivitas (Rasio Nilai Tambah Sektor Manufaktur terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur)	Data Sekunder	BPS Pusat dan Daerah : PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2003, Sakernas Tahun 2003
	<i>Productivity (Ratio of Added Value of Manufacturing Sector to Total Manufacturing Labour Force)</i>	<i>Secondary Data</i>	<i>Central and Regional Statistical Agencies: GRDP Based on Constant 2003 Prices, National Labour Force Survey, 2003</i>
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR/INFRASTRUCTURE FACTOR			
1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur /Availability of Infrastructure Variable			
33	Ketersediaan Jalan	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dalam Angka
	<i>Availability of Roads</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
34	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop DI dalam Angka
	<i>Availability of Sea Ports</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
35	Ketersediaan Pelabuhan Udara	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Availability of Airports</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
36	Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpon	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Availability of Telephone Lines (Connections)</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
37	Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Availability of Electricity Lines (Connections)</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
2. Variabel Kualitas Infrastruktur / Infrastructure Quality Variable			
38	Kualitas Jalan	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Quality of Roads</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
39	Akses & Tipe Pelabuhan Laut	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Access to and Types of Seaports</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
40	Akses & Tipe Pelabuhan Udara	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Access to and Types of Airports</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	JENIS DATA TYPE OF DATA	SUMBER DATA SOURCE OF DATA
41	Kualitas Sambungan Telpon	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Quality of Telephone Connections</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>
42	Kualitas Suplai Listrik	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Kab/Kota dan Prop Dlm Angka
	<i>Quality of Electricity Supply</i>	<i>Primary & Secondary Data</i>	<i>Primary Data: Perceptions of Business Operators; Secondary Data: Regional Statistical Agencies / Central Statistical Agency: Regencies/Cities and Provinces In Figures</i>

B.2. Pengumpulan Data

B.2.1. Teknik Pengumpulan Data

(1) Pengumpulan data sekunder (*existing statistic*).

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah (seperti BPS, BI, Depdagri, Pemda, dan lain-lain), serta berbagai laporan penelitian sebelumnya.

(2) Data Bobot Faktor, Variabel, dan Indikator.

Bobot pengaruh masing-masing faktor, variabel, dan indikator terhadap daya tarik investasi suatu daerah bervariasi / berbeda. Agar dapat dilakukan perbandingan dan perkembangan hasil pemeringkatan dari tahun ke tahun, untuk pemeringkatan tahun 2004 ini masih menggunakan hasil pembobotan tahun 2002 (sama halnya dengan pemeringkatan tahun 2003). Data pembobotan masing-masing faktor, variabel dan indikator dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan bantuan kuesioner *The Analytic Hierarchy Process* (AHP) kepada 2 sampai dengan 3 orang responden pengusaha daerah di setiap daerah penelitian dari 20 daerah penelitian, dan 8 orang pengusaha nasional, serta 3 orang pengamat ekonomi dari Jakarta.

B.2. Data Collection

B.2.1. Data Collection Techniques

(1) Collection of data in the form of existing statistics

(*secondary data*). Done by collecting regional statistical data derived from various reports provided by government institutions (Central Statistical Bureau (BPS), Bank Indonesia, Department of the Interior, Regional Governments, etc.), and previous research reports.

(2) Data on Weighting of Factors, Variables, and Indicators.

The weightings for the influence of the respective factors, variables, and indicators on the investment attractiveness of a region vary. To allow for comparison and development of the rating results from year to year, the 2004 ratings used the same weighting results as were used in 2002 (and in 2003). The weighting factors for the respective factors, variables and indicators were determined through face-to-face interviews using an *Analytic Hierarchy Process* (AHP) questionnaire of two to three business operator respondents in each of twenty research regions, eight national-scale business operators, and three economics experts from Jakarta.

(3) **Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya tarik investasi daerah** dilakukan dengan survei melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang dirumuskan secara terstruktur dan sistematis. Responden untuk penelitian ini adalah para pelaku usaha di setiap daerah penelitian yang representatif sehingga memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan / pengertian/ kepercayaan individu tentang obyek sikap (*kognitif*) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti.

(4) **Metode Sampling.** Mengingat keterbatasan ketersediaan daftar perusahaan atau pelaku usaha yang berada di tiap daerah penelitian, penentuan responden dilakukan dengan *purposive sampling*. Daftar perusahaan atau pelaku usaha di tiap daerah tetap digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih dan mencari responden yang akan diwawancarai. Secara umum penentuan responden dan proporsinya di tiap daerah didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- Kalangan dunia usaha yang mewakili perusahaan yang bergerak di bidang, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Industri Pengolahan (Manufaktur), dan Perdagangan (tergantung dari keterwakilan karakteristik masing-masing daerah),
- Mewakili perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, berdasarkan modal usaha/jumlah tenaga kerja.
- Perusahaan yang berasal dari daerah yang bersangkutan (investor daerah setempat), dan perusahaan yang berasal dari luar daerah (cabang perusahaan, investor dari luar daerah, PMA, dan lain sebagainya);

(5) Penelitian lapangan dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yakni dari Agustus sampai dengan awal November 2004. Jumlah responden pelaku usaha (baik pemilik usaha maupun pengelola usaha level manager) yang

(3) *Collection of data on business community perceptions regarding regional investment attractiveness was done through a face-to-face interview survey using a questionnaire that was formulated in a structured and systematic way. The respondents in this research were business operators in each research region who were sufficiently representative to enable the data entered into the questionnaires to be data with a high level of objectivity in line with the individuals' knowledge/ understanding/ beliefs regarding the cognitive objects, based on experience, i.e. the length of time the person had been working or facing the issues being investigated.*

(4) **Sampling Methods.** *Given the limited availability of lists of companies or business operators in each research region, respondents were selected through purposive sampling. A list of companies or business operators in each region was still used as one consideration for selecting and seeking the respondents to be interviewed. Generally, the determination of the respondents and their proportions in each region were based on the following criteria:*

- *Business community circles representing companies operating in the sectors of Plantations, Forestry, Livestock, Fisheries, Mining, Processing Industry (Manufacturing), and Trade (depending on the characteristics of their representation in each region),*
- *Representing small, medium-scale, and large companies, based on business capital/ number of employees.*
- *Companies originally from the regions concerned (local investors), and companies from outside the regions (company branches, investors from outside the regions, foreign investment, etc.);*

(5) *The field research was conducted over a period of two (2) months, from August to early November 2004. The number of business operator respondents (both business owners and manager level) that were interviewed was 5,246 persons, spread throughout*

berhasil diwawancari sebanyak 5.246 orang, tersebar di 214 daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, atau rata-rata 25 responden di setiap daerah. Pengumpulan data melibatkan kurang lebih 230 interviewer dari 214 daerah penelitian.

214 regencies and cities in Indonesia, or an average of 25 respondents in each region. The data collection involved around 230 interviewers in the 214 research regions.

B.2.2. Profil Responden

Gambaran responden yang berhasil diwawancari adalah sebagai berikut :

B.2.2. Respondent Profile

The profile of the respondents who were interviewed is as follows:

Tabel/Table. 3
Profil Responden/Respondent Profile

1. Berdasarkan Bidang Usaha/ Sektor Kegiatan Usaha/By Business Sector

Bidang Usaha/ Business Sector	Frekuensi/ Frequency	Persen / Percentage (%)
Tidak Jawab/No response	15	0, 29
Manufaktur/Manufacturing	1.128	21, 50
Pertambangan/Mining	67	1, 28
Perkebunan/Plantations	168	3, 20
Perdagangan dan Jasa/Trading and Services	3.362	64, 09
Pertanian Pangan/Food Agriculture	113	2, 15
Kehutanan/Forestry	33	0, 63
Perikanan/Fisheries	124	2, 36
Lainnya/Other	236	4, 50
Total	5.246	100

2. Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Kegiatan Usaha yang Dilakukan/ By Number of Workers in the Business :

Jumlah Tenaga Kerja/ Number of Workers	Frekuensi/ Frequency	Persen / Percentage (%)
Tidak Jawab/No response	254	4, 84
s/d 19 orang (Persh. Kecil)/Up to 19 persons (Small Business)	3.571	68, 07
20 s/d 100 orang (Persh. Menengah)/ 20 to 100 persons (Medium-Scale Company)	1.081	20, 61
> 100 orang (Persh. Besar)/> 100 persons (Large Company)	340	6, 48
Total	5.246	100

B.3. Pengolahan Data dan Analisis Data

B.3.1. Pembobotan Faktor, Variabel, dan Indikator

Bobot faktor, variabel, dan indikator, yang digunakan sebagai dasar menentukan skor daya tarik tiap daerah untuk pemeringkatan tahun 2004 menggunakan hasil pembobotan yang digunakan pada pemeringkatan tahun 2002-2003. Hal ini dimaksudkan agar dapat memper-bandingkan hasil pemeringkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akan dapat dilihat perubahan indikator-indikator pemeringkatan tiap daerah.

B.3. Data Processing and Data Analysis

B.3.1. Weighting of Factors, Variables, and Indicators

The weightings of the factors, variables, and indicators used as the basis for determining the attractiveness scores for each region in the 2004 ratings were the same weightings that were used in the ratings for 2002 and 2003. This was to enable year-to-year comparisons of the ratings. Thus, changes in the rating indicators for each region can also easily be seen.

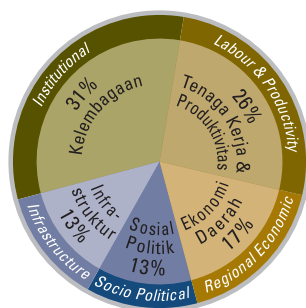
Bobot Faktor, Variabel, dan Indikator Pemeringkatan diperoleh dengan menggunakan metode AHP (*The Analytic Hierarchy Process*) dengan bantuan perangkat lunak yang disebut 'Expert Choice'. Prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Hasil Pembobotan Faktor, Variabel dan Indikator, secara lengkap dapat dilihat pada *Diagram Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan* berikut :

The weights of the Rating Factors, Variables, and Indicators were obtained using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method with the assistance of a software program called "Expert Choice". The principle of the AHP method is to give a weighting to each factor, variable, and indicator by comparing each factor, variable, or indicator with each other factor, variable, or indicator. A greater weight for a given indicator indicates that that indicator is more important than the other indicators in determining the investment attractiveness of a region. The main tool in this model is a functional hierarchy, the main input of which is human perceptions. The complete results of the Factor, Variable and Indicator Weightings can be seen in the following Figure, "Weightings of Factors, Variables, Indicators, and Intensity of Ratings".

Bobot Faktor; Variabel; Indikator Pemeringkatan *Weighting of Rating Factors, Variables and Indicators*

Diagram/Figure 2.

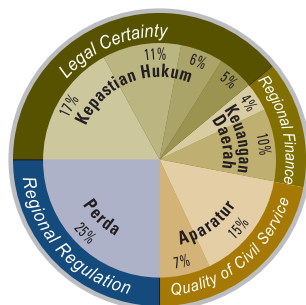
Bobot Faktor Pemeringkatan/Weight of Rating Factors



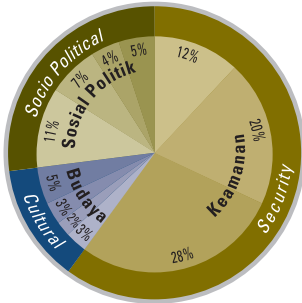
- Infrastruktur Fisik / *Physical Infrastructure* : **13%**
- Sosial Politik / *Socio Political* : **26%**
- Ekonomi Daerah / *Regional Economic Dynamism* : **17%**
- Tenaga Kerja & Produktivitas / *Labour & Productivity* : **13%**
- Kelembagaan/*Institutional* : **31%**

Diagram/Figure 3.

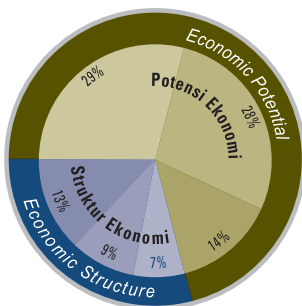
Faktor Kelembagaan/Institutional Factors



- Variabel Kepastian Hukum /*Legal Certainty* : **39 %**
 - Penegakan Hukum/*Law Enforcement* : **17 %**
 - Konsistensi Peraturan/*Legal Consistency* : **11 %**
 - Pungli di Luar Birokrasi/*Extortion/Criminal Activity* : **6 %**
 - Hubungan Eksekutif-Legislatif/*Executive-Lagislative Relation* : **5 %**
- Variabel Keuangan Daerah /*Regional Finance* : **14 %**
 - Anggaran Pembangunan/*Development Budget* : **4 %**
 - Rasio Retribusi-Pajak/*Ratio of Retribution-Tax* : **10 %**
- Variabel Aparatur /*Quality of Civil Service* : **22 %**
 - Penggunaan Wewenang/*Use of Authority* : **15 %**
 - Pelayanan Birokrasi/*Quality of Civil Service* : **7 %**
- Variabel Perda/Indikator Perda/*Regional Policy/Regional Regulation* : **25 %**
 - Perda/*Regional Regulation* : **25%**

Diagram/Figure 4.**Faktor Sosial Politik/Socio-Political Factors**

- Variabel Sosial Politik /Socio-Political : **27%**
 - Stabilitas Politik/*Political Stability* : **11%**
 - Konflik Masyarakat/*Social Conflict* : **7%**
 - Unjuk Rasa/*Strike* : **4%**
 - Partisipasi Masyarakat/*Public Participation* : **5%**
- Variabel Keamanan /*Security*: **60%**
 - Gangguan Masyarakat/*Disturbance of Society*: **12%**
 - Gangguan Usaha/*Disturbance of Business* : **20%**
 - Kecepatan Aparat/*Speed of Security Officer* : **28%**
- Variabel Budaya /*Cultural* : **13%**
 - Keterbukaan/*Openness* : **3%**
 - Non Diskriminatif/*Non Discrimination* : **2%**
 - Adat Istiadat/*Custom and Tradition* : **3%**
 - Etos Kerja/*Working Ethos* : **5%**

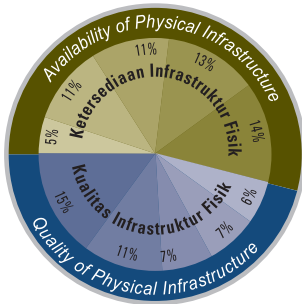
Diagram/Figure 5.**Faktor Ekonomi Daerah/Regional Economic Dynamism**

- Variabel Potensi Ekonomi/*Economic Potential* : **71%**
 - PDRB Perkapita/*GRDP Per Capita* : **29%**
 - Pertumbuhan/*Growth* : **28%**
 - Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* : **14%**
- Variabel Struktur Ekonomi/*Economic Structure* : **29%**
 - Nilai Tambah Tersier/*Added Value-Tertier* : **7%**
 - Nilai Tambah Sekunder/*Added Value-Secondary* : **9%**
 - Nilai Tambah Primer/*Added Value-Primary* : **13%**

Diagram/Figure 6.**Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/Labour & Productivity**

- Variabel Biaya Tenaga Kerja/*Labour Cost* : **24%**
 - Upah Aktual/*Actual Wage* : **13%**
 - UMP/*Normative Wage* : **11%**
- Variabel Ketersediaan TK/*Availability of Manpower* : **35%**
 - SLTP Berpengalaman/*Skilled Labour* : **8%**
 - Usia Produktif/*Productive Age* : **8%**
 - Pencari Kerja/*Job Seeker* : **19%**
- Variabel Produktivitas Tenaga Kerja/*Productivity of Labour* : **41%**
 - Produktivitas/*Productivity* : **41%**

Diagram/Figure 7.
Faktor Infrastruktur Fisik/Physical Infrastructure



- Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik/
Availability of Physical Infrastructure : **54%**
 - Pelabuhan Udara/Airport : **5%**
 - Pelabuhan Laut/Seaport : **11%**
 - Jalan/Road : **11%**
 - Telepon/Telephone : **13%**
 - Listrik/Electricity : **14%**
- Variabel Kualitas Infrastruktur Fisik/*Quality of Physical Infrastructure* : **46%**
 - Kualitas Pelabuhan Udara/Quality of Airport : **6%**
 - Kualitas Pelabuhan Laut/Quality of Seaport : **7%**
 - Kualitas Jalan/Quality of Road : **7%**
 - Kualitas Telepon/Quality of Telephone : **11%**
 - Kualitas Listrik/Quality of Electricity : **15%**

B.3.2. Klasifikasi Intensitas Tiap Indikator

Sebelum diolah dengan ‘*expert choice*’, setiap indikator baik yang berasal dari data primer maupun sekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitas masing-masing.

- Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner persepsi responden dari 214 daerah diolah dengan bantuan SPSS atau Exel sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator pemeringkatan. Intensitas tersebut berupa skala *likert* 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruk sampai kondisi yang paling baik.
- Indikator-indikator kuantitatif berupa data sekunder (*existing statistik data*), masing-masing juga diklasifikasikan dengan menggunakan ‘*metode rata-rata*’ dan ‘*metode distribusi*’ sehingga diperoleh intensitasnya ke dalam skala *likert* yang sama.

B.3.2. Intensity Classification of Each Indicator

Before being processed using Expert Choice, each indicator, whether derived from primary or from secondary data, was classified to obtain its respective intensity.

- *Primary data obtained from questionnaires on perceptions of respondents from the 214 regions were processed with the aid of SPSS or Excel in order to obtain a tabulation showing the intensity of each rating indicator. These intensities were expressed in the form of a Likert scale rating from 1 to 5 showing a measurement of conditions, from worst to best.*
- *Quantitative indicators in the form of secondary data (existing statistical data) were also each classified using the “average method” and the “distribution method” in order to obtain their intensities using the same Likert scale.*

B.3.3. Penentuan Nilai Intensitas Tiap Indikator dan Peringkat

Intensitas masing-masing indikator diolah dengan perangkat lunak ‘*expert choice*’ berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yang telah

B.3.3. Determining the Intensity Value of Each Indicator and Rating

The intensity of each indicator was processed using Expert Choice software based on the previously established rating hierarchy and weightings. This

ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunak tersebut menghasilkan nilai masing-masing indikator yang secara kumulatif membentuk urutan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah diantara 214 daerah pemeringkatan. Daftar intensitas tiap-tiap Indikator secara lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 10.A - 15.3.B : Hasil Klasifikasi Indikator Pemeringkatan*.

software processing produced values for each indicator that cumulatively formed a sequence of ratings from the highest to the lowest among the 214 rating regions. The complete list of intensities of the indicators can be seen in the Appendix 10.A - 15.3.B : Result of Classification of Rating Indicators.

IV. Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2004

Investment Attractiveness of 214 Regencies/Cities in Indonesia, 2004

Dari pemeringkatan tahun 2002 hingga tahun 2004, jumlah daerah yang diperingkat terus bertambah. Pada tahun 2002 daerah yang diperingkat sebanyak 134 daerah (97 Kabupaten dan 37 Kota); tahun 2003 sebanyak 200 daerah (156 Kabupaten dan 44 Kota); sementara untuk tahun 2004 daerah yang diperingkat bertambah menjadi 214 (161 Kabupaten dan 53 Kota). Seiring dengan berjalannya waktu, hasil pemeringkatan dari tahun ke tahun juga mengalami perubahan. Beberapa daerah mengalami peningkatan peringkat, sebagian mengalami penurunan, dan yang lainnya berhasil mempertahankan posisinya secara relatif. Perubahan peringkat dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya dinamika yang terjadi di daerah-daerah yang diperingkat. Tidak dipungkiri bahwa penambahan jumlah daerah turut andil dalam perubahan posisi peringkat daya tarik investasi suatu daerah secara relatif dibandingkan dengan daerah lainnya.

A. PERINGKAT 161 KABUPATEN DAN PERINGKAT 53 KOTA DI INDONESIA

Seperti tahun 2003, hasil pemeringkatan Daya Tarik Investasi 214 Daerah tahun 2004 ini dibuat secara terpisah antara Daerah Kabupaten dan

Between 2002 and 2004, the number of regions rated steadily rose. In 2002, 134 regions were rated (97 regencies and 37 cities); in 2003, 200 regions (156 regencies and 44 cities); and in 2004 the number of regions rated was increased to 214 (161 regencies and 53 cities). In line with the passage of time, the results of the ratings have also changed from year to year. Some regions' ratings have risen, some others' have fallen, and others have managed to maintain relatively steady ratings. These changes in ranking from year to year indicate the dynamics occurring in the regions that are rated. It is undeniable that the increase in the number of regions has played a part in the changes in regions' rating positions for investment attractiveness relative to other regions.

A. RANKINGS OF 161 REGENCIES AND 53 CITIES IN INDONESIA

As in 2003, the Investment Attractiveness rankings for the 214 Regions for 2004 are presented separately for Regencies and for Cities. Unlike last year, the

Daerah Kota. Hasil pemeringkatan tidak ditampilkan secara urutan dari peringkat tertinggi hingga terendah, tetapi ditampilkan dengan pengelompokan nilai yang diperoleh. Pengelompokan dilakukan dengan mengelompokkan daerah-daerah yang memperoleh nilai daya tarik investasi tinggi hingga kelompok daerah-daerah yang memiliki nilai daya tarik investasi rendah. Untuk itu dibuat 5 kelompok peringkat, yaitu kelompok A, B, C D, dan E. Secara berurutan, kelompok peringkat A adalah untuk daerah dengan daya tarik investasi tinggi, hingga kelompok E untuk daerah dengan daya tarik investasi rendah. Khusus untuk kelompok A dan kelompok B, masing-masing dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yakni A***; A**; A* dan B***; B**; dan B*. Pengelompokan seperti ini didasarkan pertimbangan bahwa perbedaan satu peringkat dengan peringkat dibawah atau di atasnya sangat kecil atau tidak signifikan.

A.1. Peringkat Berdasarkan Kriteria Umum

Secara umum terjadi perubahan yang cukup signifikan pada hasil pemeringkatan tahun 2004, dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2002. Dilihat dari rata-rata skor yang berhasil diraih oleh 161 kabupaten di tahun 2004 adalah sebesar 0,2007 atau mengalami peningkatan sebesar 0,0354 poin dibandingkan pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,1553 point. Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata iklim investasi kabupaten-kabupaten di Indonesia pada tahun 2004 mengalami perbaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan terjadi persaingan yang semakin ketat diantara daerah-daerah dalam menarik investasi.

*rankings are not presented simply in a rank order from highest to lowest; instead, they are presented by groupings, or "clusters," of the scores obtained. This was done by grouping together the regions that received high investment attractiveness scores, down to the group of regions that had low investment attractiveness scores. Five clusters were thereby produced, clusters A, B, C D, and E. Cluster A is the group of regions with the highest investment attractiveness, while cluster E is those with the lowest investment attractiveness. Within group A and group B, each group is further divided into three subgroups: A***; A**; A* and B***; B**; and B*. It was decided to present the ranking in this way because the difference in numerical ranking was in many cases too small to be significant.*

A.1. Rankings Based on General Criteria

In general, there have been some quite significant changes in the ratings for 2004, compared with those for 2003 and 2002. The average score attained by the 161 regencies in 2004 was 0.2007, an increase of 0.0354 points compared with 2003's average score of 0.1553. This can be taken to mean that on average, the investment climate in the regencies in Indonesia showed an improvement over the previous year, and that there was increasingly sharp competition between regions to attract investment.

Tabel/Table. 4.a
Rata-Rata Skor Peringkat Umum/Average Scores for General Ratings:

	2003		2004
Kab & Kota/Regencies and Cities	0,1853	▶	0,2007
Kota/Cities	0,1943	▶	0,2172
Kabupaten/Regencies	0,1828	▶	0,1925

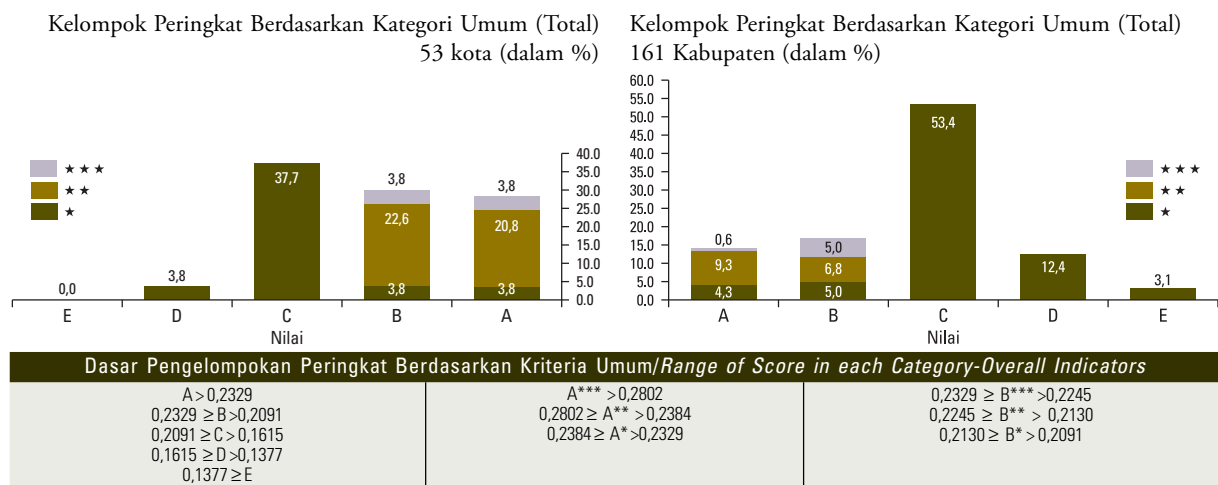
Grafik 1., memperlihatkan statistik peringkat yang diperoleh Kota dan Kabupaten berdasarkan Kriteria Umum (Nilai Total). Terlihat bahwa daerah

Graph 1 shows the statistics of the rankings achieved by cities and by regencies based on General Criteria (Overall Score). It can be seen that city regions have

kota memiliki nilai yang lebih baik dari pada daerah kabupaten, terlihat dari lebih banyaknya persentase daerah perkotaan yang memiliki peringkat A dan B. Dari Grafik 1., juga memperlihatkan bahwa tidak satupun daerah Kota yang berada pada kelompok peringkat E, sebaliknya 3,1% Kabupaten berada pada kelompok peringkat E.

better scores than regency regions, as seen from the greater percentages of urban regions with A and B rankings. Graph 1 also shows that not one city region is in ranking cluster E, while 3.1% of regencies fall into cluster E.

Grafik/Graph. 1.
Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Kategori Umum (Nilai Total)/
Ranking Based on the Overall Score



Tabel 4.b. Memperlihatkan daerah-daerah yang berada pada kelompok peringkat A (dari A^{***} hingga A^{*}) dan daerah-daerah yang berada pada kelompok peringkat E. Purwakarta merupakan satu-satunya daerah kabupaten yang memperoleh peringkat A^{***}.

Hasil yang diperoleh Kab. Purwakarta ini sedikit menurun dibandingkan dengan yang diperolehnya pada tahun 2003, namun demikian dia mampu mempertahankan peringkatnya di urutan pertama pada pemeringkatan daya tarik investasi secara umum. Beberapa indikator penting yang sedikit menurun pada iklim investasi di Kab. Purwakarta adalah pada indikator, pelayanan birokrasi dan penegakan hukum. Kabupaten ini berhasil memanfaatkan *endowment* yang dimilikinya dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif, dan *responsive* terhadap pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 6,9% pertahun, dan daya beli masyarakat yang tinggi,

*Table 4.b. shows the regions that fall into cluster A (from A^{***} to A^{*}) and the regions in cluster E. Purwakarta is the only regency that obtained an A^{***} ranking.*

The result obtained by Purwakarta Regency is in fact slightly lower than what it achieved in 2003; even so, the regency was able to maintain its first-place ranking in the general investment attractiveness ratings. Among the important indicators that indicated a slight decline in the investment climate in Purwakarta Regency were those of government services and law enforcement. This regency has been able to make good use of its endowments by applying comprehensive policies and being responsive to business operators. The economic growth, which reached an average of 6.9% per year, and the public's high buying power, indicate bright business prospects for the region. The availability of a competitive labor force and the guarantees of legal

menggambarkan prospek bisnis cerah di daerah ini. Ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif; dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemda, membuat kabupaten ini sangat menarik untuk investasi. Keberhasilan Purwakarta menempati peringkat pertama pada tahun 2003, membuat ekspektasi publik pengusaha di sana menjadi lebih tinggi terhadap performa pelayanan yang diberikan oleh Pemda. Hal ini harus diwaspadai dan perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Pemda Purwakarta jika ingin kembali meraih peringkat teratas, karena banyak daerah yang telah berbenah diri untuk menarik investasi ke daerahnya masing-masing.

Kota Kediri berhasil meraih peringkat A*** karena memperoleh skor tertinggi untuk beberapa faktornya. PDRB Perkapita yang mencapai sebesar Rp.87,3 juta, menjadikan penduduk kota ini memiliki daya beli tertinggi di Indonesia. Kantor Pelayanan Perizinan, mengakomodasi proses pengurusan ijin dalam satu tempat, dan dilakukan secara prima. Pelibatan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan pemda yang terlembaga dalam Forum Kota, membuat tata pemerintahannya menjadi transparan dan bertanggung gugat. Dengan didukung kualitas sumberdaya manusianya yang handal, kota ini sangat menarik bagi investasi.

certainty provided by the regional government have made this regency very attractive for investment. Purwakarta's success in attaining the top ranking in 2003 further raised the expectations of the business community there regarding the performance of services provided by the regional government. This situation will require serious attention from the Purwakarta regional government if it wishes to win the top ranking yet again, because many other regional governments have now prepared themselves to attract investment to their respective regions.

*The city of Kediri succeeded in achieving an A*** ranking because it received the highest score for several factors. Its per-capita GRDP of Rp.87.3 million gives the residents of this city the highest spending power in Indonesia. The Permitting Services Office accommodates permitting processes at a single venue and provides top-rate service. The involvement of the public in the formulation of all regional government policies, through the institution of the City Forum, makes its government practices transparent and accountable. With the support of skilled and reliable human resources, this city is very attractive for investment.*

Tabel /Table 4.b
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Kategori Umum/Best and Worst - Overall

	Kelompok Peringkat/Cluster			
	A***	A**		E
Kota/City	Kediri Malang	Balikpapan Cilegon Gorontalo Jakarta Madiun Makassar	Mojokerto Palembang Pare-pare Sawahlunto Tegal	Tanjung Balai Dumai
Kabupaten/ Regencies	Purwakarta	Asahan Badung Barito Utara Gianyar Gowa Gresik Indramayu	Karawang Klungkung Kudus Luwu Utara Musi Banyuasin Pinrang Sinjai	Banggai Bekasi Bulungan Cilacap Lampung Barat Majene Pelalawan Tabalong Fakfak Kapuas Hulu Manggarai Mimika Sorong

Dilihat dari daerah-daerah yang berada pada kelompok peringkat bawah (peringkat E) juga tidak

It can be seen that the regions in the lowest cluster (ranking E) also showed little change from the rankings

banyak perubahan, kelompok bawah hasil pemeringkatan tahun 2003 dan di tahun 2004 ini. Daerah-daerah seperti Mimika, Bengkulu Selatan, Kapuas Hulu, Mimika, Manggarai, Fak-fak, dan Sorong pada tahun 2003 juga termasuk dalam kelompok peringkat terbawah. Tampaknya, hingga tahun ke empat pelaksanaan otonomi, daerah-daerah yang berada pada kelompok terbawah ini belum juga berhasil berbenah diri dalam upaya menarik investasi. Masih ditemukan sejumlah persoalan, baik dari aspek, kelembagaan, maupun sosial politik, maupun dalam penyediaan infrastruktur fisik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Kab. Sorong masih dibelit oleh persoalan kepastian hukum yang ada di daerah ini. Persoalah yang sering muncul terkait dengan kepastian hukum di Kab. Sorong adalah sengketa tanah antara pelaku usaha dan masyarakat lokal. Hingga saat ini Pemda Kab. Sorong belum mampu menciptakan kelembagaan yang bisa menangani persoalan-persoalan ini. Sementara Kab. Minahasa dinilai tidak baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah dalam APBDnya, dimana daerah ini tidak memberikan prosesi yang baik untuk anggaran pembangunan di daerahnya. Hal ini tentunya berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan bisnis di daerah ini. *Peringkat Daya Tarik Investasi Secara Umum secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 2.*

A.2. Peringkat Berdasarkan Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan, terdiri dari Variabel Kepastian Hukum; Variabel Keuangan Daerah; Variabel Aparatur; dan Variabel Peraturan Daerah. Faktor kelembagaan merupakan faktor penting dalam pembentukan daya tarik investasi suatu daerah. Dari indikator-indikator yang ada dalam faktor kelembagaan ini semuanya adalah indikator-indikator yang secara langsung di bawah kendali pemerintah daerah, atau termasuk dalam *policy variabel*. Di sinilah peran pemda sangat menentukan dalam arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yang kondusif bagi investor. Salah satunya cermin

in 2003 and 2004. Regions such as Mimika, South Bengkulu, Kapuas Hulu, Manggarai, Fak-fak, and Sorong were also in the lowest rank in 2003. It seems that even in this fourth year of implementation of regional autonomy, the regions in this lowest group have been unable to upgrade themselves to attract investment. Many problems are still found, both in institutional and sociopolitical aspects and in terms of provision of physical infrastructure to stimulate these regions' economic growth.

Sorong Regency is still entangled with issues of legal certainty. The problem that often arises in connection with legal certainty in Sorong Regency is land disputes between business operators and local people. Thus far, the Sorong regency government has been unable to create an institution that can handle these issues. In contrast, Minahasa Regency is considered poor in managing its regional finances through its local budget (APBD), as this region fails to allocate an adequate portion of the budget for development of the region. This obviously affects the provision of the facilities and infrastructure needed to facilitate business activities in the region. The Complete Overall Investment Attractiveness Rankings can be seen in the Appendix 2.

A.2. Rankings Based on the Institutional Factor

The institutional factor comprises the variables of Legal Certainty, Regional Finance, Government Services, and Local Regulations. These institutional factors are an important determinant of the investment attractiveness of a region. All of the indicators within the institutional factors are policy indicators in nature. Here, the regional government plays a very important role in setting the direction of development policy and in creating a business climate that is conducive for investors. One factor in the success of institutional factors is the quality of services provided by the regional government to the public. The regions that have the top rankings for institutional factors are those rated as

keberhasilan dari aspek kelembagaan adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada publik. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas untuk faktor kelembagaan ini, dinilai baik dalam melakukan pelayanan birokrasi, penegakan hukum, sedikitnya penyalahgunaan wewenang, serta berhasil dalam menjalin kerjasama yang harmonis dengan pihak legislatif.

good in provision of government services, strong in law enforcement, low in abuse of authority, and successful in forging harmonious cooperation with the legislature.

Tabel/Table. 5.a
Rata-Rata Skor Faktor Kelembagaan/Average Scores for Institutional Factor:

	2003		2004
Kab & Kota/ <i>Regencies and Cities</i>	0,0555		0,0586
Kota/ <i>Cities</i>	0,0483		0,0545
Kabupaten/ <i>Regencies</i>	0,0575		0,0601

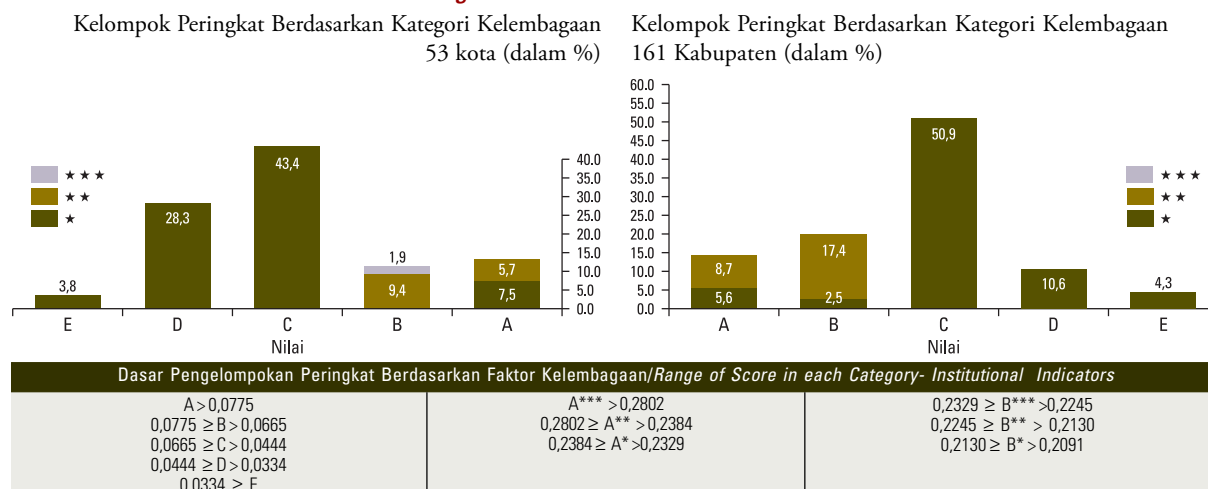
Hasil pembobotan menunjukkan bahwa pelaku usaha menaruh perhatian yang besar terhadap peraturan daerah, dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Daerah-daerah yang menempati peringkat atas (A dan B), adalah daerah-daerah yang secara rata-rata skor tiap variabelnya baik, terutama untuk variabel-variabel yang memperoleh bobot besar. Secara rata-rata hasil pemeringkatan tahun 2004 untuk faktor kelembagaan menunjukkan adanya perbaikan.

Grafik 2. Memperlihatkan, hasil pengelompokan peringkat berdasarkan faktor

The weightings show that business operators place more emphasis on regional regulations than on the other indicators. The regions with high rankings (A and B) are those that have an average good score on all variables, particularly on the variables that receive strong weightings. On average, the results of the ratings for institutional factors in 2004 showed improvement.

Graph 2 shows the rankings based on institutional factors. It can be seen that for the institutional factor,

Grafik/Graph. 2.
Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Kategori Kelembagaan/
Ranking Based on the Institutional Score



kelembagaan. Terlihat bahwa untuk faktor kelembagaan daerah Kabupaten secara rata-rata lebih baik dibandingkan daerah Kota. Namun demikian, untuk daerah kota tidak satupun daerah yang berada pada kelompok peringkat E.

Jika dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh pada pemeringkatan 2004 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil yang diraih pada pemeringkatan 2003. Namun demikian, untuk pemeringkatan tahun 2004 ini tidak satupun daerah yang mencapai skor tertinggi (A***). Daerah-daerah perlu meningkatkan kinerja kelembagaannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pelaku usaha. Table 5.b. Memperlihatkan daerah-daerah yang berada pada kelompok peringkat A dan E, untuk faktor Kelembagaan.

Kota Gorontalo, adalah salah satu daerah yang berhasil membuktikan keberhasilannya dalam pengelolaan kelembagaan pemerintahannya. Pada pemeringkatan kali ini Kota Gorontalo berhasil menduduki peringkat atas untuk faktor kelembagaan. Keberhasilan Kota Gorontalo menduduki peringkat atas ini diperoleh berkat penilaian para pelaku usaha di sana yang merasakan pelayanan birokrasi yang baik, ditunjang dengan keberhasilannya dalam menekan penyelewengan di tubuh birokrasinya, serta mengurangi pungutan-pungutan tidak resmi. Kota ini merupakan pelopor perda tentang kebebasan informasi dan partisipasi publik, yang menjadi jaminan bagi setiap warganya untuk mendapatkan hak akan informasi mengenai pengelolaan kota, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Penerapan kedua perda tersebut secara konsisten, mampu meningkatkan kualitas pelayanannya publik di kota ini.

Perubahan di bidang kelembagaan di Kota Gorontalo ini barangkali sebagai imbas dari kebijakan yang inovatif di tingkat Propinsi Gorontalo, yang juga diikuti oleh Pemda-pemda di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah ini. Pemda Propinsi Gorontalo dinilai mempunyai keberpihakan yang cukup besar terhadap aktivitas pelaku usaha di sana, seperti yang tercermin dalam kebijakan pengembangan komoditi pertanian

regencies are on average better than cities. Even so, not one city falls into cluster E.

*Looking at the average scores attained in the 2004 rankings, we note an increase compared with the 2003 rankings. However, in the 2004 rankings, not one region achieved the highest possible score (A***). The regions need to improve their institutional performance by providing even better services to business operators. Table 5.b. shows the regions that fall into ranking clusters A and E for the institutional factor.*

Gorontalo City is one region that has demonstrated success in managing its government institutions. In this year's ratings, Gorontalo City managed to obtain the highest ranking for the institutional factor. Gorontalo City achieved this success thanks to the evaluations from its business operators, who felt that government services are good, supported by success in reducing irregularities (corruption) within the bureaucracy and in reducing illegal levies. This city was also the pioneer in issuing local ordinances on freedom of information and public participation, which serve as a guarantee for every citizen's right to obtain information on city management and to participate in the public policy decision making process. The consistent application of these two regulations has helped to upgrade the quality of public services in the city.

This change in institutions in Gorontalo City may have been influenced by the innovative policies at the level of Gorontalo province, which were then followed by the regency/city regional governments within the province. The Gorontalo provincial government is seen as strongly supporting the activities of business operators there, as reflected in the policy for development of corn as an agricultural commodity. This harmonization of policies between the provincial level and regency/city

jagung. Harmonisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan dari tingkat propinsi hingga tingkat kabupaten/kota, merupakan satu kekuatan dari kelembagaan di daerah ini. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) disusun secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lokal. Pemda di Gorontalo juga telah berhasil mendorong kesejahteraan masyarakat dengan membebaskan biaya SPP untuk para pelajar dari tingkat SD hingga SLTA. Hal-hal tersebut mencerminkan *political will* dari pemda untuk pembangunan daerahnya.

Sementara itu di Kab. Indramayu, pelayanan birokrasi perizinan usaha dilakukan dengan sistem pelayanan satu atap pada tingkat kecamatan. Pemda senantiasa membuka akses bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maupun dalam setiap proses penyusunan perda dan kebijakan publik lainnya. Keberpihakan pemda pada pelaku usaha dan komitmennya pada pembangunan perekonomian lokal, oleh para pelaku usaha dinilai sebagai kebijakan yang suportif bagi investasi.

level is one strength of the institutions in this region. The Land Use Master Plan (RUTR) is formulated in an integrated way, with attention to local conditions. The regional governments in Gorontalo have also succeeded in improving public welfare by exempting students from elementary through high school levels from having to pay SPP (Educational Management Contribution). These changes reflect the political will of the regional government to develop the region.

Meanwhile, in Indramayu Regency in West Java Province, business permitting services are provided through a one-roof service system at the district (kecamatan) level. The regional government provides ongoing access for community participation in development, including in the formulation of all local ordinances and other public policies. The regional government's support for the business community and its commitment to building the local economy are seen by business operators as policies that support investment.

Tabel /Table 5.b.
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Kelembagaan/
Best and Worst - The Institutional Factor

	Kelompok Peringkat/Cluster			
	A***	A**	A*	E
Kota/City		Cilegon Gorontalo Kediri	Dumai Mojokerto Pare-pare Sawahlunto	Manado Tanjung Pinang
Kabupaten/ Regencies		Asahan Banggai Barito Utara Belu Gowa Indramayu Lampung Barat	Luwu Utara Musi Banyuasin Pelalawan Pinrang Purwakarta Sinjai Way Kanan	Bungo Ende Gianyar Kolaka Solok Tabalong Tasikmalaya Timor Tengah Utara Toli Toli Bengkulu Selatan Ciamis Kapuas Hulu Lampung Selatan Minahasa Musi Rawas Sorong

Daerah-daerah yang berada di peringkat terbawah berdasarkan faktor kelembagaan, banyak dijumpai persoalan yang dapat mengganggu iklim investasi. Persolan yang banyak terjadi di daerah-daerah tersebut adalah terkait dengan birokrasi pelayanan oleh Pemda, Kepastian Hukum, Peraturan Daerah dan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan daerah

In the regions with the lowest rankings in terms of institutional factors, many problems are encountered that disturb the investment climate. The problems occurring most often in these regions are those related to the bureaucracy of regional government services, legal certainty, regional regulations, and regional financial management. Regional regulations seem to be the focus

tampaknya masih menjadi perhatian serius bagi para pelaku usaha di daerah, karena peraturan daerah ini dipandang sebagai salah satu sumber ekonomi biaya tinggi bagi kegiatan usaha mereka.

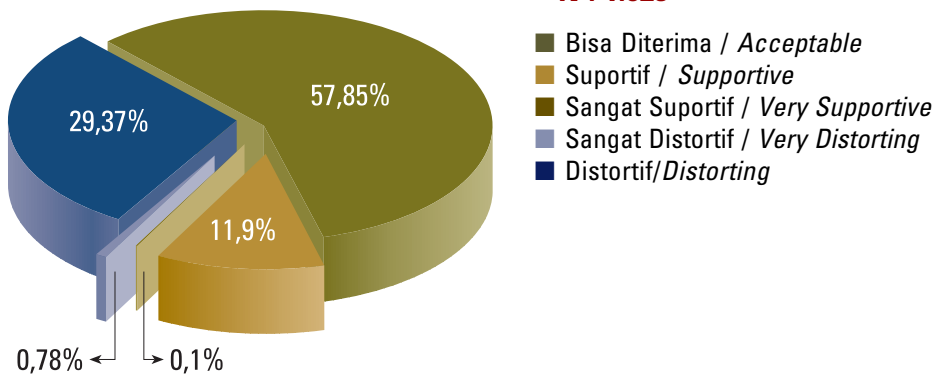
Kab. Bengkulu Selatan, hingga saat ini masih disibukkan oleh penataan organisasi pemerintahannya setelah dilakukan pemekaran wilayahnya menjadi tiga kabupaten. Sementara para pelaku usaha di Bengkulu Selatan juga merasakan pelayanan yang tidak baik dari pemda setempat. Dari penelusuran di lapangan ditemukan sejumlah kasus investor yang membatalkan berinvestasi di daerah ini karena terlalu banyak pungutan yang harus mereka bayar dalam proses perizinan usaha. Di Kab. Bengkulu Selatan juga ditemukan sejumlah pos retribusi yang dikelola oleh pihak "swasta". Hal inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha di Bengkulu Selatan. *Peringkat Berdasarkan Faktor Kelembagaan secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 3.*

of concern for business operators in the regions, because these local regulations are seen as one source of the high cost economy that affects their business operations.

South Bengkulu Regency is still busy reorganizing its government structures after a partitioning that converted its territory into three regencies. Business operators in South Bengkulu also feel that the local government's services are poor. Investigations in the field found a number of cases in which investors cancelled their investments in this region due to the excessive fees they had to pay in the business permitting process. There are also quite a few unofficial levy points in South Bengkulu Regency, operated by "private" parties. This is the thing that business operators in South Bengkulu complain about the most. Complete Rankings based on the Institutional Factor can be seen in the Appendix 3.

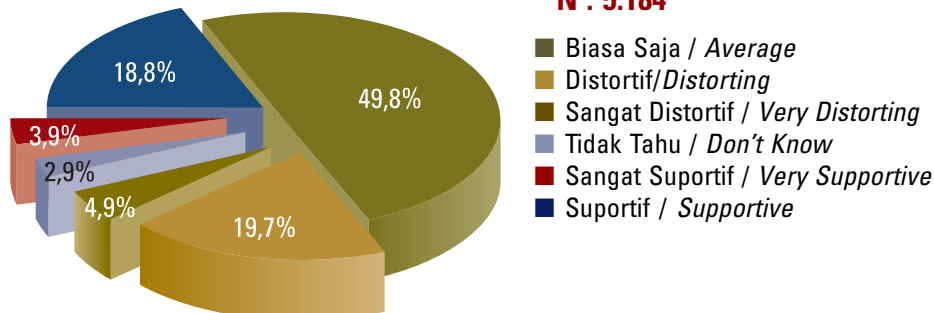
Diagram/Figure. 7

Tingkat Kebermasalahan Perda /Regional Regulations by Level of Problems Created
N : 1.025

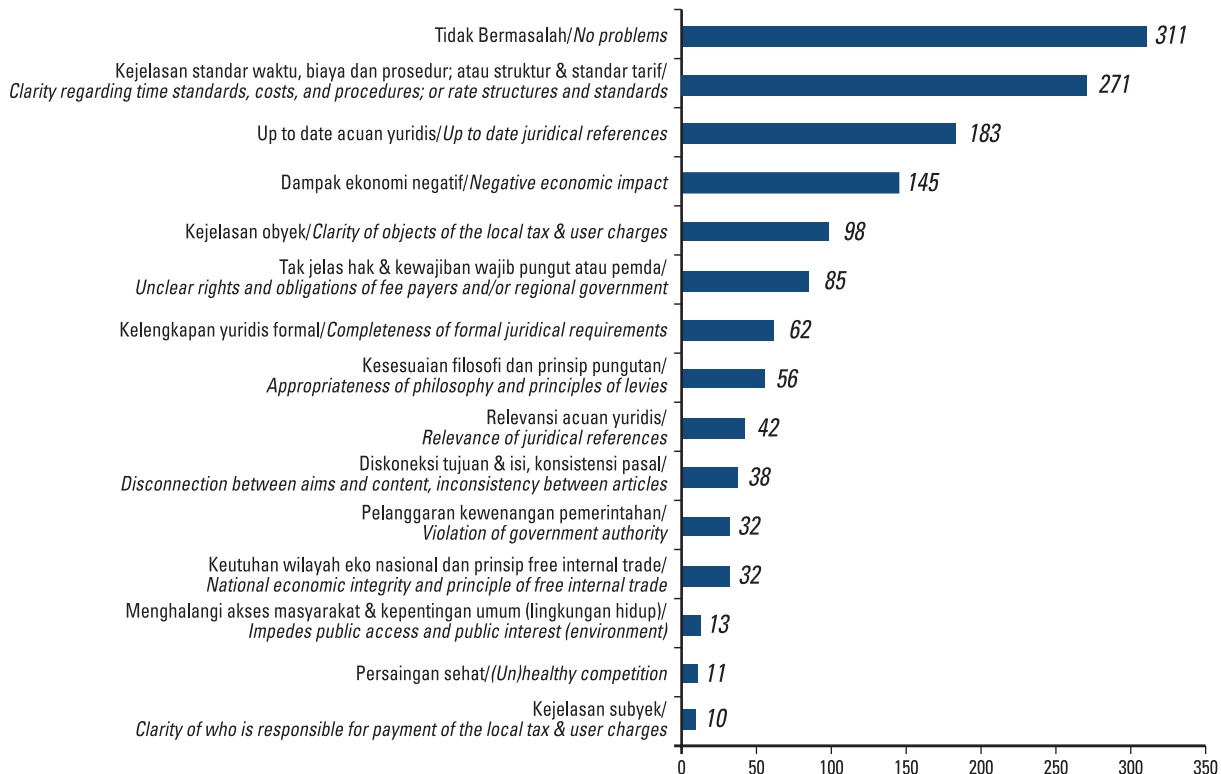


Diagram/Figure. 8

Kualitas Perda Menurut Pelaku Usaha/
Quality of Regional Regulations According to Business Operators
N : 5.184



Diagram/Figure. 9
Jenis Pelanggaran Perda /Type of Violations in Regional Regulation
N : 1.025



Pada pemeringkatan tahun 2004 ini atau sampai dengan tahun ke-4 pelaksanaan otonomi daerah, sejumlah persoalan terkait dengan faktor kelembagaan masih ditemukan. Salah satu persoalan yang belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan adalah terkait dengan sejumlah peraturan daerah yang dinilai masih mendistorsi kegiatan usaha di beberapa daerah.

Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa 24,6% responden pelaku usaha merasakan distorsi perda terhadap kegiatan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan hasil analisis kualitatif terhadap 1.025 dokumen perda dari 214 daerah, dimana 30,15% diantaranya berpotensi mendistorsi aktivitas usaha. Masih banyaknya perda-perda yang dinilai distorsif terhadap aktivitas usaha ini terkait dengan proses perumusan kebijakan daerah ini yang masih kurang baik, dalam artian kurang partisipatif atau kurang melibatkan para pelaku usaha yang akan menanggung beban dari peraturan tersebut.

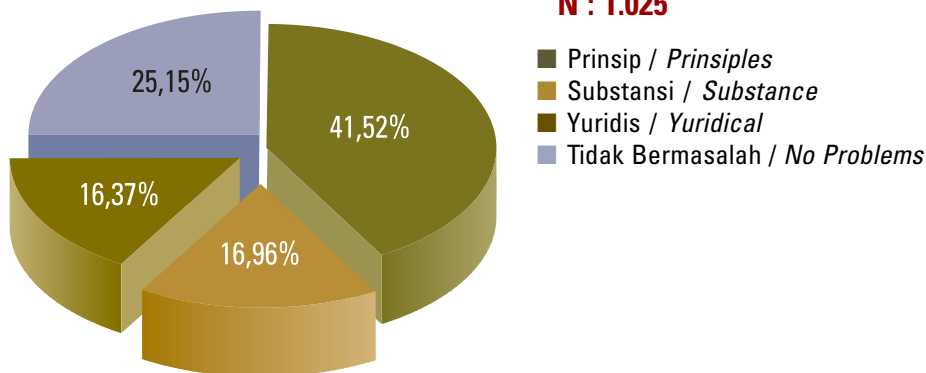
In these rankings for 2004, after four years of implementation of regional autonomy, various problems related to institutional factors still persist. One issue that has shown little significant improvement is the large number of local regulations that distort business activities in many regions.

Field research found that 24.6% of business operator respondents felt they experienced distortion of their business activities. This is in line with the results of a qualitative KPPOD desk analysis of 1,025 regional regulation documents from the 214 regions, 30.15% of which could distort business activities. The continuing large number of local regulations that are felt to distort business activities is related to the poor policy formulation process in these regions resulting from the lack of participation or involvement in this process of the business operators who will bear the burden of these regulations. Field findings revealed that 84.6%

Dari temuan lapangan diketahui bahwa 84,6 % dari 5.184 responden pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Sementara dari 12% yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah 59,6% diantaranya menyatakan kualitas pelibatangannya tidak baik, dan 8,1% menyatakan biasa saja. Sebagian besar pelaku usaha yang menyatakan dilibatkan dalam perumusan kebijakan menyatakan bahwa proses pelibatangannya hanya sebatas formalitas dan terbatas pada sosialisasi. *Stakeholders* dari kalangan pelaku usaha ini, kebanyakan hanya diundang pada proses sosialisasi ketika rancangan perda sudah jadi. Pelibatan mereka tidak dilibatkan secara aktif dari proses perumusan awal kebijakan yang hendak diputuskan, namun masukan yang mereka berikan tidak mendapat respon positif untuk dilakukan perubahan.

of the 5,184 business operator respondents claimed they were not involved at all in the formulation of regional policies. Of the 12% who said they were involved in policy formulation, 59.6% said the level of their involvement was poor, and 8.1% said it was just average. Most of the business operators who said they were involved in policy formulation said that their involvement was a mere formality and limited to receiving information. The stakeholders from the business community were generally only invited to hear about the regulations after the drafts of the regulations had already been prepared. They were not actively involved in the initial formulation of the policies to be introduced, nor did the input they provided receive any positive response.

Diagram/Figure. 10
Perda Berdasarkan Tingkat Kebermasalahan/Regional Regulations by Type of Problems
N : 1.025



Terkait dengan faktor kelembagaan, kepastian hukum juga masih menjadi persoalan yang krusial. Di banyak daerah masih ditemukan praktik-praktik pungutan liar, baik yang dilakukan dalam tubuh birokrasi maupun di luar birokrasi. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa besarnya pungutan liar yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha dalam aktivitas bisnis mereka rata-rata adalah sebesar 6,81% dari total biaya produksi atau operasional usaha mereka. Besarnya pungutan liar ini tentunya menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat mengurangi daya saing usaha mereka. Dalam tubuh birokrasi praktik-

In connection with the institutional factor, legal certainty also remains a crucial issue. In many regions, practices of illegal levies remain rampant, both within the bureaucracy and outside it. Survey results revealed that the amount of illegal levies that must be paid by business operators in their business activities averages 6.81% of their total production costs or business operation costs. The high level of these illegal levies obviously creates a high cost economy, which in turn reduces competitiveness. Within the bureaucracy, the illegal levy practices that routinely occur in the permitting process continue to be a hindrance. The amount of unofficial fees that business operators have

praktik pungli yang biasa terjadi dalam proses pengurusan birokrasi perizinan juga masih menjadi kendala. Besarnya biaya tidak resmi yang harus dibayar oleh pelaku usaha dalam proses pengurusan izin rata-rata adalah sebesar 64,25% dari biaya resmi yang tercantum dalam peraturan formal. Angka ini tampaknya kurang signifikan, mengingat biaya perizinan usaha di berbagai daerah tidak terlalu besar. Namun masih ada 1,6% responden pelaku usaha yang menyatakan bahwa pungli dalam mengurus perizinan usaha mencapai 500% dari biaya resmi yang diatur dalam ketentuan formal (perda).

A.3. Peringkat Berdasarkan Faktor Sosial Politik

Kondisi sosial politik merupakan politik suatu daerah merupakan prasarat mutlak untuk daya tarik investasi suatu daerah. Suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat, dan kondisi politik yang kondusif. Selama tahun 2004, secara umum untuk faktor sosial politik di berbagai daerah di Indonesia dinilai oleh para pelaku usaha menunjukkan adanya perbaikan, terutama untuk kondisi keamanan dan konflik sosial. Secara rata-rata hasil pemeringkatan berdasarkan faktor sosial politik tahun 2004 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa, iklim investasi berdasarkan faktor sosial politik berbagai daerah di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

to pay when arranging permits averages 64.25% of the officially declared rates. This figure might appear relatively insignificant, given that the business permitting costs in most regions are not that high. But 1.6% of business operator respondents said that the illegal levies they paid in arranging their permits came to 500% of the official fees stipulated in the formal provisions (regional regulations).

A.3. Rankings Based on the Social-Political Factor

Good social and political conditions are an absolute prerequisite for any region's investment attractiveness. A business cannot run smoothly unless it is supported by security, an open attitude from the local people, and conducive political conditions. During 2004, the social-political factors in most regions of Indonesia were generally seen by business operators as showing some improvement, particularly with regard to security conditions and social conflict. The average rankings by social-political factor for 2004 showed better results than in 2003. This indicates that the investment climate based on social-political factors in many regions in Indonesia is improving from year to year.

Tabel/Table 6.a.

Rata-Rata Skor Faktor Sosial Politik/Average Scores for Socio-Political Factor:

	2003		2004
Kab & Kota/ <i>Regencies and Cities</i>	0,0506	➡	0,0582
Kota/ <i>Cities</i>	0,0434	➡	0,0552
Kabupaten/ <i>Regencies</i>	0,0526	➡	0,0592

Rata-rata skor faktor sosial politik daerah kabupaten lebih baik dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi sosial politik daerah kabupaten lebih baik dibandingkan dengan daerah perkotaan. Namun demikian masih ada satu daerah kabupaten yang berada pada kelompok peringkat E. Grafik

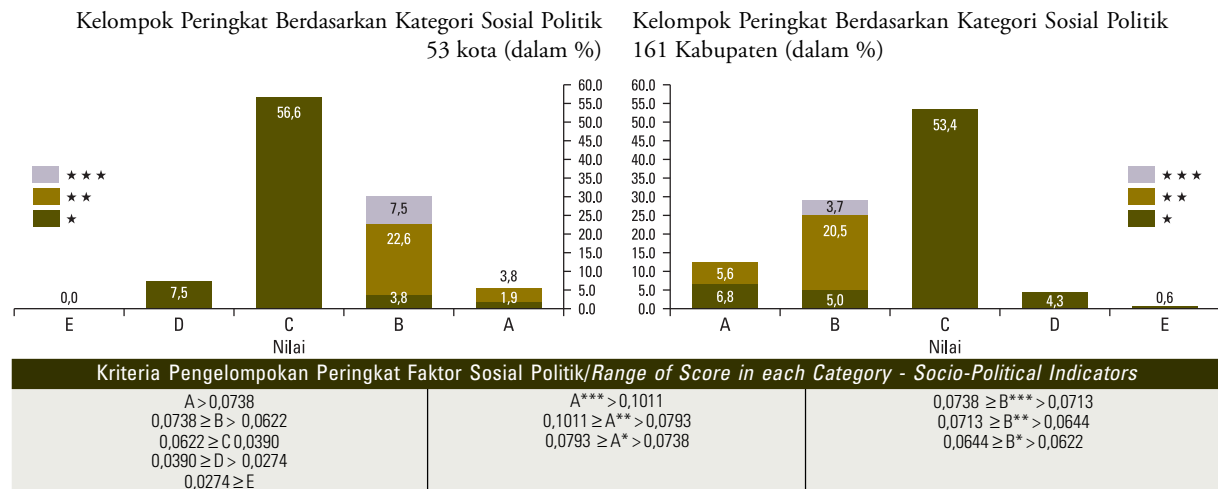
On average, the social-political factor scores for regencies were better than those for cities. Nevertheless, there was one regency that fell into ranking cluster E. Graph 3 shows the results of the rankings based on social and political factors.

3., memperlihatkan hasil pengelompokan peringkat daerah berdasarkan faktor sosial politik

Secara umum kondisi sosial politik daerah kabupaten *sedikit lebih baik* dibandingkan dengan daerah perkotaan. Secara umum kondisi keamanan berusaha selama tahun 2004 kondusif untuk kegiatan usaha. Dari penelusuran di lapangan diketahui bahwa, 92% responden dunia usaha menyatakan kondisi keamanan di berbagai daerah kondusif untuk kegiatan usaha. Namun demikian perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak karena masih ada 7,4% pelaku usaha yg menyatakan kurang aman. Beberapa jenis gangguan keamanan yang sering dialami oleh para pelaku usaha diantaranya adalah pencurian di lokasi usaha (25% responden); penghadangan di jalan (9%); perusakan asset (7,9%); dan penjarahan (3,1% responden).

In general, the social and political conditions of regencies are slightly better than in cities. Generally speaking, the business security conditions during 2004 were conducive for business activities. Investigations in the field found that 92% of business community respondents stated that security conditions in their regions were conducive for business activities. However, attention is still needed from certain parties, as there are still 7.4% of business operators who say they feel unsafe. The types of security disturbances often experienced by business operators include theft at the place of business (25% of respondents); robberies on the road (9%); damage to assets/ vandalism (7.9%); and looting (3.1% of respondents).

Grafik/Graph. 3.
Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Sosial Politik/
Ranking Based on the Socio-Political Score



Hal yang menonjol terjadi di tahun 2004 adalah kondisi politik yang sedikit memanas sebagai dampak dari penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilu anggota legislative dan pemilu presiden secara langsung. Kondisi ini merata ke seluruh penjuru tanah air, sehingga faktor politik mengalami penurunan. Dari penelusuran lapangan, 15,6% pelaku usaha menyatakan merasa terganggu dengan kondisi politik selama tahun 2004. Sementara 7% responden menilai hubungan

One significant aspect of 2004 was that the political situation heated up somewhat due to the “festival of democracy”: the election of legislators at various levels and the first-ever direct presidential election. This situation prevailed throughout the nation, causing a decline in ratings for the political factor. According to field surveys, 15.6% of business operators said that they felt disturbed by the political situation during 2004. Seven percent of respondents felt that relations between the executive and legislative branches disrupted

Eksekutif dan Legislatif mengganggu pelayanan terhadap dunia usaha, dan 9% terganggu oleh aksi unjuk rasa buruh.

services to the business community, and 9% were disturbed by labor unrest.

Tabel/Table 6.b.
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Sosial Politik/Best and Worst - Socio-Political

	Kelompok Peringkat/Cluster					
	A***	A**		A*		E
Kota/City		Mojokerto Pare-pare		Tegal		
Kabupaten/ Regencies		Bangli Ciamis Gianyar Magetan Majene Sinjai	Sukoharjo Tapin Tebo Sangihe Selayar	Banggai Bone Buton Enrekang Indramayu	Jeneponto Klungkung Lampung Barat Lombok Timur	Poso

Tabel 6.b., memperlihatkan daerah-daerah yang berada pada kelompok peringkat A dan E. Dari kelompok peringkat tersebut terlihat bahwa tidak satupun daerah yang berhasil berada pada peringkat A***. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004, daerah-daerah yang sebelumnya memperoleh peringkat A*** mengalami penurunan. Daerah-daerah Kabupaten yang berada pada peringkat atas untuk faktor sosial politik memperlihatkan kondisi sosial politik mereka yang baik.

Kab. Barru di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang berada pada peringkat atas. Para pelaku usaha di Kab. Barru menilai indikator-indikator yang tergabung dalam faktor sosial politik sangat baik. Berdasarkan penilaian para pelaku usaha di Kab. Barru, aparat keamanan sangat cepat dalam menanggulangi gangguan keamanan, baik terhadap aktivitas usaha maupun yang terjadi di masyarakat, hal inilah yang menurut para pelaku usaha menjadi salah satu faktor mengapa selama tahun 2004 di daerah ini tidak dijumpai adanya gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha. Sikap masyarakat yang terbuka terhadap masuknya investasi dari luar, dan memiliki etos kerja yang baik, ditunjang dengan kondisi politik lokal yang stabil, juga merupakan faktor penting yang mengakibatkan daerah ini berada pada peringkat teratas untuk faktor sosial politik.

Kota Mojokerto berada pada peringkat atas untuk faktor sosial politik karena etos kerja

*Table 6.b shows the regions in ranking clusters A and E. From these rankings it can be seen that no region succeeded in attaining an A*** rating. This indicates that in 2004, those regions that had previously obtained A*** ratings experienced a decline. The regencies in the top ranking for social and political factors demonstrated their good social and political conditions.*

Barru Regency in South Sulawesi was the top-ranked region. Business operators in Barru Regency rated the indicators included in the social-political factor as excellent. According to the evaluation by business operators in Barru Regency, the security officials are very quick in handling security disturbances, both those that disrupt business activities and those within the community; they felt that this was one reason why there were no security disturbances that disrupted business activities in the regency during 2004. The public's open attitude toward investment coming in from outside, and the community's strong work ethic, supported by a stable local political situation, were other important elements that put this region in first place for the social-political factor.

The city of Mojokerto was in the top ranking for the social-political factor thanks to the community's

masyarakat yang tinggi, dan sikap terbuka kepada investor dari luar, yang merupakan cermin kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi. Di kota ini hampir tidak pernah terjadi gangguan keamanan usaha. Pemko senantiasa mengkomunikasikan setiap rencana kebijakan kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama secara harmonis dengan DPRD. Sementara Kota Tegal, berhasil memperoleh peringkat atas berdasarkan faktor sosial politik berkat kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang kondusif, keamanan yang mantap, kecepatan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan. Rendahnya aksi unjuk rasa di Kota Tegal disebabkan pemko senantiasa memberi ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan daerah. Sementara kultur agraris, dengan sikap terbuka bagi kehadiran dunia usaha dari luar, adalah keseharian yang ada di Kab. Magetan. Dinamika politik yang terjadi di daerah tidak mengganggu kegiatan usaha di sana. Kecepatan aparat dalam merespon dan menanggulangi gangguan keamanan, membuat daerah ini sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi.

Kabupaten Poso menjadi satu-satunya daerah yang mendapat peringkat E untuk kategori Sosial Politik. Konflik sosial di daerah ini yang tidak kunjung selesai, menyebabkan daerah ini tetap berada pada peringkat terbawah untuk faktor sosial politik seperti hasil pemeringkatan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi sosial politik di daerah-daerah ini sering memberikan citra negatif terhadap daya tarik investasi Indonesia di mata internasional. Kab. Poso, yang hingga saat ini masih diliputi oleh konflik sosial adalah daerah yang berada pada peringkat terendah untuk kategori ini. Konflik sosial yang berkepanjangan, dinilai merupakan ancaman utama bagi aktivitas bisnis di sana. (*Peringkat Berdasarkan Faktor Sosial Politik secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 4.*)

Selain Kab. Poso, beberapa daerah yang berada pada peringkat bawah (D) juga menunjukkan kondisi yang kurang menggemblirakan. Hal yang hampir sama dengan Kab. Poso juga terjadi pada daerah tetangganya yaitu Kab. Morowali.

strong work ethic and openness to outside investors, which reflects the public's awareness of the importance of investment. In this city, disturbances to business security almost never occur. The city government regularly communicates all planned policies to the public, and maintains harmonious relations with the local legislature (DPRD). The city of Tegal also achieved a high rating for the social-political factor thanks to the government's capability in creating a conducive political climate, the solid security situation, and the security forces' speed in dealing with any security disturbances. The level of demonstrations in the city of Tegal is low because the city government provides space for the public to participate in the process of formulating local policies. Meanwhile, the agrarian culture and an attitude of openness to the presence of outside businesses are part of daily life in Magetan Regency. The political dynamics that occur in this region do not disrupt business activities. The security apparatus's speed in responding to and handling security disturbances makes this region a safe place to invest.

Poso Regency was the only region to receive an E ranking in the social-political category. The unending social conflict in this region put it in last place for the social-political factor, just as in the previous years. The poor social-political situation in this region often creates a negative image for Indonesia's overall investment attractiveness in the eyes of the international community. The protracted social conflict is felt to be the main threat to business activities in the region. (Complete Rankings Based on Social and Political Factors can be seen in the Appendix. 4.)

Apart from Poso Regency, several other regions in the other low ranking cluster, (D), also show a worrisome situation. Nearly the same situation as in Poso Regency also prevails in the neighboring region of Morowali Regency. And the mental attitude of the

Sementara sikap mental masyarakat daerah-daerah di Papua, seperti Kab. Sorong, Kab. Fak-Fak, dan Mimika, yang dinilai tidak terbuka terhadap investor mengakibatkan keengganan investor untuk masuk ke daerah ini, padahal jika ditinjau dari potensi sumber daya alamnya, daerah-daerah tersebut sangat menjanjikan. Di Kab. Mimika pada tahun 2004 juga diwarnai bentrokan antar kelompok warga yang dipicu oleh rencana pemekaran wilayah propinsi. Konsisi politik lokal di Kab. Kutai Kalimantan Timur dan Manggarai di NTT selama tahun 2004 menyebabkan peringkat daerah ini untuk faktor sosial politik dinilai tidak baik oleh para pelaku usaha.

Untuk kelompok daerah kota, Kota Sorong dinilai kurang kondusif gangguan masyarakat, terhadap aktivitas usaha dan sikap kurang terbukanya masyarakat terhadap aktivitas usaha. Di Kota Cirebon konflik eksekutif legislatif yang terjadi selama tahun 2004 dirasakan mengganggu pelayanan pada dunia usaha. Sementara Kota Tangerang ancaman faktor sosial politik datang dari gangguan keamanan usaha, unjuk rasa buruh. Sedangkan keterpurukan peringkat Kota Palu berdasarkan faktor sosial politik karena selama tahun 2004 di kota ini sering terjadi ancaman bom, dan kerusuhan sosial.

A.4. Peringkat Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah

Faktor ekonomi daerah adalah indikasi dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang merupakan pertimbangan yang juga penting dalam keputusan berinvestasi. Potensi ekonomi bisa dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam, maupun potensi akibat bentukan karena didorong oleh aktivitas usaha atau adanya investasi. Kedua aspek tersebut harus dapat berjalan selaras agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli, dan sikap mental masyarakat yang mendorong kearah kemajuan dan modern.

Peringkat atas untuk faktor ekonomi daerah, didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki

communities in several regions in Papua – Sorong Regency, Fak-Fak Regency, and Mimika – which is considered unfriendly to outside investment, deters investors from coming into these regions, despite these regions' great promise in terms of natural resources. In 2004, Mimika Regency also experienced intercommunal conflict, triggered by the plan to partition the province of Papua. Local political conditions in Kutai, East Kalimantan and in Manggarai, NTT during 2004 caused business operators to give these region low ratings for the social-political factor.

Among the cities, the city of Sorong was considered not very attractive due to community disruptions of business activities and the community's lack of openness toward business activities. In the city of Cirebon, the conflict between the executive and legislative branches that occurred during 2004 was felt to have disrupted services to the business community. And in the city of Tangerang, the major social-political threat came from security disruptions in the form of worker demonstrations. Finally, the miserable ranking of the city of Palu in the social-political factor during 2004 was due to frequent bomb threats and social unrest.

A.4. Rankings Based on the Regional Economy Factor

The regional economic dynamism factor is an indicator of the economic potential and economic structure of a region, which is another important consideration in any investment decision. Economic potential can be seen from potential based on natural resources, and also from "created" potential resulting from business activities or the presence of investment. These two aspects must proceed in harmony to promote high economic growth and a strong economic structure, so as to spur progress in the region's economy, increased buying power, and a mental attitude within the community that promotes progress and modernity.

The top rankings for the regional economy factor were dominated by regions with good natural resource

potensi sumber daya alam yang baik dan daerah-daerah yang telah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat aktivitas bisnis yang relatif modern yang ditunjukkan dengan tingkat industrialisasi yang tinggi. Hasil pemeringkatan tahun 2004 menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan pada indikator-indikator ekonomi daerah. Secara rata-rata kondisi perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan.

potential and those that already have high rates of economic growth due to relatively modern types of business activities, as indicated by a high level of industrialization. The rankings for 2004 show significant changes in the regional economy indicators. On average, regional economic conditions experienced significant improvements.

Tabel/Table 7.a.

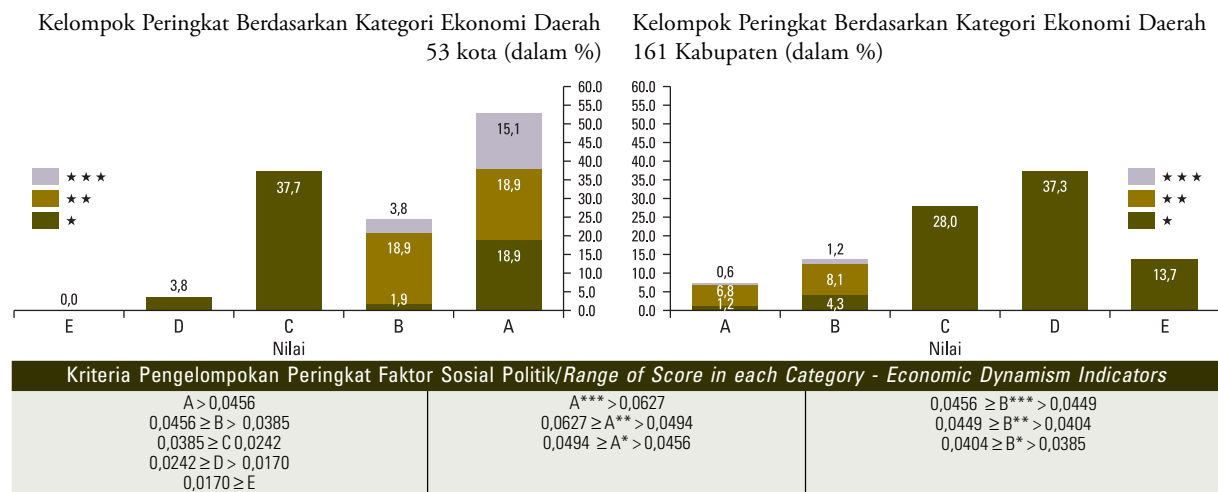
Rata-Rata Skor Faktor Ekonomi Daerah/Average Scores for Economic Dynamism Factor:

	2003		2004
Kab & Kota/ <i>Regencies and Cities</i>	0,0313	▮▮▮▮▮	0,0327
Kota/ <i>Cities</i>	0,0424	▮▮▮▮▮	0,0465
Kabupaten/ <i>Regencies</i>	0,0282	▮▮▮▮▮	0,0281

Indikator-indikator ekonomi daerah kota, lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Mayoritas daerah kota berada pada kelompok peringkat B hingga A, dan tidak satupun yang memiliki peringkat E. Sebaliknya daerah kabupaten lebih banyak yang berada pada peringkat D dan E. Grafik 4 memperlihatkan hasil pengelompokan peringkat berdasarkan faktor ekonomi daerah.

The economic indicators for cities are better than those for regencies. A majority of the cities rank in clusters B and A, and none has an E ranking. In contrast, most of the regency regions are in ranking clusters D and E. Graph 4 shows the rankings based on the regional economic dynamism factor.

Grafik/Graph. 4.
Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/
Ranking Based on the Economic Dynamism Score



Rata-rata PDRB perkapita kota sebesar Rp. 11,42 juta, kabupaten hanya sebesar Rp. 5,25 juta. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi kota

The average per capita GRDP in cities is Rp. 11.417.446,80, while in regencies it is only Rp. 5.252.425,57. Furthermore, the average rate of

sebesar 4,9% pertahun, sedangkan kabupaten hanya 2,3% pertahun. Hal ini penyebab peringkat faktor ekonomi kota lebih baik dibandingkan kabupaten.

Kota-kota yang berada pada peringkat atas berdasarkan faktor ekonomi daerah, dicirikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan memiliki PDRB Perkapita yang juga Tinggi. Kota Sibolga memiliki PDRB Perkapita sebesar Rp.7,06 juta pada tahun 2003, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,2% selama tahun 1999 – 2003. Selain dari struktur ekonomi yang mantap, Kota Sibolga juga merupakan sebuah kota yang memiliki keunggulan dalam hal potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Kegiatan ekonomi dari sektor perikanan menyumbang 25% terhadap keseluruhan perekonomian di Kota Sibolga.

economic growth in cities is 4.9%, and in regencies only 2.3%. This is why the economic factor rankings for cities are higher than those for regencies.

The cities in the top ranking for regional economic dynamism are characterized by a high level of economic growth, and also have high per capita GRDP. The city of Sibolga had a per capita GRDP of Rp.7.060.886 in 2003, with average economic growth of 5.2% per year from 1999 to 2003. In addition to a solid economic structure, Sibolga also has a strong advantage from its abundant fishery resources. Economic activity from the fisheries sector contributes 25% to Sibolga's overall economy.

Tabel/Table 7.b.
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/
Best and Worst - Economic Dynamism

	Kelompok Peringkat/Cluster					
	A***	A**	A*	E		
Kota/City	Balikpapan Bandung Batam Makassar Palembang Pekan Baru Samarinda Sibolga	Binjai Bitung Cirebon DKI Jakarta Kupang Malang Pematang Siantar Surakarta Tanjung Balai Tanjung Pinang	Bandar Lampung Bogor Cilegon Denpasar Kediri Padang Semarang Surabaya Tangerang Yogyakarta			
Kabupaten/ Regencies	Asahan	Bekasi Berau Cilacap Dairi Kutai Timur Labuhan Batu Langkat Purwakarta Tabalong	Gresik Sidoharjo	Bengkulu Utara Bima Bondowoso Buton Dompu Flores Timur Gorontalo Hulu Sungai Utara Karang Asem	Kebumen Ketapang Lamongan Lombok Barat Lombok Timur Manggarai Musi Rawas Pamekasan Ponorogo	Poso Selayar Tegal Wonosobo

Kota Balikpapan merupakan pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan. Kota ini memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan ekonomi, dan PDRB Perkapita. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 9,4%

The city of Balikpapan is a new growth center in Kalimantan. This city has a high rate of economic growth and a high per capita GRDP. The city's average economic growth is 9.4% per year, making it one of the main economic growth centers in Indonesia. The

pertahun, menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi produktif yang ada, mampu meningkatkan daya beli masyarakat hingga mencapai Rp.19,5 juta. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia daerah ini (73) melampaui rata-rata IPM nasional (65), adalah bukti keberhasilan pembangunan di daerah ini. Perekonomian Kota Balikpapan juga ditopang oleh kegiatan di sektor pertambangan. Kota ini dijadikan kantor pusat berbagai perusahaan pertambangan yang berskala multinasional, sehingga fasilitas kota ini sangat lengkap.

Kab. Asahan, Berau, Kutai Timur, Tabalong, Labuhan Batu, Langkat, dan Dairi adalah daerah-daerah yang berbasis potensi sumber daya alam yang melimpah. Struktur perekonomian Kab. Asahan bisa dikatakan cukup kuat dan mantap. Dengan perpaduan sektor primer dan sekunder yang seimbang, mampu meningkatkan daya beli masyarakat hingga mencapai Rp.11,7 Juta. Dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,4% pertahun, dan ketersediaan lahan yang luas, menjadikan ekonomi daerahnya sangat menarik.

Sementara Kab. Purwakarta, Cilacap, Bekasi, dan Sidoarjo adalah daerah-daerah yang berbasis ekonomi moderen dengan industrialisasi yang cukup tinggi, dan dikenal sebagai pusat-pusat industri di Indonesia. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas berdasarkan faktor ekonomi daerah ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni diatas 4,5% (dari tahun 1999 – 2003). Daerah-daerah ini juga memiliki PDRB Perkapita yang tinggi yakni di atas Rp.7 juta pada thun 2003, jauh diatas rata-rata daerah-daerah yang diteliti yakni sebesar Rp.5,3 juta.

Kondisi sebaliknya ditunjukan oleh daerah-daerah yang berada pada peringkat bawah. Dari sisi ekonomi daerah, daerah-daerah ini kurang memiliki *endowment* variabel yang baik. Dari sisi potensi ekonomi sumber daya alam Kab. Dompu, Karangasem, Lombok Timur, Flores Timur, Manggarai dan lain-lain, tidak banyak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai. Daerah-daerah ini juga kurang

existing productive economic activities have raised the public's buying power to Rp.19.5 million. The Human Development Index in this region at 73 far exceeding the national average of 65, is proof of the success of development in this region. Balikpapan's economy is also supported by activity in the mining sector. The city serves as the head office for several multinational mining companies, and so the city has very complete facilities.

The regencies of Asahan, Berau, East Kutai, Tabalong, Labuhan Batu, Langkat, and Dairi are all regions with abundant natural resource potential. The economic structure of Asahan Regency can be considered strong and solid. The excellent balance between the primary and secondary sectors has enabled the public's buying power to reach Rp. 11.7 million. With an annual growth rate of 5.4% and a great amount of land available, this region's economy is very attractive.

In contrast, the regencies of Purwakarta, Cilacap, Bekasi, and Sidoarjo are regions based on a modern economy with a high level of industrialization, and are well known as centers of industry in Indonesia. These regions, which are in the top ranking in the regional economic dynamism factor, have a very high average rate of economic growth, over 4.5% (from 1999 to 2003). These regions also have a high per capita GRDP, over Rp. 7 million in 2003, far above the average in the regions studied of only Rp. 5.3 million.

Entirely the opposite situation is observed in the regions with the lowest rankings. In terms of regional economic dynamism, these regions lack good endowment in any variables. In terms of economic potential from natural resources, the regencies of Dompu, Karangasem, East Lombok, East Flores, Manggarai and several others lack significant natural resource potential. These regions are also underdeveloped because they are not supported by

berkembang karena kurang didukung oleh aktivitas ekonomi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat.

Kota-kota yang berada pada peringkat bawah berdasarkan faktor ekonomi daerah, didominasi oleh kota-kota dengan skala kecil dan menengah. Kota-kota ini kebanyakan memiliki posisi yang kurang strategis, dan jauh dengan kota-kota besar lainnya. Keterbatasan akses ke Kota-kota ini mengakibatkan perkembangan ekonominya mengalami keterlambatan. Hal ini kemudian juga mengakibatkan PDRB Perkapita kota-kota seperti Mataram, Banjar Masin, Jambi, atau Palangkaraya menjadi relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia, dan menempatkan mereka pada peringkat bawah berdasarkan faktor ekonomi daerah. *Peringkat Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 5.*

A.5. Peringkat Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas

Dalam aktivitas usaha, selain kapital, dan input produksi, tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai peran penting. Tenaga kerja merupakan motor penggerak kegiatan usaha. Dari tiga variabel yang tergabung dalam Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, terlihat bahwa variabel dan indikator Produktivitas Tenaga kerja memiliki bobot terbesar dalam pertimbangan keputusan berinvestasi oleh para pelaku usaha di suatu daerah. Pada akhirnya produktivitas tenaga kerja yang tinggi merupakan daya tarik yang besar bagi investasi. Hal inilah yang menjadi salah satu penentu peringkat daya tarik investasi suatu daerah. Selain produktivitas tenaga kerja, variabel

productive economic activity that would support economic growth and the community's buying power.

The cities in the lowest ranking for regional economic dynamism are dominated by small and medium-sized cities. Most of these cities are in locations that are not strategic and far from any major cities. This limited access to larger cities causes their economic development to be delayed. In turn, this causes the per capita GRDP in cities such as Mataram, Banjarmasin, Jambi, or Palangkaraya to be relatively lower than in other cities in Indonesia, and gives them lower rankings in the regional economic dynamism factor. Complete Rankings Based on Regional Economic Dynamism can be seen in the Appendix 5.

A.5. Rankings Based on the Labor and Productivity Factor

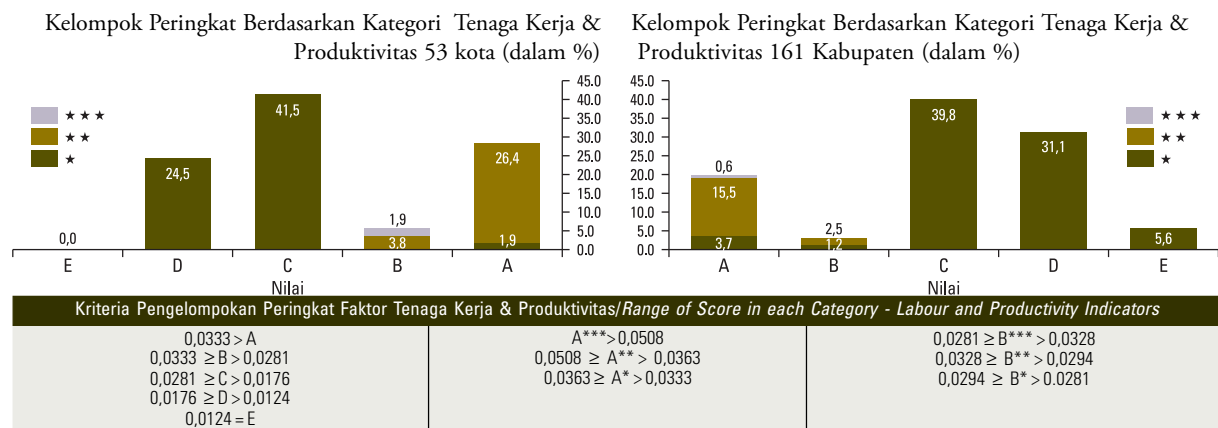
In business activities, aside from capital and production input, labor is a production factor that plays a very important role. Labor is the motivator of business activities. Of the three variables included in the Labor and Productivity Factor, it can be seen that the variable and indicators of Labor Productivity have the highest weighting in business operators' considerations when deciding whether to invest in a given region. Ultimately, high labor productivity is a strong attraction for investment. It is therefore a major determinant of a region's investment attractiveness. In addition to labor productivity, the variables of availability of skilled and educated workers, and labor costs, are also important considerations in the decision to invest in a region.

Tabel/Table 8.a.
Rata-Rata Skor Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/
Average Scores for Labour and Productivity Factor:

	2003		2004
Kab & Kota/ <i>Regencies and Cities</i>	0,0229	■■■■	0,0243
Kota/ <i>Cities</i>	0,0291	■■■■	0,0264
Kabupaten/ <i>Regencies</i>	0,0211	■■■■	0,0205

ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik, serta biaya tenaga kerja juga merupakan pertimbangan penting dalam keputusan berinvestasi di suatu daerah.

Grafik/Graph.5.
Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/
Ranking Based on the Labour and Productivity Score



Dari peringkat Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas diketahui bahwa daerah kota dapat menyediakan tenaga kerja yang lebih berkualitas, baik dilihat dari segi pendidikan maupun produktivitasnya, dibandingkan dengan daerah Kabupaten

Berdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, daerah kota lebih banyak yang menempati peringkat A dan B, dibandingkan dengan daerah Kabupaten, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 5.

Terbatasnya lapangan kerja di pedesaan mendorong perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Sementara kegiatan ekonomi kota menuntut tenaga kerjanya lebih produktif daripada di pedesaan. Kedua hal ini penyebab kualitas tenaga kerja di kota lebih baik daripada di kabupaten. Dari Tabel 8.b., terlihat bahwa tidak satupun daerah kota yang berada pada peringkat E.

Kabupaten-kabupaten yang berada di peringkat atas berdasarkan faktor tenaga kerja dan produktivitas, didominasi oleh daerah-daerah yang aktivitas ekonominya relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di

From the rankings for the Labor and Productivity Factor, it is evident that cities can provide labor of a higher quality, in terms of both education and productivity, than can regencies.

In terms of the Labor and Productivity score, more cities than regencies occupy rankings A and B, as shown in Graph 5.

The lack of job opportunities in rural regions stimulates migration of the work force from these regions to the cities. Furthermore, economic activities in the cities demand a more productive work force. These are two reasons why the quality of the work force in the cities is higher than in the regencies. Table 8.b shows that no city region is in ranking cluster E.

The regencies in the top ranking for the labor and productivity factor are mostly those regions whose economic activities are relatively more advanced than those of other regions. In these regions, a highly skilled and highly productive work force is available, as the workers are accustomed to production activities in the

daerah-daerah ini telah tersedia tenaga kerja dengan produktivitas tinggi dan keterampilan yang tinggi, karena telah terbiasa dengan kegiatan produksi di bidang industri. Seperti yang diperlihatkan oleh Kab. Gresik, Tangerang, Serang dan Purwakarta. Kab. Gresik memperoleh peringkat tinggi berdasarkan faktor tenaga kerja dan produktivitas karena merupakan daerah industri dengan standar upah tenaga kerja yang kompetitif. Kegiatan industri dari skala besar hingga kecil yang ada di daerah ini beraglomerasi, hingga mampu menyediakan tenaga kerja terdidik dan produktif dalam jumlah banyak. Daerah-daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak juga berhasil menempati posisi teratas, seperti Kab. Lahat, Simalungun, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanah Karo, dan sebagainya. Di daerah-daerah tersebut upah tenaga kerja juga yang relatif murah baik dilihat dari ketentuan formal (UMP/UMK) maupun upah aktual yang biasa diberikan oleh pemberi kerja.

industrial sector. Examples of this are the regencies of Gresik, Tangerang, Serang and Purwakarta. Gresik Regency received a high ranking for the labor and productivity factor because it is an industrial region with a competitive standard of wages. The industrial activities in this region, from large scale down to small scale, are agglomerated, and trained and productive workers are therefore available in large numbers. Regions with large work forces also tend to have high rankings, such as the regencies of Lahat, Simalungun, East Lampung, South Lampung, Tanah Karo, and so on. In these regions, wages are also relatively low, both in terms of the formal provisions (provincial and regency/city minimum wages) and in terms of the actual wages usually paid by employers.

Tabel/Table 8.b.
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/
Best and Worst - Labour and Productivity

Kelompok Peringkat/Cluster					
A***		A**		A*	E
Kota/City		Bandar Lampung Binjai Cirebon Jakarta Kediri Malang Padang	Palembang Samarinda Sawahlunto Sibolga Sorong Surabaya Tangerang	Makassar	
Kabupaten/ Regencies	Gresik	Badung Bandung Banyuwangi Barito Selatan Batanghari Belitung Bengkalis Bengkulu Selatan Bengkulu Utara Klungkung Kolaka Lahat Lampung Selatan	Lampung Timur Langkat Musi Banyuasin Musi Rawas Pontianak Poso Sanggau Serang Simalungun Solok Tanah Karo Tangerang	Kebumen Bantaeng Bulungan Kendal Pangkajene & Kepulauan Pelalawan Purwakarta	Fakfak Hulu Sungai Utara Kapuas Hulu Karang Asem Pasir Sangihe Sumba Barat Tabanan Timor Tengah Utara

Kota-kota industri juga mendominasi peringkat atas untuk faktor ketenagakerjaan, seperti Kediri, Tangerang dan lain-lain. Industrialisasi di Kota Kediri telah mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang ada. Institusi-institusi pendidikan yang ada mampu menciptakan tenaga kerja dengan kualitas yang memadai. Kemakmuran kota ini, menarik orang dari daerah lain untuk bermigrasi, sehingga menambah ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang kompetitif. Sementara, peringkat faktor ketenagakerjaan dan produktivitas diperoleh Kota Padang, karena dilihat dari ketiga variabel pada faktor ini dinilai sangat baik. Kota Padang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang besar dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai, ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Selain itu upah tenaga kerja di Kota Padang juga kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah kota lainnya. Sementara Kota Jakarta, walaupun memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi tetapi berhasil menduduki peringkat ke-3 karena produktivitasnya yang tinggi. Kota Sibolga, mempunyai keunggulan dari sisi biaya tenaga kerja yang relatif murah.

Kab. Hulu Sungai Utara, Karangasem, Kapuas Hulu, Pasir, Bangli, Banggai dan sebagainya merupakan daerah-daerah yang berada pada peringkat terbawah berdasarkan faktor ketenagakerjaan dan produktivitas. Kabupaten-kabupaten yang menempati peringkat terbawah, didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki struktur ekonomi yang berbasis pertanian tradisional (pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan nelayan kecil), atau perekonomian yang berbasis sumber daya alam lainnya. Kegiatan industri manufaktur dan perdagangan jasa di daerah-daerah tersebut belum berkembang dengan baik di daerah-daerah ini. Hal inilah yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja di daerah ini dinilai rendah, karena belum cukup terbiasa dengan kegiatan produksi secara modern. *Peringkat Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 6.*

Industrial cities also dominate the higher rankings for the labor factor, such as Kediri, Tangerang and others. Industrialization in the city of Kediri has spurred an increase in the productivity and quality of the existing work force. The educational institutions there have been able to create a work force of sufficient quality. The city's overall prosperity attracts people from other regions to migrate, thereby adding to the availability of a work force with competitive wages. Similarly, the city of Padang earned a high labor and productivity factor ranking because the three variables within this factor were all given excellent ratings. The city of Padang has available a large work force with adequate levels of skills and education, supported by high productivity. Furthermore, wages in Padang are also competitive with those in other cities. The city of Jakarta managed to win third place in this factor despite its high labor costs, thanks to its high productivity rating. The city of Sibolga has a strong advantage from its relatively low labor costs.

The regencies of Hulu Sungai Utara, Karangasem, Kapuas Hulu, Pasir, Bangli, Banggai and so on are regions in the lowest rank for the labor and productivity factor. The regencies in the lowest cluster are dominated by regions with an economic structure based on traditional agriculture (food crop agriculture, smallholders' plantations, small-scale fisheries), or economies based on other natural resources. Manufacturing industry and trade in services have not developed well in these regions. This is why the labor productivity in these regions is rated low: workers are not accustomed to modern production activities. Complete Rankings based on the Labor and Productivity Factor can be seen in the Appendix 6.

A.6. Peringkat Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

Infrastruktur Fisik merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini sangat berpengaruh bagi kelancaran kegiatan usaha yang terjadi di daerah-daerah. Semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan infrastruktur fisik juga semakin besar. Dari hasil pemeringkatan berdasarkan faktor infrastruktur fisik terlihat bahwa daerah-daerah yang berada di pusat pertumbuhan, dan yang termasuk

A.6. Rankings Based on the Physical Infrastructure Factor

Physical infrastructure is a supporting factor for the smooth conduct of business activities. The availability and quality of physical infrastructure strongly affect the continuity of the business activities that take place in a region. The larger the scale of a business, the greater its need for physical infrastructure. The rankings based on the physical infrastructure factor show high scores for regions that lie in growth centers, those in metropolitan areas or support regions for large cities.

Tabel/Table 9.a.

Rata-Rata Skor Faktor Infrastruktur Fisik/Average Scores for Physical Infrastructure Factor:

	2003		2004
Kab & Kota/Regencies and Cities	0,0251		0,0269
Kota/Cities	0,0311		0,0346
Kabupaten/Regencies	0,0234		0,0245

dalam wilayah metropolitan atau daerah penyangga kota-kota besar. Aktivitas bisnis di daerah-daerah ini juga memperlihatkan adanya kegiatan ekonomi modern, dari sektor sekunder hingga sektor tersier. Kebanyakan daerah-daerah yang berada pada peringkat atas ini terletak di pusat-pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa.

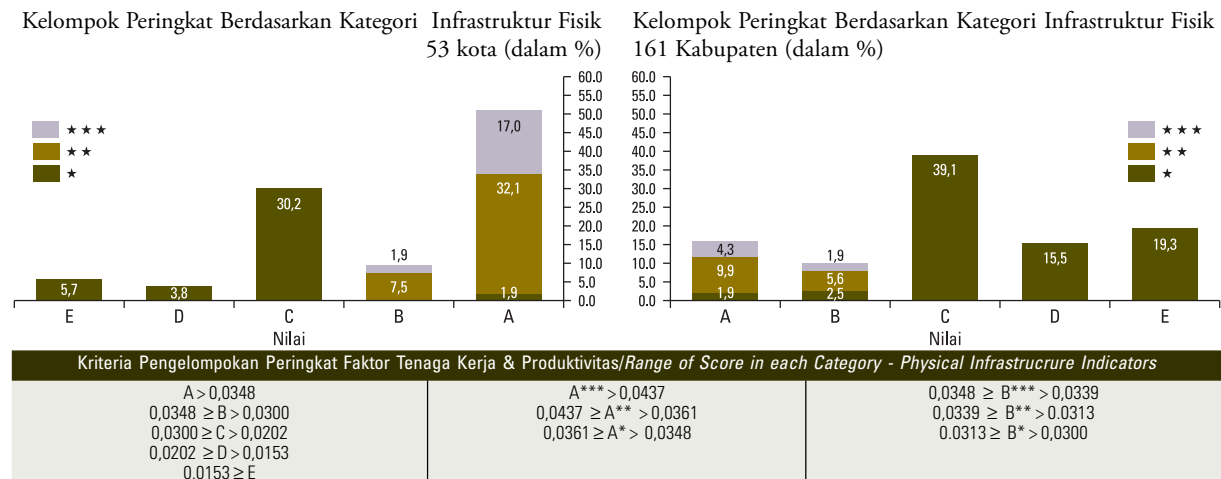
Hasil pemeringkatan tahun 2004 menunjukkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara daerah Kabupaten dan daerah Kota. Secara rata-rata kondisi

Business activities in these regions also show the presence of modern economic activity in the secondary and tertiary sectors. Most of the regions in the top ranking are located in centers of economic activity on the island of Java.

The rankings for 2004 show significant differences between regencies and cities. On average, the condition of infrastructure in cities is better than in regencies.

Grafik/Graph. 6.

Statistik Kelompok Peringkat Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/ Ranking Based on the Physical Infrastructure Score



infrastruktur daerah kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten.

Daerah kota memiliki ketersediaan maupun kualitas infrastruktur yang lebih lengkap dan baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hanya sebagian kecil kota yang ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisiknya berada pada peringkat D dan E. Sebaliknya sebagian besar daerah kabupaten berada pada peringkat D dan E (lihat grafik 6).

Cities, as concentrations of populations with complex economic activities, require better and more complete availability of support infrastructure than do regencies. Only a very small number of cities have availability and quality of physical infrastructure in clusters D and E. In contrast, most of the regencies are ranked D and E (see Graph 6).

Tabel/Table 9.b.
Kelompok Peringkat A dan E Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/
Best and Worst - Physical Infrastructure

	Kelompok Peringkat/Cluster			
	A***	A**	A*	E
Kota/City	Batam Cilegon Denpasar DKI Jakarta Makassar Medan Surabaya Tangerang Tegal	Balikpapan Bandung Bekasi Bogor Gorontalo Kediri Malang Mataram Mojokerto Palembang Pare-pare Pekalongan Probolinggo Semarang Surakarta Tebing Tinggi Yogyakarta	Sukabumi	Bengkulu Jayapura Sorong
Kabupaten/ Regencies	Gresik Indramayu Karawang Kudus Mojokerto Pasuruan Tangerang Jepara Jombang Klaten Klungkung Lamongan Pekalongan Serang Sukabumi Tabanan	Badung Banyuwangi Bekasi Blitar Gianyar Gowa Jembrana	Bantul Cirebon Takalar	Barito Selatan Batanghari Bengkalis Bengkulu Selatan Berau Bungo Fakfak Indragiri Hilir Kapuas Hulu Ketapang Kuantan Senggigi Kutai Timur Lampung Utara Luwu Manggarai Morowali Muara Enim Musi Rawas Ngada Pasaman Rokan Hulu Sambas Sanggau Sorong Sumba Barat Tana Toraja Tanjung Jabung Timur Tapanuli Utara Tapin Tebo Toli Toli

Kota sebagai konsentrasi penduduk dengan aktivitas ekonomi yang kompleks, menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang lebih

Given the high density and complex economic activity in Cities, they tend to have better supporting infrastructure available than in the Regencies. Only three

lengkap dan lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Hanya ada 3 daerah kota yang berada pada kelompok peringkat E, yakni Kota Bengkulu, Kota Jayapura dan Kota Sorong, sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 9.b.

Kota-kota utama di Indonesia, berhasil menduduki peringkat teratas berdasarkan faktor infrastruktur fisik. Tidak diragukan lagi bahwa kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Makassar telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, baik dari sisi ketersediaan jalan, sarana transportasi udara, laut, listrik, maupun sarana komunikasi seperti jaringan telepon. Salah satu pendorong kemajuan ekonomi kota-kota tersebut adalah dukungan sarana infrastruktur fisik dengan kualitas terbaik. Dukungan sarana transportasi darat, laut, dan udara, membuat mobilitas manusia, barang dan jasa, intra daerah dan ke luar daerah, menjadi sangat lancar. Jaringan telekomunikasi yang tersedia di setiap jengkal wilayah kota, membuat seolah-olah kota-kota tersebut tidak lagi berjarak dengan belahan dunia lainnya. Hal inilah yang membuat kota-kota tersebut menempati peringkat teratas dilihat dari faktor infrastruktur fisik. Namun perlu diperhatikan juga bahwa, seiring dengan perkembangan kota-kota tersebut, ada sejumlah persoalan yang dapat mengganggu dari sisi ketersediaan infrastruktur fisik. Dengan beban pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, kota-kota seperti Jakarta, dan Surabaya, menghadapi persoalan kelancaran transportasi darat sebagai akibat kemacetan lalu lintas.

Kabupaten-kabupaten yang menempati peringkat teratas berdasarkan faktor infrastruktur fisik, semuanya berada di Pulau Jawa. Kab. Karawang dan Kab. Tangerang merupakan daerah penyangga dari ibukota negara, dan merupakan daerah sentra industri besar di Indonesia. Di Kab. Karawang, selain zona-zona industri, juga terdapat kawasan industri dan kota industri modern yang terbesar di ASEAN. Ketersediaan jalan darat dengan kualitas baik, memperlancar akses ke sarana perhubungan laut dan udara, maupun ke pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya. Jaringan komunikasi yang tersedia semakin memperlancar

Cities ranked E for infrastructure, there are Bengkulu City, Jayapura City and Sorong City (see graph. 9.b)

The major cities in Indonesia occupy the top rankings in terms of the physical infrastructure factor. It is undeniable that cities such as Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, and Makassar have very complete facilities, whether in terms of availability of roads, air and sea transportation and electricity, or of communications facilities such as a telephone network. One stimulant for the economic progress of these cities is the support of better quality physical infrastructure facilities. Support from land, sea, and air transport facilities promotes high mobility of persons, goods and services, both within and between regions. Telecommunication networks that reach to all corners of the cities seem to eliminate the distance between these cities and other parts of the world. It is these facilities that place these cities in the top rankings in terms of the physical infrastructure factor. Yet it must be noted that together with the growth of these cities, there are also certain potential problems with the availability of physical infrastructure. With the burden of rapid population growth, cities such as Jakarta and Surabaya face problems with smooth land transportation due to traffic congestion.

All of the regencies that occupy the top rankings in the physical infrastructure factor are located on the island of Java. Karawang Regency and Tangerang Regency are support regions for the national capital, and are the largest industrial centers in Indonesia. Karawang Regency, in addition to industrial zones, has the largest modern industrial zone and industrial city in ASEAN. The existence of high quality roads facilitates access to sea and air transport facilities, and also to other centers of economic activity. The available communication networks also facilitate communications with other regions.

hubungan dengan daerah lainnya.

Demikian pula yang dengan Kab. Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan dan Jombang, juga merupakan daerah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Di Jawa Tengah diwakili oleh Kab. Kudus, dan Jepara, yang merupakan daerah yang berbasis industri. Daerah-daerah tersebut di atas memiliki infrastruktur fisik yang memadai, dan akses yang lancar ke pelabuhan laut maupun udara, sehingga memudahkan mobilitas kegiatan usaha pebisnis di daerah-daerah ini. Daerah-daerah ini memiliki keuntungan sebagai dampak aglomerasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya. Dengan demikian terjadi sharing fasilitas di antara daerah-daerah ini dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Berbeda dengan daerah-daerah yang berada di peringkat atas, daerah-daerah yang menempati peringkat bawah, rata-rata adalah daerah yang jauh dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi. Kota-kota dengan skala kecil seperti Kota Sorong, Bengkulu, dan Jayapura, menempati peringkat terbawah dilihat dari faktor infrastruktur fisik. Kota-kota ini kurang berkembang karena lokasinya yang kurang strategis, dan tidak banyak kegiatan ekonomi produktif yang dapat memacu perkembangan kota, sehingga perkembangan sarana dan prasarana fisiknya juga kurang maju.

Kabupaten-kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Papua, NTT, dan daerah pelosok lainnya mendominasi peringkat terbawah untuk faktor infrastruktur fisik. Kab. Kutai Timur, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, baik berupa jalan darat, laut, maupun udara. Di daerah ini juga masih dinilai kekurangan sumber energi listrik maupun jaringan komunikasi. Hal yang relatif sama terjadi pada Kab. Rokan Hulu, Bengkulu Selatan, Fak-fak di Papua, Sanggau di Kalimantan Barat dan lainnya. *Peringkat berdasarkan faktor infrastruktur fisik secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran 7.*

Similarly, the regencies of Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, and Jombang are regions located near the economic growth centers in East Java. Central Java is represented by the regencies of Kudus and Jepara, regions with an industrial basis. These regions have adequate physical infrastructure and smooth access to seaports and airports, which ease the mobility for business activities of business operators in these regions. These regions have advantages resulting from their agglomeration with centers of economic activity in nearby regions; this produces a sharing of facilities between these regions and the nearby regions.

Unlike the regions in the top rankings, the regions in the lowest rankings are generally located far from the centers of economic growth and economic activity. Smaller cities such as Sorong, Bengkulu and Jayapura hold the lowest rankings for the physical infrastructure factor. These cities are underdeveloped because their locations are not very strategic, and there is little productive economic activity to stimulate the cities' growth; consequently, their physical facilities and infrastructure are underdeveloped as well.

Regencies outside the island of Java, such as those in Kalimantan, Papua, NTT, and other outlying regions, dominate the lowest rankings for the physical infrastructure factor. East Kutai Regency, despite its abundant natural resources, lacks the support of adequate physical infrastructure for land, water, or air transport. This region is also rated as lacking in electric power and communication networks. Much the same situation prevails in the regencies of Rokan Hulu, South Bengkulu, Fak-fak in Papua, Sanggau in West Kalimantan, and the others. Complete Rankings based on the Physical Infrastructure Factor can be seen in the Appendix 7.

B. PERUBAHAN PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI

Dengan membandingkan hasil rating tahun 2003 dan 2004 akan diketahui seberapa banyak daerah-daerah yang mengalami perubahan peringkat. Perubahan peringkat ini baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan peringkat. Dari perbandingan hasil peringkat selama dua tahun juga akan diketahui perkembangan kinerja daerah-daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.

B. CHANGES IN THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS RANKINGS

By comparing the results of the ratings for 2003 and 2004, we can see how many regions have experienced changes in their rankings, whether improvements or declines. The comparison of rankings between these two years will also show the progress of the regions' performance in creating a conducive climate for business activities.

Tabel/Table 10.a.
Statistik Perubahan Peringkat/Statistics of Changes in Ranking

		Kota/Kab./ Overall	Kota/Cities	Kabupaten/ Regencies
Meningkat/: <i>Improved</i>	- B ▮▮▮▮ A :	5	3	2
	- C ▮▮▮▮ A :	16	8	8
Turun/: <i>Declined</i>	- A ▮▮▮▮ B :	10	1	9
	- A ▮▮▮▮ C :	14	1	13

Persentase Kota yang mengalami peningkatan peringkat lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten. Demikian juga dengan persentase Kota yang mengalami penurunan peringkat lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten. Jumlah daerah yang mengalami peningkatan peringkat dari C ke A, untuk daerah Kota sebanyak 8 daerah,

The percentage of cities experiencing improvements in rankings is greater than that of regencies. Similarly, a smaller percentage of cities than of regencies experienced declines in rankings. Eight cities had rankings that improved from C to A, as did eight regencies.

Tabel/Table 10.b.
**Daerah Yang Mengalami Peningkatan Dari Kelompok Peringkat C Pada Tahun 2003 Menjadi Berada Pada Kelompok Peringkat A Pada Tahun 2004 Berdasarkan Kategori Umum/
Regions Experiencing Overall Improvement From Ranking C in 2003 to Ranking A in 2004**

No.	Kota/Cities	No.	Kabupaten/Regencies
1	Kota Dumai	1	Kab. Cilacap
2	Kota Jakarta	2	Kab. Gresik
3	Kota Madiun	3	Kab. Karawang
4	Kota Malang	4	Kab. Kudus
5	Kota Palembang	5	Kab. Lampung Barat
6	Kota Pare-Pare	6	Kab. Majene
7	Kota Tanjung Balai	7	Kab. Musi Banyuasin
8	Kota Tegal	8	Kab. Pinrang

sementara untuk Kabupaten sebanyak 8 daerah.

Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan Kota Pare-Pare di Sulawesi Selatan memperbaiki kualitas pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap. Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang mengalami lonjakan peringkat secara pesat. Keberhasilan Parepare meningkatkan peringkatnya ini disebabkan oleh beberapa kebijakan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di bidang birokrasi perizinan, pelayanan investasi dilakukan melalui SINTAP yang memperoleh sertifikat ISO 9001, menjadikan pelayanan perizinan investasi di kota ini semakin prima. Aspek sosial politik juga mengalami kemajuan yang cukup berarti. Kondisi sosial politik yang kian mantap, dengan jarang ditemukannya gangguan keamanan usaha, maupun keamanan di lingkungan masyarakat. Sementara aspek tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Berbagai infrastruktur yang disediakan oleh pemko, seperti perbaikan pelabuhan laut, penyediaan kawasan industri, dan jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah dan yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi semakin memperlancar kegiatan usaha di daerah ini. Berbagai inovasi yang dilakukannya, telah mendongkrak peringkat daya tarik investasinya dari kategori C menjadi A***.

Pada kelompok kabupaten, Kab. Kudus, juga mengalami lonjakan peringkat secara pesat. Respon pemda yang cepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial membuat kabupaten ini nyaman untuk kegiatan investasi. Aksi unjuk rasa karyawan pabrik yang terjadi pada tahun 2003, mampu diatasi dengan segera sehingga tidak berkembang ke arah yang distoratif. Pembentukan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang berwenang memberikan berbagai perizinan usaha, mempermudah pengurusan izin usaha. Sistem pelayanan satu atap di Kab. Kudus merupakan contoh yang baik dalam proses pelayanan perizinan usaha yang dapat ditiru oleh kabupaten / kota lainnya. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMPPT) di Kab. Kudus dikepalai oleh eselon satu yang mempunyai kewenangan penuh untuk menerima

*The city of Parepare is one region that has shown a great leap in its ranking. Parepare's success in improving its ranking was the result of several innovative policies undertaken by the local government. In permitting procedures, investment services are conducted through the "SINTAP" One-Stop Permit Processing System, which has earned ISO 9001 certification, greatly improving the investment permitting service in the city. The social-political aspect has also shown significant progress. The social-political situation is increasingly solid; disturbances to business security or to public security are seldom encountered. The labor aspect has also shown improvement. Various types of infrastructure provided by the city government, such as improvements to the seaport, provision of an industrial zone, and roads connecting the regions and leading to the various centers of economic activity have all accelerated business activities in this region. These innovations have boosted Parepare's investment attractiveness ranking from category C to A***.*

*In the regency group, Kudus Regency has also shown a leap in its ranking. The regional government's speedy response in overcoming social problems has made this regency safe and secure for investment activities. The demonstrations by factory workers that took place in 2003 were promptly handled and therefore did not lead to economic distortions. The establishment of an Integrated Investment and Permitting Services Office, with the authority to issue various types of business permits, has greatly eased the arrangement of business permits. In terms of labor matters, the regional government continually strives to improve the quality of the labor force by providing various types of training. These training programs conducted by the regional government have helped to improve the quality of the region's work force. These efforts by the regional government have succeeded in raising the regency's investment attractiveness ranking from C to A***.*

atau menolak permohonan izin usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat. Pada kasus ini kemauan baik dari aparat pelayanan publik dan didukung penuh dinas-dinas terkait merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan pelayanan terpadu di Kab. Kudus. Dalam aspek ketenagakerjaan, pemda senantiasa berupaya meningkatkan perbaikan kualitas dengan melakukan berbagai pelatihan. Berbagai pelatihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemda, mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah ini. Hasil kerja pemda mampu meningkatkan peringkat daya tarik investasinya dari C ke A***. *Perubahan peringkat seluruh daerah-daerah yang di peringkat dapat dilihat pada bagian lampiran 2 - 8.*

Changes in rankings for all regions that were rated can be seen in the Appendix 2 - 8.

V. Penutup

Conclusion

Hasil pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten / kota tahun 2004 dapat memberikan gambaran umum bagaimana iklim investasi yang ada di berbagai daerah selama tahun 2004. Dengan membandingkan hasil pemeringkatan tahun 2004 dengan tahun sebelumnya diperoleh gambaran perkembangan berbagai indikator penentu daya tarik dari tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mengalami peningkatan dan faktor-faktor apa saja yang mengalami kemunduran. Dari hasil pemeringkatan dan penelusuran di lapangan dapat diambil beberapa catatan penting sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pada tahun 2004 terjadi peningkatan daya tarik investasi kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata skor yang diperoleh kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pemeringkatan tahun 2003.
2. Berdasarkan peringkat daya tarik investasi secara umum diperoleh hasil bahwa daerah kota memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hal

The investment attractiveness rating of cities and regencies for 2004 provide an overall picture of the investment climate. By comparing the rankings for 2004 with those of previous years, we can obtain a picture of developments in the various determinants of investment attractiveness in each region. In this way, we can recognize which factors have shown improvements and which have shown declines. From the rankings and from investigations in the field, several important points can be noted, as follows:

A. CONCLUSIONS

1. *Overall, in 2004 there has been an improvement in the investment attractiveness of regencies and cities in Indonesia. This can be seen from the average increase in the scores achieved by regencies and cities compared with the ratings for 2003.*
2. *The overall investment attractiveness rankings show that cities have higher ratings than regencies. This can be seen from the average scores attained by cities and from the high percentage of cities*

ini terlihat dari rata-rata skor yang berhasil dicapai oleh daerah kota maupun dari banyaknya prosentase daerah kota yang berada ada peringkat A dan B, dan tidak satupun daerah kota yang berada pada peringkat E.

3. Terjadi peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003. Hal ini terlihat dari rata-rata skor faktor kelembagaan kota maupun kabupaten yang mengalami peningkatan. Rata-rata skor dan peringkat kabupaten berdasarkan faktor kelembagaan lebih baik dibandingkan dengan peringkat kota berdasarkan faktor kelembagaan. Namun demikian berdasarkan faktor kelembagaan pada hasil pemeringkatan tahun 2004 tidak satupun daerah baik kota maupun kabupaten yang berhasil mencapai peringkat A***.

4. Pada tahun 2004 masih dijumpai sejumlah persoalan terkait dengan faktor kelembagaan terutama masalah kepastian hukum. Para pelaku usaha harus menanggung pungutan liar dari berbagai pihak (preman, aparat keamanan, organisasi sosial kemasyarakatan, proses peradilan, dll) yang jumlahnya mencapai rata-rata sebesar 6.81% dari total biaya produksi. Dalam pelayanan perizinan usaha, para pelaku usaha juga harus membayar tambahan biaya tidak resmi yang besarnya rata-rata mencapai 64.25% dari biaya yang seharusnya ditanggung. Dan 1.6% responden mengaku harus membayar tambahan biaya tidak resmi hingga 500% dari biaya yang diatur berdasarkan ketentuan formal.

5. Masih ditemukan sejumlah perda di berbagai daerah yang mendistorsi kegiatan usaha. Berdasarkan penelusuran lapangan 24.6% pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan usaha mereka terdistorsi oleh perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil kajian KPPOD terhadap 1.025 perda dimana 30,15% berpotensi

ranking in clusters A and B, with not one city ranking in group E.

3. *The performance of regional government institutions improved during 2004 compared with 2003. This can be seen from the average scores for the institutional (government services) category, in which both cities and regencies showed improvement. The average scores and rankings for regencies based on the institutional category were better than those for cities. However, not one city or regency achieved an A*** ranking in the institutional category in 2004.*

4. *Various problems were still encountered in 2004 in connection with the institutional category, primarily with regard to issues of legal certainty. Business operators had to pay illegal levies to various parties (hoodlums, security officials, community social organizations, legal processes, etc.), in amounts averaging 6.81% of their total production costs. For business permitting services, business operators also had to pay additional, unofficial fees, which averaged 64.25% on top of the official fees. Furthermore, 1.6% of respondents stated that they had to pay unofficial fees of up to 500% of the officially declared rates for business permits.*

5. *There are still a number of local regulations that distort business activities. According to investigations in the field, 24.6% of business operators who were respondents in this research stated that their business activities were distorted by the local regulations issued by regional governments. This accords with the results of a Regional Autonomy Watch study of 1,025 local regulations, which showed that 30.15% of these*

mendistorsi aktivitas usaha.

had the potential to distort business activities.

6. Banyaknya perda yang bermasalah ini, terkait dengan proses perumusan perda yang kurang partisipatif. 86.4% responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Sementara dari 12% yang menyatakan dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah, 59.6% di antaranya menilai bahwa kualitas pelibatan dunia usaha dalam perumusan perda tidak baik, dan 8.1% biasa saja, dalam artian hanya sebatas ikut dalam sosialisasi ketika rancangan perda telah siap untuk disahkan.
 7. Hasil pemeringkatan berdasarkan faktor sosial politik menunjukkan bahwa kondisi sosial politik di tahun 2004 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2003. Secara rata-rata kondisi sosial politik kabupaten sedikit lebih baik dibandingkan dengan daerah kota.
 8. Secara umum kondisi keamanan daerah-daerah di Indonesia, kondusif untuk kegiatan investasi. Hal ini dinyatakan oleh 92% responden pelaku usaha yang menyatakan bahwa kondisi keamanan di daerah mereka melakukan usaha aman untuk kegiatan investasi, dan hanya 7.4% yang menyatakan mengalami gangguan keamanan dalam usaha mereka. Dari para pelaku usaha yang menyatakan mengalami gangguan keamanan diketahui bahwa gangguan keamanan yang biasa dialami oleh para pelaku usaha diantaranya adalah : pencurian di lokasi usaha (25% responden); penghadangan di jalan (9%); perusakan asset (7.9%); dan penjarahan (3.1%).
 9. Khusus untuk indikator kondisi politik daerah, di tahun 2004 mengalami sedikit guncangan, dimana terjadi peningkatan suhu politik di berbagai daerah. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislative secara langsung. Dari penelusuran penelitian lapangan, 15.6% pelaku usaha menyatakan bahwa aktivitas usaha
6. *This large number of problematic local regulations is related to the lack of public participation in the process of their formulation. 86.4% of respondents said that they were never involved in the formulation of regional policies. And of the 12% who said that they were so involved, 59.6% felt that the quality of involvement of the business community in formulation of local regulations was poor, while 8.1% said it was just average, meaning that their involvement was limited to receiving information after the draft regulations were already about to be ratified.*
 7. *The rankings for the social-political factor showed that social-political conditions in 2004 were relatively better than in 2003. On average, social-political conditions in the regencies were slightly better than in cities.*
 8. *Overall, security conditions in the regions of Indonesia are conducive for investment activity. This was the perception of 92% of business operator respondents, who said that the security conditions in the regions where they conduct their business activities were safe for investment activities, while only 7.4% stated that they had experienced security disturbances in their businesses. From those business operators who said they had experienced security disturbances, it was found that the problems they experienced included thefts at the place of business (25% of respondents), robberies on the road (9%), damage to assets/ vandalism (7.9%), and looting (3.1%).*
 9. *In the indicator of regional political conditions, there was some volatility during 2004 as the political temperature rose in many regions. This was related to the "festival of democracy": legislative elections at all levels and Indonesia's first-ever direct presidential elections. Investigations in the field showed that 15.6% of business operators stated that their business activities were disrupted*

mereka terganggu oleh kondisi politik di daerah. Sebanyak 7% pelaku usaha juga menyatakan bahwa hubungan eksekutif dan legislative yang tidak harmonis di sejumlah daerah, telah menghambat pelayanan birokrasi terhadap pelaku usaha. Sementara 9% responden menyatakan terganggu oleh aktivitas unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kalangan selama tahun 2004.

by political conditions in their regions. Seven percent of business operators also said that unharmonious relations between the executive and legislative branches had impeded government services to business operators. And 9% of respondents stated that they were disturbed by demonstrations conducted by various groups during 2004.

10. Secara umum kondisi ekonomi daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi ekonomi daerah perkotaan di tahun 2004 mengalami perbaikan, sementara untuk daerah kabupaten justru mengalami penurunan. Mayoritas daerah kota berada pada peringkat A dan B, dan tidak satupun kota yang berada pada peringkat E, sementara daerah kabupaten lebih banyak pada peringkat D dan E.

10. Overall, economic conditions in cities are better than in regencies. Economic conditions in cities showed improvement during 2004; in contrast, they declined in regencies. A majority of cities were ranked in clusters A and B, and no city was ranked in cluster E, whereas most regencies were ranked in clusters D and E.

11. Rata-rata PDRB perkapita kota sebesar Rp. 11,42 Juta, sedangkan kabupaten hanya sebesar Rp.5,25 Juta. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi kota sebesar 4.9%, sementara kabupaten hanya 2.3%. Hal ini penyebab peringkat faktor ekonomi kota lebih baik dibandingkan kabupaten.

11. The average per capita GDRP in cities was Rp. 11.42 Milion, while in regencies it was only Rp.5.25 Milion. The average rate of economic growth in cities was 4.9%, and in regencies only 2.3%. For this reason, the ranking for economic factors were higher for cities than for regencies.

12. Kondisi ketenagakerjaan daerah perkotaan juga lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Berdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, daerah kota lebih banyak yang menempati peringkat A dan B, dibandingkan dengan daerah kabupaten.

12. Labor conditions in urban regions are also better than in regencies. In the Labor and Productivity factor, more cities than regencies were ranked A and B.

13. Yang menyebabkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten adalah, terbatasnya lapangan kerja di pedesaan mendorong perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Sementara kegiatan ekonomi kota menuntut tenaga kerjanya lebih produktif daripada di pedesaan.

13. One reason why the quality and availability of the labor force in cities is better than in regencies is that the lack of job opportunities in rural regions encourages labor migration from these regions to the cities. Likewise, the economic activities in cities require a more productive work force than is needed in rural areas.

14. Daerah-daerah yang berada di pusat kegiatan

14. Regions located in and near the centers of economic

ekonomi dan industri dan sekitarnya mendominasi peringkat atas berdasarkan faktor infrastruktur fisik. Daerah-daerah ini memperoleh manfaat dari efek aglomerasi dengan *sharing* infrastruktur antar daerah yang saling berdekatan.

and industrial activity dominated the top rankings for the physical infrastructure factor. These regions reaped the benefit of the agglomeration effect by sharing infrastructure with neighboring regions. Locations on Java and Bali benefited from high investment levels during the New Order era that continue to provide them with better infrastructure than the outer areas.

15. Kota sebagai konsentrasi penduduk dengan aktivitas ekonomi yang kompleks, menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Hanya ada 3 daerah kota yang berada pada kelompok peringkat E, yakni Kota Bengkulu, Kota Jayapura dan Kota Sorong. Dengan demikian secara rata-rata peringkat berdasarkan faktor infrastruktur fisik daerah kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten.

15. *Cities, as concentrations of population with complex economic activities, require the availability of better and more complete support infrastructure than is needed in regencies. Only three cities fell into ranking cluster E: Bengkulu, Jayapura, and Sorong. Thus, on average, the rankings for the physical infrastructure factor for cities were better than those for regencies.*

16. Secara keseluruhan, prosentase Kota yang mengalami peningkatan peringkat lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten. Demikian juga sebaliknya, prosentase Kota yang mengalami penurunan peringkat lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten.

16. *Overall, the percentage of cities experiencing improvements in their rankings was higher than for regencies. Similarly, the percentage of cities experiencing declines in their rankings was lower than for regencies.*

17. Ada 16 daerah (8 kota dan 8 kabupaten) yang mengalami lonjakan peringkat secara drastic yaitu dari peringkat C ke peringkat A. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan oleh ke-16 pemerintah daerah selama setahun terakhir, oleh para penerima jasa layanan - dalam hal ini para pelaku usaha - telah dirasakan perbaikannya secara signifikan. Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan Kota Pare-Pare di Sulawesi Selatan memperbaiki kualitas pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap. Sistem pelayanan satu atap di Kab. Kudus merupakan contoh yang baik dalam proses pelayanan perizinan usaha yang dapat ditiru oleh kabupaten / kota lainnya. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

17. *Sixteen regions (eight cities and eight regencies) experienced dramatic leaps in their rankings from C to A. This indicates that the efforts to improve public services undertaken by these sixteen regional governments over the past year have led to significant improvements as felt by the recipients of these services, in this case business operators. The regencies and cities are among others Kudus Regency of Central Java and Pare Pare of South Sulawesi that improved their government services quality in business licensing process through the implementation of one-stop-service (OSS). In case of Kudus for example, having learned better service in business licensing process through the implementation of OSS in other regencies/cities, one of the senior officer (now become the head of OSS Office) were success in convincing the Regent to replicate OSS in Kudus by giving full authority*

Terpadu (PMPPT) di Kab. Kudus dikepalai oleh eselon satu yang mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat. Pada kasus ini kemauan baik dari aparat pelayanan publik dan didukung penuh dinas-dinas terkait merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan pelayanan terpadu di Kab. Kudus.

B. SARAN

1. Walaupun kondisi kelembagaan secara rata-rata mengalami perbaikan namun perlu kiranya daerah-daerah terus meningkatkan kinerja kelembagaannya untuk mendorong iklim usaha yang lebih kondusif lagi.
2. Perbaikan pelayanan publik perlu dilakukan oleh daerah-daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima, mudah, murah dan cepat yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana tuntutan dunia usaha. Pembentukan pelayanan birokrasi pelayanan publik dengan sistem *one stop service* yang memberi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha perlu direplikasikan di daerah-daerah otonom lainnya.
3. Daerah-daerah perlu mengenali faktor-faktor kelemahan dalam menarik investasi di daerahnya, agar dapat dilakukan perbaikan. Selain itu juga perlu dilakukan penelusuran lebih dalam faktor-faktor, variabel, atau indikator yang menjadi kekuatan dari daerah lainnya, untuk dikembangkan di daerahnya dalam rangka meningkatkan daya tarik investasinya.
4. Pelibatan dunia usaha dan *stakeholders* lainnya dalam setiap perumusan kebijakan publik merupakan syarat mutlak agar tercipta sebuah pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta terwujudnya kebijakan publik yang

to the OSS office to accept or reject the application of business permit. In this case, the initial initiative from civil servant became the most significant factor to realize the implementation of OSS; on the other hand, the strong political back-up from the Regent switched the initial resistance of other service office (dinas) to be full support of this OSS implementation.

B. RECOMMENDATIONS

1. *Although improvements have been seen in governance indicators, regional governments still need to continue to improve their institutional performance in order to promote an even more conducive climate for business.*
2. *Local governments need to upgrade their service standards in order to improve the quality of government services to the business community, so as to provide top-rate, simple, inexpensive, and speedy services in line with the business community's need for effectiveness and efficiency. The public service centers using the one-stop service system, which provides ease in business permitting services, need to be replicated in other autonomous regions.*
3. *Local governments need to recognize the factor/s in which they are weak in attracting investment so that they can make improvements in these areas. Regions also need to carry out more in-depth studies of the factors, variables, and indicators of this study that are the strengths of other regions, so that these can be developed in their own regions in order to improve their investment attractiveness.*
4. *Positive practices in the conduct of good governance that are employed in other regions, such as transparency and public participation, need to be replicated and developed in each region in line with local characteristics.*

berkualitas dan dapat diterima oleh setiap pihak. Praktik-praktik positif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh daerah lainnya, seperti transparansi dan partisipasi publik perlu direplikasikan dan dikembangkan di daerahnya sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerahnya.

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak harus dilakukan dengan menggenjot PAD dengan membuat berbagai pungutan daerah yang justru malah akan mendistorsi kegiatan usaha. Peningkatan kapasitas fiskal dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan mendorong masuknya investasi yang akan mendatangkan *multiplier effect*, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah perlu dilakukan kerjasama antar daerah dan membentuk iklim investasi yang mencakup kawasan tertentu. Keuntungan dari kerjasama antar daerah ini adalah dapat memperoleh efek aglomerasi yang salah satunya adalah *sharing* infrastruktur, *sharing* informasi dan keterkaitan ekonomi antar daerah.
7. Perbaikan sarana fisik dan pembangunan infrastruktur baru sebagai pendukung kegiatan usaha mutlak untuk terus dilakukan, mengingat bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini mampu mendorong tumbuhnya aktivitas usaha baru dan mendatangkan *multiplier effect* yang besar.
8. Mengingat bahwa sebagian besar daerah yang memperoleh peringkat tinggi adalah daerah-daerah yang berada di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan

The involvement of the business community and other stakeholders in formulation of public policy is an absolute prerequisite for the creation of accountable and transparent government and of high-quality public policies that are acceptable to all.

5. *Local government should be aware that boosting regionally-generated revenue through various types of local levies can distort business activities. Increased revenue should preferably be obtained by encouraging the entry of new investment which will bring it a multiplier effect that improves public welfare. The central government should reconsider current policy on land tax, which continues to accrue to the central government. Property tax is the primary source of local government revenue in most other countries.*
6. *To improve their investment attractiveness, regions need to engage in inter-regional cooperation and create an investment climate that encompasses a larger area. One advantage of inter-regional cooperation is the agglomeration effect, leading to sharing of infrastructure, sharing of information, and economic interrelationships between the regions concerned. Province governments can play a more active role in promoting cooperation. Special attention should be paid to removing barriers to domestic trade.*
7. *Improvements to physical infrastructure and construction of new infrastructure as the support for business activities are essential, given that the availability and quality of physical infrastructure promotes growth in new business activities and brings with it a strong multiplier effect.*
8. *As most of the regions that achieved high rankings are regions that are located in or near centers of economic growth, new centers of economic growth need to be developed, of the more developed islands of Java and Bali.*

ekonomi baru, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan tertentu secara terpadu. Upaya pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat terwujud dengan baik apabila beberapa rekomendasi di atas dijalankan secara konsisten.

Lampiran 1 : Statistik Daerah Penelitian/Statistic of Rating Area
1. Berdasarkan Propinsi, Kabupaten dan kota

NO	PROPINSI	KABUPATEN (N=161)		KOTA (N=53)		TOTAL (N=214)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sumatera Utara	8	5.0	6	11.3	14	6.5
2	Sumatera Barat	4	2.5	2	3.8	6	2.8
3	Riau	6	3.7	2	3.8	8	3.7
4	Kepulauan Riau	0	0.0	2	3.8	2	0.9
5	Jambi	5	3.1	1	1.9	6	2.8
6	Sumatera Selatan	5	3.1	1	1.9	6	2.8
7	Bangka Belitung	2	1.2	1	1.9	3	1.4
8	Bengkulu	3	1.9	1	1.9	4	1.9
9	Lampung	5	3.1	1	1.9	6	2.8
10	Banten	3	1.9	2	3.8	5	2.3
11	DKI. Jakarta	0	0.0	1	1.9	1	0.5
12	Jawa Barat	15	9.3	5	9.4	20	9.3
13	Jawa Tengah	15	9.3	4	7.5	19	8.9
14	D.I. Yogyakarta	2	1.2	1	1.9	3	1.4
15	Jawa Timur	17	10.6	6	11.3	23	10.7
16	Bali	8	5.0	1	1.9	9	4.2
17	Kalimantan Barat	5	3.1	1	1.9	6	2.8
18	Kalimantan Tengah	3	1.9	1	1.9	4	1.9
19	Kalimantan Selatan	6	3.7	1	1.9	7	3.3
20	Kalimantan Timur	6	3.7	2	3.8	8	3.7
21	Sulawesi Utara	2	1.2	2	3.8	4	1.9
22	Gorontalo	1	0.6	1	1.9	2	0.9
23	Sulawesi Tengah	5	3.1	1	1.9	6	2.8
24	Sulawesi Tenggara	2	1.2	1	1.9	3	1.4
25	Sulawesi Selatan	16	9.9	2	3.8	18	8.4
26	Nusa Tenggara Barat	4	2.5	1	1.9	5	2.3
27	Nusa Tenggara Timur	8	5.0	1	1.9	9	4.2
28	Irian Jaya Barat	3	1.9	1	1.9	4	1.9
29	Papua	2	1.2	1	1.9	3	1.4
Jumlah (Total)		161	100	53	100	214	100

1.2. Propinsi yang Tidak Terwakili

1	Nagro Aceh Darusalam
2	Maluku
3	Maluku Utara

1.3. Berdasarkan Basis Sektor Ekonomi

NO	PDRB PERKAPITA	KABUPATEN (N=161)		KOTA (N=53)		TOTAL (N=214)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perdagangan dan Jasa	97	60.2	49	92.5	146	68.2
2	Manufaktur	31	19.3	28	52.8	59	27.6
3	Manufaktur Non Migas	21	13.0	23	43.4	44	20.6
4	Pertambangan	15	9.3	1	1.9	16	7.5
5	Perkebunan dan Kehutanan	24	14.9	0	0.0	24	11.2
6	Pertanian Non Pangan (Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, & Perikanan)	54	33.5	1	1.9	55	25.7

Keterangan : Kontribusi PDRB Sektoral lebih dari 20%

1.4. Berdasarkan PDRB Perkapita

NO	PDRB PERKAPITA	KABUPATEN (N=161)		KOTA (N=53)		TOTAL (N=214)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PDRB Perkapita < 2.5 Juta	16	9.9	0	0.0	16	7.5
2	2.5 Juta <= PDRB Perkapita < 5 Juta	91	56.5	7	13.2	98	45.8
3	5 Juta <= PDRB Perkapita < 7.5 Juta	32	19.9	16	30.2	48	22.4
4	PDRB Perkapita => 7.5 Juta	22	13.7	30	56.6	52	24.3
Jumlah Keseluruhan :		161	100.00	53	100.00	214	100.0

PERINGKAT DAERAH/Rank of Region :**Lampiran 2.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Kategori Umum/***Ranking of 53 Cities Based on the Overall Score*

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Jatim	Kediri	AA	AAA
2	Jatim	Malang	C	AAA
3	Banten	Cilegon	A	AA
4	Sumbar	Sawah Lunto	A	AA
5	Gorontalo	Gorontalo	BBB	AA
6	Kaltim	Balikpapan	BB	AA
7	Jatim	Mojokerto	BB	AA
8	DKI	Jakarta	C	AA
9	Jatim	Madiun	C	AA
10	Sumsel	Palembang	C	AA
11	Sulsel	Pare-Pare	C	AA
12	Jateng	Tegal	C	AA
13	Sulsel	Makasar		AA
14	Riau	Dumai	C	A
15	Sumut	Tanjung Balai	C	A
16	Jatim	Surabaya	B	BBB
17	Sumut	Tebing Tinggi	C	BBB
18	Riau	Batam	AAA	BB
19	Jateng	Semarang	BB	BB
20	Sumbar	Padang	B	BB
21	Lampung	Bandar Lampung	C	BB
22	NTT	Kupang	C	BB
23	Sumut	Medan	C	BB
24	Riau	Pekan Baru	C	BB
25	Jatim	Probolinggo	C	BB
26	Sumut	Sibolga	C	BB
27	Banten	Tangerang	C	BB

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
28	DIY	Yogyakarta	C	BB
29	Kalbar	Pontianak		BB
30	Jateng	Surakarta	C	B
31	Sumut	Binjai	D	B
32	Jabar	Cirebon	AA	C
33	Jabar	Bandung	BB	C
34	Sulut	Bitung	C	C
35	Jabar	Bogor	C	C
36	Bali	Denpasar	C	C
37	Sultra	Kendari	C	C
38	Sulut	Manado	C	C
39	Sumut	Pematang Siantar	C	C
40	Kaltim	Samarinda	C	C
41	Jabar	Bekasi	D	C
42	NTB	Mataram	D	C
43	Babel	Pangkal Pinang	D	C
44	Jateng	Pekalongan	D	C
45	Jabar	Sukabumi	D	C
46	Kalsel	Banjarmasin		C
47	Jambi	Jambi		C
48	Papua	Jayapura		C
49	Sulteng	Palu		C
50	Papua	Sorong		C
51	Riau	Tanjung Pinang		C
52	Bengkulu	Bengkulu	D	D
53	Kalteng	Palangkaraya		D

Keterangan :

	: Mengalami peningkatan peringkat
--	-----------------------------------

	: Mengalami penurunan peringkat
--	---------------------------------

	: Tidak berubah
--	-----------------

**Lampiran 2.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Kategori Umum/
Ranking of 161 Regencies Based on the Overall Score**


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Jabar	Purwakarta	AAA	AAA
2	Kalteng	Barito Utara	AA	AA
3	Sulsel	Gowa	AA	AA
4	Jabar	Indramayu	AA	AA
5	Sulsel	Sinjai	AA	AA
6	Bali	Gianyar	A	AA
7	Sulsel	Luwu Utara	A	AA
8	Kalsel	Tabalong	A	AA
9	Bali	Badung	BBB	AA
10	Sumut	Asahan	B	AA
11	Jatim	Gresik	C	AA
12	Jabar	Karawang	C	AA
13	Jateng	Kudus	C	AA
14	Sumsel	Musi Banyuasin	C	AA
15	Sulsel	Pinrang	C	AA
16	Bali	Klungkung		AA
17	Kaltim	Bulungan	AAA	A
18	Sulteng	Banggai	AA	A
19	Jabar	Bekasi	A	A
20	Riau	Pelalawan	A	A
21	Jateng	Cilacap	C	A
22	Lampung	Lampung Barat	C	A
23	Sulsel	Majene	C	A
24	Sulsel	Jeneponto	AA	BBB
25	Sultra	Kolaka	BBB	BBB
26	Sulsel	Barro	C	BBB
27	Sumbar	Solok	C	BBB
28	Banten	Tangerang	C	BBB
29	Lampung	Way Kanan	C	BBB
30	Jabar	Bandung	D	BBB
31	Sumut	Simalungun	D	BBB
32	Jatim	Magetan	AAA	BB
33	NTT	Ende	AA	BB
34	Kaltim	Nunukan	AA	BB
35	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	AA	BB
36	Jabar	Tasikmalaya	AA	BB
37	NTT	Belu	A	BB
38	Sulsel	Bone	C	BB
39	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	D	BB
40	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	D	BB
41	Jatim	Jombang	D	BB
42	Sumut	Langkat	D	BB
43	Jabar	Kuningan	AA	B
44	Sulsel	Bantaeng	A	B
45	Jatim	Blitar	C	B
46	Sulsel	Selayar	C	B


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Jatim	Sidoarjo	C	B
48	Jateng	Magelang	D	B
49	Jateng	Pekalongan	D	B
50	Banten	Serang	D	B
51	Bali	Jembrana	AAA	C
52	Bali	Bangli	AA	C
53	Jabar	Cianjur	AA	C
54	Sulsel	Enrekang	AA	C
55	Sulut	Minahasa	AA	C
56	Sulut	Sangihe	AA	C
57	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	AA	C
58	Bali	Tabanan	AA	C
59	Jambi	Tanjung Jabung Timur	AA	C
60	Babel	Belitung	A	C
61	Kalteng	Kapuas	A	C
62	Papua	Manokwari	A	C
63	Sulsel	Tana Toraja	A	C
64	Jambi	Batanghari	BB	C
65	Kalsel	Hulu Sungai Utara	BB	C
66	Sumut	Labuhan Batu	BB	C
67	Sumsel	Lahat	BB	C
68	Sulsel	Maros	BB	C
69	Sumbar	Pesisir Selatan	BB	C
70	Jateng	Tegal	BB	C
71	NTT	Timor Tengah Selatan	BB	C
72	Babel	Bangka	C	C
73	Riau	Bengkalis	C	C
74	Kaltim	Berau	C	C
75	Bali	Buleleng	C	C
76	Jambi	Bungo	C	C
77	Jabar	Ciamis	C	C
78	Jabar	Cirebon	C	C
79	Sumut	Dairi	C	C
80	Jabar	Garut	C	C
81	Riau	Kampar	C	C
82	Bali	Karang Asem	C	C
83	Jatim	Kediri	C	C
84	Jambi	Kerinci	C	C
85	Riau	Kuantan Senggigi	C	C
86	Kaltim	Kutai Kertanegara	C	C
87	Kaltim	Kutai Timur	C	C
88	Banten	Lebak	C	C
89	Sumsel	Muara Enim	C	C
90	Kaltim	Pasir	C	C
91	Kalbar	Sambas	C	C
92	Kalbar	Sanggau	C	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	Jabar	Subang	C	C
94	Sumut	Tapanuli Utara	C	C
95	Jambi	Tebo	C	C
96	NTT	Timor Tengah Utara	C	C
97	Sulteng	Toli Toli	C	C
98	Kalteng	Barito Selatan	D	C
99	Jabar	Bogor	D	C
100	Sultra	Buton	D	C
101	Gorontalo	Gorontalo	D	C
102	DIY	Gunung Kidul	D	C
103	Riau	Indragiri Hilir	D	C
104	Jateng	Karang Anyar	D	C
105	Jateng	Kebumen	D	C
106	Jateng	Kendal	D	C
107	Kalbar	Ketapang	D	C
108	Jateng	Klaten	D	C
109	Jatim	Lamongan	D	C
110	NTB	Lombok Timur	D	C
111	Sulsel	Luwu	D	C
112	Kalbar	Pontianak	D	C
113	Jabar	Sukabumi	D	C
114	Jabar	Sumedang	D	C
115	Sulsel	Takalar	D	C
116	Sumut	Tanah Karo	D	C
117	Kalsel	Tapin	D	C
118	Jatim	Bangkalan	E	C
119	DIY	Bantul	E	C
120	Jateng	Banyumas	E	C
121	Jatim	Banyuwangi	E	C
122	NTB	Bima	E	C
123	Jatim	Bondowoso	E	C
124	Jateng	Jepara	E	C
125	Lampung	Lampung Timur	E	C
126	NTB	Lombok Barat	E	C
127	Jatim	Mojokerto	E	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Jatim	Pamekasan	E	C
129	Jatim	Pasuruan	E	C
130	Jateng	Pemalang	E	C
131	Jatim	Ponorogo	E	C
132	Jateng	Sukoharjo	E	C
133	Kalsel	Tanah Laut	E	C
134	Jatim	Tulungagung	E	C
135	Bengkulu	Bengkulu Utara		C
136	Bengkulu	Rejang Lebong		C
137	Riau	Rokan Hulu	BB	C
138	Jateng	Boyolali	C	D
139	Sulteng	Donggala	C	D
140	Sumsel	Musi Rawas	C	D
141	Sumbar	Pasaman	C	D
142	NTB	Dompus	D	D
143	Papua	Jayawijaya	D	D
144	Lampung	Lampung Utara	D	D
145	Sulteng	Morowali	D	D
146	Sumsel	Ogan Komering Ilir	D	D
147	Sulteng	Poso	D	D
148	NTT	Sumba Barat	D	D
149	Bengkulu	Bengkulu Selatan	E	D
150	Sumut	Deli Serdang	E	D
151	NTT	Flores Timur	E	D
152	Jatim	Jember	E	D
153	Lampung	Lampung Selatan	E	D
154	NTT	Ngada	E	D
155	Jatim	Situbondo		D
156	Jateng	Wonosobo		D
157	Papua	Sorong	C	E
158	Kalbar	Kapuas Hulu	D	E
159	NTT	Manggarai	D	E
160	Papua	Mimika	D	E
161	Papua	Fakfak	E	E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat


 : Tidak berubah


**Lampiran 3.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan/
Ranking of 53 Cities Based on the Institutional Score**

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Banten	Cilegon	C	AA
2	Gorontalo	Gorontalo	C	AA
3	Jatim	Kediri	C	AA
4	Jatim	Mojokerto	A	A
5	Riau	Dumai	C	A
6	Sulsel	Pare-Pare	C	A
7	Sumbar	Sawah Lunto	C	A
8	Jatim	Madiun	D	BBB
9	Jateng	Tegal	BB	BB
10	Jatim	Malang	C	BB
11	NTT	Kupang	C	BB
12	Kaltim	Balikpapan	D	BB
13	Sulsel	Makasar		BB
14	Sumut	Tebing Tinggi	BB	C
15	Lampung	Bandar Lampung	C	C
16	Jabar	Bogor	C	C
17	Bali	Denpasar	C	C
18	DKI	Jakarta	C	C
19	Sumbar	Padang	C	C
20	Riau	Pekan Baru	C	C
21	Sumut	Pematang Siantar	C	C
22	Jateng	Semarang	C	C
23	DIY	Yogyakarta	C	C
24	Sumut	Binjai	D	C
25	Sultra	Kendari	D	C
26	Jateng	Pekalongan	D	C
27	Jatim	Probolinggo	D	C

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
28	Jatim	Surabaya	D	C
29	Jateng	Surakarta	D	C
30	Sumut	Tanjung Balai	D	C
31	Jabar	Bekasi	E	C
32	Kalsel	Banjarmasin		C
33	Jambi	Jambi		C
34	Sulteng	Palu		C
35	Kalbar	Pontianak		C
36	Papua	Sorong		C
37	Jabar	Bandung	BB	D
38	Riau	Batam	C	D
39	Bengkulu	Bengkulu	C	D
40	Jabar	Cirebon	C	D
41	Sumut	Medan	C	D
42	Sumsel	Palembang	D	D
43	Kaltim	Samarinda	D	D
44	Sumut	Sibolga	D	D
45	Jabar	Sukabumi	D	D
46	Banten	Tangerang	D	D
47	Sulut	Bitung	E	D
48	NTB	Mataram	E	D
49	Babel	Pangkal Pinang	E	D
50	Papua	Jayapura		D
51	Kalteng	Palangkaraya		D
52	Sulut	Manado	C	E
53	Riau	Tanjung Pinang		E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

**Lampiran 3.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan/
Ranking of 161 Regencies Based on the Institutional Score**


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Riau	Pelalawan	AAA	AA
2	Sulteng	Banggai	AA	AA
3	Kalteng	Barito Utara	AA	AA
4	Jabar	Purwakarta	AA	AA
5	Sulsel	Sinjai	AA	AA
6	NTT	Belu	A	AA
7	Sumsel	Musi Banyuasin	BBB	AA
8	Lampung	Lampung Barat	BB	AA
9	Lampung	Way Kanan	BB	AA
10	Sumut	Asahan	C	AA
11	Sulsel	Gowa	C	AA
12	Jabar	Indramayu	C	AA
13	Sulsel	Luwu Utara	C	AA
14	Sulsel	Pinrang	C	AA
15	NTT	Ende	AA	A
16	Kalsel	Tabalong	AA	A
17	Jabar	Tasikmalaya	AA	A
18	NTT	Timor Tengah Utara	AA	A
19	Sulteng	Toli Toli	AA	A
20	Bali	Gianyar	A	A
21	Jambi	Bungo	C	A
22	Sultra	Kolaka	C	A
23	Sumbar	Solok	C	A
24	Sulsel	Jeneponto	AAA	BB
25	Kaltim	Bulungan	AA	BB
26	Jabar	Kuningan	AA	BB
27	Kaltim	Nunukan	AA	BB
28	Jambi	Tanjung Jabung Timur	AA	BB
29	Bali	Karang Asem	BB	BB
30	Sulsel	Barru	B	BB
31	NTB	Bima	C	BB
32	Jateng	Cilacap	C	BB
33	Jatim	Jombang	C	BB
34	Riau	Kampar	C	BB
35	Jambi	Kerinci	C	BB
36	Sulsel	Luwu	C	BB
37	Sulsel	Selayar	C	BB
38	Jabar	Bekasi	D	BB
39	Jabar	Bogor	D	BB
40	Sulsel	Bone	D	BB
41	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	D	BB
42	Jabar	Karawang	D	BB
43	Jateng	Kudus	D	BB
44	NTB	Lombok Barat	D	BB
45	Jateng	Magelang	D	BB
46	Sulsel	Majene	D	BB


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Jateng	Pekalongan	D	BB
48	Jabar	Sumedang	D	BB
49	Sumut	Tapanuli Utara	D	BB
50	Bali	Klungkung		BB
51	Bengkulu	Rejang Lebong		BB
52	Jambi	Batanghari	A	B
53	Bali	Badung	BB	B
54	Sumut	Dairi	B	B
55	Sulsel	Bantaeng	C	B
56	Jabar	Cianjur	AAA	C
57	Sulsel	Enrekang	AAA	C
58	Bali	Jembrana	AAA	C
59	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	AAA	C
60	Bali	Bangli	AA	C
61	Babel	Belitung	AA	C
62	Kalsel	Hulu Sungai Utara	AA	C
63	Jatim	Magetan	AA	C
64	Bali	Tabanan	AA	C
65	Sulsel	Tana Toraja	AA	C
66	NTT	Timor Tengah Selatan	AA	C
67	Jatim	Blitar	A	C
68	Papua	Manokwari	A	C
69	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	A	C
70	Riau	Rokan Hulu	A	C
71	Jambi	Tebo	A	C
72	Sumut	Labuhan Batu	BBB	C
73	Banten	Lebak	BBB	C
74	Sulut	Sangihe	BBB	C
75	Kalteng	Kapuas	BB	C
76	Kaltim	Pasir	BB	C
77	Jabar	Bandung	C	C
78	Jatim	Bangkalan	C	C
79	Kalteng	Barito Selatan	C	C
80	Riau	Bengkalis	C	C
81	Jateng	Boyolali	C	C
82	Bali	Buleleng	C	C
83	Sultra	Buton	C	C
84	Jabar	Cirebon	C	C
85	Sulteng	Donggala	C	C
86	Jabar	Garut	C	C
87	DIY	Gunung Kidul	C	C
88	Jateng	Karang Anyar	C	C
89	Jateng	Kebumen	C	C
90	Jatim	Kediri	C	C
91	Kaltim	Kutai Kertanegara	C	C
92	Kaltim	Kutai Timur	C	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	Sumsel	Lahat	C	C
94	Jatim	Lamongan	C	C
95	NTB	Lombok Timur	C	C
96	NTT	Manggarai	C	C
97	Sumsel	Muara Enim	C	C
98	Sumbar	Pesisir Selatan	C	C
99	Kalbar	Sambas	C	C
100	Banten	Serang	C	C
101	Jatim	Sidoarjo	C	C
102	NTT	Sumba Barat	C	C
103	Jateng	Tegal	C	C
104	DIY	Bantul	D	C
105	Jateng	Banyumas	D	C
106	Jatim	Banyuwangi	D	C
107	Jatim	Gresik	D	C
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	D	C
109	Papua	Jayawijaya	D	C
110	Jateng	Jepara	D	C
111	Jateng	Kendal	D	C
112	Kalbar	Ketapang	D	C
113	Riau	Kuantan Senggigi	D	C
114	Lampung	Lampung Utara	D	C
115	Sumut	Langkat	D	C
116	Jatim	Pasuruan	D	C
117	Jateng	Pemalang	D	C
118	Sulteng	Poso	D	C
119	Sumut	Simalungun	D	C
120	Jabar	Sukabumi	D	C
121	Sulsel	Takalar	D	C
122	Kalsel	Tanah Laut	D	C
123	Kalsel	Tapin	D	C
124	Jatim	Bondowoso	E	C
125	Sumut	Deli Serdang	E	C
126	NTT	Flores Timur	E	C
127	Gorontalo	Gorontalo	E	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Lampung	Lampung Timur	E	C
129	Jatim	Mojokerto	E	C
130	Jatim	Pamekasan	E	C
131	Jatim	Ponorogo	E	C
132	Kalbar	Sanggau	E	C
133	Jabar	Subang	E	C
134	Jateng	Sukoharjo	E	C
135	Jatim	Tulungagung	E	C
136	Bengkulu	Bengkulu Utara		C
137	Jateng	Wonosobo		C
138	Sumbar	Pasaman	BB	D
139	Babel	Bangka	C	D
140	NTB	Dompu	C	D
141	Riau	Indragiri Hilir	C	D
142	Jateng	Klaten	C	D
143	Sulsel	Maros	C	D
144	Banten	Tangerang	C	D
145	Kaltim	Berau	D	D
146	Papua	Fakfak	D	D
147	Papua	Mimika	D	D
148	Sulteng	Morowali	D	D
149	NTT	Ngada	D	D
150	Sumsel	Ogan Komering Ilir	D	D
151	Jatim	Jember	E	D
152	Kalbar	Pontianak	E	D
153	Sumut	Tanah Karo	E	D
154	Jatim	Situbondo		D
155	Bengkulu	Bengkulu Selatan	C	E
156	Jabar	Ciamis	C	E
157	Sulut	Minahasa	C	E
158	Sumsel	Musi Rawas	C	E
159	Papua	Sorong	C	E
160	Kalbar	Kapuas Hulu	E	E
161	Lampung	Lampung Selatan	E	E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat


 : Tidak berubah


**Lampiran 4.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik/
Ranking of 53 Cities Based on the Socio-Political Score**

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Jatim	Mojokerto	C	AA
2	Sulsel	Pare-Pare	C	AA
3	Jateng	Tegal	C	A
4	Gorontalo	Gorontalo	AA	BBB
5	Sumbar	Sawah Lunto	AA	BBB
6	Banten	Cilegon	D	BBB
7	Sumut	Tebing Tinggi	D	BBB
8	Sulut	Manado	B	BB
9	Kaltim	Balikpapan	C	BB
10	Jatim	Kediri	C	BB
11	Jatim	Madiun	C	BB
12	Sumut	Tanjung Balai	C	BB
13	Jatim	Malang	D	BB
14	Sumut	Medan	D	BB
15	Babel	Pangkal Pinang	D	BB
16	Jambi	Jambi		BB
17	Riau	Tanjung Pinang		BB
18	NTB	Mataram	C	B
19	Jateng	Pekalongan	D	B
20	Riau	Batam	BB	C
21	Lampung	Bandar Lampung	C	C
22	Jabar	Bandung	C	C
23	Sulut	Bitung	C	C
24	Jabar	Bogor	C	C
25	Jabar	Cirebon	C	C
26	Bali	Denpasar	C	C
27	Riau	Dumai	C	C

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
28	Sultra	Kendari	C	C
29	NTT	Kupang	C	C
30	Sumbar	Padang	C	C
31	Kaltim	Samarinda	C	C
32	Sumut	Sibolga	C	C
33	Jabar	Sukabumi	C	C
34	Jatim	Surabaya	C	C
35	Sumut	Binjai	D	C
36	DKI	Jakarta	D	C
37	Sumsel	Palembang	D	C
38	Riau	Pekan Baru	D	C
39	Sumut	Pematang Siantar	D	C
40	Jatim	Probolinggo	D	C
41	Jateng	Semarang	D	C
42	Jateng	Surakarta	D	C
43	DIY	Yogyakarta	D	C
44	Jabar	Bekasi	E	C
45	Kalsel	Banjarmasin		C
46	Papua	Jayapura		C
47	Sulsel	Makasar		C
48	Kalteng	Palangkaraya		C
49	Kalbar	Pontianak		C
50	Bengkulu	Bengkulu	D	D
51	Banten	Tangerang	D	D
52	Sulteng	Palu		D
53	Papua	Sorong		D

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

**Lampiran 4.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik/
Ranking of 161 Regencies Based on the Socio-Political Score**


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Jatim	Magetan	AAA	AA
2	Bali	Bangli	AA	AA
3	Sulsel	Sinjai	AA	AA
4	Jabar	Ciamis	A	AA
5	Sulsel	Majene	BBB	AA
6	Bali	Gianyar	C	AA
7	Jateng	Sukoharjo	C	AA
8	Kalsel	Tapin	C	AA
9	Jambi	Tebo	C	AA
10	Sulteng	Banggai	AA	A
11	Sulsel	Enrekang	AA	A
12	Sulsel	Jeneponto	AA	A
13	Sulut	Sangihe	AA	A
14	Jabar	Indramayu	A	A
15	Sulsel	Selayar	BBB	A
16	Lampung	Lampung Barat	BB	A
17	Sulsel	Bone	C	A
18	Sultra	Buton	C	A
19	NTB	Lombok Timur	C	A
20	Bali	Klungkung		A
21	Kalteng	Barito Utara	A	BBB
22	Sumsel	Lahat	BB	BBB
23	Lampung	Way Kanan	C	BBB
24	Sulsel	Barru	D	BBB
25	NTB	Bima	D	BBB
26	DIY	Gunung Kidul	D	BBB
27	NTT	Belu	AAA	BB
28	Jabar	Kuningan	AAA	BB
29	Kaltim	Bulungan	AA	BB
30	Sulsel	Gowa	AA	BB
31	Bali	Jembrana	AA	BB
32	Sulsel	Luwu Utara	AA	BB
33	Kaltim	Nunukan	AA	BB
34	Jabar	Subang	AA	BB
35	Sumut	Tapanuli Utara	AA	BB
36	NTT	Timor Tengah Selatan	A	BB
37	Sultra	Kolaka	BB	BB
38	Gorontalo	Gorontalo	B	BB
39	Bali	Karang Asem	B	BB
40	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	B	BB
41	Bali	Badung	C	BB
42	Bali	Buleleng	C	BB
43	Jambi	Bungo	C	BB
44	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	C	BB
45	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	C	BB
46	Jabar	Karawang	C	BB


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Jateng	Magelang	C	BB
48	Sulsel	Pinrang	C	BB
49	Jabar	Sumedang	C	BB
50	Kalsel	Tabalong	C	BB
51	Jambi	Tanjung Jabung Timur	C	BB
52	Babel	Bangka	D	BB
53	Jabar	Cirebon	D	BB
54	Jatim	Gresik	D	BB
55	Jateng	Kudus	D	BB
56	Jatim	Lamongan	D	BB
57	Sumsel	Musi Banyuasin	D	BB
58	NTT	Timor Tengah Utara	D	BB
59	Bengkulu	Bengkulu Utara		BB
60	NTT	Ende	AAA	B
61	Sumbar	Pesisir Selatan	AA	B
62	Jambi	Batanghari	BB	B
63	Babel	Belitung	BB	B
64	Jatim	Blitar	C	B
65	Sulsel	Maros	C	B
66	Sumsel	Musi Rawas	C	B
67	Kalbar	Sambas	C	B
68	Sulsel	Bantaeng	AAA	C
69	Jabar	Purwakarta	AAA	C
70	Jabar	Tasikmalaya	AAA	C
71	Riau	Kampar	AA	C
72	Kalteng	Kapuas	AA	C
73	Papua	Manokwari	AA	C
74	Sulut	Minahasa	AA	C
75	Sulsel	Tana Toraja	AA	C
76	Jateng	Tegal	AA	C
77	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	A	C
78	Jabar	Cianjur	BB	C
79	Jabar	Garut	BB	C
80	Jatim	Kediri	BB	C
81	Sumut	Asahan	C	C
82	Kalteng	Barito Selatan	C	C
83	Riau	Bengkalis	C	C
84	Jatim	Bondowoso	C	C
85	Jateng	Boyolali	C	C
86	Sumut	Dairi	C	C
87	Sulteng	Donggala	C	C
88	Kalsel	Hulu Sungai Utara	C	C
89	Riau	Indragiri Hilir	C	C
90	Papua	Jayawijaya	C	C
91	Jatim	Jombang	C	C
92	Jateng	Karang Anyar	C	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	Jateng	Kebumen	C	C
94	Jateng	Kendal	C	C
95	Jambi	Kerinci	C	C
96	Kalbar	Ketapang	C	C
97	Jateng	Klaten	C	C
98	Riau	Kuantan Senggigi	C	C
99	Kaltim	Kutai Timur	C	C
100	Lampung	Lampung Utara	C	C
101	Sumut	Langkat	C	C
102	Banten	Lebak	C	C
103	Sulsel	Luwu	C	C
104	NTT	Manggarai	C	C
105	Papua	Mimika	C	C
106	NTT	Ngada	C	C
107	Sumbar	Pasaman	C	C
108	Kaltim	Pasir	C	C
109	Riau	Pelalawan	C	C
110	Riau	Rokan Hulu	C	C
111	Kalbar	Sanggau	C	C
112	Sumut	Simalungun	C	C
113	Sumbar	Solok	C	C
114	Jabar	Sukabumi	C	C
115	NTT	Sumba Barat	C	C
116	Bali	Tabanan	C	C
117	Sulsel	Takalar	C	C
118	Sulteng	Toli Toli	C	C
119	Jatim	Tulungagung	C	C
120	Jatim	Bangkalan	D	C
121	Jatim	Banyuwangi	D	C
122	Jabar	Bekasi	D	C
123	Bengkulu	Bengkulu Selatan	D	C
124	Jabar	Bogor	D	C
125	Jateng	Cilacap	D	C
126	NTB	Dompu	D	C
127	Jatim	Jember	D	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Jateng	Jepara	D	C
129	Lampung	Lampung Selatan	D	C
130	NTB	Lombok Barat	D	C
131	Sumsel	Muara Enim	D	C
132	Sumsel	Ogan Komering Ilir	D	C
133	Jatim	Pamekasan	D	C
134	Jateng	Pekalongan	D	C
135	Jateng	Pemalang	D	C
136	Jatim	Ponorogo	D	C
137	Kalbar	Pontianak	D	C
138	Banten	Serang	D	C
139	Jatim	Sidoarjo	D	C
140	Banten	Tangerang	D	C
141	Jabar	Bandung	E	C
142	DIY	Bantul	E	C
143	Jateng	Banyumas	E	C
144	Sumut	Deli Serdang	E	C
145	NTT	Flores Timur	E	C
146	Sumut	Labuhan Batu	E	C
147	Lampung	Lampung Timur	E	C
148	Jatim	Mojokerto	E	C
149	Jatim	Pasuruan	E	C
150	Kalsel	Tanah Laut	E	C
151	Bengkulu	Rejang Lebong		C
152	Jatim	Situbondo		C
153	Jateng	Wonosobo		C
154	Papua	Sorong	BB	D
155	Papua	Fakfak	C	D
156	Kalbar	Kapuas Hulu	C	D
157	Kaltim	Berau	D	D
158	Kaltim	Kutai Kertanegara	D	D
159	Sulteng	Morowali	D	D
160	Sumut	Tanah Karo	D	D
161	Sulteng	Poso	D	E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat


 : Tidak berubah


**Lampiran 5.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/
Ranking of 53 Cities Based on the Economic Dynamism Score**

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Kaltim	Balikpapan	AAA	AAA
2	Riau	Batam	AAA	AAA
3	Sumsel	Palembang	AA	AAA
4	Riau	Pekan Baru	AA	AAA
5	Kaltim	Samarinda	AA	AAA
6	Sumut	Sibolga	A	AAA
7	Jabar	Bandung	BB	AAA
8	Sulsel	Makasar		AAA
9	Sulut	Bitung	AAA	AA
10	Jabar	Cirebon	AAA	AA
11	Sumut	Pematang Siantar	AA	AA
12	Jatim	Malang	A	AA
13	DKI	Jakarta	BBB	AA
14	Sumut	Binjai	C	AA
15	Jateng	Surakarta	C	AA
16	Sumut	Tanjung Balai	C	AA
17	NTT	Kupang	D	AA
18	Riau	Tanjung Pinang		AA
19	Banten	Cilegon	AAA	A
20	Jatim	Kediri	AAA	A
21	Jateng	Semarang	AA	A
22	Bali	Denpasar	A	A
23	Sumbar	Padang	A	A
24	Jatim	Surabaya	A	A
25	Banten	Tangerang	A	A
26	Lampung	Bandar Lampung	BBB	A
27	DIY	Yogyakarta	BB	A

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
28	Jabar	Bogor	C	A
29	Riau	Dumai	C	BBB
30	Sumut	Tebing Tinggi	C	BBB
31	Sultra	Kendari	AA	BB
32	Sumbar	Sawah Lunto	BB	BB
33	Sulut	Manado	C	BB
34	Sumut	Medan	C	BB
35	Jatim	Mojokerto	C	BB
36	Babel	Pangkal Pinang	C	BB
37	Sulsel	Pare-Pare	C	BB
38	Sulteng	Palu		BB
39	Kalbar	Pontianak		BB
40	Papua	Sorong		BB
41	Papua	Jayapura		B
42	Jabar	Bekasi	C	C
43	Bengkulu	Bengkulu	C	C
44	Gorontalo	Gorontalo	C	C
45	Jatim	Madiun	C	C
46	Jatim	Probolinggo	C	C
47	Jateng	Tegal	C	C
48	Jateng	Pekalongan	D	C
49	Jabar	Sukabumi	D	C
50	Jambi	Jambi		C
51	Kalteng	Palangkaraya		C
52	NTB	Mataram	C	D
53	Kalsel	Banjarmasin		D

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

**Lampiran 5.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/
Ranking of 161 Regencies Based on the Economic Dynamism Score**


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Sumut	Asahan	AAA	AAA
2	Sumut	Labuhan Batu	AAA	AA
3	Sumut	Dairi	BB	AA
4	Sumut	Langkat	C	AA
5	Jabar	Bekasi	AA	AA
6	Kaltim	Berau	AA	AA
7	Jateng	Cilacap	AA	AA
8	Kaltim	Kutai Timur	AA	AA
9	Jabar	Purwakarta	AA	AA
10	Kalsel	Tabalong	AA	AA
11	Jatim	Gresik	A	A
12	Jatim	Sidoarjo	BB	A
13	Bali	Badung	BBB	BBB
14	Banten	Tangerang	C	BBB
15	Sulsel	Luwu Utara	AA	BB
16	Sulteng	Morowali	AA	BB
17	Sumut	Tanah Karo	AA	BB
18	Sulteng	Toli Toli	AA	BB
19	Kalteng	Barito Utara	A	BB
20	Sulut	Minahasa	BBB	BB
21	Kaltim	Bulungan	BB	BB
22	Jateng	Kudus	BB	BB
23	Riau	Pelalawan	BB	BB
24	Sulsel	Maros	B	BB
25	Sumsel	Musi Banyuasin	B	BB
26	Riau	Rokan Hulu	B	BB
27	Kalsel	Tapin	C	BB
28	Kaltim	Pasir	AA	B
29	Riau	Kuantan Senggigi	BB	B
30	Lampung	Lampung Timur	BB	B
31	Kaltim	Nunukan	BB	B
32	Kaltim	Kutai Kertanegara	B	B
33	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	C	B
34	Jabar	Karawang	D	B
35	Jabar	Indramayu	AA	C
36	Jambi	Tanjung Jabung Timur	AA	C
37	Sulteng	Banggai	BB	C
38	Sumsel	Muara Enim	B	C
39	Kalbar	Sanggau	B	C
40	Jabar	Bandung	C	C
41	Babel	Bangka	C	C
42	Kalteng	Barito Selatan	C	C
43	Babel	Belitung	C	C
44	Riau	Bengkalis	C	C
45	Jambi	Bungo	C	C
46	Jabar	Ciamis	C	C


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Sumut	Deli Serdang	C	C
48	Bali	Gianyar	C	C
49	DIY	Gunung Kidul	C	C
50	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	C	C
51	Riau	Indragiri Hilir	C	C
52	Papua	Jayawijaya	C	C
53	Bali	Jembrana	C	C
54	Kalteng	Kapuas	C	C
55	Jateng	Karang Anyar	C	C
56	Jambi	Kerinci	C	C
57	Lampung	Lampung Barat	C	C
58	Sumbar	Pesisir Selatan	C	C
59	Sulsel	Pinrang	C	C
60	Kalbar	Pontianak	C	C
61	Sulut	Sangihe	C	C
62	Sumut	Simalungun	C	C
63	Papua	Sorong	C	C
64	Sulsel	Bantaeng	D	C
65	DIY	Bantul	D	C
66	Jatim	Banyuwangi	D	C
67	NTT	Ende	D	C
68	Sulsel	Enrekang	D	C
69	Jatim	Mojokerto	D	C
70	NTT	Ngada	D	C
71	Jabar	Sukabumi	D	C
72	Jateng	Sukoharjo	D	C
73	Kalsel	Tanah Laut	D	C
74	Sumut	Tapanuli Utara	D	C
75	Jabar	Tasikmalaya	D	C
76	NTT	Timor Tengah Selatan	D	C
77	Papua	Fakfak	E	C
78	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	E	C
79	Bali	Klungkung		C
80	Papua	Manokwari	B	D
81	Sulteng	Donggala	C	D
82	Sulsel	Gowa	C	D
83	Kalbar	Kapuas Hulu	C	D
84	Sultra	Kolaka	C	D
85	Sulsel	Majene	C	D
86	Bali	Tabanan	C	D
87	Sulsel	Tana Toraja	C	D
88	Jambi	Tebo	C	D
89	Jatim	Tulungagung	C	D
90	Jatim	Bangkalan	D	D
91	Bali	Bangli	D	D
92	Sulsel	Barru	D	D

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	Jambi	Batanghari	D	D
94	Bengkulu	Bengkulu Selatan	D	D
95	Jatim	Blitar	D	D
96	Jabar	Bogor	D	D
97	Jateng	Boyolali	D	D
98	Bali	Buleleng	D	D
99	Jabar	Cianjur	D	D
100	Jatim	Jember	D	D
101	Sulsel	Jeneponto	D	D
102	Jateng	Jepara	D	D
103	Jatim	Jombang	D	D
104	Riau	Kampar	D	D
105	Jatim	Kediri	D	D
106	Jateng	Kendal	D	D
107	Jateng	Klaten	D	D
108	Jabar	Kuningan	D	D
109	Sumsel	Lahat	D	D
110	Lampung	Lampung Selatan	D	D
111	ampung	Lampung Utara	D	D
112	Banten	Lebak	D	D
113	Sulsel	Luwu	D	D
114	Jateng	Magelang	D	D
115	Jatim	Magetan	D	D
116	Papua	Mimika	D	D
117	Sumsel	Ogan Komering Ilir	D	D
118	Sumbar	Pasaman	D	D
119	Jateng	Pekalongan	D	D
120	Jateng	Pemalang	D	D
121	Kalbar	Sambas	D	D
122	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	D	D
123	Banten	Serang	D	D
124	Sulsel	Sinjai	D	D
125	Sumbar	Solok	D	D
126	Jabar	Subang	D	D
127	Jabar	Sumedang	D	D

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Sulsel	Takalar	D	D
129	NTT	Timor Tengah Utara	D	D
130	Lampung	Way Kanan	D	D
131	Jateng	Banyumas	E	D
132	NTT	Belu	E	D
133	Sulsel	Bone	E	D
134	Jabar	Cirebon	E	D
135	Jabar	Garut	E	D
136	Jatim	Pasuruan	E	D
137	NTT	Sumba Barat	E	D
138	Bengkulu	Rejang Lebong		D
139	Jatim	Situbondo		D
140	Kalsel	Hulu Sungai Utara	BBB	E
141	NTB	Dompu	C	E
142	NTB	Lombok Timur	C	E
143	Bali	Karang Asem	D	E
144	Kalbar	Ketapang	D	E
145	Jatim	Lamongan	D	E
146	NTT	Manggarai	D	E
147	Sumsel	Musi Rawas	D	E
148	Sulteng	Poso	D	E
149	Sulsel	Selayar	D	E
150	NTB	Bima	E	E
151	Jatim	Bondowoso	E	E
152	Sultra	Buton	E	E
153	NTT	Flores Timur	E	E
154	Gorontalo	Gorontalo	E	E
155	Jateng	Kebumen	E	E
156	NTB	Lombok Barat	E	E
157	Jatim	Pamekasan	E	E
158	Jatim	Ponorogo	E	E
159	Jateng	Tegal	E	E
160	Bengkulu	Bengkulu Utara		E
161	Jateng	Wonosobo		E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

Lampiran 6.1 : Peringkat 53 Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/
Ranking of 53 Cities Based on the Labour & Productivity Score

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004	NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Jabar	Cirebon	AAA	AA	28	Sulsel	Pare-Pare	C	C
2	Jatim	Kediri	AAA	AA	29	Riau	Pekan Baru	C	C
3	Sumsel	Palembang	AAA	AA	30	Sumut	Pematang Siantar	C	C
4	Lampung	Bandar Lampung	AA	AA	31	Jabar	Sukabumi	C	C
5	Jatim	Surabaya	A	AA	32	Jateng	Tegal	C	C
6	Sumut	Binjai	BB	AA	33	DIY	Yogyakarta	C	C
7	Sumbar	Padang	BB	AA	34	Jateng	Surakarta	D	C
8	DKI	Jakarta	C	AA	35	Kalsel	Banjarmasin		C
9	Jatim	Malang	C	AA	36	Jambi	Jambi		C
10	Kaltim	Samarinda	C	AA	37	Papua	Jayapura		C
11	Sumbar	Sawah Lunto	C	AA	38	Kalteng	Palangkaraya		C
12	Banten	Tangerang	C	AA	39	Sulteng	Palu		C
13	Sumut	Sibolga	D	AA	40	Riau	Tanjung Pinang		C
14	Papua	Sorong		AA	41	Kaltim	Balikpapan	AA	D
15	Sulsel	Makasar		A	42	Riau	Batam	AA	D
16	Jatim	Madiun	C	BBB	43	Banten	Cilegon	AA	D
17	Bengkulu	Bengkulu	C	BB	44	Sumut	Tanjung Balai	AA	D
18	NTT	Kupang	D	BB	45	Gorontalo	Gorontalo	BBB	D
19	Sultra	Kendari	A	C	46	Jabar	Bekasi	C	D
20	Jatim	Probolinggo	A	C	47	Bali	Denpasar	C	D
21	Jateng	Semarang	BB	C	48	Sulut	Manado	C	D
22	Jabar	Bandung	C	C	49	NTB	Mataram	C	D
23	Sulut	Bitung	C	C	50	Jatim	Mojokerto	C	D
24	Jabar	Bogor	C	C	51	Jateng	Pekalongan	C	D
25	Riau	Dumai	C	C	52	Sumut	Tebing Tinggi	C	D
26	Sumut	Medan	C	C	53	Kalbar	Pontianak		D
27	Babel	Pangkal Pinang	C	C					

Keterangan :

- : Mengalami peningkatan peringkat
 : Mengalami penurunan peringkat
 : Tidak berubah

**Lampiran 6.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas/
Ranking of 161 Regencies Based on the Labour & Productivity Score**


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Jatim	Gresik	C	AAA
2	Sultra	Kolaka	AA	AA
3	Sumsel	Lahat	AA	AA
4	Kalbar	Sanggau	AA	AA
5	Sumbar	Solok	AA	AA
6	Jambi	Batanghari	A	AA
7	Jabar	Bandung	BBB	AA
8	Banten	Tangerang	BBB	AA
9	Babel	Belitung	BB	AA
10	Riau	Bengkalis	BB	AA
11	Sumut	Langkat	B	AA
12	Kalbar	Pontianak	B	AA
13	Bali	Badung	C	AA
14	Kalteng	Barito Selatan	C	AA
15	Lampung	Lampung Timur	C	AA
16	Sumsel	Musi Rawas	C	AA
17	Sulteng	Poso	C	AA
18	Banten	Serang	C	AA
19	Sumut	Simalungun	C	AA
20	Sumut	Tanah Karo	C	AA
21	Lampung	Lampung Selatan	D	AA
22	Sumsel	Musi Banyuasin	D	AA
23	Jatim	Banyuwangi	E	AA
24	Bengkulu	Bengkulu Selatan	E	AA
25	Bengkulu	Bengkulu Utara		AA
26	Bali	Klungkung		AA
27	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	AAA	A
28	Kaltim	Bulungan	AA	A
29	Riau	Pelalawan	C	A
30	Jabar	Purwakarta	C	A
31	Sulsel	Bantaeng	D	A
32	Jateng	Kendal	D	A
33	Sulsel	Barru	A	BB
34	Sulsel	Takalar	B	BB
35	Lampung	Lampung Utara	C	BB
36	Jabar	Garut	D	BB
37	Sumbar	Pesisir Selatan	AAA	C
38	Sumut	Asahan	AA	C
39	Jateng	Cilacap	AA	C
40	Sumut	Labuhan Batu	AA	C
41	Sulsel	Maros	AA	C
42	Sulsel	Gowa	A	C
43	Sulsel	Bone	BB	C
44	Sumut	Deli Serdang	BB	C
45	Jabar	Karawang	BB	C
46	Jambi	Tanjung Jabung Timur	BB	C


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Jabar	Bogor	B	C
48	Jabar	Cirebon	B	C
49	Kalteng	Barito Utara	C	C
50	Sulteng	Donggala	C	C
51	Sulsel	Enrekang	C	C
52	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	C	C
53	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	C	C
54	Jabar	Indramayu	C	C
55	Jateng	Kudus	C	C
56	Sulsel	Luwu Utara	C	C
57	Jatim	Magetan	C	C
58	Papua	Mimika	C	C
59	Sumbar	Pasaman	C	C
60	Jateng	Pekalongan	C	C
61	Sulsel	Pinrang	C	C
62	Jatim	Sidoarjo	C	C
63	Jabar	Subang	C	C
64	Sulsel	Tana Toraja	C	C
65	Jambi	Tebo	C	C
66	Lampung	Way Kanan	C	C
67	Jateng	Banyumas	D	C
68	NTB	Bima	D	C
69	NTT	Ende	D	C
70	Riau	Indragiri Hilir	D	C
71	Jatim	Jember	D	C
72	Sulsel	Jeneponto	D	C
73	Jatim	Jombang	D	C
74	Riau	Kampar	D	C
75	Jambi	Kerinci	D	C
76	Jatim	Lamongan	D	C
77	Lampung	Lampung Barat	D	C
78	Sulsel	Luwu	D	C
79	Sulsel	Majene	D	C
80	Jatim	Pamekasan	D	C
81	Jatim	Ponorogo	D	C
82	Sulsel	Selayar	D	C
83	Jabar	Sukabumi	D	C
84	Jateng	Sukoharjo	D	C
85	Kalsel	Tabalong	D	C
86	Jateng	Tegal	D	C
87	Jatim	Tulungagung	D	C
88	Sulteng	Morowali	D	C
89	Jatim	Bondowoso	E	C
90	Jabar	Ciamis	E	C
91	DIY	Gunung Kidul	E	C
92	Jateng	Kebumen	E	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	Kaltim	Kutai Timur	E	C
94	NTB	Lombok Barat	E	C
95	NTB	Lombok Timur	E	C
96	Jateng	Pemalang	E	C
97	Jabar	Tasikmalaya	E	C
98	Bengkulu	Rejang Lebong		C
99	Jatim	Situbondo		C
100	Jateng	Wonosobo		C
101	Babel	Bangka	AA	D
102	Jabar	Bekasi	AA	D
103	Papua	Sorong	BBB	D
104	Bali	Bangli	C	D
105	Bali	Buleleng	C	D
106	Sultra	Buton	C	D
107	Gorontalo	Gorontalo	C	D
108	Bali	Jembrana	C	D
109	Kalteng	Kapuas	C	D
110	Kalbar	Ketapang	C	D
111	Jateng	Klaten	C	D
112	Riau	Kuantan Senggigi	C	D
113	Kaltim	Kutai Kertanegara	C	D
114	Banten	Lebak	C	D
115	Sulut	Minahasa	C	D
116	Jatim	Mojokerto	C	D
117	Sumsel	Muara Enim	C	D
118	Riau	Rokan Hulu	C	D
119	Kalbar	Sambas	C	D
120	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	C	D
121	Jabar	Sumedang	C	D
122	Kalsel	Tanah Laut	C	D
123	Sumut	Tapanuli Utara	C	D
124	Sulteng	Banggai	D	D
125	DIY	Bantul	D	D
126	NTT	Belu	D	D
127	Kaltim	Berau	D	D

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Jateng	Boyolali	D	D
129	Jambi	Bungo	D	D
130	Jabar	Cianjur	D	D
131	NTB	Dompu	D	D
132	NTT	Flores Timur	D	D
133	Bali	Gianyar	D	D
134	Papua	Jayawijaya	D	D
135	Jateng	Karang Anyar	D	D
136	Jatim	Kediri	D	D
137	Jabar	Kuningan	D	D
138	Jateng	Magelang	D	D
139	NTT	Manggarai	D	D
140	Kaltim	Nunukan	D	D
141	Sumsel	Ogan Komering Ilir	D	D
142	Jatim	Pasuruan	D	D
143	Sulsel	Sinjai	D	D
144	Kalsel	Tapin	D	D
145	Sulteng	Toli Toli	D	D
146	Jatim	Bangkalan	E	D
147	Sumut	Dairi	E	D
148	Jateng	Jepara	E	D
149	Papua	Manokwari	E	D
150	NTT	Ngada	E	D
151	NTT	Timor Tengah Selatan	E	D
152	Kalbar	Kapuas Hulu	C	E
153	Bali	Karang Asem	C	E
154	Sulut	Sangihe	C	E
155	Bali	Tabanan	C	E
156	Kalsel	Hulu Sungai Utara	D	E
157	Jatim	Blitar	E	E
158	Papua	Fakfak	E	E
159	Kaltim	Pasir	E	E
160	NTT	Sumba Barat	E	E
161	NTT	Timor Tengah Utara	E	E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat


 : Tidak berubah


**Lampiran 7.1 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/
Ranking of 53 Cities Based on the Labour & Productivity Score**

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
1	Riau	Batam	AAA	AAA
2	DKI	Jakarta	AAA	AAA
3	Jatim	Surabaya	AAA	AAA
4	Banten	Cilegon	AA	AAA
5	Bali	Denpasar	AA	AAA
6	Sumut	Medan	A	AAA
7	Banten	Tangerang	BB	AAA
8	Jateng	Tegal	BB	AAA
9	Sulsel	Makasar		AAA
10	Jabar	Bogor	AAA	AA
11	Jatim	Probolinggo	AAA	AA
12	Jatim	Malang	AA	AA
13	Sulsel	Pare-Pare	AA	AA
14	Jateng	Semarang	AA	AA
15	Jateng	Surakarta	AA	AA
16	Jatim	Kediri	A	AA
17	Jabar	Bandung	BB	AA
18	Jatim	Mojokerto	BB	AA
19	DIY	Yogyakarta	BB	AA
20	Jabar	Bekasi	B	AA
21	Kaltim	Balikpapan	C	AA
22	Gorontalo	Gorontalo	C	AA
23	NTB	Mataram	C	AA
24	Sumsel	Palembang	C	AA
25	Jateng	Pekalongan	C	AA
26	Sumut	Tebing Tinggi	C	AA
27	Jabar	Sukabumi	C	A

NO	PROPINSI	KOTA	2003	2004
28	Riau	Pekan Baru	C	BBB
29	Riau	Dumai	C	BB
30	Jatim	Madiun	C	BB
31	Sumut	Tanjung Balai	D	BB
32	Kalbar	Pontianak		BB
33	NTT	Kupang	AA	C
34	Sumbar	Padang	AA	C
35	Jabar	Cirebon	BB	C
36	Sulut	Manado	BB	C
37	Sumut	Sibolga	BB	C
38	Lampung	Bandar Lampung	C	C
39	Sumut	Binjai	C	C
40	Sulut	Bitung	C	C
41	Sultra	Kendari	C	C
42	Sumbar	Sawah Lunto	C	C
43	Babel	Pangkal Pinang	D	C
44	Kaltim	Samarinda	E	C
45	Kalsel	Banjarmasin		C
46	Jambi	Jambi		C
47	Kalteng	Palangkaraya		C
48	Riau	Tanjung Pinang		C
49	Sumut	Pematang Siantar	C	D
50	Sulteng	Palu		D
51	Bengkulu	Bengkulu	D	E
52	Papua	Jayapura		E
53	Papua	Sorong		E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

Lampiran 7.2 : Peringkat 161 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/
Ranking of 161 Regencies Based on the Physical Infrastructure Score


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
1	Jatim	Gresik	AAA	AAA
2	Jabar	Indramayu	AA	AAA
3	Banten	Tangerang	AA	AAA
4	Jabar	Karawang	BB	AAA
5	Jateng	Kudus	C	AAA
6	Jatim	Mojokerto	C	AAA
7	Jatim	Pasuruan	C	AAA
8	Jabar	Bekasi	AAA	AA
9	Bali	Gianyar	AAA	AA
10	Sulsel	Gowa	AA	AA
11	Jateng	Pekalongan	AA	AA
12	Bali	Tabanan	AA	AA
13	Jateng	Klaten	A	AA
14	Bali	Badung	BB	AA
15	Jatim	Jombang	BB	AA
16	Banten	Serang	BB	AA
17	Bali	Jembrana	B	AA
18	Jatim	Banyuwangi	C	AA
19	Jatim	Blitar	C	AA
20	Jateng	Jepara	C	AA
21	Jatim	Lamongan	C	AA
22	Jabar	Sukabumi	C	AA
23	Bali	Klungkung		AA
24	Jabar	Cirebon	BB	A
25	DIY	Bantul	C	A
26	Sulsel	Takalar	C	A
27	Jabar	Bogor	BBB	BBB
28	Jabar	Purwakarta	BBB	BBB
29	Kalsel	Tanah Laut	C	BBB
30	Jabar	Kuningan	AA	BB
31	Sulsel	Pinrang	BBB	BB
32	Jateng	Cilacap	C	BB
33	Jateng	Magelang	C	BB
34	Sulsel	Majene	C	BB
35	Jatim	Sidoarjo	C	BB
36	Jabar	Subang	C	BB
37	Jatim	Kediri	D	BB
38	Jatim	Tulungagung	D	BB
39	Jabar	Tasikmalaya	AA	B
40	Sulsel	Barru	C	B
41	Sumut	Asahan	D	B
42	Jatim	Bangkalan	D	B
43	Jateng	Tegal	AAA	C
44	Sulsel	Bantaeng	AA	C
45	Bali	Buleleng	AA	C
46	Jabar	Cianjur	AA	C


NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
47	Sulsel	Jeneponto	AA	C
48	Jatim	Magetan	AA	C
49	Sulsel	Maros	AA	C
50	Sumbar	Sawahlunto Sijunjung	AA	C
51	Sulsel	Sinjai	AA	C
52	Sulsel	Bone	A	C
53	Jateng	Kendal	A	C
54	Banten	Lebak	A	C
55	Sumbar	Solok	A	C
56	Sulteng	Banggai	BBB	C
57	Bali	Bangli	BBB	C
58	Sulsel	Enrekang	BBB	C
59	Sulut	Minahasa	BB	C
60	Jabar	Garut	B	C
61	Bali	Karang Asem	B	C
62	Jateng	Banyumas	C	C
63	Jateng	Boyolali	C	C
64	Sumut	Deli Serdang	C	C
65	Sulteng	Donggala	C	C
66	Gorontalo	Gorontalo	C	C
67	Jateng	Karang Anyar	C	C
68	Jateng	Kebumen	C	C
69	Sultra	Kolaka	C	C
70	Kaltim	Kutai Kertanegara	C	C
71	Sumsel	Lahat	C	C
72	NTB	Lombok Barat	C	C
73	Sulsel	Luwu Utara	C	C
74	Sumsel	Ogan Komering Ilir	C	C
75	Sulsel	Pangkajene & Kepulauan	C	C
76	Sulut	Sangihe	C	C
77	Jateng	Sukoharjo	C	C
78	Sumut	Tanah Karo	C	C
79	NTT	Timor Tengah Selatan	C	C
80	Jabar	Bandung	D	C
81	Kaltim	Bulungan	D	C
82	Sultra	Buton	D	C
83	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	D	C
84	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	D	C
85	Jatim	Jember	D	C
86	NTB	Lombok Timur	D	C
87	Sumsel	Musi Banyuasin	D	C
88	Jateng	Pemalang	D	C
89	Jatim	Ponorogo	D	C
90	Kalbar	Pontianak	D	C
91	Kalsel	Tabalong	D	C
92	Babel	Bangka	E	C

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
93	NTB	Bima	E	C
94	Jatim	Bondowoso	E	C
95	NTB	Dompu	E	C
96	NTT	Flores Timur	E	C
97	Sumut	Labuhan Batu	E	C
98	Lampung	Lampung Barat	E	C
99	Lampung	Lampung Selatan	E	C
100	Lampung	Lampung Timur	E	C
101	Sumut	Langkat	E	C
102	Jatim	Pamekasan	E	C
103	Sumbar	Pesisir Selatan	E	C
104	Jatim	Situbondo		C
105	Jateng	Wonosobo		C
106	Jabar	Sumedang	B	D
107	Kalteng	Barito Utara	C	D
108	NTT	Belu	C	D
109	Jabar	Ciamis	C	D
110	Sumut	Dairi	C	D
111	NTT	Ende	C	D
112	Riau	Kampar	C	D
113	Kalteng	Kapuas	C	D
114	NTT	Timor Tengah Utara	C	D
115	Babel	Belitung	D	D
116	DIY	Gunung Kidul	D	D
117	Kalsel	Hulu Sungai Utara	D	D
118	Papua	Mimika	D	D
119	Kaltim	Nunukan	D	D
120	Kaltim	Pasir	D	D
121	Sulteng	Poso	D	D
122	Papua	Jayawijaya	E	D
123	Jambi	Kerinci	E	D
124	Papua	Manokwari	E	D
125	Riau	Pelalawan	E	D
126	Sulsel	Selayar	E	D
127	Sumut	Simalungun	E	D

NO	PROPINSI	KABUPATEN	2003	2004
128	Lampung	Way Kanan	E	D
129	Bengkulu	Bengkulu Utara		D
130	Bengkulu	Rejang Lebong		D
131	Riau	Bengkalis	C	E
132	Lampung	Lampung Utara	C	E
133	Sumsel	Muara Enim	C	E
134	Sumut	Tapanuli Utara	C	E
135	Kalteng	Barito Selatan	D	E
136	Jambi	Bungo	D	E
137	Papua	Fakfak	D	E
138	Riau	Indragiri Hilir	D	E
139	Kalbar	Ketapang	D	E
140	Sulsel	Luwu	D	E
141	Sumbar	Pasaman	D	E
142	Kalbar	Sanggau	D	E
143	Papua	Sorong	D	E
144	Sulsel	Tana Toraja	D	E
145	Kalsel	Tapin	D	E
146	Jambi	Batanghari	E	E
147	Bengkulu	Bengkulu Selatan	E	E
148	Kaltim	Berau	E	E
149	Kalbar	Kapuas Hulu	E	E
150	Riau	Kuantan Senggigi	E	E
151	Kaltim	Kutai Timur	E	E
152	NTT	Manggarai	E	E
153	Sulteng	Morowali	E	E
154	Sumsel	Musi Rawas	E	E
155	NTT	Ngada	E	E
156	Riau	Rokan Hulu	E	E
157	Kalbar	Sambas	E	E
158	NTT	Sumba Barat	E	E
159	Jambi	Tanjung Jabung Timur	E	E
160	Jambi	Tebo	E	E
161	Sulteng	Toli Toli	E	E

Keterangan :

 : Mengalami peningkatan peringkat

 : Mengalami penurunan peringkat

 : Tidak berubah

Lampiran 8 : Statistik Perubahan Peringkat Kabupaten /Kota Tahun 2003 - 2004/
Statistic of Changes in Ranking

UMUM			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	5	3	2
C-A	16	8	8
A-B	10	1	9
A-C	14	1	13

SOSIAL KELEMBAGAAN			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	3	0	3
C-A	14	6	8
D-A	0	0	0
A-B	6	0	6
A-C	16	0	16
A-D	0	0	0

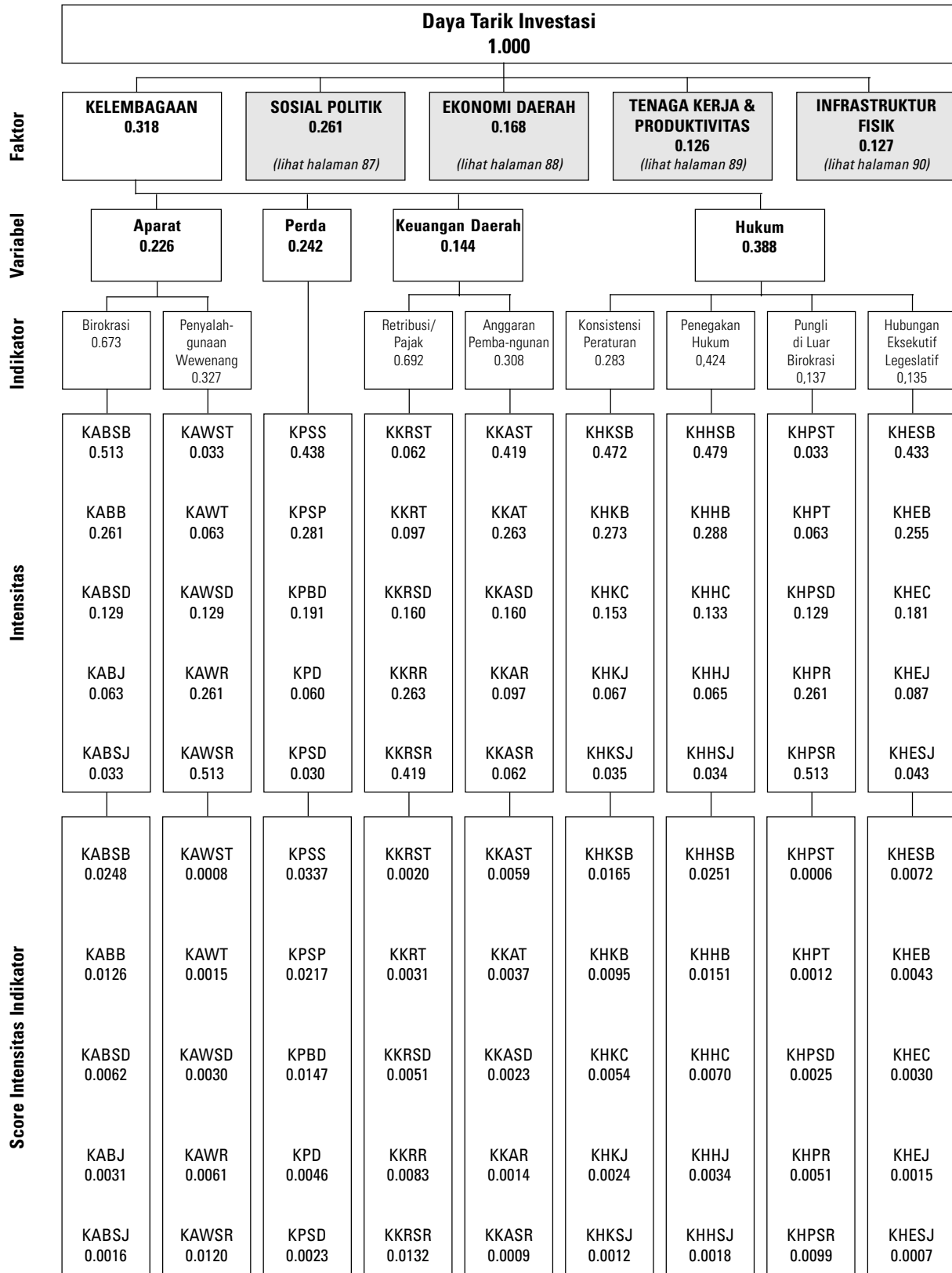
SOSIAL POLITIK			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	3	0	3
C-A	10	3	7
A-B	15	2	13
A-C	10	0	10

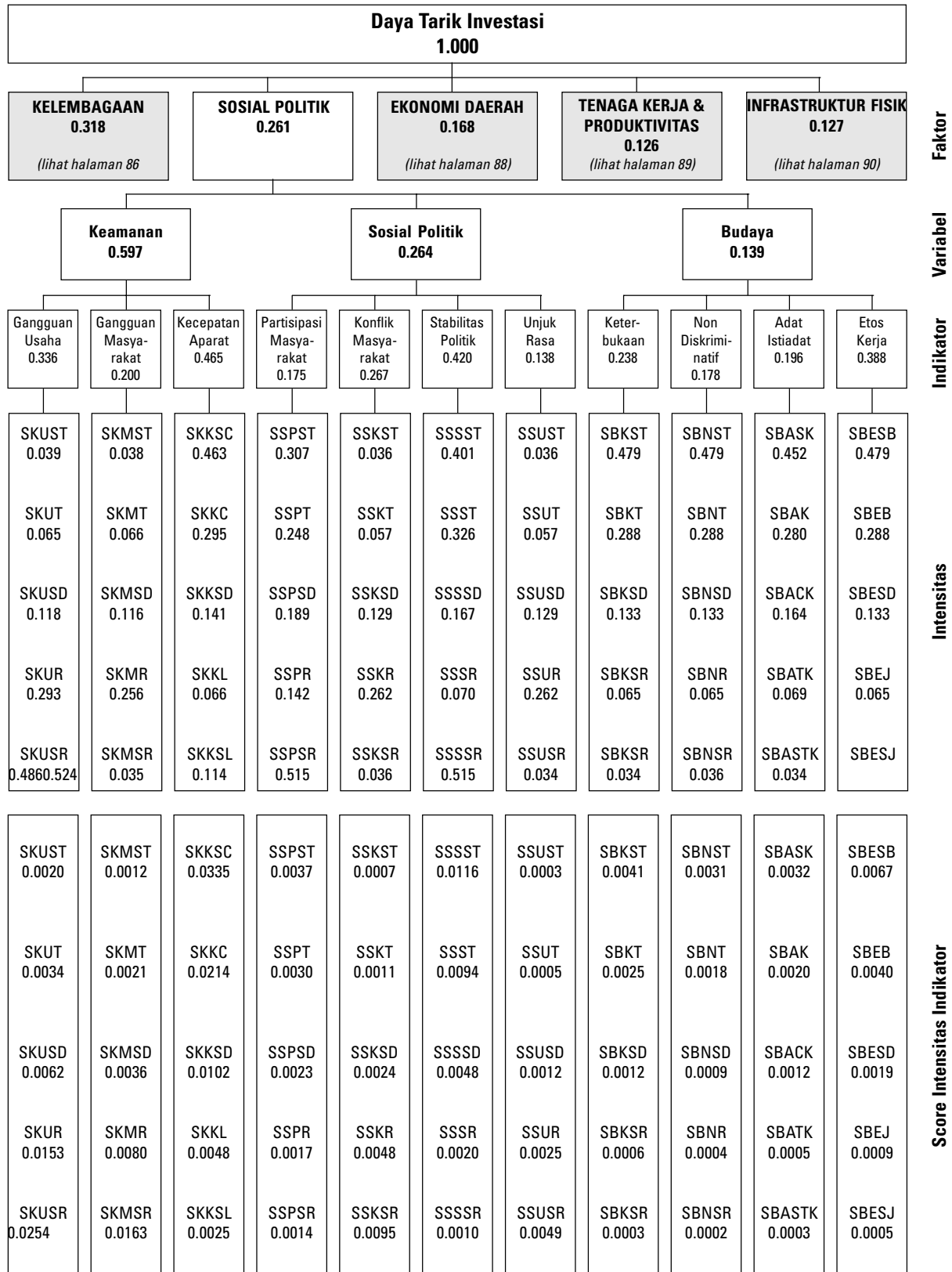
SOSIAL EKONOMI DAERAH			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	6	5	1
C-A	5	4	1
D-A	1	1	0
A-B	7	1	6
A-C	2	0	2
A-D	0	0	0

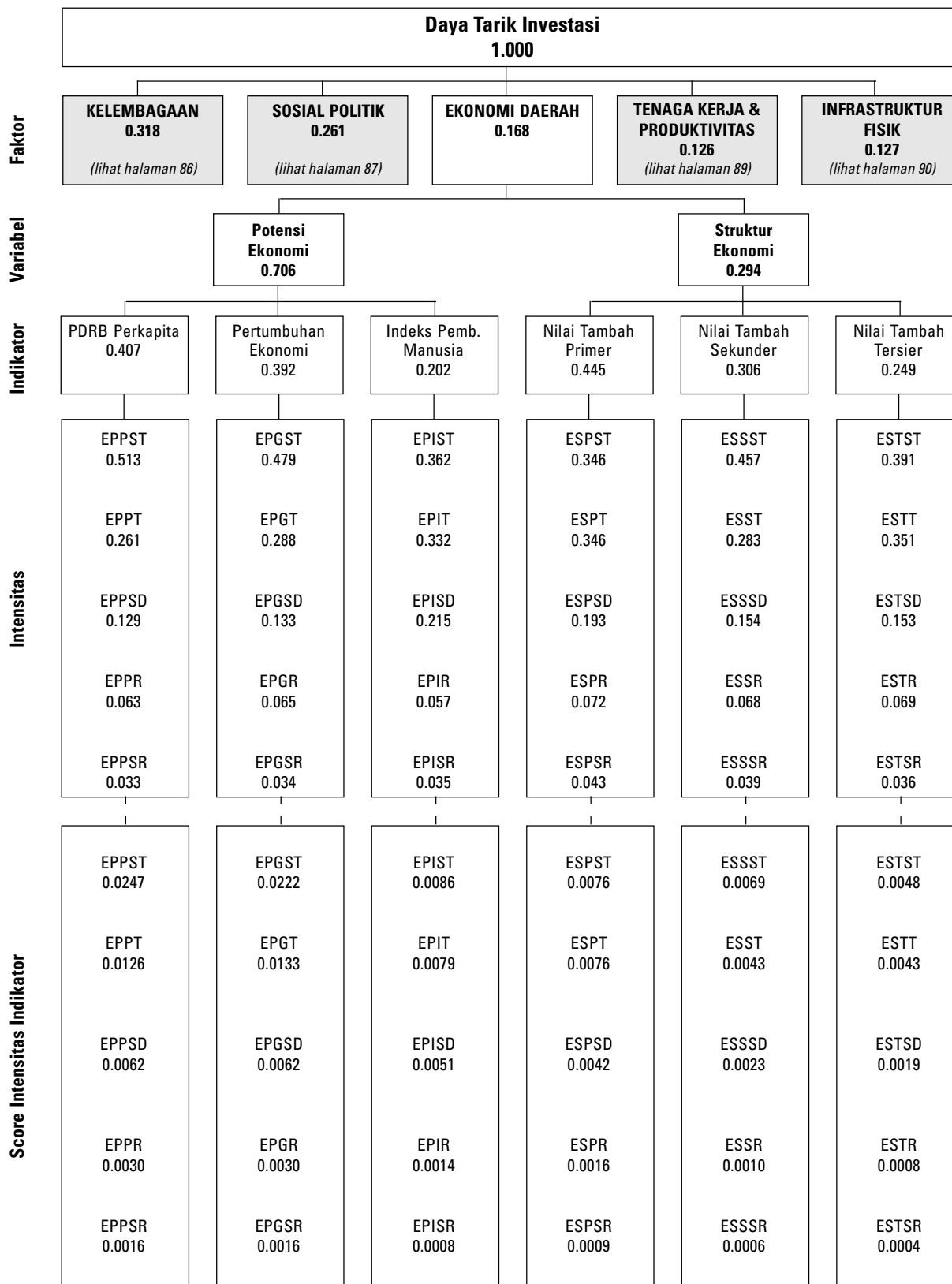
SOSIAL TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	12	6	6
B-A	8	2	6
C-A	16	5	11
D-A	5	1	4
E-A	2	0	2
A-B	1	0	1
A-C	8	2	6
A-D	6	4	2

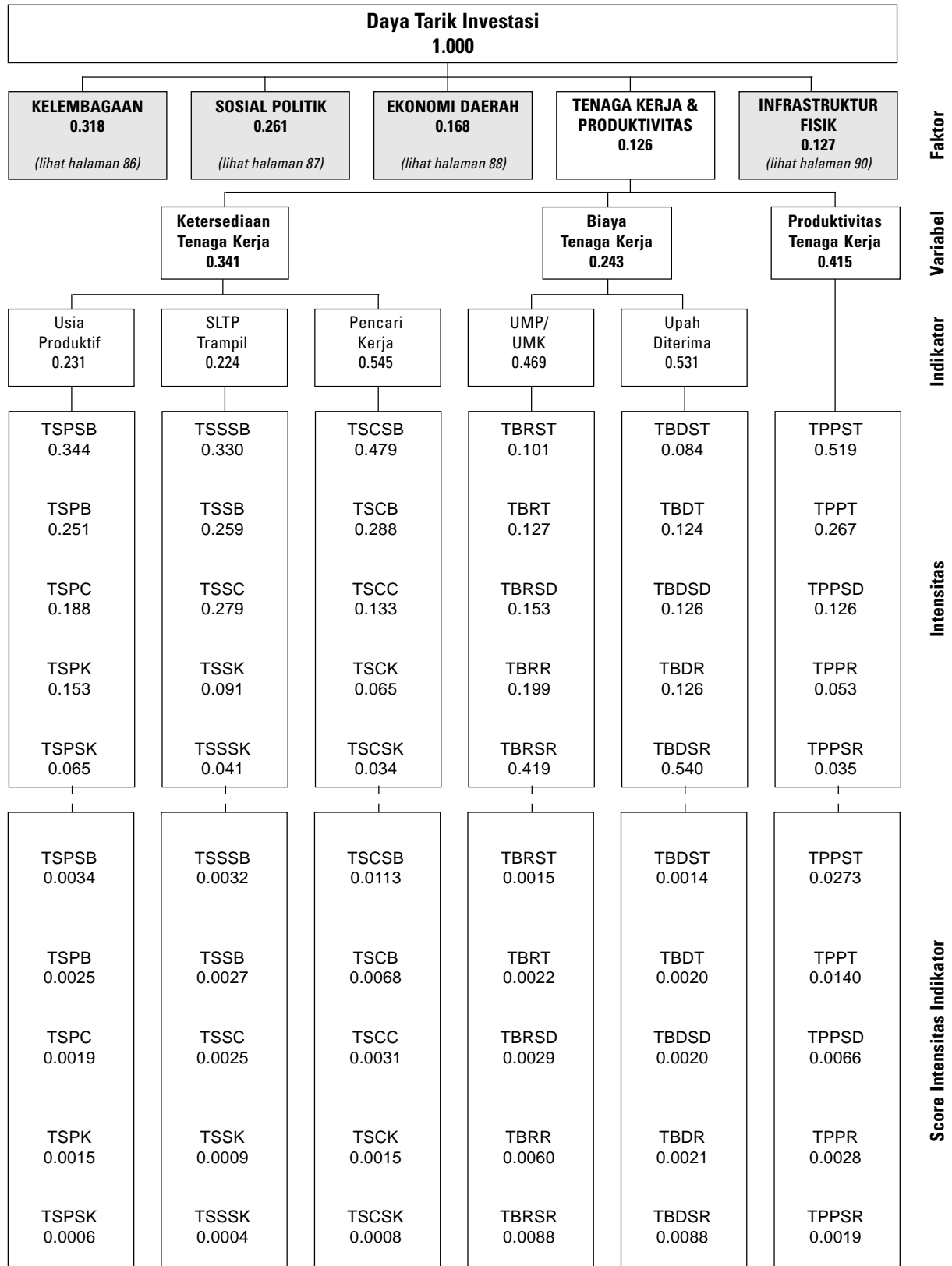
SOSIAL INFRASTRUKTUR FISIK			
	TOTAL	KOTA	KABUPATEN
B-A	12	6	6
C-A	17	7	10
D-A	0	0	0
A-B	2	0	2
A-C	15	2	13
A-D	0	0	0

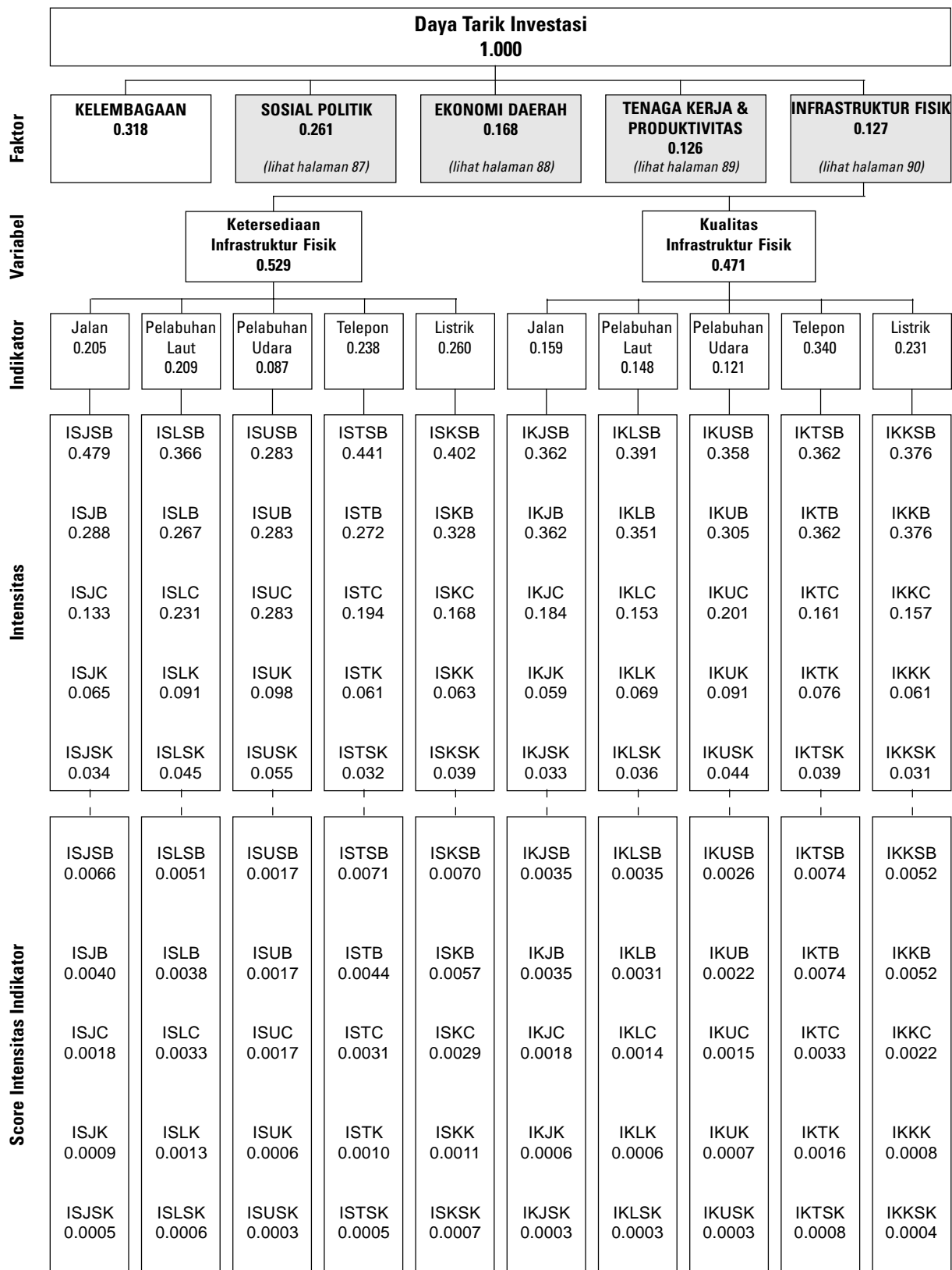
**Lampiran 9.1. : Hirarki dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan/
Weighting of Factors, Variables, Indicators and Intensity of Rating**











Lampiran 9.2. : Penghitungan Nilai Intensitas Dengan Metode AHP/
Calculation of the Value of Indicators Using AHP Method

Indikator pemeringkatan ditentukan melalui studi literatur, lokakarya terbatas para ahli, dan hasil evaluasi pemeringkatan KPPOD tahun 2001. Hasil tersebut diolah lagi oleh sejumlah ahli terbatas dalam suatu *panel judgment* yang menghasilkan hasil akhir indikator dan hirarki pemeringkatan. Selanjutnya dengan pengolahan hasil pembobotan indikator dari *judgement* para ahli sebagaimana dijelaskan pada bagian **III.B.3.1.** ditentukan bobot indikator (skala penting tidaknya tiap indikator) terhadap daya tarik investasi suatu daerah, sebagaimana ditampilkan hasilnya dalam bagan **Lampiran 9.1.**

Dalam bagan hirarki pemeringkatan pada **Lampiran 9.1.** kita bisa lihat 5 faktor penentu daya tarik investasi suatu daerah, dilengkapi dengan bobot masing-masing. Apabila kita jumlahkan keseluruhan bobot masing-masing faktor (level pertama dari hirarki pemeringkatan) maka jumlah yang dihasilkan harus 1 (satu).

Demikian juga dengan jumlah bobot seluruh variabel yang tercakup dalam faktor yang sama (level kedua hirarki pemeringkatan) harus berjumlah 1 (satu).

Hal yang sama juga berlaku untuk bobot indikator-indikator dalam satu variabel yang sama (level ketiga hirarki pemeringkatan) juga harus berjumlah 1 (satu).

Terakhir, bobot intensitas-intensitas dalam tiap

As discussed in the body of this research report particularly in part III.B.3.1.3., indicators were determined and developed through study of literature, experts' choice, and KPPOD's research result in 2001. The result was conferred with several experts through panel judgement then producing the final indicators and their structure.

Afterwards, the structure of indicators produced by experts through panel judgment as explained in part III.B.3.1. was then valued (the level of the importance of each indicator) to measure the level of attractiveness of an area to investment, as presented in appendix 9.1

The hierarchy of values of factors, variables, and indicators in appendix 9.1 illustrates the five significant factors determining the attractiveness of an area to investment and the weight assigned to each. The total weight of all factors (the first level in the hierarchy) is 1 (one).

Likewise the total weight of all variables under similar factor (the second level in the hierarchy) is 1 (one).

The same process applies for the value of indicators under one variable (the third level in the hierarchy) wherein the total weight is 1 (one).

The total weight for the intensity assigned to each

indikator yang sama (level keempat hirarki pemeringkatan) juga berjumlah 1 (satu).

Bila kita melihat pada turunan selanjutnya dibawah level intensitas (untuk memudahkan, sebut saja level kelima); maka kita akan melihat bahwa **score intensitas (bukan bobot intensitas)** yang terlihat pada level kelima, contoh untuk **indikator birokrasi** dengan intensitas **KASBS** (singkatan dari Kelembagaan – Aparat – Birokrasi – Sangat Baik) adalah **0.0248**. Jumlah keseluruhan score intensitas tertinggi untuk setiap indikator dari 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan adalah 1 (satu).

Dengan mengambil contoh **indikator birokrasi** di atas, score intensitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Score **0.0248** adalah score intensitas KASBS dimana untuk indikator '**Birokrasi**' yang dinilai '**sangat baik**' akan menghasilkan score 0.0248. Sedangkan bila untuk indikator yang sama dinilai '**sangat jelek**' KASBJ (singkatan dari Kelembagaan – Aparat – Birokrasi – Sangat Jelek) maka menghasilkan score **0.0016**.
2. Score **0.0248** tersebut didapat dari perkalian antar bobot:
intensitas x indikator x variabel x faktor
 $0.513 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0248$
3. Pada *Lampiran 10.A* score **0.0062** pada indikator '**Birokrasi**' dari Kota Jambi yang dinilai '**sedang**' dengan notasi KASBD (singkatan dari Kelembagaan – Aparat – Birokrasi – Sedang), didapat dari perkalian antar bobot:

$$\text{intensitas} \times \text{indikator} \times \text{variabel} \times \text{faktor} \\ 0.126 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0062$$

(Catatan: perbedaan digit hanya karena faktor pembulatan)

Penghitungan dengan cara yang sama juga dilakukan pada intensitas dari indikator-indikator lainnya untuk menghasilkan score intensitas tiap indikator pemeringkatan.

indicator (the fourth level in the hierarchy) was likewise set at one.

Looking at the next level, below the intensity level (to make it simple, just call it the fifth level), we will find intensity score (not intensity weight) in the fifth level. For example, under government service indicator there is KASBS intensity (abbreviation of Institutional – Apparatus – Bureaucracy – Excellent), with a score of 0.0248. The total of the entire intensity values for each indicator from 42 (forty-two) indicators is 1 (one).

Using the above government service indicator as sample, the score of its intensity is calculated as follows:

1. The score **0.0248** is KASBS intensity score where "**Government Service**" indicator, which is valued '**excellent**', produces a score of 0.0248. While, if similar indicator, KASBJ (abbreviation of Institutional – Apparatus – Bureaucracy – Extremely Bad), is valued '**extremely bad**', it produces a score of **0.0016**.
2. The score **0.0248** is obtained by multiplying the weights for the following:
intensity x indicator x variable x factor
 $0.513 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0248$
3. In Appendix 10.A, the score **0.0062** given to '**Government Service**' indicator for Jambi City equivalent to '**Moderate**' rating under KASBD (which stands for Institutional Factor – Apparatus – Bureaucracy – Moderate), was obtained by multiplying the weights of the following:
intensity x indicator x variable x factor
 $0.126 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0062$

(Note: the product was rounded off)

The same calculation was done for the intensity of other indicators to produce intensity score of each indicator.

Jumlah kumulatif score intensitas dari ke 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan menghasilkan score total, yang kemudian dibandingkan antar daerah untuk mendapatkan hasil urutan peringkat total. Bila suatu daerah mendapatkan score intensitas tertinggi untuk tiap indikator dari semua 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan, maka score totalnya harus 1 (satu).

Untuk peringkat per kategori maka score intensitas yang dijumlahkan berdasarkan intensitas intensitas dari kategori spesifik yang dimaksud. Misalnya peringkat score Kelembagaan merupakan perbandingan score kumulatif dari indikator indikator yang masuk pada faktor Kelembagaan saja.

The total cumulative intensity score of 42 (forty-two) indicators represents the total score, which is used in the comparison between one area to other areas to get the ranking of total score. An area that obtained the highest intensity score for all 42 (forty-two) indicators was given a total score of 1 (one).

Ranking per specific factor was done through calculation of the intensity score of intended factor. For example, the ranking in terms of institutional factor was conducted by comparing the cumulative score of indicators under the institutional factor.

INTENSITAS INDIKATOR DATA PRIMER/Intensity of Primary Indicators
Lampiran 10.A : Intensitas Indikator Faktor Kelembagaan 53 Kota/
The Intensity of 53 Cities of the Institutional Indicators

NO	PROPINSI	KOTA	FAKTOR KELEMBAGAAN						
			Aparatur & Pelayanan		Peraturan Daerah	Kepastian Hukum			
			Birokrasi	Penyalahgunaan Wewenang		Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Hub. Eksekutif - Legislatif
			0.0483	0.0235	0.0771	0.035	0.0524	0.0194	0.0167
1	Bali	Denpasar	0.0031	0.0061	0.0046	0.0054	0.0034	0.0051	0.0030
2	Babel	Pangkal Pinang	0.0031	0.0015	0.0147	0.0054	0.0034	0.0006	0.0030
3	Banten	Cilegon	0.0126	0.0120	0.0046	0.0165	0.0151	0.0025	0.0072
4	Banten	Tangerang	0.0031	0.0030	0.0046	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
5	Bengkulu	Bengkulu	0.0031	0.0008	0.0147	0.0024	0.0070	0.0025	0.0030
6	DIY	Yogyakarta	0.0062	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
7	DKI	Jakarta	0.0031	0.0030	0.0147	0.0054	0.0034	0.0006	0.0030
8	Gorontalo	Gorontalo	0.0126	0.0120	0.0147	0.0165	0.0151	0.0099	0.0030
9	Jambi	Jambi	0.0062	0.0061	0.0147	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
10	Jabar	Bandung	0.0016	0.0008	0.0147	0.0024	0.0034	0.0006	0.0007
11	Jabar	Bekasi	0.0031	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
12	Jabar	Bogor	0.0062	0.0120	0.0046	0.0024	0.0070	0.0025	0.0030
13	Jabar	Cirebon	0.0031	0.0030	0.0147	0.0054	0.0034	0.0012	0.0007
14	Jabar	Sukabumi	0.0062	0.0015	0.0147	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
15	Jateng	Pekalongan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0025	0.0007
16	Jateng	Semarang	0.0062	0.0061	0.0147	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
17	Jateng	Surakarta	0.0031	0.0030	0.0217	0.0024	0.0018	0.0051	0.0030
18	Jateng	Tegal	0.0126	0.0061	0.0046	0.0165	0.0151	0.0051	0.0072
19	Jatim	Kediri	0.0126	0.0120	0.0147	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
20	Jatim	Madiun	0.0126	0.0061	0.0147	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
21	Jatim	Malang	0.0062	0.0030	0.0147	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
22	Jatim	Mojokerto	0.0062	0.0120	0.0147	0.0095	0.0151	0.0099	0.0030
23	Jatim	Probolinggo	0.0062	0.0015	0.0147	0.0165	0.0151	0.0006	0.0030
24	Jatim	Surabaya	0.0062	0.0008	0.0147	0.0054	0.0070	0.0012	0.0048
25	Kalbar	Pontianak	0.0062	0.0030	0.0147	0.0095	0.0151	0.0006	0.0030
26	Kalsel	Banjarmasin	0.0062	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
27	Kalteng	Palangkaraya	0.0016	0.0008	0.0147	0.0054	0.0034	0.0025	0.0030
28	Kaltim	Balikpapan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
29	Kaltim	Samarinda	0.0016	0.0008	0.0147	0.0024	0.0018	0.0006	0.0030
30	Lampung	Bandar Lampung	0.0031	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
31	NTB	Mataram	0.0062	0.0030	0.0046	0.0054	0.0070	0.0025	0.0015
32	NTT	Kupang	0.0016	0.0061	0.0147	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
33	Papua	Jayapura	0.0062	0.0030	0.0147	0.0012	0.0018	0.0025	0.0030
34	Papua	Sorong	0.0016	0.0008	0.0147	0.0012	0.0151	0.0006	0.0007
35	Riau	Batam	0.0016	0.0030	0.0147	0.0012	0.0018	0.0006	0.0030
36	Riau	Dumai	0.0062	0.0030	0.0147	0.0165	0.0151	0.0012	0.0072
37	Riau	Pekanbaru	0.0062	0.0030	0.0147	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
38	Riau	Tanjung Pinang	0.0016	0.0008	0.0046	0.0024	0.0018	0.0006	0.0007
39	Sulsel	Makassar	0.0126	0.0120	0.0147	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
40	Sulsel	Pare-Pare	0.0126	0.0120	0.0147	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
41	Sulteng	Palu	0.0031	0.0008	0.0147	0.0024	0.0070	0.0012	0.0030
42	Sultra	Kendari	0.0062	0.0015	0.0147	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
43	Sulut	Bitung	0.0016	0.0015	0.0147	0.0054	0.0070	0.0012	0.0015
44	Sulut	Manado	0.0016	0.0015	0.0046	0.0024	0.0070	0.0025	0.0015
45	Sumbar	Padang	0.0062	0.0030	0.0147	0.0024	0.0070	0.0006	0.0015
46	Sumbar	Sawahlunto	0.0248	0.0120	0.0147	0.0054	0.0070	0.0099	0.0043
47	Sumsel	Palembang	0.0031	0.0008	0.0147	0.0024	0.0018	0.0006	0.0030
48	Sumut	Binjai	0.0031	0.0030	0.0147	0.0095	0.0070	0.0006	0.0030
49	Sumut	Medan	0.0031	0.0015	0.0046	0.0165	0.0070	0.0006	0.0030
50	Sumut	Pematang Siantar	0.0062	0.0030	0.0147	0.0095	0.0070	0.0012	0.0030
51	Sumut	Sibolga	0.0031	0.0061	0.0046	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
52	Sumut	Tanjung Balai	0.0031	0.0030	0.0147	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
53	Sumut	Tebing Tinggi	0.0062	0.0030	0.0046	0.0165	0.0070	0.0051	0.0043

Lampiran 10.B : Intensitas Indikator Faktor Kelembagaan 161 Kabupaten/
The Intensity of 161 Regencies of the Institutional Indicators

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR KELEMBAGAAN								
			Aparatur & Pelayanan		Peraturan Daerah	Keuangan Daerah		Kepastian Hukum			
			Birokrasi	Penyalahgunaan Wewenang		Retribusi/ Pajak	Anggaran Pemb./ APBD	Konsistensi Peraturan	Pener-gakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Hubungan Eksekutif Legislatif
			0.0483	0.0235	0.0771	0.0316	0.0141	0.035	0.0524	0.0194	0.0167
1	Bali	Badung	0.0062	0.0061	0.0147	0.0132	0.0059	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
2	Bali	Bangli	0.0062	0.0061	0.0147	0.0031	0.0023	0.0024	0.0070	0.0051	0.0030
3	Bali	Buleleng	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0009	0.0054	0.0034	0.0051	0.0015
4	Bali	Gianyar	0.0126	0.0120	0.0147	0.0132	0.0037	0.0054	0.0070	0.0099	0.0030
5	Bali	Jembrana	0.0126	0.0061	0.0046	0.0031	0.0009	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
6	Bali	Karangasem	0.0126	0.0061	0.0046	0.0132	0.0023	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
7	Bali	Klungkung	0.0126	0.0120	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0099	0.0030
8	Bali	Tabanan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0023	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
9	Babel	Bangka	0.0062	0.0015	0.0046	0.0083	0.0037	0.0054	0.0034	0.0025	0.0030
10	Babel	Belitung	0.0062	0.0061	0.0046	0.0132	0.0014	0.0054	0.0034	0.0051	0.0030
11	Banten	Lebak	0.0126	0.0030	0.0147	0.0020	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
12	Banten	Serang	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
13	Banten	Tangerang	0.0016	0.0008	0.0147	0.0083	0.0023	0.0054	0.0034	0.0012	0.0015
14	Bengkulu	Bengkulu Selatan	0.0016	0.0008	0.0147	0.0051	0.0009	0.0012	0.0034	0.0025	0.0007
15	Bengkulu	Bengkulu Utara	0.0126	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0034	0.0025	0.0030
16	Bengkulu	Rejang Lebong	0.0248	0.0061	0.0147	0.0031	0.0014	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
17	DIY	Bantul	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0009	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
18	DIY	Gunung Kidul	0.0126	0.0061	0.0147	0.0020	0.0014	0.0095	0.0070	0.0099	0.0030
19	Gorontalo	Gorontalo	0.0062	0.0061	0.0147	0.0020	0.0014	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
20	Jambi	Batanghari	0.0062	0.0061	0.0217	0.0020	0.0037	0.0054	0.0151	0.0051	0.0030
21	Jambi	Bungo	0.0126	0.0120	0.0147	0.0020	0.0023	0.0095	0.0151	0.0099	0.0030
22	Jambi	Kerinci	0.0062	0.0061	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0251	0.0025	0.0030
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur	0.0031	0.0120	0.0147	0.0031	0.0037	0.0054	0.0151	0.0099	0.0043
24	Jambi	Tebo	0.0062	0.0008	0.0147	0.0020	0.0059	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
25	Jabar	Bandung	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
26	Jabar	Bekasi	0.0126	0.0120	0.0147	0.0083	0.0037	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
27	Jabar	Bogor	0.0062	0.0120	0.0046	0.0083	0.0023	0.0095	0.0151	0.0099	0.0030
28	Jabar	Ciamis	0.0016	0.0015	0.0046	0.0020	0.0009	0.0054	0.0034	0.0025	0.0030
29	Jabar	Cianjur	0.0126	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
30	Jabar	Cirebon	0.0126	0.0030	0.0046	0.0083	0.0023	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
31	Jabar	Garut	0.0062	0.0061	0.0147	0.0031	0.0009	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
32	Jabar	Indramayu	0.0126	0.0120	0.0147	0.0083	0.0023	0.0165	0.0251	0.0025	0.0030
33	Jabar	Karawang	0.0126	0.0061	0.0147	0.0051	0.0037	0.0165	0.0151	0.0006	0.0030
34	Jabar	Kuningan	0.0031	0.0030	0.0147	0.0020	0.0009	0.0165	0.0251	0.0025	0.0030
35	Jabar	Purwakarta	0.0126	0.0120	0.0147	0.0083	0.0014	0.0165	0.0151	0.0051	0.0043
36	Jabar	Subang	0.0031	0.0061	0.0147	0.0031	0.0014	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
37	Jabar	Sukabumi	0.0031	0.0061	0.0147	0.0083	0.0023	0.0024	0.0070	0.0099	0.0043
38	Jabar	Sumedang	0.0126	0.0120	0.0046	0.0051	0.0009	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
39	Jabar	Tasikmalaya	0.0062	0.0120	0.0147	0.0031	0.0009	0.0165	0.0151	0.0099	0.0030
40	Jateng	Banyumas	0.0062	0.0120	0.0147	0.0031	0.0009	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
41	Jateng	Boyolali	0.0062	0.0030	0.0147	0.0020	0.0009	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
42	Jateng	Cilacap	0.0126	0.0061	0.0147	0.0083	0.0014	0.0054	0.0151	0.0012	0.0043
43	Jateng	Jepara	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0023	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
44	Jateng	Karanganyar	0.0062	0.0120	0.0147	0.0051	0.0009	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
45	Jateng	Kebumen	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0014	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
46	Jateng	Kendal	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0009	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
47	Jateng	Klaten	0.0031	0.0030	0.0147	0.0083	0.0009	0.0024	0.0034	0.0025	0.0030
48	Jateng	Kudus	0.0126	0.0120	0.0046	0.0031	0.0023	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
49	Jateng	Magelang	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0023	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
50	Jateng	Pekalongan	0.0062	0.0120	0.0147	0.0051	0.0014	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
51	Jateng	Pemalang	0.0062	0.0015	0.0147	0.0031	0.0009	0.0095	0.0251	0.0006	0.0030
52	Jateng	Sukoharjo	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0009	0.0054	0.0034	0.0051	0.0030
53	Jateng	Tegal	0.0062	0.0015	0.0147	0.0031	0.0023	0.0054	0.0151	0.0006	0.0030
54	Jateng	Wonosobo	0.0126	0.0061	0.0147	0.0020	0.0014	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR KELEMBAGAAN								
			Aparatur & Pelayanan		Peraturan Daerah	Keuangan Daerah		Kepastian Hukum			
			Brokrasi	Penyalahgunaan Wewenang		Retribusi/ Pajak	Anggaran Pemb./ APBD	Konsistensi Peraturan	Penera-gaan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Hubungan Ekeku-tif Legislatif
55	Jatim	Bangkalan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0014	0.0095	0.0070	0.0051	0.0030
56	Jatim	Banyuwangi	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
57	Jatim	Blitar	0.0062	0.0120	0.0046	0.0051	0.0009	0.0165	0.0070	0.0025	0.0030
58	Jatim	Bondowoso	0.0062	0.0061	0.0046	0.0051	0.0009	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
59	Jatim	Gresik	0.0062	0.0030	0.0147	0.0132	0.0014	0.0054	0.0070	0.0025	0.0043
60	Jatim	Jember	0.0016	0.0030	0.0147	0.0031	0.0023	0.0024	0.0034	0.0025	0.0030
61	Jatim	Jombang	0.0126	0.0008	0.0147	0.0051	0.0023	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
62	Jatim	Kediri	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
63	Jatim	Lamongan	0.0126	0.0030	0.0046	0.0051	0.0014	0.0054	0.0151	0.0051	0.0072
64	Jatim	Magetan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
65	Jatim	Mojokerto	0.0126	0.0061	0.0046	0.0083	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
66	Jatim	Pamekasan	0.0126	0.0030	0.0046	0.0031	0.0014	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
67	Jatim	Pasuruan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0132	0.0023	0.0054	0.0151	0.0012	0.0030
68	Jatim	Ponorogo	0.0062	0.0061	0.0147	0.0051	0.0014	0.0024	0.0034	0.0051	0.0030
69	Jatim	Sidoarjo	0.0126	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0034	0.0025	0.0072
70	Jatim	Situbondo	0.0016	0.0061	0.0046	0.0083	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
71	Jatim	Tulungagung	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
72	Kalbar	Kapuas Hulu	0.0062	0.0015	0.0046	0.0020	0.0037	0.0024	0.0070	0.0006	0.0030
73	Kalbar	Ketapang	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0059	0.0054	0.0151	0.0012	0.0030
74	Kalbar	Pontianak	0.0031	0.0030	0.0046	0.0132	0.0014	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
75	Kalbar	Sambas	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0023	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
76	Kalbar	Sanggau	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
77	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	0.0126	0.0120	0.0147	0.0020	0.0023	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
78	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	0.0126	0.0061	0.0046	0.0051	0.0023	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
79	Kalsel	Hulu Sungai Utara	0.0126	0.0061	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
80	Kalsel	Tabalong	0.0126	0.0030	0.0147	0.0132	0.0023	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
81	Kalsel	Tanah Laut	0.0062	0.0061	0.0046	0.0051	0.0023	0.0165	0.0070	0.0099	0.0030
82	Kalsel	Tapin	0.0062	0.0030	0.0147	0.0083	0.0014	0.0054	0.0034	0.0099	0.0030
83	Kalteng	Barito Selatan	0.0062	0.0030	0.0046	0.0051	0.0059	0.0095	0.0070	0.0025	0.0030
84	Kalteng	Barito Utara	0.0126	0.0061	0.0147	0.0051	0.0059	0.0095	0.0151	0.0099	0.0072
85	Kalteng	Kapuas	0.0016	0.0015	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
86	Kaltim	Berau	0.0062	0.0015	0.0147	0.0083	0.0059	0.0024	0.0018	0.0006	0.0030
87	Kaltim	Bulungan	0.0126	0.0061	0.0147	0.0051	0.0059	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
88	Kaltim	Kutai	0.0126	0.0030	0.0147	0.0083	0.0059	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
89	Kaltim	Kutai Timur	0.0062	0.0061	0.0147	0.0083	0.0059	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
90	Kaltim	Nunukan	0.0126	0.0061	0.0046	0.0051	0.0059	0.0095	0.0251	0.0025	0.0030
91	Kaltim	Pasir	0.0126	0.0008	0.0046	0.0083	0.0059	0.0095	0.0070	0.0025	0.0030
92	Lampung	Lampung Barat	0.0126	0.0061	0.0147	0.0083	0.0037	0.0165	0.0151	0.0025	0.0072
93	Lampung	Lampung Selatan	0.0016	0.0030	0.0046	0.0051	0.0014	0.0024	0.0070	0.0025	0.0030
94	Lampung	Lampung Timur	0.0062	0.0061	0.0147	0.0051	0.0009	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
95	Lampung	Lampung Utara	0.0016	0.0120	0.0147	0.0051	0.0023	0.0012	0.0034	0.0051	0.0030
96	Lampung	Way Kanan	0.0126	0.0120	0.0147	0.0051	0.0059	0.0165	0.0151	0.0099	0.0030
97	NTB	Bima	0.0126	0.0061	0.0046	0.0083	0.0014	0.0165	0.0151	0.0025	0.0030
98	NTB	Dompu	0.0126	0.0030	0.0046	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0015
99	NTB	Lombok Barat	0.0062	0.0120	0.0147	0.0132	0.0014	0.0054	0.0070	0.0099	0.0015
100	NTB	Lombok Timur	0.0062	0.0030	0.0147	0.0020	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
101	NTT	Belu	0.0126	0.0120	0.0147	0.0083	0.0023	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
102	NTT	Ende	0.0062	0.0061	0.0147	0.0031	0.0014	0.0165	0.0251	0.0025	0.0030
103	NTT	Flores Timur	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0015
104	NTT	Manggarai	0.0126	0.0015	0.0046	0.0031	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0072
105	NTT	Ngada	0.0062	0.0030	0.0147	0.0020	0.0023	0.0024	0.0034	0.0025	0.0030
106	NTT	Sumba Barat	0.0126	0.0030	0.0147	0.0031	0.0023	0.0165	0.0034	0.0012	0.0030
107	NTT	Timur Tengah Selatan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0031	0.0037	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
108	NTT	Timur Tengah Utara	0.0126	0.0120	0.0147	0.0031	0.0037	0.0095	0.0151	0.0099	0.0030

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR KELEMBAGAAN								
			Aparatur & Pelayanan		Peraturan Daerah	Keuangan Daerah		Kepastian Hukum			
			Brokrasi	Penyalahgunaan Wewenang		Retribusi/ Pajak	Anggaran Pemb./ APBD	Konsistensi Peraturan	Pener-gakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Hubungan Ekektuf Legislatif
0.0483	0.0235	0.0771	0.0316	0.0141	0.035	0.0524	0.0194	0.0167			
109	Papua	Fak-Fak	0.0062	0.0030	0.0046	0.0083	0.0023	0.0012	0.0070	0.0025	0.0007
110	Papua	Jayawijaya	0.0016	0.0061	0.0147	0.0051	0.0037	0.0012	0.0070	0.0025	0.0030
111	Papua	Manokwari	0.0062	0.0120	0.0046	0.0051	0.0059	0.0054	0.0151	0.0051	0.0030
112	Papua	Mimika	0.0031	0.0030	0.0046	0.0132	0.0037	0.0012	0.0018	0.0025	0.0030
113	Papua	Sorong	0.0062	0.0008	0.0147	0.0020	0.0023	0.0012	0.0034	0.0006	0.0007
114	Riau	Bengkalis	0.0016	0.0008	0.0147	0.0132	0.0059	0.0024	0.0034	0.0025	0.0030
115	Riau	Indragiri Hilir	0.0031	0.0015	0.0147	0.0020	0.0059	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
116	Riau	Kampar	0.0126	0.0030	0.0147	0.0051	0.0059	0.0095	0.0151	0.0025	0.0015
117	Riau	Kuantan Singingi	0.0062	0.0015	0.0147	0.0020	0.0059	0.0054	0.0070	0.0012	0.0043
118	Riau	Pelalawan	0.0126	0.0030	0.0046	0.0132	0.0059	0.0165	0.0251	0.0051	0.0030
119	Riau	Rokan Hulu	0.0062	0.0061	0.0046	0.0020	0.0059	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
120	Sulsel	Bantaeng	0.0062	0.0120	0.0147	0.0031	0.0037	0.0054	0.0151	0.0051	0.0030
121	Sulsel	Barru	0.0062	0.0120	0.0147	0.0051	0.0037	0.0165	0.0070	0.0051	0.0030
122	Sulsel	Bone	0.0126	0.0061	0.0217	0.0020	0.0009	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
123	Sulsel	Enrekang	0.0031	0.0061	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
124	Sulsel	Gowa	0.0126	0.0120	0.0147	0.0083	0.0023	0.0165	0.0151	0.0099	0.0043
125	Sulsel	Jeneponto	0.0126	0.0120	0.0147	0.0031	0.0023	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
126	Sulsel	Luwu	0.0126	0.0120	0.0147	0.0020	0.0023	0.0054	0.0151	0.0051	0.0030
127	Sulsel	Luwu Utara	0.0126	0.0061	0.0147	0.0132	0.0023	0.0165	0.0151	0.0025	0.0072
128	Sulsel	Majene	0.0126	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0165	0.0151	0.0051	0.0030
129	Sulsel	Maros	0.0062	0.0030	0.0046	0.0083	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
130	Sulsel	Pangkep	0.0062	0.0030	0.0046	0.0132	0.0037	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
131	Sulsel	Pinrang	0.0126	0.0120	0.0147	0.0051	0.0023	0.0165	0.0151	0.0099	0.0072
132	Sulsel	Selayar	0.0062	0.0120	0.0147	0.0051	0.0037	0.0095	0.0151	0.0051	0.0030
133	Sulsel	Sinjai	0.0126	0.0120	0.0147	0.0020	0.0023	0.0095	0.0251	0.0051	0.0072
134	Sulsel	Takalar	0.0016	0.0008	0.0217	0.0031	0.0014	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
135	Sulsel	Tana Toraja	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
136	Sulteng	Banggai	0.0126	0.0120	0.0147	0.0051	0.0023	0.0165	0.0151	0.0099	0.0030
137	Sulteng	Donggala	0.0031	0.0030	0.0147	0.0083	0.0009	0.0054	0.0034	0.0099	0.0030
138	Sulteng	Morowali	0.0062	0.0008	0.0147	0.0031	0.0037	0.0054	0.0034	0.0025	0.0030
139	Sulteng	Poso	0.0126	0.0030	0.0147	0.0031	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0030
140	Sulteng	Toli-Toli	0.0126	0.0015	0.0147	0.0132	0.0023	0.0054	0.0151	0.0099	0.0048
141	Sultra	Buton	0.0126	0.0061	0.0147	0.0020	0.0023	0.0054	0.0151	0.0025	0.0030
142	Sultra	Kolaka	0.0126	0.0030	0.0046	0.0083	0.0023	0.0165	0.0251	0.0025	0.0043
143	Sulut	Minahasa	0.0031	0.0008	0.0046	0.0051	0.0009	0.0054	0.0034	0.0006	0.0015
144	Sulut	Sangihe	0.0031	0.0030	0.0046	0.0020	0.0009	0.0095	0.0251	0.0025	0.0030
145	Sumbar	Pasaman	0.0031	0.0061	0.0046	0.0031	0.0037	0.0024	0.0070	0.0051	0.0030
146	Sumbar	Pesisir Selatan	0.0062	0.0030	0.0147	0.0020	0.0014	0.0024	0.0034	0.0099	0.0030
147	Sumbar	Sawah Lunto Sijunjung	0.0062	0.0030	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
148	Sumbar	Solok	0.0248	0.0120	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
149	Sumsel	Lahat	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0070	0.0051	0.0030
150	Sumsel	Muara Enim	0.0126	0.0030	0.0147	0.0132	0.0023	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
151	Sumsel	Musi Banyuasin	0.0062	0.0061	0.0217	0.0132	0.0059	0.0095	0.0151	0.0025	0.0072
152	Sumsel	Musi Rawas	0.0016	0.0008	0.0046	0.0031	0.0059	0.0012	0.0018	0.0006	0.0015
153	Sumsel	Ogan Kemiling Ilir	0.0016	0.0015	0.0147	0.0051	0.0037	0.0024	0.0034	0.0006	0.0030
154	Sumut	Asahan	0.0062	0.0120	0.0147	0.0132	0.0023	0.0165	0.0151	0.0012	0.0043
155	Sumut	Dairi	0.0126	0.0120	0.0147	0.0031	0.0023	0.0095	0.0070	0.0025	0.0030
156	Sumut	Deli Serdang	0.0126	0.0030	0.0046	0.0083	0.0014	0.0054	0.0070	0.0006	0.0030
157	Sumut	Labuhan Batu	0.0062	0.0061	0.0046	0.0083	0.0023	0.0165	0.0070	0.0012	0.0030
158	Sumut	Langkat	0.0062	0.0061	0.0147	0.0051	0.0023	0.0054	0.0070	0.0025	0.0030
159	Sumut	Simalungun	0.0031	0.0030	0.0147	0.0083	0.0023	0.0095	0.0151	0.0025	0.0072
160	Sumut	Tanah Karo	0.0031	0.0030	0.0147	0.0051	0.0014	0.0054	0.0070	0.0012	0.0030
161	Sumut	Tapanuli Utara	0.0062	0.0030	0.0147	0.0020	0.0023	0.0095	0.0151	0.0099	0.0072

Lampiran 11.A : Intensitas Indikator Faktor Sosial Politik 53 Kota/
The Intensity of 53 Cities of Socio-Political Indicators

NO	PROPINSI	KOTA	FAKTOR SOSIAL POLITIK										
			Keamanan			Sosial Politik				Budaya			
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja
			0.0523	0.0311	0.0724	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141
1	Bali	Denpasar	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0012	0.0019
2	Babel	Pangkal Pinang	0.0062	0.0036	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0009	0.0005	0.0009
3	Banten	Cilegon	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0094	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
4	Banten	Tangerang	0.0020	0.0012	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0004	0.0005	0.0009
5	Bengkulu	Bengkulu	0.0034	0.0012	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0005	0.0009
6	DIY	Yogyakarta	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0032	0.0019
7	DKI	Jakarta	0.0020	0.0012	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0025	0.0025	0.0031	0.0003	0.0067
8	Gorontalo	Gorontalo	0.0062	0.0036	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
9	Jambi	Jambi	0.0062	0.0036	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0020	0.0009
10	Jabar	Bandung	0.0020	0.0012	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0006	0.0018	0.0012	0.0019
11	Jabar	Bekasi	0.0020	0.0012	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0012	0.0009
12	Jabar	Bogor	0.0062	0.0036	0.0214	0.0037	0.0024	0.0048	0.0003	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
13	Jabar	Cirebon	0.0034	0.0012	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0002	0.0005	0.0005
14	Jabar	Sukabumi	0.0034	0.0012	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
15	Jateng	Pekalongan	0.0062	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0067
16	Jateng	Semarang	0.0034	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
17	Jateng	Surakarta	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0048	0.0025	0.0003	0.0004	0.0012	0.0019
18	Jateng	Tegal	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0020	0.0067
19	Jatim	Kediri	0.0034	0.0021	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0032	0.0040
20	Jatim	Madiun	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0004	0.0003	0.0040
21	Jatim	Malang	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0031	0.0032	0.0019
22	Jatim	Mojokerto	0.0254	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0032	0.0040
23	Jatim	Probolinggo	0.0062	0.0012	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0040
24	Jatim	Surabaya	0.0062	0.0021	0.0102	0.0023	0.0024	0.0116	0.0012	0.0012	0.0009	0.0020	0.0019
25	Kalbar	Pontianak	0.0020	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
26	Kalsel	Banjarmasin	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0012	0.0019
27	Kalteng	Palangkaraya	0.0034	0.0012	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0003	0.0019
28	Kaltim	Balikpapan	0.0153	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0025	0.0025	0.0018	0.0020	0.0019
29	Kaltim	Samarinda	0.0020	0.0012	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0012	0.0003	0.0002	0.0012	0.0009
30	Lampung	Bandar Lampung	0.0062	0.0036	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0040
31	NTB	Mataram	0.0153	0.0080	0.0048	0.0030	0.0095	0.0094	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0019
32	NTT	Kupang	0.0062	0.0036	0.0048	0.0030	0.0095	0.0094	0.0025	0.0012	0.0009	0.0020	0.0019
33	Papua	Jayapura	0.0034	0.0012	0.0095	0.0017	0.0095	0.0116	0.0025	0.0003	0.0002	0.0003	0.0009
34	Papua	Sorong	0.0062	0.0036	0.0095	0.0037	0.0024	0.0094	0.0012	0.0006	0.0002	0.0003	0.0005
35	Riau	Batam	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0024	0.0094	0.0025	0.0025	0.0009	0.0012	0.0067
36	Riau	Dumai	0.0062	0.0021	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0040
37	Riau	Pekanbaru	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0009
38	Riau	Tanjung Pinang	0.0034	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0032	0.0040
39	Sulsel	Makasar	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0025	0.0025	0.0018	0.0032	0.0067
40	Sulsel	Pare-Pare	0.0254	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0031	0.0032	0.0040
41	Sulteng	Palu	0.0062	0.0012	0.0025	0.0030	0.0048	0.0116	0.0049	0.0006	0.0002	0.0003	0.0009
42	Sultra	Kendari	0.0062	0.0021	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0012	0.0004	0.0012	0.0019
43	Sulut	Bitung	0.0034	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0005	0.0019
44	Sulut	Manado	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0032	0.0067
45	Sumbar	Padang	0.0062	0.0021	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0020	0.0019
46	Sumbar	Sawahlunto	0.0062	0.0080	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
47	Sumsel	Palembang	0.0062	0.0021	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0032	0.0040
48	Sumut	Binjai	0.0020	0.0021	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0020	0.0009
49	Sumut	Medan	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
50	Sumut	Pematang Siantar	0.0020	0.0012	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0005	0.0005
51	Sumut	Sibolga	0.0020	0.0012	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0012	0.0009
52	Sumut	Tanjung Balai	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0005	0.0009
53	Sumut	Tebing Tinggi	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0094	0.0049	0.0025	0.0018	0.0032	0.0040

Lampiran 11.B : Intensitas Indikator Faktor Sosial Politik 161 Kabupaten
The Intensity of 161 Regencies of Socio-Political Indicators

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR SOSIAL POLITIK										
			Keamanan			Sosial Politik				Budaya			
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja
			0.0523	0.0311	0.0724	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141
1	Bali	Badung	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
2	Bali	Bangli	0.0153	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0019
3	Bali	Buleleng	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0012	0.0019
4	Bali	Gianyar	0.0254	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
5	Bali	Jembrana	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
6	Bali	Karangasem	0.0062	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0019
7	Bali	Klungkung	0.0153	0.0163	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0012	0.0019
8	Bali	Tabanan	0.0062	0.0036	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0004	0.0003	0.0019
9	Babel	Bangka	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0005	0.0009
10	Babel	Belitung	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0020	0.0019
11	Banten	Lebak	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0009
12	Banten	Serang	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0003	0.0009
13	Banten	Tangerang	0.0062	0.0012	0.0025	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
14	Bengkulu	Bengkulu Selatan	0.0062	0.0036	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0004	0.0012	0.0040
15	Bengkulu	Bengkulu Utara	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0019
16	Bengkulu	Rejang Lebong	0.0034	0.0036	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
17	DIY	Bantul	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0020	0.0019
18	DIY	Gunung Kidul	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0012	0.0040
19	Gorontalo	Gorontalo	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0019
20	Jambi	Batanghari	0.0062	0.0036	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0003	0.0009
21	Jambi	Bungo	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
22	Jambi	Kerinci	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0006	0.0009	0.0012	0.0067
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur	0.0062	0.0080	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0019
24	Jambi	Tebo	0.0254	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
25	Jabar	Bandung	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0019
26	Jabar	Bekasi	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
27	Jabar	Bogor	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0019
28	Jabar	Ciamis	0.0153	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
29	Jabar	Cianjur	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
30	Jabar	Cirebon	0.0153	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0020	0.0019
31	Jabar	Garut	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0040
32	Jabar	Indramayu	0.0153	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0019
33	Jabar	Karawang	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0020	0.0040
34	Jabar	Kuningan	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
35	Jabar	Purwakarta	0.0062	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
36	Jabar	Subang	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0040
37	Jabar	Sukabumi	0.0062	0.0036	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0031	0.0032	0.0019
38	Jabar	Sumedang	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0009	0.0020	0.0040
39	Jabar	Tasikmalaya	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
40	Jateng	Banyumas	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
41	Jateng	Boyolali	0.0034	0.0021	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
42	Jateng	Cilacap	0.0034	0.0021	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
43	Jateng	Jepara	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
44	Jateng	Karanganyar	0.0020	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
45	Jateng	Kebumen	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
46	Jateng	Kendal	0.0034	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
47	Jateng	Klaten	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
48	Jateng	Kudus	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0025	0.0012	0.0018	0.0020	0.0040
49	Jateng	Magelang	0.0062	0.0036	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0040
50	Jateng	Pekalongan	0.0062	0.0080	0.0214	0.0023	0.0095	0.0020	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
51	Jateng	Pemalang	0.0034	0.0021	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
52	Jateng	Sukoharjo	0.0153	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0040
53	Jateng	Tegal	0.0062	0.0021	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
54	Jateng	Wonosobo	0.0034	0.0021	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR SOSIAL POLITIK										
			Keamanan			Sosial Politik				Budaya			
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja
			0.0523	0.0311	0.0724	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141
55	Jatim	Bangkalan	0.0034	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0020	0.0040
56	Jatim	Banyuwangi	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
57	Jatim	Blitar	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0003	0.0019
58	Jatim	Bondowoso	0.0062	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
59	Jatim	Gresik	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0005	0.0019
60	Jatim	Jember	0.0034	0.0021	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0002	0.0005	0.0009
61	Jatim	Jombang	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0032	0.0040
62	Jatim	Kediri	0.0062	0.0021	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0004	0.0012	0.0019
63	Jatim	Lamongan	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0012	0.0040
64	Jatim	Magetan	0.0254	0.0080	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0012	0.0009
65	Jatim	Mojokerto	0.0062	0.0021	0.0048	0.0023	0.0095	0.0094	0.0012	0.0012	0.0031	0.0032	0.0040
66	Jatim	Pamekasan	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
67	Jatim	Pasuruan	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0025	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
68	Jatim	Ponorogo	0.0034	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0009
69	Jatim	Sidoarjo	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0005	0.0012	0.0009	0.0012	0.0067
70	Jatim	Situbondo	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0005	0.0019
71	Jatim	Tulungagung	0.0034	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0012	0.0040
72	Kalbar	Kapuas Hulu	0.0020	0.0012	0.0102	0.0037	0.0048	0.0094	0.0005	0.0003	0.0002	0.0012	0.0009
73	Kalbar	Ketapang	0.0062	0.0012	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0009	0.0012	0.0005
74	Kalbar	Pontianak	0.0020	0.0012	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0006	0.0002	0.0012	0.0009
75	Kalbar	Sambas	0.0020	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0032	0.0019
76	Kalbar	Sanggau	0.0020	0.0012	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0020	0.0019
77	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0032	0.0040
78	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
79	Kalsel	Hulu Sungai Utara	0.0062	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0019
80	Kalsel	Tabalong	0.0062	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0003	0.0005
81	Kalsel	Tanah Laut	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0040
82	Kalsel	Tapin	0.0153	0.0080	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0018	0.0032	0.0019
83	Kalteng	Barito Selatan	0.0062	0.0021	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0012	0.0040
84	Kalteng	Barito Utara	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0020	0.0040
85	Kalteng	Kapuas	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0048	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0019
86	Kaltim	Berau	0.0020	0.0021	0.0048	0.0037	0.0048	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0003	0.0005
87	Kaltim	Bulungan	0.0153	0.0163	0.0102	0.0023	0.0024	0.0116	0.0012	0.0025	0.0009	0.0012	0.0019
88	Kaltim	Kutai	0.0020	0.0021	0.0025	0.0037	0.0048	0.0116	0.0012	0.0025	0.0009	0.0012	0.0019
89	Kaltim	Kutai Timur	0.0062	0.0021	0.0214	0.0023	0.0024	0.0116	0.0012	0.0012	0.0004	0.0003	0.0019
90	Kaltim	Nunukan	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0048	0.0094	0.0005	0.0041	0.0031	0.0020	0.0067
91	Kaltim	Pasir	0.0062	0.0036	0.0102	0.0023	0.0024	0.0116	0.0025	0.0012	0.0009	0.0012	0.0009
92	Lampung	Lampung Barat	0.0153	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
93	Lampung	Lampung Selatan	0.0034	0.0021	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
94	Lampung	Lampung Timur	0.0062	0.0021	0.0048	0.0023	0.0048	0.0094	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0019
95	Lampung	Lampung Utara	0.0034	0.0021	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0012	0.0009
96	Lampung	Way Kanan	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0018	0.0032	0.0019
97	NTB	Bima	0.0153	0.0036	0.0214	0.0030	0.0048	0.0094	0.0049	0.0012	0.0018	0.0032	0.0040
98	NTB	Dompu	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0040
99	NTB	Lombok Barat	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0048	0.0094	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
100	NTB	Lombok Timur	0.0254	0.0080	0.0048	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0020	0.0040
101	NTT	Belu	0.0153	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0005	0.0019
102	NTT	Ende	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0009
103	NTT	Flores Timur	0.0034	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
104	NTT	Manggarai	0.0034	0.0021	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0025	0.0006	0.0009	0.0012	0.0005
105	NTT	Ngada	0.0153	0.0036	0.0048	0.0023	0.0048	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0003	0.0009
106	NTT	Sumba Barat	0.0020	0.0036	0.0214	0.0023	0.0024	0.0094	0.0049	0.0006	0.0004	0.0012	0.0019
107	NTT	Timur Tengah Selatan	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0020	0.0019
108	NTT	Timur Tengah Utara	0.0153	0.0036	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0018	0.0005	0.0019

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR SOSIAL POLITIK										
			Keamanan			Sosial Politik				Budaya			
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja
			0.0523	0.0311	0.0724	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141
109	Papua	Fak-Fak	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0048	0.0020	0.0025	0.0003	0.0002	0.0003	0.0005
110	Papua	Jayawijaya	0.0034	0.0012	0.0095	0.0017	0.0095	0.0116	0.0012	0.0003	0.0002	0.0003	0.0005
111	Papua	Manokwari	0.0034	0.0036	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0005
112	Papua	Mimika	0.0020	0.0012	0.0102	0.0017	0.0095	0.0116	0.0012	0.0003	0.0002	0.0003	0.0009
113	Papua	Sorong	0.0034	0.0021	0.0102	0.0037	0.0024	0.0016	0.0012	0.0006	0.0009	0.0005	0.0009
114	Riau	Bengkalis	0.0062	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0012	0.0005
115	Riau	Indragiri Hilir	0.0062	0.0021	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0012	0.0040
116	Riau	Kampar	0.0034	0.0012	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0025	0.0003	0.0004	0.0012	0.0019
117	Riau	Kuantan Singingi	0.0153	0.0036	0.0048	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0009
118	Riau	Pelalawan	0.0062	0.0036	0.0102	0.0037	0.0048	0.0094	0.0005	0.0025	0.0031	0.0032	0.0067
119	Riau	Rokan Hulu	0.0020	0.0012	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0049	0.0003	0.0002	0.0005	0.0009
120	Sulsel	Bantaeng	0.0153	0.0080	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0002	0.0005	0.0009
121	Sulsel	Barru	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0020	0.0040
122	Sulsel	Bone	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0067
123	Sulsel	Enrekang	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0031	0.0032	0.0067
124	Sulsel	Gowa	0.0062	0.0036	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0018	0.0032	0.0040
125	Sulsel	Jeneponto	0.0254	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0009	0.0012	0.0040
126	Sulsel	Luwu	0.0034	0.0036	0.0048	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0020	0.0040
127	Sulsel	Luwu Utara	0.0062	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0020	0.0019
128	Sulsel	Majene	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0032	0.0067
129	Sulsel	Maros	0.0062	0.0021	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0004	0.0012	0.0009
130	Sulsel	Pangkep	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0009	0.0012	0.0019
131	Sulsel	Pinrang	0.0062	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0032	0.0067
132	Sulsel	Selayar	0.0153	0.0163	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0004	0.0005	0.0019
133	Sulsel	Sinjai	0.0153	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0012	0.0031	0.0032	0.0040
134	Sulsel	Takalar	0.0062	0.0036	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0012	0.0019
135	Sulsel	Tana Toraja	0.0153	0.0036	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0009	0.0012	0.0009
136	Sulteng	Banggai	0.0254	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0094	0.0005	0.0003	0.0002	0.0032	0.0067
137	Sulteng	Donggala	0.0062	0.0012	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0025	0.0025	0.0004	0.0020	0.0009
138	Sulteng	Morowali	0.0020	0.0021	0.0025	0.0037	0.0024	0.0094	0.0025	0.0006	0.0009	0.0005	0.0009
139	Sulteng	Poso	0.0020	0.0012	0.0025	0.0037	0.0024	0.0016	0.0025	0.0006	0.0002	0.0012	0.0019
140	Sulteng	Toli-Toli	0.0062	0.0036	0.0025	0.0037	0.0095	0.0048	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019
141	Sultra	Buton	0.0153	0.0080	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0032	0.0040
142	Sultra	Kolaka	0.0062	0.0036	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0025	0.0012	0.0009	0.0020	0.0019
143	Sulut	Minahasa	0.0062	0.0036	0.0048	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0032	0.0040
144	Sulut	Sangihe	0.0062	0.0080	0.0214	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0031	0.0020	0.0040
145	Sumbar	Pasaman	0.0034	0.0036	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0020	0.0040
146	Sumbar	Pesisir Selatan	0.0153	0.0080	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0005	0.0040
147	Sumbar	Sawah Lunto Sijunjung	0.0062	0.0036	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0004	0.0012	0.0009
148	Sumbar	Solok	0.0153	0.0080	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0009
149	Sumsel	Lahat	0.0153	0.0036	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0005	0.0005
150	Sumsel	Muara Enim	0.0062	0.0080	0.0102	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0004	0.0012	0.0019
151	Sumsel	Musi Banyuasin	0.0153	0.0080	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0018	0.0020	0.0019
152	Sumsel	Musi Rawas	0.0034	0.0012	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0012	0.0009
153	Sumsel	Ogan Kemiling Ilir	0.0034	0.0021	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0004	0.0005	0.0005
154	Sumut	Asahan	0.0034	0.0021	0.0102	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0005	0.0009
155	Sumut	Dairi	0.0020	0.0021	0.0048	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0031	0.0005	0.0009
156	Sumut	Deli Serdang	0.0020	0.0021	0.0025	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0025	0.0009	0.0012	0.0040
157	Sumut	Labuhan Batu	0.0034	0.0021	0.0025	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0041	0.0018	0.0005	0.0009
158	Sumut	Langkat	0.0062	0.0021	0.0102	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0005	0.0009
159	Sumut	Simalungun	0.0062	0.0036	0.0214	0.0023	0.0095	0.0116	0.0049	0.0006	0.0004	0.0005	0.0009
160	Sumut	Tanah Karo	0.0020	0.0012	0.0048	0.0030	0.0095	0.0116	0.0049	0.0003	0.0002	0.0003	0.0009
161	Sumut	Tapanuli Utara	0.0062	0.0036	0.0214	0.0037	0.0095	0.0116	0.0049	0.0012	0.0009	0.0012	0.0019

Lampiran 12.A : Intensitas Indikator Faktor Infrastruktur Fisik 53 Kota
The Intensity of 53 Cities of Physical Infrastructure Indicators

NO	PROPINSI	KOTA	FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK									
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik					Kualitas Infrastruktur Fisik				
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon
			0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175	0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139
1	Bali	Denpasar	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
2	Babel	Pangkal Pinang	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0007	0.0018	0.0031	0.0022	0.0074	0.0004
3	Banten	Cilegon	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0018	0.0035	0.0022	0.0074	0.0052
4	Banten	Tangerang	0.0066	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
5	Bengkulu	Bengkulu	0.0005	0.0006	0.0017	0.0010	0.0011	0.0006	0.0014	0.0022	0.0016	0.0008
6	DIY	Yogyakarta	0.0040	0.0033	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0014	0.0026	0.0074	0.0052
7	DKI	Jakarta	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
8	Gorontalo	Gorontalo	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
9	Jambi	Jambi	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
10	Jabar	Bandung	0.0066	0.0033	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0052
11	Jabar	Bekasi	0.0066	0.0033	0.0017	0.0071	0.0070	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
12	Jabar	Bogor	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
13	Jabar	Cirebon	0.0040	0.0033	0.0006	0.0044	0.0057	0.0035	0.0014	0.0007	0.0033	0.0022
14	Jabar	Sukabumi	0.0040	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0006	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
15	Jateng	Pekalongan	0.0040	0.0051	0.0006	0.0071	0.0057	0.0035	0.0014	0.0003	0.0074	0.0052
16	Jateng	Semarang	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0052
17	Jateng	Surakarta	0.0066	0.0033	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
18	Jateng	Tegal	0.0040	0.0051	0.0006	0.0071	0.0070	0.0035	0.0031	0.0015	0.0074	0.0052
19	Jatim	Kediri	0.0040	0.0033	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
20	Jatim	Madiun	0.0040	0.0013	0.0006	0.0044	0.0057	0.0035	0.0003	0.0003	0.0074	0.0052
21	Jatim	Malang	0.0066	0.0013	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0014	0.0015	0.0074	0.0052
22	Jatim	Mojokerto	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0014	0.0015	0.0074	0.0052
23	Jatim	Probolinggo	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0018	0.0031	0.0026	0.0074	0.0052
24	Jatim	Surabaya	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
25	Kalbar	Pontianak	0.0040	0.0051	0.0017	0.0044	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
26	Kalsel	Banjarmasin	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
27	Kalteng	Palangkaraya	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
28	Kaltim	Balikpapan	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
29	Kaltim	Samarinda	0.0018	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
30	Lampung	Bandar Lampung	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0008
31	NTB	Mataram	0.0040	0.0051	0.0017	0.0044	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0074	0.0022
32	NTT	Kupang	0.0018	0.0051	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
33	Papua	Jayapura	0.0018	0.0033	0.0017	0.0010	0.0007	0.0006	0.0014	0.0015	0.0016	0.0008
34	Papua	Sorong	0.0018	0.0013	0.0006	0.0010	0.0007	0.0006	0.0014	0.0015	0.0016	0.0008
35	Riau	Batam	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
36	Riau	Dumai	0.0018	0.0051	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0074	0.0022
37	Riau	Pekanbaru	0.0066	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
38	Riau	Tanjung Pinang	0.0040	0.0038	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
39	Sulsel	Makassar	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
40	Sulsel	Pare-Pare	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0041	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0022
41	Sulteng	Palu	0.0005	0.0038	0.0017	0.0031	0.0007	0.0006	0.0031	0.0026	0.0033	0.0004
42	Sultra	Kendari	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
43	Sulut	Bitung	0.0018	0.0051	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
44	Sulut	Manado	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
45	Sumbar	Padang	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0011	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0008
46	Sumbar	Sawahlunto	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
47	Sumsel	Palembang	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0074	0.0022
48	Sumut	Binjai	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
49	Sumut	Medan	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0035	0.0022	0.0074	0.0052
50	Sumut	Pematang Siantar	0.0018	0.0006	0.0003	0.0031	0.0029	0.0018	0.0003	0.0003	0.0033	0.0022
51	Sumut	Sibolga	0.0018	0.0038	0.0006	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
52	Sumut	Tanjung Balai	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0052
53	Sumut	Tebing Tinggi	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0041	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052

Lampiran 12.B : Intensitas Indikator Faktor Infrastruktur Fisik 161 Kabupaten/
The Intensity of 161 Regencies of Physical Infrastructure Indicators

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK									
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik					Kualitas Infrastruktur Fisik				
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon
			0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175	0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139
1	Bali	Badung	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0026	0.0074	0.0022
2	Bali	Bangli	0.0040	0.0038	0.0017	0.0010	0.0029	0.0040	0.0031	0.0022	0.0016	0.0022
3	Bali	Buleleng	0.0040	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
4	Bali	Gianyar	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0022
5	Bali	Jembrana	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0040	0.0031	0.0022	0.0074	0.0022
6	Bali	Karangasem	0.0040	0.0038	0.0017	0.0010	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0016	0.0022
7	Bali	Klungkung	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0022
8	Bali	Tabanan	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0022
9	Babel	Bangka	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0007	0.0035	0.0031	0.0022	0.0008	0.0004
10	Babel	Belitung	0.0018	0.0038	0.0017	0.0005	0.0007	0.0035	0.0031	0.0022	0.0008	0.0004
11	Banten	Lebak	0.0009	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
12	Banten	Serang	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
13	Banten	Tangerang	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
14	Bengkulu	Bengkulu Selatan	0.0005	0.0006	0.0006	0.0010	0.0007	0.0003	0.0003	0.0015	0.0008	0.0004
15	Bengkulu	Bengkulu Utara	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0007	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0004
16	Bengkulu	Rejang Lebong	0.0009	0.0013	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0006	0.0015	0.0033	0.0022
17	DIY	Bantul	0.0040	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0014	0.0026	0.0033	0.0052
18	DIY	Gunung Kidul	0.0018	0.0006	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0006	0.0015	0.0033	0.0022
19	Gorontalo	Gorontalo	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
20	Jambi	Batanghari	0.0018	0.0033	0.0017	0.0005	0.0011	0.0006	0.0014	0.0022	0.0016	0.0008
21	Jambi	Bungo	0.0009	0.0033	0.0017	0.0010	0.0007	0.0006	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
22	Jambi	Kerinci	0.0018	0.0006	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0003	0.0015	0.0016	0.0008
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur	0.0005	0.0038	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0003	0.0008	0.0004
24	Jambi	Tebo	0.0009	0.0006	0.0003	0.0010	0.0011	0.0006	0.0003	0.0003	0.0033	0.0008
25	Jabar	Bandung	0.0018	0.0013	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0006	0.0015	0.0074	0.0052
26	Jabar	Bekasi	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
27	Jabar	Bogor	0.0018	0.0038	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0031	0.0026	0.0074	0.0022
28	Jabar	Ciamis	0.0018	0.0013	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0006	0.0015	0.0033	0.0022
29	Jabar	Cianjur	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0035	0.0014	0.0015	0.0033	0.0052
30	Jabar	Cirebon	0.0066	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0014	0.0015	0.0033	0.0052
31	Jabar	Garut	0.0018	0.0013	0.0006	0.0044	0.0057	0.0018	0.0006	0.0007	0.0074	0.0022
32	Jabar	Indramayu	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
33	Jabar	Karawang	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0035	0.0026	0.0074	0.0052
34	Jabar	Kuningan	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0014	0.0015	0.0074	0.0022
35	Jabar	Purwakarta	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
36	Jabar	Subang	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
37	Jabar	Sukabumi	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
38	Jabar	Sumedang	0.0018	0.0006	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
39	Jabar	Tasikmalaya	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0074	0.0052
40	Jateng	Banyumas	0.0040	0.0013	0.0006	0.0031	0.0057	0.0018	0.0006	0.0007	0.0016	0.0052
41	Jateng	Boyolali	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0006	0.0015	0.0033	0.0022
42	Jateng	Cilacap	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0052
43	Jateng	Jepara	0.0040	0.0051	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
44	Jateng	Karanganyar	0.0040	0.0006	0.0006	0.0031	0.0057	0.0018	0.0006	0.0022	0.0033	0.0022
45	Jateng	Kebumen	0.0040	0.0013	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
46	Jateng	Kendal	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
47	Jateng	Klaten	0.0040	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
48	Jateng	Kudus	0.0066	0.0038	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0014	0.0022	0.0074	0.0052
49	Jateng	Magelang	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0052
50	Jateng	Pekalongan	0.0040	0.0051	0.0006	0.0044	0.0057	0.0018	0.0031	0.0007	0.0074	0.0052
51	Jateng	Pemalang	0.0040	0.0013	0.0006	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0007	0.0033	0.0022
52	Jateng	Sukoharjo	0.0040	0.0013	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0052
53	Jateng	Tegal	0.0040	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
54	Jateng	Wonosobo	0.0040	0.0006	0.0006	0.0031	0.0057	0.0018	0.0006	0.0007	0.0016	0.0052

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK									
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik					Kualitas Infrastruktur Fisik				
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon
			0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175	0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139
55	Jatim	Bangkalan	0.0009	0.0033	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0052
56	Jatim	Banyuwangi	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0031	0.0015	0.0074	0.0052
57	Jatim	Blitar	0.0066	0.0018	0.0006	0.0071	0.0070	0.0035	0.0006	0.0007	0.0074	0.0052
58	Jatim	Bondowoso	0.0040	0.0033	0.0006	0.0031	0.0057	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
59	Jatim	Gresik	0.0066	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0026	0.0074	0.0052
60	Jatim	Jember	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
61	Jatim	Jombang	0.0040	0.0038	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
62	Jatim	Kediri	0.0018	0.0013	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0014	0.0015	0.0074	0.0052
63	Jatim	Lamongan	0.0040	0.0051	0.0017	0.0044	0.0070	0.0035	0.0031	0.0015	0.0074	0.0052
64	Jatim	Magetan	0.0040	0.0018	0.0006	0.0031	0.0029	0.0035	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
65	Jatim	Mojokerto	0.0040	0.0051	0.0017	0.0071	0.0057	0.0035	0.0031	0.0026	0.0074	0.0052
66	Jatim	Pamekasan	0.0018	0.0038	0.0017	0.0044	0.0057	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
67	Jatim	Pasuruan	0.0066	0.0038	0.0017	0.0071	0.0070	0.0035	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
68	Jatim	Ponorogo	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
69	Jatim	Sidoarjo	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0033	0.0052
70	Jatim	Situbondo	0.0018	0.0033	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
71	Jatim	Tulungagung	0.0018	0.0013	0.0006	0.0044	0.0057	0.0035	0.0014	0.0007	0.0074	0.0052
72	Kalbar	Kapuas Hulu	0.0005	0.0033	0.0003	0.0010	0.0011	0.0006	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
73	Kalbar	Ketapang	0.0005	0.0038	0.0003	0.0010	0.0011	0.0003	0.0031	0.0026	0.0016	0.0008
74	Kalbar	Pontianak	0.0009	0.0051	0.0017	0.0031	0.0011	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0004
75	Kalbar	Sambas	0.0009	0.0033	0.0003	0.0010	0.0011	0.0018	0.0014	0.0003	0.0016	0.0008
76	Kalbar	Sanggau	0.0009	0.0006	0.0003	0.0010	0.0007	0.0006	0.0006	0.0003	0.0016	0.0008
77	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
78	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
79	Kalsel	Hulu Sungai Utara	0.0009	0.0033	0.0017	0.0010	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
80	Kalsel	Tabalong	0.0018	0.0013	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0006	0.0015	0.0074	0.0052
81	Kalsel	Tanah Laut	0.0018	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
82	Kalsel	Tapin	0.0005	0.0033	0.0017	0.0005	0.0011	0.0003	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
83	Kalteng	Barito Selatan	0.0009	0.0006	0.0003	0.0010	0.0007	0.0003	0.0003	0.0003	0.0033	0.0008
84	Kalteng	Barito Utara	0.0018	0.0033	0.0003	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
85	Kalteng	Kapuas	0.0009	0.0033	0.0003	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
86	Kaltim	Berau	0.0009	0.0033	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0022	0.0016	0.0004
87	Kaltim	Bulungan	0.0009	0.0038	0.0017	0.0031	0.0007	0.0018	0.0031	0.0026	0.0033	0.0004
88	Kaltim	Kutai	0.0009	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
89	Kaltim	Kutai Timur	0.0005	0.0006	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0003	0.0003	0.0008	0.0004
90	Kaltim	Nunukan	0.0005	0.0038	0.0003	0.0031	0.0007	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0004
91	Kaltim	Pasir	0.0018	0.0038	0.0017	0.0010	0.0007	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0008
92	Lampung	Lampung Barat	0.0018	0.0033	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0007	0.0033	0.0022
93	Lampung	Lampung Selatan	0.0009	0.0038	0.0017	0.0031	0.0011	0.0006	0.0031	0.0022	0.0033	0.0008
94	Lampung	Lampung Timur	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0006	0.0031	0.0015	0.0016	0.0008
95	Lampung	Lampung Utara	0.0005	0.0033	0.0017	0.0005	0.0011	0.0003	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
96	Lampung	Way Kanan	0.0018	0.0006	0.0003	0.0031	0.0029	0.0018	0.0003	0.0007	0.0033	0.0022
97	NTB	Bima	0.0009	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
98	NTB	Dompu	0.0009	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0006	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
99	NTB	Lombok Barat	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0008
100	NTB	Lombok Timur	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
101	NTT	Belu	0.0018	0.0033	0.0006	0.0031	0.0011	0.0018	0.0006	0.0007	0.0033	0.0008
102	NTT	Ende	0.0018	0.0038	0.0017	0.0010	0.0011	0.0018	0.0014	0.0026	0.0033	0.0008
103	NTT	Flores Timur	0.0018	0.0038	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
104	NTT	Manggarai	0.0005	0.0013	0.0017	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
105	NTT	Ngada	0.0005	0.0033	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0003	0.0008	0.0004
106	NTT	Sumba Barat	0.0009	0.0033	0.0017	0.0005	0.0011	0.0006	0.0014	0.0015	0.0016	0.0008
107	NTT	Timur Tengah Selatan	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
108	NTT	Timur Tengah Utara	0.0018	0.0013	0.0006	0.0031	0.0029	0.0018	0.0006	0.0007	0.0033	0.0022

NO	PROPINSI	KABUPATEN	FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK									
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik					Kualitas Infrastruktur Fisik				
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Listrik	Telepon
			0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175	0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139
109	Papua	Fak-Fak	0.0009	0.0013	0.0006	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
110	Papua	Jayawijaya	0.0009	0.0033	0.0017	0.0010	0.0011	0.0006	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
111	Papua	Manokwari	0.0018	0.0033	0.0017	0.0010	0.0011	0.0018	0.0014	0.0026	0.0016	0.0008
112	Papua	Mimika	0.0009	0.0033	0.0017	0.0010	0.0011	0.0006	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
113	Papua	Sorong	0.0005	0.0033	0.0017	0.0010	0.0007	0.0003	0.0014	0.0015	0.0016	0.0004
114	Riau	Bengkalis	0.0005	0.0033	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0003	0.0016	0.0008
115	Riau	Indragiri Hilir	0.0005	0.0038	0.0003	0.0010	0.0007	0.0006	0.0031	0.0007	0.0016	0.0004
116	Riau	Kampar	0.0018	0.0033	0.0017	0.0005	0.0011	0.0018	0.0014	0.0022	0.0016	0.0022
117	Riau	Kuantan Singingi	0.0005	0.0006	0.0003	0.0010	0.0011	0.0003	0.0003	0.0003	0.0016	0.0008
118	Riau	Pelalawan	0.0018	0.0038	0.0017	0.0005	0.0007	0.0018	0.0031	0.0015	0.0008	0.0008
119	Riau	Rokan Hulu	0.0005	0.0006	0.0003	0.0005	0.0007	0.0003	0.0006	0.0015	0.0008	0.0004
120	Sulsel	Bantaeng	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0011	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
121	Sulsel	Barru	0.0040	0.0038	0.0017	0.0005	0.0057	0.0035	0.0031	0.0026	0.0008	0.0052
122	Sulsel	Bone	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
123	Sulsel	Enrekang	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
124	Sulsel	Gowa	0.0040	0.0038	0.0017	0.0044	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0052
125	Sulsel	Jeneponto	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
126	Sulsel	Luwu	0.0018	0.0038	0.0017	0.0005	0.0011	0.0018	0.0014	0.0015	0.0008	0.0004
127	Sulsel	Luwu Utara	0.0018	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
128	Sulsel	Majene	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
129	Sulsel	Maros	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0026	0.0033	0.0022
130	Sulsel	Pangkep	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0031	0.0022	0.0016	0.0022
131	Sulsel	Pinrang	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0057	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
132	Sulsel	Selayar	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0011	0.0003	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
133	Sulsel	Sinjai	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
134	Sulsel	Takalar	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0057	0.0018	0.0031	0.0022	0.0074	0.0052
135	Sulsel	Tana Toraja	0.0005	0.0033	0.0006	0.0005	0.0011	0.0018	0.0014	0.0015	0.0008	0.0022
136	Sulteng	Banggai	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0007	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
137	Sulteng	Donggala	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0007	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
138	Sulteng	Morowali	0.0005	0.0033	0.0006	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0015	0.0016	0.0004
139	Sulteng	Poso	0.0018	0.0033	0.0017	0.0010	0.0029	0.0018	0.0014	0.0007	0.0016	0.0004
140	Sulteng	Toli-Toli	0.0005	0.0033	0.0017	0.0005	0.0007	0.0003	0.0014	0.0003	0.0008	0.0004
141	Sultra	Buton	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
142	Sultra	Kolaka	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
143	Sulut	Minahasa	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
144	Sulut	Sangihe	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0022
145	Sumbar	Pasaman	0.0005	0.0006	0.0006	0.0005	0.0029	0.0003	0.0006	0.0007	0.0008	0.0004
146	Sumbar	Pesisir Selatan	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0033	0.0022
147	Sumbar	Sawah Lunto Sijunjung	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0022	0.0016	0.0004
148	Sumbar	Solok	0.0040	0.0038	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0022
149	Sumsel	Lahat	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0006	0.0006	0.0015	0.0033	0.0008
150	Sumsel	Muara Enim	0.0009	0.0006	0.0006	0.0031	0.0029	0.0006	0.0006	0.0003	0.0033	0.0008
151	Sumsel	Musi Banyuasin	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
152	Sumsel	Musi Rawas	0.0005	0.0006	0.0006	0.0031	0.0007	0.0018	0.0006	0.0015	0.0033	0.0008
153	Sumsel	Ogan Kemiling Ilir	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0035	0.0031	0.0015	0.0033	0.0008
154	Sumut	Asahan	0.0018	0.0038	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0031	0.0022	0.0033	0.0052
155	Sumut	Dairi	0.0018	0.0013	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0006	0.0007	0.0033	0.0022
156	Sumut	Deli Serdang	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0033	0.0004
157	Sumut	Labuhan Batu	0.0009	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0014	0.0022	0.0074	0.0022
158	Sumut	Langkat	0.0018	0.0033	0.0017	0.0044	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
159	Sumut	Simalungun	0.0018	0.0006	0.0003	0.0044	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0033	0.0022
160	Sumut	Tanah Karo	0.0018	0.0033	0.0017	0.0031	0.0029	0.0018	0.0014	0.0015	0.0074	0.0022
161	Sumut	Tapanuli Utara	0.0018	0.0006	0.0003	0.0010	0.0029	0.0018	0.0003	0.0003	0.0016	0.0022

INTENSITAS INDIKATOR DATA SEKUNDER/Intensity of Secondary Indicators**Lampiran 13 : Variabel Keuangan Daerah/Regional Finance Variables****Lampiran 13.A : Variabel Keuangan Daerah 53 Kota/Regional Finance of 53 Cities**

NO	PROPINSI	KOTA	Indikator Retribusi Terhadap Pajak			Indikator Retribusi Terhadap APBD		
			Rasio	Intensitas	Score	Rasio	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	159.05	KKRSD	0.0051	20.9	KKAR	0.0014
2	Sumut	Medan	73.84	KKRR	0.0083	27.5	KKASD	0.0023
3	Sumut	Pematang Siantar	138.83	KKRSD	0.0051	37.4	KKAT	0.0037
4	Sumut	Sibolga	370.41	KKRST	0.0020	61.5	KKAST	0.0059
5	Sumut	Tanjung Balai	150.50	KKRSD	0.0051	35.1	KKASD	0.0023
6	Sumut	Tebing Tinggi	110.23	KKRR	0.0083	33.6	KKASD	0.0023
7	Sumbar	Padang	41.40	KKRSR	0.0132	14.0	KKASR	0.0009
8	Sumbar	Sawahlunto	258.14	KKRT	0.0031	27.1	KKASD	0.0023
9	Riau	Pekanbaru	106.40	KKRR	0.0083	31.7	KKASD	0.0023
10	Riau	Dumai	76.64	KKRR	0.0083	44.6	KKAST	0.0059
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	30.38	KKRSR	0.0132	NA		
12	Kep. Riau	Batam	95.90	KKRR	0.0083	52.8	KKAST	0.0059
13	Jambi	Jambi	154.17	KKRSD	0.0051	14.8	KKASR	0.0009
14	Sumsel	Palembang	95.06	KKRR	0.0083	22.2	KKAR	0.0014
15	Babel	Pangkal Pinang	264.35	KKRT	0.0031	30.2	KKASD	0.0023
16	Bengkulu	Bengkulu	156.36	KKRSD	0.0051	17.1	KKAR	0.0014
17	Lampung	Bandar Lampung	51.77	KKRSR	0.0132	14.8	KKASR	0.0009
18	Banten	Cilegon	5.16	KKRSR	0.0132	33.5	KKASD	0.0023
19	Banten	Tangerang	43.11	KKRSR	0.0132	42.1	KKAT	0.0037
20	DKI	DKI Jakarta	8.11	KKRSR	0.0132	38.8	KKAT	0.0037
21	Jabar	Bekasi	118.78	KKRSD	0.0051	40.7	KKAT	0.0037
22	Jabar	Bogor	96.75	KKRR	0.0083	24.2	KKASD	0.0023
23	Jabar	Bandung	72.54	KKRR	0.0083	25.1	KKASD	0.0023
24	Jabar	Sukabumi	959.02	KKRST	0.0020	27.6	KKASD	0.0023
25	Jabar	Cirebon	135.27	KKRSD	0.0051	24.8	KKASD	0.0023
26	Jateng	Semarang	59.16	KKRR	0.0083	81.5	KKAST	0.0059
27	Jateng	Tegal	341.91	KKRST	0.0020	42.2	KKAT	0.0037
28	Jateng	Pekalongan	74.69	KKRR	0.0083	36.5	KKAT	0.0037
29	Jateng	Surakarta	102.53	KKRR	0.0083	15.6	KKASR	0.0009
30	DIY	Jogyakarta	62.88	KKRR	0.0083	9.8	KKASR	0.0009
31	Jatim	Kediri	98.28	KKRR	0.0083	20.0	KKAR	0.0014
32	Jatim	Malang	93.13	KKRR	0.0083	21.4	KKAR	0.0014
33	Jatim	Madiun	115.29	KKRSD	0.0051	55.4	KKAST	0.0059
34	Jatim	Mojokerto	157.48	KKRSD	0.0051	30.9	KKASD	0.0023
35	Jatim	Surabaya	61.96	KKRR	0.0083	22.4	KKAR	0.0014
36	Jatim	Probolinggo	257.17	KKRT	0.0031	33.3	KKASD	0.0023
37	Bali	Denpasar	43.31	KKRSR	0.0132	30.6	KKASD	0.0023
38	Kalbar	Pontianak	68.63	KKRR	0.0083	27.0	KKASD	0.0023
39	Kalteng	Palangkaraya	113.10	KKRSD	0.0051	25.4	KKASD	0.0023
40	Kalsel	Banjarmasin	63.05	KKRR	0.0083	17.1	KKAR	0.0014
41	Kaltim	Balikpapan	54.66	KKRSR	0.0132	51.9	KKAST	0.0059
42	Kaltim	Samarinda	154.83	KKRSD	0.0051	49.7	KKAST	0.0059
43	Sulut	Bitung	150.86	KKRSD	0.0051	32.2	KKASD	0.0023
44	Sulut	Manado	78.24	KKRR	0.0083	16.2	KKAR	0.0014
45	Gorontalo	Gorontalo	371.73	KKRST	0.0020	29.2	KKASD	0.0023
46	Sulteng	Palu	6.65	KKRSR	0.0132	66.5	KKAST	0.0059
47	Sultra	Kendari	66.60	KKRR	0.0083	18.7	KKAR	0.0014
48	Sulsel	Makasar	82.02	KKRR	0.0083	14.3	KKASR	0.0009
49	Sulsel	Pare-Pare	399.29	KKRST	0.0020	27.5	KKASD	0.0023
50	NTB	Mataram	86.85	KKRR	0.0083	32.2	KKASD	0.0023
51	NTT	Kupang	62.91	KKRR	0.0083	14.8	KKASR	0.0009
52	Iriabar	Sorong	76.39	KKRR	0.0083	38.0	KKAT	0.0037
53	Papua	Jayapura	102.78	KKRR	0.0083	31.3	KKASD	0.0023

Keterangan :**KKR** : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Retribusi/Pajak**KKK** : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Anggaran Pembangunan/APBDDibelakang **KKR/KKK** - **ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Sumber : Data APBD Kabupaten / Kota di Indonesia th.2002, DJPKPD yang telah diolah.

Rata-rata	168.30		Rata-rata	29.56	
Standev	111.94		Standev	13.43	
Skew	0.79		Skew	0.77	
Kuortis	(0.25)		Kuortis	0.19	
KKRST	280.24		KKAST	42.99	
KKRT	224.27	280.24	KKAT	36.28	42.99
KKRSD	112.33	224.27	KKASD	22.85	36.28
KKRR	56.36	112.33	KKAR	16.14	22.85
KKRSR		56.36	KKASR		16.14

Lampiran 13.B : Variabel Keuangan Daerah 161 Kabupaten
Regional Finance of 161 Regencies

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Retribusi Terhadap Pajak			Indikator Retribusi Terhadap APBD		
			Rasio	Intensitas	Score	Rasio	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	22.0	KKRSR	0.0132	29.3	KKASD	0.0023
2	Sumut	Dairi	288.8	KKRST	0.0020	28.6	KKASD	0.0023
3	Sumut	Deli Serdang	50.2	KKRSR	0.0132	18.8	KKAR	0.0014
4	Sumut	Simalungun	54.0	KKRSR	0.0132	31.3	KKASD	0.0023
5	Sumut	Tanah Karo	160.8	KKRSD	0.0051	22.2	KKAR	0.0014
6	Sumut	Labuhan Batu	100.9	KKRR	0.0083	23.1	KKASD	0.0023
7	Sumut	Langkat	42.8	KKRSR	0.0132	25.8	KKASD	0.0023
8	Sumut	Tapanuli Utara	447.6	KKRST	0.0020	31.5	KKASD	0.0023
9	Sumbar	Pesisir Selatan	341.4	KKRST	0.0020	21.6	KKAR	0.0014
10	Sumbar	Sawah Lunto Sijunjung	212.4	KKRSD	0.0051	32.2	KKASD	0.0023
11	Sumbar	Pasaman	273.7	KKRT	0.0031	29.1	KKASD	0.0023
12	Sumbar	Solok	148.2	KKRSD	0.0051	27.8	KKASD	0.0023
13	Riau	Bengkalis	22.9	KKRSR	0.0132	71.7	KKAST	0.0059
14	Riau	Indragiri Hilir	443.1	KKRST	0.0020	55.1	KKAST	0.0059
15	Riau	Kampar	165.9	KKRSD	0.0051	51.9	KKAST	0.0059
16	Riau	Kuantan Singingi	457.3	KKRST	0.0020	60.2	KKAST	0.0059
17	Riau	Pelalawan	43.2	KKRSR	0.0132	66.9	KKAST	0.0059
18	Riau	Rokan Hulu	369.7	KKRST	0.0020	48.6	KKAST	0.0059
19	Jambi	Batanghari	553.6	KKRST	0.0020	38.9	KKAT	0.0037
20	Jambi	Bungo	769.8	KKRST	0.0020	28.3	KKASD	0.0023
21	Jambi	Kerinci	212.0	KKRSD	0.0051	28.7	KKASD	0.0023
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	240.9	KKRT	0.0031	39.8	KKAT	0.0037
23	Jambi	Tebo	1,463.4	KKRST	0.0020	50.9	KKAST	0.0059
24	Sumsel	Muara Enim	24.7	KKRSR	0.0132	31.6	KKASD	0.0023
25	Sumsel	Musi Banyuasin	18.1	KKRSR	0.0132	49.1	KKAST	0.0059
26	Sumsel	Musi Rawas	281.0	KKRST	0.0020	44.7	KKAST	0.0059
27	Sumsel	Ogan Kemiling Ilir	136.7	KKRSD	0.0051	41.4	KKAT	0.0037
28	Sumsel	Lahat	128.1	KKRSD	0.0051	21.3	KKAR	0.0014
29	Babel	Bangka	54.2	KKRSR	0.0132	40.8	KKAT	0.0037
30	Babel	Belitung	19.9	KKRSR	0.0132	16.6	KKAR	0.0014
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	140.4	KKRSD	0.0051	16.0	KKASR	0.0009
32	Bengkulu	Rejang Lebong	313.9	KKRST	0.0020	18.7	KKAR	0.0014
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	218.6	KKRSD	0.0051	17.5	KKAR	0.0014
34	Lampung	Lampung Barat	113.1	KKRSD	0.0051	37.5	KKAT	0.0037
35	Lampung	Lampung Selatan	159.1	KKRSD	0.0051	17.1	KKAR	0.0014
36	Lampung	Lampung Timur	115.8	KKRSD	0.0051	9.6	KKASR	0.0009
37	Lampung	Lampung Utara	177.8	KKRSD	0.0051	25.8	KKASD	0.0023
38	Lampung	Way Kanan	210.9	KKRSD	0.0051	51.7	KKAST	0.0059
39	Banten	Lebak	799.0	KKRST	0.0020	29.8	KKASD	0.0023
40	Banten	Serang	145.7	KKRSD	0.0051	17.5	KKAR	0.0014
41	Banten	Tangerang	50.4	KKRSR	0.0132	32.4	KKASD	0.0023
42	Jabar	Bekasi	65.7	KKRR	0.0083	40.9	KKAT	0.0037
43	Jabar	Bogor	58.7	KKRR	0.0083	29.3	KKASD	0.0023
44	Jabar	Ciamis	375.8	KKRST	0.0020	8.2	KKASR	0.0009
45	Jabar	Tasikmalaya	290.7	KKRST	0.0020	7.6	KKASR	0.0009
46	Jabar	Garut	247.2	KKRT	0.0031	10.7	KKASR	0.0009
47	Jabar	Sumedang	145.9	KKRSD	0.0051	10.5	KKASR	0.0009
48	Jabar	Bandung	76.0	KKRR	0.0083	28.3	KKASD	0.0023
49	Jabar	Cianjur	200.8	KKRSD	0.0051	23.3	KKASD	0.0023
50	Jabar	Sukabumi	64.3	KKRR	0.0083	29.8	KKASD	0.0023
51	Jabar	Cirebon	112.1	KKRR	0.0083	23.8	KKASD	0.0023
52	Jabar	Kuningan	416.5	KKRST	0.0020	8.5	KKASR	0.0009
53	Jabar	Indramayu	67.6	KKRR	0.0083	28.4	KKASD	0.0023
54	Jabar	Purwakarta	113.1	KKRSD	0.0051	19.3	KKAR	0.0014
55	Jabar	Karawang	197.6	KKRSD	0.0051	30.3	KKASD	0.0023
56	Jabar	Subang	280.7	KKRST	0.0020	21.2	KKAR	0.0014
57	Jateng	Kendal	126.3	KKRSD	0.0051	5.8	KKASR	0.0009
58	Jateng	Pekalongan	116.2	KKRSD	0.0051	20.7	KKAR	0.0014
59	Jateng	Pemalang	228.5	KKRT	0.0031	15.3	KKASR	0.0009

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Retribusi Terhadap Pajak			Indikator Retribusi Terhadap APBD		
			Rasio	Intensitas	Score	Rasio	Intensitas	Score
60	Jateng	Tegal	270.6	KKRT	0.0031	27.1	KKASD	0.0023
61	Jateng	Jepara	309.2	KKRST	0.0020	27.3	KKASD	0.0023
62	Jateng	Kudus	324.6	KKRST	0.0020	33.8	KKASD	0.0023
63	Jateng	Banyumas	279.1	KKRT	0.0031	12.7	KKASR	0.0009
64	Jateng	Cilacap	88.2	KKRR	0.0083	17.4	KKAR	0.0014
65	Jateng	Wonosobo	435.4	KKRST	0.0020	19.5	KKAR	0.0014
66	Jateng	Kebumen	248.7	KKRT	0.0031	16.2	KKAR	0.0014
67	Jateng	Boyolali	411.1	KKRST	0.0020	13.6	KKASR	0.0009
68	Jateng	Sukoharjo	88.1	KKRR	0.0083	11.8	KKASR	0.0009
69	Jateng	Karanganyar	144.2	KKRSD	0.0051	14.9	KKASR	0.0009
70	Jateng	Klaten	109.8	KKRR	0.0083	10.0	KKASR	0.0009
71	Jateng	Magelang	83.7	KKRR	0.0083	23.1	KKASD	0.0023
72	DIY	Bantul	296.9	KKRST	0.0020	15.8	KKASR	0.0009
73	DIY	Gunung Kidul	554.2	KKRST	0.0020	16.3	KKAR	0.0014
74	Jatim	Blitar	192.5	KKRSD	0.0051	8.3	KKASR	0.0009
75	Jatim	Kediri	155.9	KKRSD	0.0051	17.2	KKAR	0.0014
76	Jatim	Magetan	147.7	KKRSD	0.0051	16.2	KKAR	0.0014
77	Jatim	Ponorogo	216.6	KKRSD	0.0051	21.9	KKAR	0.0014
78	Jatim	Tulungagung	216.0	KKRSD	0.0051	17.4	KKAR	0.0014
79	Jatim	Mojokerto	91.9	KKRR	0.0083	21.0	KKAR	0.0014
80	Jatim	Pamekasan	276.3	KKRT	0.0031	19.1	KKAR	0.0014
81	Jatim	Bangkalan	234.5	KKRT	0.0031	21.6	KKAR	0.0014
82	Jatim	Pasuruan	45.0	KKRSR	0.0132	26.5	KKASD	0.0023
83	Jatim	Sidoarjo	139.5	KKRSD	0.0051	23.7	KKASD	0.0023
84	Jatim	Gresik	30.0	KKRSR	0.0132	20.9	KKAR	0.0014
85	Jatim	Jombang	128.5	KKRSD	0.0051	28.2	KKASD	0.0023
86	Jatim	Lamongan	155.9	KKRSD	0.0051	22.0	KKAR	0.0014
87	Jatim	Banyuwangi	150.8	KKRSD	0.0051	19.9	KKAR	0.0014
88	Jatim	Bondowoso	124.2	KKRSD	0.0051	10.4	KKASR	0.0009
89	Jatim	Situbondo	81.6	KKRR	0.0083	27.8	KKASD	0.0023
90	Jatim	Jember	273.0	KKRT	0.0031	28.3	KKASD	0.0023
91	Bali	Badung	1.5	KKRSR	0.0132	53.2	KKAST	0.0059
92	Bali	Bangli	231.2	KKRT	0.0031	22.8	KKAR	0.0014
93	Bali	Buleleng	77.1	KKRR	0.0083	15.4	KKASR	0.0009
94	Bali	Gianyar	35.8	KKRSR	0.0132	39.3	KKAT	0.0037
95	Bali	Jembrana	240.6	KKRT	0.0031	12.8	KKASR	0.0009
96	Bali	Tabanan	114.3	KKRSD	0.0051	28.0	KKASD	0.0023
97	Bali	Klungkung	164.8	KKRSD	0.0051	NA		
98	Bali	Karangasem	21.1	KKRSR	0.0132	30.7	KKASD	0.0023
99	Kalbar	Kapuas Hulu	363.5	KKRST	0.0020	40.1	KKAT	0.0037
100	Kalbar	Ketapang	218.5	KKRSD	0.0051	43.3	KKAST	0.0059
101	Kalbar	Pontianak	35.8	KKRSR	0.0132	21.0	KKAR	0.0014
102	Kalbar	Sambas	251.2	KKRT	0.0031	32.3	KKASD	0.0023
103	Kalbar	Sanggau	127.8	KKRSD	0.0051	28.0	KKASD	0.0023
104	Kalteng	Barito Selatan	158.5	KKRSD	0.0051	65.9	KKAST	0.0059
105	Kalteng	Barito Utara	208.5	KKRSD	0.0051	45.0	KKAST	0.0059
106	Kalteng	Kapuas	128.6	KKRSD	0.0051	35.4	KKASD	0.0023
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	347.3	KKRST	0.0020	30.4	KKASD	0.0023
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	224.1	KKRT	0.0031	30.6	KKASD	0.0023
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	116.6	KKRSD	0.0051	25.6	KKASD	0.0023
110	Kalsel	Tabalong	8.0	KKRSR	0.0132	30.8	KKASD	0.0023
111	Kalsel	Tanah Laut	177.5	KKRSD	0.0051	30.0	KKASD	0.0023
112	Kalsel	Tapin	47.8	KKRSR	0.0132	22.0	KKAR	0.0014
113	Kaltim	Berau	99.3	KKRR	0.0083	56.7	KKAST	0.0059
114	Kaltim	Kutai	71.6	KKRR	0.0083	64.3	KKAST	0.0059
115	Kaltim	Pasir	52.3	KKRSR	0.0132	60.5	KKAST	0.0059
116	Kaltim	Bulungan	206.6	KKRSD	0.0051	51.6	KKAST	0.0059
117	Kaltim	Kutai Timur	55.2	KKRSR	0.0132	65.5	KKAST	0.0059
118	Kaltim	Nunukan	185.9	KKRSD	0.0051	62.5	KKAST	0.0059

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Retribusi Terhadap Pajak			Indikator Retribusi Terhadap APBD		
			Rasio	Intensitas	Score	Rasio	Intensitas	Score
119	Sulut	Minahasa	179.4	KKRSD	0.0051	-	KKASR	0.0009
120	Sulut	Sangihe	436.1	KKRST	0.0020	10.4	KKASR	0.0009
121	Gorontalo	Gorontalo	363.9	KKRST	0.0020	21.2	KKAR	0.0014
122	Sulteng	Banggai	132.2	KKRSD	0.0051	29.1	KKASD	0.0023
123	Sulteng	Toli-Toli	9.5	KKRSR	0.0132	33.3	KKASD	0.0023
124	Sulteng	Donggala	91.7	KKRR	0.0083	1.2	KKASR	0.0009
125	Sulteng	Morowali	256.2	KKRT	0.0031	36.5	KKAT	0.0037
126	Sulteng	Poso	295.1	KKRST	0.0020	32.2	KKASD	0.0023
127	Sultra	Buton	449.5	KKRST	0.0020	24.7	KKASD	0.0023
128	Sultra	Kolaka	66.5	KKRR	0.0083	28.2	KKASD	0.0023
129	Sulsel	Gowa	114.9	KKRSD	0.0051	29.8	KKASD	0.0023
130	Sulsel	Takalar	270.8	KKRT	0.0031	19.4	KKAR	0.0014
131	Sulsel	Jeneponto	308.3	KKRST	0.0020	25.7	KKASD	0.0023
132	Sulsel	Bantaeng	298.6	KKRST	0.0020	37.7	KKAT	0.0037
133	Sulsel	Sinjai	493.4	KKRST	0.0020	25.7	KKASD	0.0023
134	Sulsel	Selayar	145.7	KKRSD	0.0051	39.5	KKAT	0.0037
135	Sulsel	Bone	333.0	KKRST	0.0020	8.6	KKASR	0.0009
136	Sulsel	Maros	71.7	KKRR	0.0083	34.7	KKASD	0.0023
137	Sulsel	Pangkep	25.8	KKRSR	0.0132	37.3	KKAT	0.0037
138	Sulsel	Barru	163.2	KKRSD	0.0051	37.4	KKAT	0.0037
139	Sulsel	Pinrang	147.3	KKRSD	0.0051	27.4	KKASD	0.0023
140	Sulsel	Majene	165.7	KKRSD	0.0051	32.2	KKASD	0.0023
141	Sulsel	Enrekang	118.6	KKRSD	0.0051	34.4	KKASD	0.0023
142	Sulsel	Tana Toraja	152.4	KKRSD	0.0051	26.5	KKASD	0.0023
143	Sulsel	Luwu	428.7	KKRST	0.0020	27.6	KKASD	0.0023
144	Sulsel	Luwu Utara	26.6	KKRSR	0.0132	34.4	KKASD	0.0023
145	NTB	Bima	74.6	KKRR	0.0083	21.1	KKAR	0.0014
146	NTB	Lombok Timur	444.4	KKRST	0.0020	29.5	KKASD	0.0023
147	NTB	Dompu	177.0	KKRSD	0.0051	26.7	KKASD	0.0023
148	NTB	Lombok Barat	31.5	KKRSR	0.0132	18.4	KKAR	0.0014
149	NTT	Ende	240.7	KKRT	0.0031	17.0	KKAR	0.0014
150	NTT	Flores Timur	219.0	KKRSD	0.0051	31.9	KKASD	0.0023
151	NTT	Manggarai	245.8	KKRT	0.0031	24.4	KKASD	0.0023
152	NTT	Ngada	397.1	KKRST	0.0020	31.8	KKASD	0.0023
153	NTT	Timur Tengah Selatan	287.6	KKRST	0.0020	36.3	KKAT	0.0037
154	NTT	Timur Tengah Utara	321.9	KKRST	0.0020	36.6	KKAT	0.0037
155	NTT	Belu	108.2	KKRR	0.0083	28.3	KKASD	0.0023
156	NTT	Sumba Barat	321.6	KKRST	0.0020	33.9	KKASD	0.0023
157	Irjabar	Fak-Fak	79.1	KKRR	0.0083	30.5	KKASD	0.0023
158	Irjabar	Manokwari	184.3	KKRSD	0.0051	44.7	KKAST	0.0059
159	Irjabar	Sorong	710.2	KKRST	0.0020	24.8	KKASD	0.0023
160	Papua	Jayawijaya	207.2	KKRSD	0.0051	42.9	KKAT	0.0037
161	Irjabar	Mimika	15.8	KKRSR	0.0132	42.4	KKAT	0.0037

Keterangan :**KKR** : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Retribusi/Pajak**KKR** : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Anggaran Pembangunan/APBDDibelakang **KKR/KA** - **ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Sumber : Data APBD Kabupaten / Kota di Indonesia th.2002, DJPKPD yang telah diolah.

Rata-rata	168.30		Rata-rata	29.56	
Standev	111.94		Standev	13.43	
Skew	0.79		Skew	0.77	
Kuortis	(0.25)		Kuortis	0.19	
KKRST	280.24		KKAST	42.99	
KKRT	224.27	280.24	KKAT	36.28	42.99
KKRSD	112.33	224.27	KKASD	22.85	36.28
KKRR	56.36	112.33	KKAR	16.14	22.85
KKRSR		56.36	KKASR		16.14

Lampiran 14 : Faktor Ekonomi Daerah/Regional Economic Dynamism**Lampiran 14.1 : Variabel Potensi Ekonomi/Economic Potential****Lampiran 14.1.A : Variabel Potensi Ekonomi 53 Kota/Economic Potential of 53 Cities**

NO	PROPINSI	KOTA	Indikator PDRB Perkapita (Tanpa Migas)			Indikator IPM		
			PDRB Perkapita 2003	Intensitas	Score	IPM 2002	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	5,653,730.46	EPPSD	0.0062	71.6	EPIT	0.0079
2	Sumut	Medan	10,978,428.71	EPPST	0.0247	73.5	EPIT	0.0079
3	Sumut	Pematang Siantar	11,061,995.71	EPPST	0.0247	74.1	EPIT	0.0079
4	Sumut	Sibolga	7,060,866.73	EPPT	0.0126	70.7	EPISD	0.0051
5	Sumut	Tanjung Balai	8,847,791.33	EPPST	0.0247	67.8	EPISD	0.0051
6	Sumut	Tebing Tinggi	7,431,762.64	EPPT	0.0126	71.6	EPIT	0.0079
7	Sumbar	Padang	13,421,682.83	EPPST	0.0247	73.2	EPIT	0.0079
8	Sumbar	Sawahlunto	10,464,928.70	EPPST	0.0247	70.8	EPIT	0.0079
9	Riau	Pekanbaru	7,008,889.48	EPPT	0.0126	73.4	EPIT	0.0079
10	Riau	Dumai	4,930,547.20	EPPSD	0.0062	71.5	EPIT	0.0079
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	8,284,725.82	EPPST	0.0247	69.1	EPISD	0.0051
12	Kep. Riau	Batam	17,053,694.82	EPPST	0.0247	73.2	EPIT	0.0079
13	Jambi	Jambi	6,183,619.98	EPPSD	0.0062	71.4	EPIT	0.0079
14	Sumsel	Palembang	9,639,451.14	EPPST	0.0247	71.2	EPIT	0.0079
15	Babel	Pangkal Pinang	6,569,276.62	EPPSD	0.0062	69.6	EPISD	0.0051
16	Bengkulu	Bengkulu	6,661,451.24	EPPSD	0.0062	72.7	EPIT	0.0079
17	Lampung	Bandar Lampung	8,427,737.72	EPPST	0.0247	70.5	EPISD	0.0051
18	Banten	Cilegon	30,610,025.32	EPPST	0.0247	68.4	EPISD	0.0051
19	Banten	Tangerang	16,212,848.18	EPPST	0.0247	72.2	EPIT	0.0079
20	DKI	Jakarta	32,869,698.03	EPPST	0.0247	75.6	EPIST	0.0086
21	Jabar	Bekasi	6,450,895.55	EPPSD	0.0062	72.8	EPIT	0.0079
22	Jabar	Bogor	4,462,727.02	EPPSD	0.0062	71.9	EPIT	0.0079
23	Jabar	Bandung	10,496,936.77	EPPST	0.0247	73.0	EPIT	0.0079
24	Jabar	Sukabumi	5,735,910.57	EPPSD	0.0062	69.2	EPISD	0.0051
25	Jabar	Cirebon	19,536,606.39	EPPST	0.0247	69.2	EPISD	0.0051
26	Jateng	Semarang	13,718,473.20	EPPST	0.0247	73.6	EPIT	0.0079
27	Jateng	Tegal	4,939,501.16	EPPSD	0.0062	68.5	EPISD	0.0051
28	Jateng	Pekalongan	7,073,279.64	EPPT	0.0126	68.2	EPISD	0.0051
29	Jateng	Surakarta	8,485,229.80	EPPST	0.0247	73.0	EPIT	0.0079
30	DIY	Yogyakarta	11,852,832.67	EPPST	0.0247	75.3	EPIST	0.0086
31	Jatim	Kediri	87,257,031.37	EPPST	0.0247	70.8	EPIT	0.0079
32	Jatim	Malang	12,175,345.92	EPPST	0.0247	71.4	EPIT	0.0079
33	Jatim	Madiun	6,041,196.12	EPPSD	0.0062	70.7	EPISD	0.0051
34	Jatim	Mojoekerto	7,681,666.75	EPPT	0.0126	72.8	EPIT	0.0079
35	Jatim	Surabaya	22,788,011.11	EPPST	0.0247	72.0	EPIT	0.0079
36	Jatim	Probolinggo	7,607,712.93	EPPT	0.0126	67.7	EPISD	0.0051
37	Bali	Denpasar	8,956,571.50	EPPST	0.0247	74.9	EPIT	0.0079
38	Kalbar	Pontianak	12,354,349.51	EPPST	0.0247	67.6	EPISD	0.0051
39	Kalteng	Palangkaraya	6,888,981.49	EPPT	0.0126	74.2	EPIT	0.0079
40	Kalsel	Banjarmasin	3,530,482.94	EPPR	0.0030	69.2	EPISD	0.0051
41	Kaltim	Balikpapan	19,568,473.23	EPPST	0.0247	73.0	EPIT	0.0079
42	Kaltim	Samarinda	17,270,930.92	EPPST	0.0247	72.6	EPIT	0.0079
43	Sulut	Bitung	8,755,154.10	EPPST	0.0247	70.7	EPISD	0.0051
44	Sulut	Manado	7,974,953.02	EPPT	0.0126	74.2	EPIT	0.0079
45	Gorontalo	Gorontalo	3,799,207.15	EPPR	0.0030	67.8	EPISD	0.0051
46	Sulteng	Palu	6,813,889.71	EPPT	0.0126	70.5	EPISD	0.0051
47	Sultra	Kendari	6,086,160.42	EPPSD	0.0062	70.5	EPISD	0.0051
48	Sulsel	Makasar	8,650,103.55	EPPST	0.0247	73.9	EPIT	0.0079
49	Sulsel	Pare Pare	5,296,298.88	EPPSD	0.0062	72.3	EPIT	0.0079
50	NTB	Mataram	4,428,548.62	EPPSD	0.0062	65.2	EPISD	0.0051
51	NTT	Kupang	7,005,344.63	EPPT	0.0126	70.9	EPIT	0.0079
52	Irjabar	Sorong	4,179,947.96	EPPSD	0.0062	73.0	EPIT	0.0079
53	Papua	Jayapura	7,888,773.11	EPPT	0.0126	71.4	EPIT	0.0079

Keterangan :

EPP : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - PDRB Perkapita

EPI : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - IPM

Dibelakang EPP/EPI - ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Sumber : BPS Pusat, yang telah diolah.

Rata-rata PDRB Perkapita Kota : 11,417,446.80 IPM Indonesia : 65.8

EPPST	8,013,324.44	-	EPIST	75.2	-
EPPT	6,681,746.92	8,013,324.44	EPIT	70.8	75.2
EPPSD	4,018,591.87	6,681,746.92	EPISD	61.9	70.8
EPPR	2,687,014.34	4,018,591.87	EPIR	57.4	61.9
EPPSR	-	2,687,014.34	EPISR	-	57.4

Yang digunakan sebagai indikator adalah PDRB Perkapita tanpa Migas

*) Menggunakan data IPM Propinsi

Lampiran 14.1.A.1 : Intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi 53 Kota*The Intensity of 53 Cities of Growth Indicators*(Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi tahun 1999 - 2003/ *Average of Growth Indicators in 1999-2003*)

NO	PROPINSI	KOTA	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-Rata	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	4.4	6.8	2.9	3.8	8.1	5.2	EPGSD	0.0062
2	Sumut	Medan	3.4	5.5	5.0	4.3	5.0	4.6	EPGSD	0.0062
3	Sumut	Pematang Siantar	4.3	4.7	6.2	6.2	5.5	5.4	EPGSD	0.0062
4	Sumut	Sibolga	5.2	5.3	5.7	4.7	5.4	5.2	EPGSD	0.0062
5	Sumut	Tanjung Balai	2.6	4.5	5.3	5.3	5.5	4.6	EPGSD	0.0062
6	Sumut	Tebing Tinggi	3.1	2.9	3.4	3.8	3.9	3.4	EPGSD	0.0062
7	Sumbar	Padang	1.7	4.2	4.2	4.5	4.7	3.9	EPGSD	0.0062
8	Sumbar	Sawahlunto	(5.9)	(6.1)	(2.6)	(0.8)	(3.4)	(3.7)	EPGSR	0.0016
9	Riau	Pekanbaru	(1.7)	16.5	2.7	14.9	7.4	8.0	EPGST	0.0222
10	Riau	Dumai			4.7	5.1	7.2	3.4	EPGT	0.0133
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang			5.6	6.8	4.0	3.3	EPGT	0.0133
12	Kep. Riau	Batam	6.4	7.7	5.2	6.0	75.3	20.1	EPGST	0.0222
13	Jambi	Jambi	3.0	1.3	3.2	3.7	3.9	3.0	EPGSD	0.0062
14	Sumsel	Palembang	3.0	17.9	4.4	6.0	6.6	7.6	EPGST	0.0222
15	Babel	Pangkal Pinang	1.6	8.7	5.9	5.5	6.1	5.6	EPGT	0.0133
16	Bengkulu	Bengkulu	4.0	5.5	4.0	4.5	4.7	4.5	EPGSD	0.0062
17	Lampung	Bandar Lampung	3.0	3.6	3.0	3.9	6.5	4.0	EPGSD	0.0062
18	Banten	Cilegon	2.1	4.4	4.8	3.9	4.8	4.0	EPGSD	0.0062
19	Banten	Tangerang	2.6	4.0	4.2	4.5	6.3	4.3	EPGSD	0.0062
20	DKI	Jakarta	0.7	3.4	3.5	3.8	4.2	3.1	EPGSD	0.0062
21	Jabar	Bekasi	2.6	6.9	5.0	5.3	4.7	4.9	EPGSD	0.0062
22	Jabar	Bogor	3.3	21.2	5.3	5.5	5.7	8.2	EPGST	0.0222
23	Jabar	Bandung	2.8	5.4	6.8	6.4	6.4	5.6	EPGT	0.0133
24	Jabar	Sukabumi	3.2	4.8	4.8	4.9	5.1	4.6	EPGSD	0.0062
25	Jabar	Cirebon	2.3	9.1	2.8	4.3	1.5	4.0	EPGSD	0.0062
26	Jateng	Semarang	3.4	5.0	4.9	3.9	4.4	4.3	EPGSD	0.0062
27	Jateng	Tegal	3.7	5.1	5.0	5.0	5.1	4.8	EPGSD	0.0062
28	Jateng	Pekalongan	4.0	4.0	4.1	3.3	3.7	3.8	EPGSD	0.0062
29	Jateng	Surakarta	1.4	4.2	3.8	5.1	6.1	4.1	EPGSD	0.0062
30	DIY	Yogyakarta	1.0	3.6	3.3	3.1	3.7	2.9	EPGSD	0.0062
31	Jatim	Kediri	1.5	5.8	5.7	(2.8)	3.3	2.7	EPGSD	0.0062
32	Jatim	Malang	1.5	3.0	2.2	7.7	4.0	3.7	EPGSD	0.0062
33	Jatim	Madiun	1.1	2.7	3.4	3.9	3.6	2.9	EPGSD	0.0062
34	Jatim	Mojokerto	1.3	8.4	2.3	7.4	3.9	4.7	EPGSD	0.0062
35	Jatim	Surabaya	(15.3)	(11.2)	4.1	3.7	4.5	(2.8)	EPGSR	0.0016
36	Jatim	Probolinggo	3.8	1.3	1.9	4.1	3.9	3.0	EPGSD	0.0062
37	Bali	Denpasar	1.4	3.1	3.8	2.9	3.5	3.0	EPGSD	0.0062
38	Kalbar	Pontianak	1.7	2.7	3.1	4.0	3.5	3.0	EPGSD	0.0062
39	Kalteng	Palangkaraya	0.2	(2.5)	2.6	0.7	3.7	0.9	EPGSR	0.0016
40	Kalsel	Banjarmasin	(0.1)	(60.7)	(1.3)	2.6	3.8	(11.1)	EPGSR	0.0016
41	Kaltim	Balikpapan	0.2	101.8	12.8	7.3	8.1	26.0	EPGST	0.0222
42	Kaltim	Samarinda	4.7	5.3	10.9	8.7	8.4	7.6	EPGST	0.0222
43	Sulut	Bitung	6.6	44.4	6.3	5.6	5.5	13.7	EPGST	0.0222
44	Sulut	Manado	1.6	6.0	4.9	4.8	5.4	4.6	EPGSD	0.0062
45	Gorontalo	Gorontalo	4.3	5.6	5.6	6.0	6.2	5.5	EPGT	0.0133
46	Sulteng	Palu	1.8	5.1	5.0	3.6	7.5	4.6	EPGSD	0.0062
47	Sultra	Kendari	(1.8)	7.9	7.3	5.3	8.1	5.4	EPGSD	0.0062
48	Sulsel	Makasar	4.2	5.6	5.7	5.8	6.9	5.6	EPGT	0.0133
49	Sulsel	Pare Pare	0.8	10.5	5.0	5.1	5.1	5.3	EPGSD	0.0062
50	NTB	Mataram	1.3	(16.8)	5.1	5.8	6.6	0.4	EPGSR	0.0016
51	NTT	Kupang	6.0	4.7	5.7	8.5	5.5	6.1	EPGT	0.0133
52	Irjabar	Sorong			5.9	6.9	6.7	6.5	EPGST	0.0222
53	Papua	Jayapura	(1.4)	10.1	4.7	5.3	6.1	5.0	EPGSD	0.0062
Rata-rata :			1.9	6.0	4.5	4.9	6.5	4.8		

Keterangan :**EPG** : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - Growth/Pertumbuhan EkonomiDibelakang **EPG-ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Sumber : BPS Pusat, yang telah diolah.

Rata-rata	3.8	EPGST	6.5	-
Standev	1.4	EPGT	5.1	6.5
Skew	(0.3)	EPGSD	2.5	5.1
Kuortis	0.2	EPGR	1.1	2.5
		EPGSR	-	1.1

Lampiran 14.1.B : Variabel Potensi Ekonomi 161 Kabupaten
Economic Potential of 161 Cities

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator PDRB Perkapita (Tanpa Migas)			Indikator IPM		
			PDRB Perkapita 2003	Intensitas	Score	IPM 2002	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	11,703,211.65	EPPST	0.0247	67.0	EPISD	0.0051
2	Sumut	Dairi	7,009,776.85	EPPT	0.0126	67.2	EPISD	0.0051
3	Sumut	Deliserdang	4,954,665.53	EPPSD	0.0062	68.4	EPISD	0.0051
4	Sumut	Langkat	5,205,232.65	EPPSD	0.0062	68.3	EPISD	0.0051
5	Sumut	Simalungun	6,027,802.24	EPPSD	0.0062	68.3	EPISD	0.0051
6	Sumut	Karo	7,680,394.31	EPPT	0.0126	70.9	EPIT	0.0079
7	Sumut	Labuhan Batu	9,618,574.34	EPPST	0.0247	67.3	EPISD	0.0051
8	Sumut	Tapanuli Utara	5,887,504.51	EPPSD	0.0062	67.3	EPISD	0.0051
9	Sumbar	Pesisir Selatan	4,263,622.71	EPPSD	0.0062	65.9	EPISD	0.0051
10	Sumbar	Sawalunto/Sijnjung	5,868,969.69	EPPSD	0.0062	61.5	EPIR	0.0014
11	Sumbar	Pasaman	4,081,792.10	EPPSD	0.0062	64.4	EPISD	0.0051
12	Sumbar	Solok	5,296,991.70	EPPSD	0.0062	63.7	EPISD	0.0051
13	Riau	Bengkalis	3,742,598.80	EPPR	0.0030	69.4	EPISD	0.0051
14	Riau	Indragiri Hilir	5,242,723.09	EPPSD	0.0062	67.8	EPISD	0.0051
15	Riau	Kampar	3,577,315.55	EPPR	0.0030	67.8	EPISD	0.0051
16	Riau	Kuantan Sengigi	5,415,548.88	EPPSD	0.0062	66.7	EPISD	0.0051
17	Riau	Pelalawan	4,714,421.51	EPPSD	0.0062	65.9	EPISD	0.0051
18	Riau	Rokan Hulu	3,533,650.37	EPPR	0.0030	64.2	EPISD	0.0051
19	Jambi	Batanghari	4,734,902.06	EPPSD	0.0062	66.7	EPISD	0.0051
20	Jambi	Bungo	4,242,281.74	EPPSD	0.0062	67.1	EPISD	0.0051
21	Jambi	Kerinci	5,160,169.70	EPPSD	0.0062	68.0	EPISD	0.0051
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	5,282,856.10	EPPSD	0.0062	65.3	EPISD	0.0051
23	Jambi	Tebo	3,267,601.35	EPPR	0.0030	64.2	EPISD	0.0051
24	Sumsel	Muara Enim	7,190,397.96	EPPT	0.0126	64.2	EPISD	0.0051
25	Sumsel	Musi Banyuasin	8,229,782.37	EPPT	0.0247	64.6	EPISD	0.0051
26	Sumsel	Musi Rawas	3,726,076.95	EPPR	0.0030	62.0	EPISD	0.0051
27	Sumsel	Ogan Komiring Ilir	4,414,535.98	EPPSD	0.0062	63.1	EPISD	0.0051
28	Sumsel	Lahat	4,708,979.86	EPPSD	0.0062	65.1	EPISD	0.0051
29	Babel	Bangka	6,439,356.38	EPPSD	0.0062	64.8	EPISD	0.0051
30	Babel	Belitung	7,771,669.90	EPPT	0.0126	66.6	EPISD	0.0051
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	4,064,228.24	EPPSD	0.0062	65.0	EPISD	0.0051
32	Bengkulu	Rejang Lebong	3,951,765.35	EPPR	0.0030	64.2	EPISD	0.0051
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	2,867,953.33	EPPR	0.0030	64.4	EPISD	0.0051
34	Lampung	Lampung Barat	2,487,042.08	EPPSR	0.0016	63.1	EPISD	0.0051
35	Lampung	Lampung Selatan	3,925,609.94	EPPR	0.0030	64.4	EPISD	0.0051
36	Lampung	Lampung Timur	3,674,880.42	EPPR	0.0030	65.7	EPISD	0.0051
37	Lampung	Lampung Utara	3,697,226.27	EPPR	0.0030	66.3	EPISD	0.0051
38	Lampung	Way Kanan	2,616,837.10	EPPSR	0.0016	64.5	EPISD	0.0051
39	Banten	Lebak	3,386,405.25	EPPR	0.0030	61.6	EPIR	0.0014
40	Banten	Serang	4,981,952.26	EPPSD	0.0062	63.7	EPISD	0.0051
41	Banten	Tangerang	5,698,117.72	EPPSD	0.0062	70.7	EPISD	0.0051
42	Jabar	Bekasi	20,144,074.81	EPPT	0.0247	66.9	EPISD	0.0051
43	Jabar	Bogor	3,840,754.17	EPPR	0.0030	65.6	EPISD	0.0051
44	Jabar	Ciamis	4,437,736.78	EPPSD	0.0062	65.3	EPISD	0.0051
45	Jabar	Tasikmalaya	3,046,581.49	EPPR	0.0030	67.1	EPISD	0.0051
46	Jabar	Garut	3,665,434.83	EPPR	0.0030	62.8	EPISD	0.0051
47	Jabar	Sumedang	3,764,410.86	EPPR	0.0030	67.5	EPISD	0.0051
48	Jabar	Bandung	5,862,901.82	EPPSD	0.0062	68.8	EPISD	0.0051
49	Jabar	Cianjur	3,891,054.91	EPPR	0.0030	64.5	EPISD	0.0051
50	Jabar	Sukabumi	3,655,516.03	EPPR	0.0030	63.8	EPISD	0.0051
51	Jabar	Cirebon	3,008,354.34	EPPR	0.0030	62.4	EPISD	0.0051
52	Jabar	Kuningan	2,967,220.77	EPPR	0.0030	65.0	EPISD	0.0051
53	Jabar	Indramayu	4,055,806.04	EPPSD	0.0062	61.2	EPIR	0.0014
54	Jabar	Purwakarta	8,329,141.23	EPPT	0.0247	65.6	EPISD	0.0051
55	Jabar	Karawang	6,491,722.17	EPPSD	0.0062	62.9	EPISD	0.0051
56	Jabar	Subang	4,253,182.45	EPPSD	0.0062	63.0	EPISD	0.0051
57	Jateng	Kendal	6,244,002.17	EPPSD	0.0062	65.5	EPISD	0.0051
58	Jateng	Pekalongan	4,171,740.10	EPPSD	0.0062	63.9	EPISD	0.0051
59	Jateng	Pemalang	2,658,246.24	EPPSR	0.0016	62.2	EPISD	0.0051

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator PDRB Perkapita (Tanpa Migas)			Indikator IPM		
			PDRB Perkapita 2003	Intensitas	Score	IPM 2002	Intensitas	Score
60	Jateng	Tegal	2,124,512.26	EPPSR	0.0016	63.3	EPISD	0.0051
61	Jateng	Jepara	3,809,266.65	EPPR	0.0030	66.9	EPISD	0.0051
62	Jateng	Kudus	16,080,540.45	EPPST	0.0247	66.9	EPISD	0.0051
63	Jateng	Banyumas	2,369,652.83	EPPSR	0.0016	66.7	EPISD	0.0051
64	Jateng	Cilacap	10,242,460.43	EPPST	0.0247	65.3	EPISD	0.0051
65	Jateng	Wonosobo	2,428,467.18	EPPSR	0.0016	64.7	EPISD	0.0051
66	Jateng	Kebumen	2,479,344.66	EPPSR	0.0016	65.6	EPISD	0.0051
67	Jateng	Boyolali	3,884,668.44	EPPR	0.0030	65.7	EPISD	0.0051
68	Jateng	Sukoharjo	4,431,768.56	EPPSD	0.0062	67.7	EPISD	0.0051
69	Jateng	Karanganyar	4,316,783.19	EPPSD	0.0062	68.5	EPISD	0.0051
70	Jateng	Klaten	3,819,569.68	EPPR	0.0030	67.8	EPISD	0.0051
71	Jateng	Magelang	3,277,225.93	EPPR	0.0030	67.2	EPISD	0.0051
72	DIY	Bantul	3,812,888.80	EPPR	0.0030	68.4	EPISD	0.0051
73	DIY	Gunung Kidul	4,200,578.32	EPPSD	0.0062	67.1	EPISD	0.0051
74	Jatim	Blitar	3,119,510.16	EPPR	0.0030	67.4	EPISD	0.0051
75	Jatim	Kediri	3,000,379.64	EPPR	0.0030	66.1	EPISD	0.0051
76	Jatim	Magetan	3,640,582.27	EPPR	0.0030	67.4	EPISD	0.0051
77	Jatim	Ponorogo	2,729,559.87	EPPR	0.0030	62.6	EPISD	0.0051
78	Jatim	Tulungagung	4,475,747.17	EPPSD	0.0062	67.6	EPISD	0.0051
79	Jatim	Mojokerto	4,166,769.71	EPPSD	0.0062	67.7	EPISD	0.0051
80	Jatim	Pamekasan	2,349,646.57	EPPSR	0.0016	58.3	EPIR	0.0014
81	Jatim	Bangkalan	2,902,005.83	EPPR	0.0030	57.6	EPIR	0.0014
82	Jatim	Pasuruhan	3,569,608.32	EPPR	0.0030	61.5	EPIR	0.0014
83	Jatim	Sidoarjo	9,621,279.23	EPPST	0.0247	71.7	EPIT	0.0079
84	Jatim	Gresik	13,173,713.92	EPPST	0.0247	69.3	EPISD	0.0051
85	Jatim	Jombang	3,938,589.30	EPPR	0.0030	66.0	EPISD	0.0051
86	Jatim	Lamongan	3,167,485.09	EPPR	0.0030	63.9	EPISD	0.0051
87	Jatim	Banyuwangi	4,207,591.76	EPPSD	0.0062	62.6	EPISD	0.0051
88	Jatim	Bondowoso	2,338,587.41	EPPSR	0.0016	54.1	EPISD	0.0008
89	Jatim	Situbondo	4,226,336.63	EPPSD	0.0062	56.2	EPISD	0.0008
90	Jatim	Jember	3,384,527.31	EPPR	0.0030	58.1	EPIR	0.0014
91	Bali	Badung	12,592,259.62	EPPST	0.0247	70.1	EPISD	0.0051
92	Bali	Bangli	4,910,148.15	EPPSD	0.0062	66.7	EPISD	0.0051
93	Bali	Buleleng	4,917,032.64	EPPSD	0.0062	63.9	EPISD	0.0051
94	Bali	Gianyar	6,763,528.90	EPPT	0.0126	67.7	EPISD	0.0051
95	Bali	Jembrana	6,056,071.45	EPPSD	0.0062	68.9	EPISD	0.0051
96	Bali	Tabanan	5,019,778.04	EPPSD	0.0062	70.4	EPISD	0.0051
97	Bali	Klungkung	6,709,844.62	EPPT	0.0126	64.6	EPISD	0.0051
98	Bali	Karang Asem	3,959,806.00	EPPR	0.0030	59.3	EPIR	0.0014
99	Kalbar	Kapuas Hulu	4,325,370.85	EPPSD	0.0062	62.7	EPISD	0.0051
100	Kalbar	Ketapang	3,883,967.47	EPPR	0.0030	63.6	EPISD	0.0051
101	Kalbar	Pontianak	7,500,260.31	EPPT	0.0126	64.0	EPISD	0.0051
102	Kalbar	Sambas	5,305,473.39	EPPSD	0.0062	59.3	EPIR	0.0014
103	Kalbar	Sanggau	4,289,343.78	EPPSD	0.0062	62.2	EPISD	0.0051
104	Kalteng	Barito Selatan	7,323,952.72	EPPT	0.0126	67.8	EPISD	0.0051
105	Kalteng	Barito Utara	10,567,618.10	EPPST	0.0247	69.6	EPISD	0.0051
106	Kalteng	Kapuas	6,208,326.36	EPPSD	0.0062	69.0	EPISD	0.0051
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	4,881,106.45	EPPSD	0.0062	64.6	EPISD	0.0051
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	3,881,223.02	EPPR	0.0030	64.7	EPISD	0.0051
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	3,742,805.15	EPPR	0.0030	61.7	EPIR	0.0014
110	Kalsel	Tabalong	8,060,493.41	EPPST	0.0247	63.6	EPISD	0.0051
111	Kalsel	Tanah Laut	6,575,267.55	EPPSD	0.0062	65.9	EPISD	0.0051
112	Kalsel	Tapin	5,612,776.86	EPPSD	0.0062	67.0	EPISD	0.0051
113	Kaltim	Berau	22,399,709.54	EPPST	0.0247	67.7	EPISD	0.0051
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	16,860,862.44	EPPST	0.0247	67.8	EPISD	0.0051
115	Kaltim	Pasir	11,727,256.36	EPPST	0.0247	67.9	EPISD	0.0051
116	Kaltim	Bulungan	14,307,836.88	EPPST	0.0247	69.5	EPISD	0.0051
117	Kaltim	Kutai Timur	35,170,206.18	EPPST	0.0247	66.1	EPISD	0.0051
118	Kaltim	Nunukan	3,826,514.49	EPPR	0.0030	67.8	EPISD	0.0051

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator PDRB Perkapita (Tanpa Migas)			Indikator IPM		
			PDRB Perkapita 2003	Intensitas	Score	IPM 2002	Intensitas	Score
119	Sulut	Minahasa	3,009,787.69	EPPR	0.0030	72.0	EPIT	0.0079
120	Sulut	Sangihe Talaut	4,135,219.59	EPPSD	0.0062	70.1	EPISD	0.0051
121	Gorontalo	Gorontalo	2,284,885.17	EPPSR	0.0016	64.7	EPISD	0.0051
122	Sulteng	Banggai	4,857,513.61	EPPSD	0.0062	65.9	EPISD	0.0051
123	Sulteng	Toli Toli	5,187,468.81	EPPSD	0.0062	64.2	EPISD	0.0051
124	Sulteng	Donggala	5,467,245.81	EPPSD	0.0062	62.4	EPISD	0.0051
125	Sulteng	Morowali	6,297,923.35	EPPSD	0.0062	64.9	EPISD	0.0051
126	Sulteng	Poso	3,168,823.70	EPPR	0.0030	64.3	EPISD	0.0051
127	Sultra	Buton	1,281,667.03	EPPSR	0.0016	62.8	EPISD	0.0051
128	Sultra	Kolaka	6,210,049.98	EPPSD	0.0062	65.3	EPISD	0.0051
129	Sulsel	Gowa	3,197,533.92	EPPR	0.0030	64.1	EPISD	0.0051
130	Sulsel	Takalar	3,121,961.97	EPPR	0.0030	62.3	EPISD	0.0051
131	Sulsel	Jeneponto	2,649,394.02	EPPSR	0.0016	57.8	EPIR	0.0014
132	Sulsel	Bantaeng	3,485,719.93	EPPR	0.0030	62.6	EPISD	0.0051
133	Sulsel	Sinjai	3,798,674.38	EPPR	0.0030	64.3	EPISD	0.0051
134	Sulsel	Selayar	3,577,088.88	EPPR	0.0030	63.8	EPISD	0.0051
135	Sulsel	Bone	4,275,255.91	EPPSD	0.0062	63.0	EPISD	0.0051
136	Sulsel	Maros	4,209,455.81	EPPSD	0.0062	64.0	EPISD	0.0051
137	Sulsel	Pangkep	6,137,475.61	EPPSD	0.0062	63.8	EPISD	0.0051
138	Sulsel	Barru	3,554,652.43	EPPR	0.0030	65.7	EPISD	0.0051
139	Sulsel	Pinrang	5,440,487.17	EPPSD	0.0062	66.0	EPISD	0.0051
140	Sulsel	Majene	3,755,053.80	EPPR	0.0030	64.0	EPISD	0.0051
141	Sulsel	Enrekang	3,321,362.91	EPPR	0.0030	67.3	EPISD	0.0051
142	Sulsel	Tanah Toraja	2,665,375.50	EPPSR	0.0016	67.2	EPISD	0.0051
143	Sulsel	Luwu	3,124,320.50	EPPR	0.0030	68.1	EPISD	0.0051
144	Sulsel	Luwu Utara	4,165,611.40	EPPSD	0.0062	67.9	EPISD	0.0051
145	NTB	Bima	3,335,605.87	EPPR	0.0030	59.0	EPIR	0.0014
146	NTB	Lombok Barat	2,975,026.25	EPPR	0.0030	55.0	EPISD	0.0008
147	NTB	Dompu	4,511,297.96	EPPSD	0.0062	58.4	EPIR	0.0014
148	NTB	Lombok Timur	2,502,097.43	EPPSR	0.0016	56.1	EPISD	0.0008
149	NTT	Ende	2,523,173.11	EPPSR	0.0016	61.3	EPIR	0.0014
150	NTT	Flores Timur	2,190,948.00	EPPSR	0.0016	62.6	EPISD	0.0051
151	NTT	Manggarai	1,636,541.11	EPPSR	0.0016	60.3	EPIR	0.0014
152	NTT	Ngada	2,233,692.76	EPPSR	0.0016	64.0	EPISD	0.0051
153	NTT	Timor Tengah Selatan	1,903,335.76	EPPSR	0.0016	57.7	EPIR	0.0014
154	NTT	Timor Tengah Utara	1,932,735.07	EPPSR	0.0016	59.5	EPIR	0.0014
155	NTT	Belu	1,572,705.16	EPPSR	0.0016	58.3	EPIR	0.0014
156	NTT	Sumba Barat	1,532,334.50	EPPSR	0.0016	53.4	EPISD	0.0008
157	Irjabar	Fakfak	7,551,499.21	EPPT	0.0126	64.3	EPISD	0.0051
158	Irjabar	Manokwari	5,126,567.12	EPPSD	0.0062	58.0	EPIR	0.0014
159	Irjabar	Sorong	9,681,522.76	EPPST	0.0247	62.0	EPISD	0.0051
160	Papua	Jayawijaya	4,535,247.54	EPPSD	0.0062	47.0	EPISD	0.0008
161	Irjabar	Mimika	4,014,383.45	EPPR	0.0030	64.8	EPISD	0.0051

Keterangan :**EPP** : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - PDRB Perkapita**EPI** : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - IPMDibelakang **EPP/EPI** - **ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Sumber : BPS Pusat, yang telah diolah.

Rata-rata PDRB Perkapita Kota : 11,417,446.80

IPM Indonesia : **65.8**

EPPST	8,013,324.44	-	EPIST	75.2	-
EPPT	6,681,746.92	8,013,324.44	EPIT	70.8	75.2
EPPSD	4,018,591.87	6,681,746.92	EPISD	61.9	70.8
EPPR	2,687,014.34	4,018,591.87	EPIR	57.4	61.9
EPPSR	-	2,687,014.34	EPISR	-	57.4

Yang digunakan sebagai indikator adalah PDRB Perkapita tanpa Migas

*) Menggunakan data IPM Propinsi

Lampiran 14.1.B.2 : Intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi 161 Kabupaten*The Intensity of 161 Regencies of Growth Indicators*(Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi tahun 1999 - 2003/*Avarage of Growth Indicators in 1999-2003*)

NO	PROPINSI	KABUPATEN	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-Rata	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	5.3	6.1	5.2	5.0	5.4	5.4	EPGSD	0.0062
2	Sumut	Dairi	0.3	7.6	5.2	5.2	4.8	4.6	EPGSD	0.0062
3	Sumut	Deliserdang	4.0	5.3	3.9	3.5	4.6	4.2	EPGSD	0.0062
4	Sumut	Langkat	1.5	3.3	3.4	2.9	3.5	2.9	EPGSD	0.0062
5	Sumut	Simalungun	4.9	3.9	4.6	4.2	4.7	4.4	EPGSD	0.0062
6	Sumut	Karo	5.6	5.5	3.9	4.7	5.4	5.0	EPGSD	0.0062
7	Sumut	Labuhan Batu	4.9	6.0	4.9	5.3	4.5	5.1	EPGSD	0.0062
8	Sumut	Tapanuli Utara	2.4	3.6	4.1	4.1	4.2	3.7	EPGSD	0.0062
9	Sumbar	Pesisir Selatan	1.2	2.3	3.2	3.9	4.2	3.0	EPGSD	0.0062
10	Sumbar	Sawalunto/Sijnjung	1.3	3.7	3.4	4.0	(56.4)	(8.8)	EPGSR	0.0016
11	Sumbar	Pasaman	1.5	3.0	3.3	9.4	(103.5)	(17.3)	EPGSR	0.0016
12	Sumbar	Solok	1.5	2.4	3.3	4.2	(25.7)	(2.8)	EPGSR	0.0016
13	Riau	Bengkalis	4.1	(64.2)	4.5	4.8	5.4	(9.1)	EPGSR	0.0016
14	Riau	Indragiri Hilir	4.6	2.9	4.0	2.0	4.6	3.6	EPGSD	0.0062
15	Riau	Kampar	3.6	(77.6)	5.4	5.0	5.2	(11.7)	EPGSR	0.0016
16	Riau	Kuantan Sengigi			5.1	4.7	4.7	4.9	EPGSD	0.0062
17	Riau	Pelalawan			5.3	35.5	5.7	15.5	EPGST	0.0222
18	Riau	Rokan Hulu			6.1	6.4	5.7	6.1	EPGT	0.0133
19	Jambi	Batanghari	1.9	(47.8)	5.1	5.2	5.2	(6.1)	EPGSR	0.0016
20	Jambi	Bungo			3.9	4.2	4.6	4.3	EPGSD	0.0062
21	Jambi	Kerinci	3.0	3.2	3.7	3.8	4.0	3.5	EPGSD	0.0062
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur			4.2	3.7	4.4	4.1	EPGSD	0.0062
23	Jambi	Tebo			4.1	4.2	4.3	4.2	EPGSD	0.0062
24	Sumsel	Muara Enim	2.8	(13.3)	2.3	3.1	5.8	0.1	EPGSR	0.0016
25	Sumsel	Musi Banyuasin	1.8	(57.3)	2.8	4.2	5.1	(8.7)	EPGSR	0.0016
26	Sumsel	Musi Rawas	2.9	(30.2)	4.0	5.6	4.3	(2.7)	EPGSR	0.0016
27	Sumsel	Ogan Komiring Ilir	(0.4)	3.4	4.5	4.7	5.0	3.4	EPGSD	0.0062
28	Sumsel	Lahat	1.7	(22.4)	4.8	5.0	4.5	(1.3)	EPGSR	0.0016
29	Babel	Bangka	0.6	4.4	4.0	4.7	9.9	4.7	EPGSD	0.0062
30	Babel	Belitung	1.3	5.5	4.7	4.1	4.6	4.1	EPGSD	0.0062
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	1.6	4.3	4.1	(10.7)	4.8	0.8	EPGSR	0.0016
32	Bengkulu	Rejang Lebong	1.7	1.9	2.5	3.2	4.8	2.8	EPGSD	0.0062
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	1.8	3.2	3.6	(59.6)	4.3	(9.3)	EPGSR	0.0016
34	Lampung	Lampung Barat	7.0	5.6	3.2	3.7	5.3	4.9	EPGSD	0.0062
35	Lampung	Lampung Selatan	3.4	3.8	3.5	3.7	4.2	3.7	EPGSD	0.0062
36	Lampung	Lampung Timur	2.8	18.6	3.6	3.5	3.9	6.5	EPGST	0.0222
37	Lampung	Lampung Utara	0.1	6.0	3.4	4.2	5.2	3.8	EPGSD	0.0062
38	Lampung	Way Kanan	1.9	(7.8)	3.7	3.9	4.5	1.2	EPGR	0.0030
39	Banten	Lebak	2.5	10.7	4.6	3.2	3.7	5.0	EPGSD	0.0062
40	Banten	Serang	0.8	(47.1)	3.0	3.5	4.0	(7.2)	EPGSR	0.0016
41	Banten	Tangerang			8.1	6.6	6.6	7.1	EPGST	0.0222
42	Jabar	Bekasi	1.8	68.9	4.1	4.7	5.4	17.0	EPGST	0.0222
43	Jabar	Bogor	1.6	(21.1)	(24.4)	25.7	4.1	(2.8)	EPGSR	0.0016
44	Jabar	Ciamis	2.4	2.6	3.3	3.4	3.4	3.0	EPGSD	0.0062
45	Jabar	Tasikmalaya	2.3	11.4	2.9	3.0	3.1	4.5	EPGSD	0.0062
46	Jabar	Garut	2.5	3.9	3.3	3.7	3.2	3.3	EPGSD	0.0062
47	Jabar	Sumedang	2.4	3.9	3.2	3.7	3.6	3.4	EPGSD	0.0062
48	Jabar	Bandung	3.0	5.3	4.8	4.7	4.8	4.5	EPGSD	0.0062
49	Jabar	Cianjur	2.0	3.4	3.5	3.6	3.3	3.2	EPGSD	0.0062
50	Jabar	Sukabumi	1.6	12.5	6.1	5.4	5.0	6.1	EPGT	0.0133
51	Jabar	Cirebon	3.6	5.0	4.7	4.0	3.0	4.1	EPGSD	0.0062
52	Jabar	Kuningan	1.3	2.8	3.6	3.8	4.1	3.1	EPGSD	0.0062
53	Jabar	Indramayu	(9.8)	58.6	3.9	3.7	4.3	12.1	EPGST	0.0222
54	Jabar	Purwakarta	2.0	116.6	3.2	3.2	2.9	25.6	EPGST	0.0222
55	Jabar	Karawang	5.6	12.8	6.1	5.8	4.2	6.9	EPGST	0.0222
56	Jabar	Subang	2.3	4.1	4.3	4.3	4.4	3.9	EPGSD	0.0062
57	Jateng	Kendal	2.2	2.0	2.6	1.3	3.1	2.2	EPGR	0.0030
58	Jateng	Pekalongan	3.5	2.5	4.1	3.2	3.4	3.4	EPGSD	0.0062
59	Jateng	Pemalang	1.6	3.7	3.1	3.5	3.3	3.0	EPGSD	0.0062
60	Jateng	Tegal	2.5	4.9	4.4	4.1	4.7	4.1	EPGSD	0.0062

NO	PROPINSI	KABUPATEN	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-Rata	Intensitas	Score
61	Jateng	Jepara	0.7	4.6	3.6	3.6	3.5	3.2	EPGSD	0.0062
62	Jateng	Kudus	0.8	1.9	3.1	3.6	3.9	2.7	EPGSD	0.0062
63	Jateng	Banyumas	0.5	4.0	1.1	3.3	2.2	2.2	EPGR	0.0030
64	Jateng	Cilacap	26.6	6.9	4.4	6.8	5.2	10.0	EPGST	0.0222
65	Jateng	Wonosobo	1.5	(0.5)	1.0	2.0	2.2	1.3	EPGR	0.0030
66	Jateng	Kebumen	3.6	0.3	1.7	2.8	3.0	2.3	EPGR	0.0030
67	Jateng	Boyolali	1.2	2.1	3.5	5.2	5.3	3.4	EPGSD	0.0062
68	Jateng	Sukoharjo	1.3	3.5	3.9	3.5	3.5	3.1	EPGSD	0.0062
69	Jateng	Karanganyar	2.5	4.5	1.4	3.1	3.2	2.9	EPGSD	0.0062
70	Jateng	Klaten	0.5	4.0	4.1	3.3	3.9	3.2	EPGSD	0.0062
71	Jateng	Magelang	1.6	3.5	3.8	4.3	4.4	3.5	EPGSD	0.0062
72	DIY	Bantul	1.4	3.2	3.0	3.5	4.2	3.1	EPGSD	0.0062
73	DIY	Gunung Kidul	1.6	13.3	2.1	1.9	2.3	4.2	EPGSD	0.0062
74	Jatim	Blitar	2.1	1.8	2.3	3.8	4.0	2.8	EPGSD	0.0062
75	Jatim	Kediri	0.9	4.0	2.5	1.5	3.3	2.4	EPGR	0.0030
76	Jatim	Magetan	1.8	2.3	2.6	2.9	3.5	2.6	EPGSD	0.0062
77	Jatim	Ponorogo	1.2	2.1	2.7	3.4	3.5	2.6	EPGSD	0.0062
78	Jatim	Tulungagung	4.1	2.5	4.3	4.4	3.7	3.8	EPGSD	0.0062
79	Jatim	Mojokerto	1.2	3.0	3.3	3.6	3.6	2.9	EPGSD	0.0062
80	Jatim	Pamekasan	(6.3)	1.4	1.5	2.1	3.2	0.4	EPGSR	0.0016
81	Jatim	Bangkalan	3.0	3.2	3.6	3.2	2.5	3.1	EPGSD	0.0062
82	Jatim	Pasuruhan	5.8	(0.4)	3.7	3.8	3.3	3.2	EPGSD	0.0062
83	Jatim	Sidoarjo	1.7	3.1	3.5	3.8	5.7	3.6	EPGSD	0.0062
84	Jatim	Gresik	2.0	3.0	5.2	4.7	3.6	3.7	EPGSD	0.0062
85	Jatim	Jombang	0.1	4.3	3.1	3.5	4.3	3.0	EPGSD	0.0062
86	Jatim	Lamongan	2.2	2.3	2.8	3.1	3.5	2.8	EPGSD	0.0062
87	Jatim	Banyuwangi	1.7	6.6	4.5	2.9	3.5	3.8	EPGSD	0.0062
88	Jatim	Bondowoso	1.3	2.1	1.7	4.2	3.2	2.5	EPGSD	0.0062
89	Jatim	Situbondo	1.2	3.3	2.4	2.2	4.1	2.7	EPGSD	0.0062
90	Jatim	Jember	1.9	3.3	3.4	4.0	4.2	3.4	EPGSD	0.0062
91	Bali	Badung	0.6	4.9	5.0	3.5	2.7	3.4	EPGSD	0.0062
92	Bali	Bangli	0.5	2.4	3.2	3.0	3.3	2.5	EPGSD	0.0062
93	Bali	Buleleng	1.1	3.5	3.6	3.5	3.7	3.1	EPGSD	0.0062
94	Bali	Gianyar	1.8	4.7	4.3	3.6	3.5	3.6	EPGSD	0.0062
95	Bali	Jembrana	0.9	3.5	3.2	2.5	3.7	2.8	EPGSD	0.0062
96	Bali	Tabanan	0.6	2.5	3.2	2.9	3.1	2.5	EPGSD	0.0062
97	Bali	Klungkung	0.9	2.5	4.2	3.0	3.3	2.8	EPGSD	0.0062
98	Bali	Karang Asem	0.7	2.5	2.8	2.9	3.2	2.4	EPGR	0.0030
99	Kalbar	Kapuas Hulu	2.8	3.6	2.9	2.9	2.5	2.9	EPGSD	0.0062
100	Kalbar	Ketapang	2.5	2.7	1.8	2.8	1.6	2.3	EPGR	0.0030
101	Kalbar	Pontianak	1.0	1.2	0.8	1.0	1.3	1.0	EPGSR	0.0016
102	Kalbar	Sambas	3.9	1.4	4.2	3.9	3.0	3.3	EPGSD	0.0062
103	Kalbar	Sanggau	6.1	7.0	2.2	2.8	6.1	4.8	EPGSD	0.0062
104	Kalteng	Barito Selatan	1.0	1.8	2.7	2.7	3.2	2.3	EPGR	0.0030
105	Kalteng	Barito Utara	(5.3)	6.1	1.8	1.7	3.5	1.5	EPGR	0.0030
106	Kalteng	Kapuas	(0.6)	1.8	2.7	5.9	5.0	3.0	EPGSD	0.0062
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	2.3	5.6	5.0	4.3	4.7	4.4	EPGSD	0.0062
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	0.7	18.2	5.5	4.0	4.2	6.5	EPGST	0.0222
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	2.1	(2.2)	(140.1)	2.4	3.2	(26.9)	EPGSR	0.0016
110	Kalsel	Tabalong	13.8	9.3	8.4	8.9	5.7	9.2	EPGST	0.0222
111	Kalsel	Tanah Laut	4.3	6.7	3.9	4.1	4.9	4.8	EPGSD	0.0062
112	Kalsel	Tapin	0.2	26.9	4.0	4.0	3.9	7.8	EPGST	0.0222
113	Kaltim	Berau	6.9	12.6	6.2	7.4	6.7	8.0	EPGST	0.0222
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	7.5	(60.0)	11.7	6.8	6.4	(5.5)	EPGSR	0.0016
115	Kaltim	Pasir	3.5	4.2	(37.2)	4.7	4.2	(4.1)	EPGSR	0.0016
116	Kaltim	Kab.Bulungan	5.1	(49.6)	22.2	7.5	12.8	(0.4)	EPGSR	0.0016
117	Kaltim	Kutai Timur			18.7	19.4	(3.8)	11.4	EPGST	0.0222
118	Kaltim	Nunukan			21.1	12.0	7.9	13.7	EPGST	0.0222
119	Sulut	Minahasa	6.6	7.2	6.2	4.7	5.4	6.0	EPGT	0.0133
120	Sulut	Sangihe Talaut	3.8	4.6	4.9	4.7	4.5	4.5	EPGSD	0.0062

NO	PROPINSI	KABUPATEN	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-Rata	Intensitas	Score
121	Gorontalo	Gorontalo	3.1	(34.5)	(18.7)	5.9	6.3	(7.6)	EPGSR	0.0016
122	Sulteng	Banggai	3.3	3.5	4.8	6.4	6.5	4.9	EPGSD	0.0062
123	Sulteng	Toli Toli	2.9	12.7	5.6	6.3	5.1	6.5	EPGST	0.0222
124	Sulteng	Donggala	3.4	4.8	6.0	(64.0)	6.0	(8.7)	EPGSR	0.0016
125	Sulteng	Morowali	4.8	3.9	6.6	5.8	6.9	5.6	EPGT	0.0133
126	Sulteng	Poso	2.1	(4.8)			(35.5)	(12.7)	EPGSR	0.0016
127	Sultra	Buton	3.2	5.0	5.1	(49.9)	(96.9)	(26.7)	EPGSR	0.0016
128	Sultra	Kolaka	(0.9)	6.6	4.7	7.3	(19.6)	(0.4)	EPGSR	0.0016
129	Sulsel	Gowa	3.8	4.3	4.3	4.2	4.0	4.1	EPGSD	0.0062
130	Sulsel	Takalar	3.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.8	EPGSD	0.0062
131	Sulsel	Jeneponto	3.1	3.6	2.9	4.0	4.3	3.6	EPGSD	0.0062
132	Sulsel	Bantaeng	3.3	5.3	4.8	5.0	5.0	4.7	EPGSD	0.0062
133	Sulsel	Sinjai	3.2	2.3	4.0	4.2	4.7	3.7	EPGSD	0.0062
134	Sulsel	Selayar	1.4	3.1	2.5	3.8	4.1	3.0	EPGSD	0.0062
135	Sulsel	Bone	2.0	2.7	3.3	4.7	4.9	3.5	EPGSD	0.0062
136	Sulsel	Maros	3.7	68.3	4.6	2.3	3.7	16.5	EPGST	0.0222
137	Sulsel	Pangkep	5.9	5.0	4.5	5.2	5.9	5.3	EPGSD	0.0062
138	Sulsel	Barru	5.6	(0.4)	4.4	4.2	5.0	3.7	EPGSD	0.0062
139	Sulsel	Pinrang	1.0	4.5	4.7	2.5	4.2	3.4	EPGSD	0.0062
140	Sulsel	Majene	4.1	2.0	3.6	2.4	2.6	3.0	EPGSD	0.0062
141	Sulsel	Enrekang	4.8	3.6	4.5	4.7	5.4	4.6	EPGSD	0.0062
142	Sulsel	Tanah Toraja	1.0	2.5	3.9	4.1	2.7	2.8	EPGSD	0.0062
143	Sulsel	Luwu	(64.7)	11.4	7.4	4.3	7.9	(6.7)	EPGSR	0.0016
144	Sulsel	Luwu Utara	16.1	4.9	9.2	6.3	4.7	8.2	EPGST	0.0222
145	NTB	Bima	3.0	(14.8)	4.1	(24.9)	4.7	(5.6)	EPGSR	0.0016
146	NTB	Lombok Barat	1.6	(13.9)	4.1	4.3	4.0	0.0	EPGSR	0.0016
147	NTB	Dompu	7.3	(13.8)	4.7	3.8	5.2	1.5	EPGR	0.0030
148	NTB	Lombok Timur	2.3	(17.7)	2.4	2.7	3.8	(1.3)	EPGSR	0.0016
149	NTT	Ende	5.8	4.8	5.0	6.6	5.0	5.4	EPGSD	0.0062
150	NTT	Flores Timur	12.2	(17.1)	5.6	6.2	6.0	2.6	EPGSD	0.0062
151	NTT	Manggarai	1.8	3.9	4.6	(30.2)	3.8	(3.2)	EPGSR	0.0016
152	NTT	Ngada	6.0	5.0	5.7	4.9	4.8	5.3	EPGSD	0.0062
153	NTT	Timor Tengah Selatan	8.7	4.6	5.2	6.2	5.5	6.0	EPGT	0.0133
154	NTT	Timor Tengah Utara	(2.7)	3.7	4.4	5.8	5.3	3.3	EPGSD	0.0062
155	NTT	Belu	4.2	3.0	4.1	5.9	6.3	4.7	EPGSD	0.0062
156	NTT	Sumba Barat	0.4	3.0	4.3	5.4	4.9	3.6	EPGSD	0.0062
157	Irjabar	Fakfak	(1.4)	(96.4)	3.9	6.7	6.5	(16.1)	EPGSR	0.0016
158	Irjabar	Manokwari	(1.0)	6.7	4.4	4.7	4.9	3.9	EPGSD	0.0062
159	Irjabar	Sorong	(23.2)	(38.0)	5.0	5.9	6.0	(8.8)	EPGSR	0.0016
160	Papua	Jayawijaya	4.5	8.5	6.8	4.0	4.0	5.6	EPGT	0.0133
161	Irjabar	Mimika			(6.6)	8.7	(0.4)	0.6	EPGSR	0.0016
Rata-rata :			1.9	6.0	4.5	4.9	6.5	4.8		

Keterangan :**EPG** : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - Growth/Pertumbuhan EkonomiDibelakang **EPG-ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Sumber : BPS Pusat, yang telah diolah.

Rata-rata	3.8	EPGST	6.5	-
Standev	1.4	EPGT	5.1	6.5
Skew	(0.3)	EPGSD	2.5	5.1
Kuortis	0.2	EPGR	1.1	2.5
		EPGSR	-	1.1

Lampiran 14.2 : Struktur Ekonomi Daerah/Economic Structure**Lampiran 14.2.A : Variabel Struktur Ekonomi Daerah 53 Kota***Economic Structure of 53 Cities*

NO	PROPINSI	KOTA	Sektor Primer			Sektor Sekunder			Sektor Tersier		
			Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	9.28	ESPSR	0.0009	38.59	ESST	0.0043	43.83	ESTT	0.0043
2	Sumut	Medan	4.11	ESPSR	0.0009	28.32	ESSSD	0.0023	62.69	ESTST	0.0048
3	Sumut	Pematang Siantar	4.28	ESPSR	0.0009	41.38	ESSST	0.0069	43.33	ESTT	0.0043
4	Sumut	Sibolga	25.72	ESPR	0.0016	28.70	ESSSD	0.0023	41.09	ESTT	0.0043
5	Sumut	Tanjung Balai	26.59	ESPR	0.0016	33.08	ESST	0.0043	32.28	ESTSD	0.0019
6	Sumut	Tebing Tinggi	7.97	ESPSR	0.0009	34.32	ESST	0.0043	45.89	ESTT	0.0043
7	Sumbar	Padang	5.13	ESPSR	0.0009	21.97	ESSSD	0.0023	64.52	ESTST	0.0048
8	Sumbar	Sawahlunto	36.79	ESPSD	0.0042	17.39	ESSSD	0.0023	34.22	ESTSD	0.0019
9	Riau	Pekanbaru	1.35	ESPSR	0.0009	22.39	ESSSD	0.0023	62.49	ESTST	0.0048
10	Riau	Dumai	2.31	ESPSR	0.0009	77.75	ESSST	0.0069	16.30	ESTSR	0.0004
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	15.23	ESPSR	0.0009	27.05	ESSSD	0.0023	49.55	ESTST	0.0048
12	Kep. Riau	Batam	2.43	ESPSR	0.0009	75.48	ESSST	0.0069	21.26	ESTR	0.0008
13	Jambi	Jambi	11.51	ESPSR	0.0009	25.35	ESSSD	0.0023	47.03	ESTST	0.0048
14	Sumsel	Palembang	0.57	ESPSR	0.0009	45.68	ESSST	0.0069	45.17	ESTT	0.0043
15	Babel	Pangkal Pinang	15.61	ESPSR	0.0009	22.28	ESSSD	0.0023	56.01	ESTST	0.0048
16	Bengkulu	Bengkulu	7.83	ESPSR	0.0009	12.90	ESSR	0.0010	64.01	ESTST	0.0048
17	Lampung	Bandar Lampung	3.40	ESPSR	0.0009	34.64	ESST	0.0043	48.09	ESTST	0.0048
18	Banten	Cilegon	2.93	ESPSR	0.0009	72.55	ESSST	0.0069	23.80	ESTR	0.0008
19	Banten	Tangerang	0.20	ESPSR	0.0009	61.42	ESSST	0.0069	37.88	ESTSD	0.0019
20	DKI	Jakarta	0.19	ESPSR	0.0009	34.81	ESST	0.0043	61.51	ESTST	0.0048
21	Jabar	Bekasi	1.24	ESPSR	0.0009	52.62	ESSST	0.0069	43.47	ESTT	0.0043
22	Jabar	Bogor	0.40	ESPSR	0.0009	38.00	ESST	0.0043	59.46	ESTST	0.0048
23	Jabar	Bandung	0.38	ESPSR	0.0009	37.98	ESST	0.0043	54.13	ESTST	0.0048
24	Jabar	Sukabumi	4.35	ESPSR	0.0009	12.63	ESSR	0.0010	71.63	ESTST	0.0048
25	Jabar	Cirebon	0.30	ESPSR	0.0009	42.63	ESSST	0.0069	53.34	ESTST	0.0048
26	Jateng	Semarang	1.32	ESPSR	0.0009	34.64	ESST	0.0043	53.85	ESTST	0.0048
27	Jateng	Tegal	11.70	ESPSR	0.0009	31.82	ESST	0.0043	49.60	ESTST	0.0048
28	Jateng	Pekalongan	11.78	ESPSR	0.0009	37.58	ESST	0.0043	41.72	ESTT	0.0043
29	Jateng	Surakarta	1.63	ESPSR	0.0009	41.56	ESSST	0.0069	49.15	ESTST	0.0048
30	DIY	Yogyakarta	0.79	ESPSR	0.0009	19.88	ESSSD	0.0023	64.58	ESTST	0.0048
31	Jatim	Kediri	0.18	ESPSR	0.0009	78.52	ESSST	0.0069	20.99	ESTR	0.0008
32	Jatim	Malang	0.67	ESPSR	0.0009	41.98	ESSST	0.0069	54.15	ESTST	0.0048
33	Jatim	Madiun	2.37	ESPSR	0.0009	43.37	ESSST	0.0069	48.00	ESTST	0.0048
34	Jatim	Mojokerto	1.30	ESPSR	0.0009	27.49	ESSSD	0.0023	61.24	ESTST	0.0048
35	Jatim	Surabaya	0.21	ESPSR	0.0009	44.91	ESSST	0.0069	53.12	ESTST	0.0048
36	Jatim	Probolinggo	10.20	ESPSR	0.0009	24.66	ESSSD	0.0023	60.30	ESTST	0.0048
37	Bali	Denpasar	8.16	ESPSR	0.0009	18.98	ESSSD	0.0023	69.58	ESTST	0.0048
38	Kalbar	Pontianak	0.69	ESPSR	0.0009	17.70	ESSSD	0.0023	56.14	ESTST	0.0048
39	Kalteng	Palangkaraya	8.98	ESPSR	0.0009	17.69	ESSSD	0.0023	46.46	ESTT	0.0043
40	Kalsel	Banjarmasin	1.55	ESPSR	0.0009	34.58	ESST	0.0043	60.49	ESTST	0.0048
41	Kaltim	Balikpapan	7.98	ESPSR	0.0009	44.33	ESSST	0.0069	45.72	ESTT	0.0043
42	Kaltim	Samarinda	7.10	ESPSR	0.0009	31.26	ESST	0.0043	49.89	ESTST	0.0048
43	Sulut	Bitung	11.88	ESPSR	0.0009	36.60	ESST	0.0043	47.59	ESTST	0.0048
44	Sulut	Manado	3.79	ESPSR	0.0009	20.76	ESSSD	0.0023	54.59	ESTST	0.0048
45	Gorontalo	Gorontalo	11.05	ESPSR	0.0009	15.27	ESSSD	0.0023	47.54	ESTST	0.0048
46	Sulteng	Palu	8.98	ESPSR	0.0009	31.24	ESST	0.0043	38.63	ESTSD	0.0019
47	Sultra	Kendari	20.95	ESPR	0.0016	17.62	ESSSD	0.0023	50.37	ESTST	0.0048
48	Sulsel	Makasar	2.24	ESPSR	0.0009	35.15	ESST	0.0043	49.99	ESTST	0.0048
49	Sulsel	Pare Pare	8.58	ESPSR	0.0009	14.23	ESSSD	0.0023	67.18	ESTST	0.0048
50	NTB	Mataram	4.17	ESPSR	0.0009	20.61	ESSSD	0.0023	63.97	ESTST	0.0048
51	NTT	Kupang	5.39	ESPSR	0.0009	12.48	ESSR	0.0010	52.66	ESTST	0.0048
52	Irjabar	Sorong	8.15	ESPSR	0.0009	38.43	ESST	0.0043	44.50	ESTT	0.0043
53	Papua	Jayapura	8.60	ESPSR	0.0009	21.49	ESSSD	0.0023	44.93	ESTT	0.0043

Keterangan :**ESP** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Primer**ESS** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Sekunder**EST** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor TersierDibelakang **ESP/ESS/EST - ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Rata-rata	39.2		Rata-rata	22.4		Rata-rata	31.5	
Standev	22.9		Standev	16.4		Standev	5.2	
Skew	(0.8)		Skew	0.6		Skew	(0.3)	
Kuortis	(0.6)		Kuortis	1.9		Kuortis	(0.1)	
ESPST	62.0	-	ESSST	38.7	-	ESTST	46.6	-
ESPT	50.6	62.0	ESST	30.5	38.7	ESTT	39.1	46.6
ESPST	27.7	50.6	ESSSD	14.2	30.5	ESTSD	23.9	39.1
ESPR	16.3	27.7	ESSR	6.0	14.2	ESTR	16.3	23.9
ESPST	-	16.3	ESSSR	-	6.0	ESTSR	-	16.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun 2003) - Untuk Sektor Tersier, Sub Sektor Jasa Pemerintahan dihilangkan

Sumber : BPS Pusat yang diolah.

Lampiran 14.2.B : Variabel Struktur Ekonomi Daerah 161 Kabupaten
Economic Structure of 161 Regencies

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Sektor Primer			Sektor Sekunder			Sektor Tersier		
			Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	36.15	ESPSD	0.0042	43.75	ESSST	0.0069	18.14	ESTR	0.0008
2	Sumut	Dairi	69.18	ESPST	0.0076	6.87	ESSR	0.0010	19.72	ESTR	0.0008
3	Sumut	Deliserdang	37.36	ESPSD	0.0042	38.14	ESST	0.0043	20.91	ESTR	0.0008
4	Sumut	Langkat	63.03	ESPST	0.0076	16.65	ESSSD	0.0023	16.88	ESTR	0.0008
5	Sumut	Simalungun	60.04	ESPT	0.0076	18.49	ESSSD	0.0023	13.73	ESTSR	0.0004
6	Sumut	Karo	65.55	ESPST	0.0076	4.84	ESSSR	0.0006	21.46	ESTR	0.0008
7	Sumut	Labuhan Batu	36.88	ESPST	0.0042	45.78	ESSST	0.0069	15.77	ESTSR	0.0004
8	Sumut	Tapaneli Utara	60.29	ESPT	0.0076	8.03	ESSR	0.0010	20.34	ESTR	0.0008
9	Sumbar	Pesisir Selatan	32.77	ESPSD	0.0042	18.26	ESSSD	0.0023	31.73	ESTSD	0.0019
10	Sumbar	Sawahlunto/Sijunjung	44.79	ESPSD	0.0042	14.48	ESSSD	0.0023	24.10	ESTSD	0.0019
11	Sumbar	Pasaman	46.12	ESPSD	0.0042	12.65	ESSR	0.0010	24.51	ESTSD	0.0019
12	Sumbar	Solok	46.98	ESPSD	0.0042	13.01	ESSR	0.0010	28.10	ESTSD	0.0019
13	Riau	Bengkalis	86.60	ESPST	0.0076	7.17	ESSR	0.0010	4.93	ESTSR	0.0004
14	Riau	Indragiri Hilir	51.87	ESPT	0.0076	13.96	ESSR	0.0010	25.39	ESTSD	0.0019
15	Riau	Kampar	84.79	ESPST	0.0076	4.10	ESSSR	0.0006	7.82	ESTSR	0.0004
16	Riau	Kuantan Sengigi	60.12	ESPT	0.0076	12.46	ESSR	0.0010	15.18	ESTSR	0.0004
17	Riau	Pelalawan	59.86	ESPT	0.0076	22.43	ESSSD	0.0023	13.29	ESTSR	0.0004
18	Riau	Rokan Hulu	70.16	ESPST	0.0076	9.30	ESSR	0.0010	11.14	ESTSR	0.0004
19	Jambi	Batanghari	44.95	ESPSD	0.0042	19.81	ESSSD	0.0023	26.16	ESTSD	0.0019
20	Jambi	Bungo	46.63	ESPSD	0.0042	9.96	ESSR	0.0010	33.00	ESTSD	0.0019
21	Jambi	Kerinci	45.78	ESPSD	0.0042	7.79	ESSR	0.0010	35.53	ESTSD	0.0019
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	72.04	ESPST	0.0076	7.80	ESSR	0.0010	16.68	ESTR	0.0008
23	Jambi	Tebo	57.65	ESPT	0.0076	8.71	ESSR	0.0010	24.09	ESTSD	0.0019
24	Sumsel	Muara Enim	84.56	ESPST	0.0076	5.40	ESSSR	0.0006	7.45	ESTSR	0.0004
25	Sumsel	Musi Banyuasin	59.19	ESPT	0.0076	19.31	ESSSD	0.0023	18.90	ESTR	0.0008
26	Sumsel	Musi Rawas	75.50	ESPST	0.0076	12.83	ESSR	0.0010	7.22	ESTSR	0.0004
27	Sumsel	Ogan Komering Ilir	45.54	ESPSD	0.0042	20.61	ESSSD	0.0023	27.42	ESTSD	0.0019
28	Sumsel	Lahat	48.27	ESPSD	0.0042	20.21	ESSSD	0.0023	23.83	ESTR	0.0008
29	Babel	Bangka	51.90	ESPT	0.0076	24.33	ESSSD	0.0023	18.95	ESTR	0.0008
30	Babel	Belitung	29.33	ESPSD	0.0042	30.33	ESSSD	0.0023	33.85	ESTSD	0.0019
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	30.99	ESPSD	0.0042	12.64	ESSR	0.0010	35.22	ESTSD	0.0019
32	Bengkulu	Rejang Lebong	58.36	ESPT	0.0076	8.52	ESSR	0.0010	19.80	ESTR	0.0008
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	46.87	ESPSD	0.0042	19.97	ESSSD	0.0023	19.55	ESTR	0.0008
34	Lampung	Lampung Barat	62.08	ESPST	0.0076	8.31	ESSR	0.0010	24.47	ESTSD	0.0019
35	Lampung	Lampung Selatan	49.16	ESPSD	0.0042	18.66	ESSSD	0.0023	24.09	ESTSD	0.0019
36	Lampung	Lampung Timur	65.22	ESPST	0.0076	9.87	ESSR	0.0010	18.97	ESTR	0.0008
37	Lampung	Lampung Utara	54.81	ESPT	0.0076	8.43	ESSR	0.0010	23.49	ESTR	0.0008
38	Lampung	Way Kanan	53.68	ESPT	0.0076	10.78	ESSR	0.0010	23.39	ESTR	0.0008
39	Banten	Lebak	40.86	ESPSD	0.0042	13.58	ESSR	0.0010	37.61	ESTSD	0.0019
40	Banten	Serang	14.37	ESPSR	0.0009	60.86	ESSST	0.0069	19.95	ESTR	0.0008
41	Banten	Tangerang	9.93	ESPSR	0.0009	63.86	ESSST	0.0069	24.48	ESTSD	0.0019
42	Jabar	Bekasi	2.65	ESPSR	0.0009	84.48	ESSST	0.0069	12.04	ESTSR	0.0004
43	Jabar	Bogor	12.49	ESPSR	0.0009	58.00	ESSST	0.0069	26.98	ESTSD	0.0019
44	Jabar	Ciamis	31.64	ESPSD	0.0042	18.12	ESSSD	0.0023	44.83	ESTT	0.0043
45	Jabar	Tasikmalaya	38.29	ESPSD	0.0042	14.06	ESSR	0.0010	40.20	ESTT	0.0043
46	Jabar	Garut	40.43	ESPSD	0.0042	13.39	ESSR	0.0010	41.06	ESTT	0.0043
47	Jabar	Sumedang	32.82	ESPSD	0.0042	21.55	ESSSD	0.0023	37.79	ESTSD	0.0019
48	Jabar	Bandung	10.13	ESPSR	0.0009	59.67	ESSST	0.0069	27.86	ESTSD	0.0019
49	Jabar	Cianjur	46.89	ESPSD	0.0042	6.27	ESSR	0.0010	40.59	ESTT	0.0043
50	Jabar	Sukabumi	43.01	ESPSD	0.0042	19.63	ESSSD	0.0023	29.22	ESTSD	0.0019
51	Jabar	Cirebon	35.99	ESPSD	0.0042	20.09	ESSSD	0.0023	37.67	ESTSD	0.0019
52	Jabar	Kuningan	40.61	ESPSD	0.0042	9.63	ESSR	0.0010	39.33	ESTT	0.0043
53	Jabar	Indramayu	74.03	ESPST	0.0076	3.45	ESSSR	0.0006	20.46	ESTR	0.0008
54	Jabar	Purwakarta	10.71	ESPSR	0.0009	48.90	ESSST	0.0069	36.45	ESTSD	0.0019
55	Jabar	Karawang	19.99	ESPR	0.0016	41.70	ESSST	0.0069	34.39	ESTSD	0.0019
56	Jabar	Subang	41.68	ESPSD	0.0042	8.98	ESSR	0.0010	39.13	ESTT	0.0043
57	Jateng	Kendal	25.03	ESPR	0.0016	43.71	ESSST	0.0069	24.21	ESTSD	0.0019
58	Jateng	Pekalongan	20.12	ESPR	0.0016	36.74	ESST	0.0043	33.22	ESTSD	0.0019
59	Jateng	Pemalang	36.18	ESPSD	0.0042	22.98	ESSSD	0.0023	34.43	ESTSD	0.0019

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Sektor Primer			Sektor Sekunder			Sektor Tersier		
			Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score
60	Jateng	Tegal	23.45	ESPR	0.0016	30.56	ESST	0.0043	39.20	ESTT	0.0043
61	Jateng	Jepara	25.08	ESPR	0.0016	31.48	ESST	0.0043	36.38	ESTSD	0.0019
62	Jateng	Kudus	3.77	ESPSR	0.0009	65.51	ESSST	0.0069	29.43	ESTSD	0.0019
63	Jateng	Banyumas	28.75	ESPSD	0.0042	26.07	ESSSD	0.0023	34.74	ESTSD	0.0019
64	Jateng	Cilacap	10.73	ESPSR	0.0009	52.75	ESSST	0.0069	34.87	ESTSD	0.0019
65	Jateng	Wonosobo	45.39	ESPSD	0.0042	14.72	ESSSD	0.0023	30.74	ESTSD	0.0019
66	Jateng	Kebumen	47.05	ESPSD	0.0042	12.50	ESSR	0.0010	29.85	ESTSD	0.0019
67	Jateng	Boyolali	40.51	ESPSD	0.0042	14.66	ESSSD	0.0023	38.73	ESTSD	0.0019
68	Jateng	Sukoharjo	26.37	ESPR	0.0016	33.50	ESST	0.0043	32.48	ESTSD	0.0019
69	Jateng	Karanganyar	24.02	ESPR	0.0016	44.74	ESSST	0.0069	20.11	ESTR	0.0008
70	Jateng	Klaten	23.35	ESPR	0.0016	32.46	ESST	0.0043	36.13	ESTSD	0.0019
71	Jateng	Magelang	35.47	ESPSD	0.0042	24.14	ESSSD	0.0023	26.14	ESTSD	0.0019
72	DIY	Bantul	29.03	ESPSD	0.0042	27.36	ESSSD	0.0023	32.08	ESTSD	0.0019
73	DIY	Gunung Kidul	40.76	ESPSD	0.0042	19.84	ESSSD	0.0023	27.27	ESTSD	0.0019
74	Jatim	Blitar	42.22	ESPSD	0.0042	6.58	ESSR	0.0010	43.57	ESTT	0.0043
75	Jatim	Kediri	42.64	ESPSD	0.0042	14.42	ESSSD	0.0023	35.31	ESTSD	0.0019
76	Jatim	Magetan	39.52	ESPSD	0.0042	16.99	ESSSD	0.0023	30.22	ESTSD	0.0019
77	Jatim	Ponorogo	32.79	ESPSD	0.0042	20.62	ESSSD	0.0023	38.87	ESTSD	0.0019
78	Jatim	Tulungagung	22.46	ESPR	0.0016	23.06	ESSSD	0.0023	46.91	ESTST	0.0048
79	Jatim	Mojokerto	28.31	ESPSD	0.0042	34.54	ESST	0.0043	32.19	ESTSD	0.0019
80	Jatim	Pamekasan	60.82	ESPT	0.0076	6.70	ESSR	0.0010	22.55	ESTR	0.0008
81	Jatim	Bangsalan	40.05	ESPSD	0.0042	11.01	ESSR	0.0010	41.13	ESTT	0.0043
82	Jatim	Pasuruhan	29.65	ESPSD	0.0042	37.49	ESST	0.0043	27.80	ESTSD	0.0019
83	Jatim	Sidoarjo	7.19	ESPSR	0.0009	55.04	ESSST	0.0069	35.68	ESTSD	0.0019
84	Jatim	Gresik	13.17	ESPSR	0.0009	59.27	ESSST	0.0069	26.44	ESTSD	0.0019
85	Jatim	Jombang	36.97	ESPSD	0.0042	17.10	ESSSD	0.0023	38.43	ESTSD	0.0019
86	Jatim	Lamongan	50.17	ESPSD	0.0042	9.24	ESSR	0.0010	31.23	ESTSD	0.0019
87	Jatim	Banyuwangi	52.93	ESPT	0.0076	6.50	ESSR	0.0010	37.15	ESTSD	0.0019
88	Jatim	Bondowoso	49.66	ESPSD	0.0042	11.89	ESSR	0.0010	32.58	ESTSD	0.0019
89	Jatim	Situbondo	32.58	ESPSD	0.0042	14.45	ESSSD	0.0023	47.92	ESTST	0.0048
90	Jatim	Jember	48.88	ESPSD	0.0042	12.63	ESSR	0.0010	32.97	ESTSD	0.0019
91	Bali	Badung	8.08	ESPSR	0.0009	8.73	ESSR	0.0010	77.93	ESTST	0.0048
92	Bali	Bangli	32.52	ESPSD	0.0042	13.68	ESSR	0.0010	42.98	ESTT	0.0043
93	Bali	Buleleng	30.30	ESPSD	0.0042	13.36	ESSR	0.0010	44.10	ESTT	0.0043
94	Bali	Gianyar	23.91	ESPR	0.0016	23.10	ESSSD	0.0023	43.11	ESTT	0.0043
95	Bali	Jembrana	28.95	ESPSD	0.0042	13.42	ESSR	0.0010	49.88	ESTST	0.0048
96	Bali	Tabanan	37.31	ESPSD	0.0042	11.04	ESSR	0.0010	42.11	ESTT	0.0043
97	Bali	Klungkung	37.48	ESPSD	0.0042	17.28	ESSSD	0.0023	35.49	ESTSD	0.0019
98	Bali	Karang Asem	35.64	ESPSD	0.0042	12.23	ESSR	0.0010	40.77	ESTT	0.0043
99	Kalbar	Kapuas Hulu	49.42	ESPSD	0.0042	9.71	ESSR	0.0010	32.93	ESTSD	0.0019
100	Kalbar	Ketapang	43.56	ESPSD	0.0042	16.22	ESSSD	0.0023	32.31	ESTSD	0.0019
101	Kalbar	Pontianak	21.25	ESPR	0.0016	45.02	ESSST	0.0069	25.89	ESTSD	0.0019
102	Kalbar	Sambas	44.00	ESPSD	0.0042	13.97	ESSR	0.0010	37.73	ESTSD	0.0019
103	Kalbar	Sanggau	39.07	ESPSD	0.0042	33.72	ESST	0.0043	23.13	ESTR	0.0008
104	Kalteng	Barito Selatan	45.07	ESPSD	0.0042	14.13	ESSR	0.0010	32.44	ESTSD	0.0019
105	Kalteng	Barito Utara	54.44	ESPT	0.0076	8.25	ESSR	0.0010	23.71	ESTR	0.0008
106	Kalteng	Kapuas	55.40	ESPT	0.0076	12.02	ESSR	0.0010	25.18	ESTSD	0.0019
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	40.60	ESPSD	0.0042	12.29	ESSR	0.0010	29.13	ESTSD	0.0019
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	39.09	ESPSD	0.0042	12.70	ESSR	0.0010	29.19	ESTSD	0.0019
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	31.21	ESPSD	0.0042	16.77	ESSSD	0.0023	33.42	ESTSD	0.0019
110	Kalsel	Tabalong	78.83	ESPST	0.0076	3.70	ESSSR	0.0006	11.68	ESTSR	0.0004
111	Kalsel	Tanah Laut	40.88	ESPSD	0.0042	23.83	ESSSD	0.0023	25.60	ESTSD	0.0019
112	Kalsel	Tapin	53.21	ESPT	0.0076	9.69	ESSR	0.0010	22.46	ESTR	0.0008
113	Kaltim	Berau	57.52	ESPT	0.0076	15.83	ESSSD	0.0023	22.79	ESTR	0.0008
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	86.82	ESPST	0.0076	7.28	ESSR	0.0010	4.72	ESTSR	0.0004
115	Kaltim	Pasir	77.54	ESPST	0.0076	8.28	ESSR	0.0010	10.24	ESTSR	0.0004
116	Kaltim	Kab.Bulungan	44.16	ESPSD	0.0042	20.19	ESSSD	0.0023	12.14	ESTSR	0.0004
117	Kaltim	Kutai Timur	77.70	ESPST	0.0076	10.86	ESSR	0.0010	10.01	ESTSR	0.0004
118	Kaltim	Nunukan	71.30	ESPST	0.0076	11.40	ESSR	0.0010	13.65	ESTSR	0.0004

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Sektor Primer			Sektor Sekunder			Sektor Tersier		
			Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score	Kontribusi	Intensitas	Score
119	Sulut	Minahasa	31.34	ESPSD	0.0042	24.11	ESSSD	0.0023	30.64	ESTSD	0.0019
120	Sulut	Sangihe Talaut	48.62	ESPSD	0.0042	13.04	ESSR	0.0010	25.53	ESTSD	0.0019
121	Gorontalo	Gorontalo	44.27	ESPSD	0.0042	18.53	ESSSD	0.0023	19.17	ESTR	0.0008
122	Sulteng	Banggai	57.77	ESPT	0.0076	15.13	ESSSD	0.0023	19.39	ESTR	0.0008
123	Sulteng	Toli Toli	57.47	ESPT	0.0076	13.81	ESSR	0.0010	19.96	ESTR	0.0008
124	Sulteng	Donggala	56.70	ESPT	0.0076	11.52	ESSR	0.0010	20.95	ESTR	0.0008
125	Sulteng	Morowali	65.77	ESPST	0.0076	7.58	ESSR	0.0010	19.20	ESTR	0.0008
126	Sulteng	Poso	49.01	ESPSD	0.0042	15.23	ESSSD	0.0023	26.18	ESTSD	0.0019
127	Sultra	Buton	48.43	ESPSD	0.0042	10.96	ESSR	0.0010	22.31	ESTR	0.0008
128	Sultra	Kolaka	53.13	ESPT	0.0076	19.45	ESSSD	0.0023	19.54	ESTR	0.0008
129	Sulsel	Gowa	49.78	ESPSD	0.0042	10.71	ESSR	0.0010	20.37	ESTR	0.0008
130	Sulsel	Takalar	47.82	ESPSD	0.0042	15.10	ESSSD	0.0023	20.11	ESTR	0.0008
131	Sulsel	Jeneponto	61.65	ESPT	0.0076	7.40	ESSR	0.0010	16.49	ESTR	0.0008
132	Sulsel	Bantaeng	58.81	ESPT	0.0076	9.55	ESSR	0.0010	20.42	ESTR	0.0008
133	Sulsel	Sinjai	66.83	ESPST	0.0076	5.54	ESSSR	0.0006	16.26	ESTSR	0.0004
134	Sulsel	Selayar	47.92	ESPSD	0.0042	12.33	ESSR	0.0010	27.59	ESTSD	0.0019
135	Sulsel	Bone	64.72	ESPST	0.0076	10.41	ESSR	0.0010	16.03	ESTSR	0.0004
136	Sulsel	Maros	52.71	ESPT	0.0076	19.04	ESSSD	0.0023	18.08	ESTR	0.0008
137	Sulsel	Pangkep	27.34	ESPR	0.0016	52.36	ESSST	0.0069	12.43	ESTSR	0.0004
138	Sulsel	Barru	48.88	ESPSD	0.0042	12.53	ESSR	0.0010	24.67	ESTSD	0.0019
139	Sulsel	Pinrang	65.56	ESPST	0.0076	8.23	ESSR	0.0010	16.53	ESTR	0.0008
140	Sulsel	Majene	56.07	ESPT	0.0076	9.26	ESSR	0.0010	22.21	ESTR	0.0008
141	Sulsel	Enrekang	62.04	ESPST	0.0076	8.67	ESSR	0.0010	18.18	ESTR	0.0008
142	Sulsel	Tanah Toraja	52.47	ESPT	0.0076	9.34	ESSR	0.0010	21.40	ESTR	0.0008
143	Sulsel	Luwu	61.98	ESPT	0.0076	19.18	ESSSD	0.0023	11.87	ESTSR	0.0004
144	Sulsel	Luwu Utara	79.55	ESPST	0.0076	3.99	ESSSR	0.0006	9.21	ESTSR	0.0004
145	NTB	Bima	55.04	ESPT	0.0076	9.59	ESSR	0.0010	24.58	ESTSD	0.0019
146	NTB	Lombok Barat	36.97	ESPSD	0.0042	14.05	ESSR	0.0010	35.72	ESTSD	0.0019
147	NTB	Dompu	49.10	ESPSD	0.0042	11.38	ESSR	0.0010	27.68	ESTSD	0.0019
148	NTB	Lombok Timur	39.58	ESPSD	0.0042	15.99	ESSSD	0.0023	29.09	ESTSD	0.0019
149	NTT	Ende	34.05	ESPSD	0.0042	10.73	ESSR	0.0010	36.37	ESTSD	0.0019
150	NTT	Flores Timur	43.16	ESPSD	0.0042	6.01	ESSR	0.0010	24.65	ESTSD	0.0019
151	NTT	Manggarai	56.16	ESPT	0.0076	8.83	ESSR	0.0010	18.15	ESTR	0.0008
152	NTT	Ngada	54.15	ESPT	0.0076	11.06	ESSR	0.0010	15.83	ESTSR	0.0004
153	NTT	Timor Tengah Selatan	57.30	ESPT	0.0076	6.02	ESSR	0.0010	13.99	ESTSR	0.0004
154	NTT	Timor Tengah Utara	53.44	ESPT	0.0076	8.92	ESSR	0.0010	15.52	ESTSR	0.0004
155	NTT	Belu	44.89	ESPSD	0.0042	7.17	ESSR	0.0010	30.80	ESTSD	0.0019
156	NTT	Sumba Barat	60.83	ESPT	0.0076	5.57	ESSSR	0.0006	16.12	ESTSR	0.0004
157	Irjabar	Fakfak	37.42	ESPSD	0.0042	21.09	ESSSD	0.0023	22.21	ESTR	0.0008
158	Irjabar	Manokwari	44.57	ESPSD	0.0042	15.22	ESSSD	0.0023	19.45	ESTR	0.0008
159	Irjabar	Sorong	77.88	ESPST	0.0076	11.07	ESSR	0.0010	3.22	ESTSR	0.0004
160	Papua	Jayawijaya	57.50	ESPT	0.0076	4.17	ESSSR	0.0006	26.24	ESTSD	0.0019
161	Irjabar	Mimika	97.90	ESPST	0.0076	0.70	ESSSR	0.0006	1.18	ESTSR	0.0004

Keterangan :**ESP** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Primer**ESS** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Sekunder**EST** : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor TersierDibelakang **ESP/ESS/EST - ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Rata-rata	39.2		Rata-rata	22.4		Rata-rata	31.5	
Standev	22.9		Standev	16.4		Standev	5.2	
Skew	(0.8)		Skew	0.6		Skew	(0.3)	
Kuortis	(0.6)		Kuortis	1.9		Kuortis	(0.1)	
ESPST	62.0	-	ESSST	38.7	-	ESTST	46.6	-
ESPT	50.6	62.0	ESST	30.5	38.7	ESTT	39.1	46.6
ESPSD	27.7	50.6	ESSSD	14.2	30.5	ESTSD	23.9	39.1
ESPR	16.3	27.7	ESSR	6.0	14.2	ESTR	16.3	23.9
ESPSR	-	16.3	ESSSR	-	6.0	ESTSR	-	16.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun 2003) - Untuk Sektor Tersier, Sub Sektor Jasa Pemerintahan dihilangkan

Sumber : BPS Pusat yang diolah.

Lampiran 15 : Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/Labour and Productivity
Lampiran 15.1 : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja/Availability of Manpower
Lampiran 15.1.A : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja 53 Kota
Availability of Manpower of 53 Cities

NO	PROPINSI	KOTA	Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja			Indikator Ketersediaan TK Usia Produktif			Indikator Ketersediaan TK Berpendidikan Min SLTP		
			% Pencari Kerja thd Angkatan Kerja	Intensitas	Score	% Usia Produktif	Intensitas	Score	% TK Berpendidikan SLTP	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	17.32	TSCSB	0.0113	64.5	TSPC	0.0019	36.6	TSSSB	0.0032
2	Sumut	Medan	13.71	TSCB	0.0068	67.7	TSPB	0.0025	25.8	TSSB	0.0027
3	Sumut	Pematang Siantar	26.09	TSCSB	0.0113	58.9	TSPC	0.0019	31.7	TSSSB	0.0032
4	Sumut	Sibolga	30.00	TSCSB	0.0113	62.5	TSPC	0.0019	30.3	TSSSB	0.0032
5	Sumut	Tanjung Balai	5.51	TSCK	0.0015	53.9	TSPK	0.0015	20.7	TSSC	0.0025
6	Sumut	Tebing Tinggi	10.81	TSCC	0.0031	59.9	TSPC	0.0019	33.3	TSSSB	0.0032
7	Sumbar	Padang	16.99	TSCSB	0.0113	67.2	TSPB	0.0025	17.8	TSSC	0.0025
8	Sumbar	Sawahlunto	12.00	TSCC	0.0031	59.3	TSPC	0.0019	17.0	TSSK	0.0009
9	Riau	Pekanbaru	14.14	TSCB	0.0068	64.9	TSPC	0.0019	26.9	TSSB	0.0027
10	Riau	Dumai	21.64	TSCSB	0.0113	60.7	TSPC	0.0019	29.9	TSSSB	0.0032
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	11.25	TSCC	0.0031	59.3	TSPC	0.0019	24.4	TSSC	0.0025
12	Kep. Riau	Batam	8.22	TSCC	0.0031	76.7	TSPSB	0.0034	10.0	TSSSK	0.0004
13	Jambi	Jambi	8.90	TSCC	0.0031	67.9	TSPB	0.0025	26.4	TSSB	0.0027
14	Sumsel	Palembang	16.55	TSCSB	0.0113	64.7	TSPC	0.0019	23.4	TSSC	0.0025
15	Babel	Pangkal Pinang	20.57	TSCSB	0.0113	65.5	TSPC	0.0019	35.9	TSSSB	0.0032
16	Bengkulu	Bengkulu	16.79	TSCSB	0.0113	65.0	TSPC	0.0019	16.6	TSSK	0.0009
17	Lampung	Bandar Lampung	18.45	TSCSB	0.0113	68.1	TSPB	0.0025	23.0	TSSC	0.0025
18	Banten	Cilegon	10.73	TSCC	0.0031	64.6	TSPC	0.0019	19.5	TSSC	0.0025
19	Banten	Tangerang	13.84	TSCB	0.0068	67.6	TSPB	0.0025	22.9	TSSC	0.0025
20	DKI	Jakarta	14.86	TSCB	0.0068	70.6	TSPB	0.0025	24.1	TSSC	0.0025
21	Jabar	Bekasi	10.92	TSCC	0.0031	68.6	TSPB	0.0025	17.5	TSSK	0.0009
22	Jabar	Bogor	19.54	TSCSB	0.0113	65.1	TSPC	0.0019	25.3	TSSB	0.0027
23	Jabar	Bandung	14.38	TSCB	0.0068	66.5	TSPC	0.0019	22.9	TSSC	0.0025
24	Jabar	Sukabumi	23.00	TSCSB	0.0113	64.6	TSPC	0.0019	28.6	TSSSB	0.0032
25	Jabar	Cirebon	12.09	TSCC	0.0031	60.2	TSPC	0.0019	22.7	TSSC	0.0025
26	Jateng	Semarang	11.44	TSCC	0.0031	65.7	TSPC	0.0019	23.7	TSSC	0.0025
27	Jateng	Tegal	13.73	TSCB	0.0068	60.0	TSPC	0.0019	28.0	TSSB	0.0027
28	Jateng	Pekalongan	2.27	TSCSK	0.0008	63.4	TSPC	0.0019	29.3	TSSSB	0.0032
29	Jateng	Surakarta	11.87	TSCC	0.0031	66.9	TSPB	0.0025	27.7	TSSB	0.0027
30	DIY	Yogyakarta	9.60	TSCC	0.0031	70.2	TSPB	0.0025	16.7	TSSK	0.0009
31	Jatim	Kediri	19.08	TSCSB	0.0113	63.9	TSPC	0.0019	22.5	TSSC	0.0025
32	Jatim	Malang	18.98	TSCSB	0.0113	72.5	TSPSB	0.0034	12.2	TSSSK	0.0004
33	Jatim	Madiun	19.79	TSCSB	0.0113	65.6	TSPC	0.0019	22.3	TSSC	0.0025
34	Jatim	Mojokerto	11.54	TSCC	0.0031	66.1	TSPC	0.0019	25.0	TSSB	0.0027
35	Jatim	Surabaya	9.93	TSCC	0.0031	68.9	TSPB	0.0025	21.5	TSSC	0.0025
36	Jatim	Probolinggo	19.35	TSCSB	0.0113	65.9	TSPC	0.0019	21.3	TSSC	0.0025
37	Bali	Denpasar	8.95	TSCC	0.0031	71.0	TSPB	0.0025	17.9	TSSC	0.0025
38	Kalbar	Pontianak	12.55	TSCC	0.0031	64.5	TSPC	0.0019	16.9	TSSK	0.0009
39	Kalteng	Palangkaraya	10.64	TSCC	0.0031	69.9	TSPB	0.0025	24.4	TSSC	0.0025
40	Kalsel	Banjarmasin	13.74	TSCB	0.0068	67.3	TSPB	0.0025	19.9	TSSC	0.0025
41	Kaltim	Balikpapan	8.92	TSCC	0.0031	66.0	TSPC	0.0019	24.6	TSSB	0.0027
42	Kaltim	Samarinda	5.61	TSCK	0.0015	69.5	TSPB	0.0025	25.3	TSSB	0.0027
43	Sulut	Bitung	8.49	TSCC	0.0031	62.3	TSPC	0.0019	31.6	TSSSB	0.0032
44	Sulut	Manado	2.65	TSCSK	0.0008	70.9	TSPB	0.0025	22.9	TSSC	0.0025
45	Gorontalo	Gorontalo	13.90	TSCB	0.0068	65.0	TSPC	0.0019	15.9	TSSK	0.0009
46	Sulteng	Palu	8.51	TSCC	0.0031	64.2	TSPC	0.0019	21.5	TSSC	0.0025
47	Sultra	Kendari	15.55	TSCSB	0.0113	63.8	TSPC	0.0019	19.0	TSSC	0.0025
48	Sulsel	Makasar	21.99	TSCSB	0.0113	63.6	TSPC	0.0019	18.6	TSSC	0.0025
49	Sulsel	Pare Pare	19.57	TSCSB	0.0113	58.1	TSPC	0.0019	14.4	TSSK	0.0009
50	NTB	Mataram	11.24	TSCC	0.0031	61.9	TSPC	0.0019	15.4	TSSK	0.0009
51	NTT	Kupang	16.57	TSCSB	0.0113	69.4	TSPB	0.0025	22.1	TSSC	0.0025
52	Irjabar	Sorong	14.29	TSCB	0.0068	57.2	TSPK	0.0015	32.2	TSSSB	0.0032
53	Papua	Jayapura	25.00	TSCSB	0.0113	62.0	TSPC	0.0019	27.6	TSSB	0.0027

Keterangan :

TSC : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Pencari Kerja
TSP : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Usia Produktif
TSS : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Berpendidikan SLTP
Dibelakang **TSC/TSP/TSS - ST** : Sangat Tinggi
T : Tinggi
SD : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Rata-rata	9.90		Rata-rata	62.31		Rata-rata	17.40	
Standev	5.61		Standev	4.39		Standev	11.60	
Skew	0.51		Skew	0.02		Skew	1.11	
Kuortis	(0.47)		Kuortis	0.72		Kuortis	0.55	
TSCSB	15.5	-	TSPSB	71.09	-	TSSSB	29.0	-
TSCB	12.7	15.5	TSPB	66.70	71.09	TSSB	23.2	29.0
TSCC	7.1	12.7	TSCB	57.92	66.70	TSSC	11.6	23.2
TSCK	4.3	7.1	TSBK	53.53	57.92	TSSK	5.8	11.6
TSCSK	-	4.3	TSBSK	-	53.53	TSSSK	-	5.8

Sumber : Data Sakernas Th.2003, dari BPS Pusat, yang telah diolah

Lampiran 15.1.B : Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja 161 Kabupaten
Availability of Manpower of 161 Regencies

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja			Indikator Ketersediaan TK Usia Produktif			Indikator Ketersediaan TK Berpendidikan Min SLTP		
			% Pencari Kerja thd Angkatan Kerja	Intensitas	Score	% Usia Produktif	Intensitas	Score	% TK Berpendidikan SLTP	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	8.03	TSCC	0.0031	61.8	TSPC	0.0019	26.04	TSSB	0.0027
2	Sumut	Dairi	8.84	TSCC	0.0031	57.2	TSPK	0.0015	41.67	TSSSB	0.0032
3	Sumut	Deliserdang	11.25	TSCC	0.0031	62.3	TSPC	0.0019	29.27	TSSSB	0.0032
4	Sumut	Langkat	12.52	TSCC	0.0031	61.9	TSPC	0.0019	38.75	TSSSB	0.0032
5	Sumut	Simalungun	18.38	TSCSB	0.0113	56.7	TSPK	0.0015	25.06	TSSB	0.0027
6	Sumut	Karo		TSCSK	0.0008	61.7	TSPC	0.0019	31.40	TSSSB	0.0032
7	Sumut	Labuhan Batu	13.98	TSCB	0.0068	58.4	TSPC	0.0019	33.58	TSSSB	0.0032
8	Sumut	Tapanuli Utara	13.10	TSCB	0.0068	61.3	TSPC	0.0019	36.92	TSSSB	0.0032
9	Sumbar	Pesisir Selatan	13.20	TSCB	0.0068	57.4	TSPK	0.0015	19.74	TSSC	0.0025
10	Sumbar	Sawalunto/Sijunjung	11.20	TSCC	0.0031	62.2	TSPC	0.0019	25.53	TSSB	0.0027
11	Sumbar	Pasaman	7.49	TSCC	0.0031	56.3	TSPK	0.0015	33.12	TSSSB	0.0032
12	Sumbar	Solok	9.23	TSCC	0.0031	56.1	TSPK	0.0015	29.09	TSSSB	0.0032
13	Riau	Bengkalis	9.18	TSCC	0.0031	64.7	TSPC	0.0019	18.83	TSSC	0.0025
14	Riau	Indragiri Hilir	12.61	TSCC	0.0031	64.9	TSPC	0.0019	22.53	TSSC	0.0025
15	Riau	Kampar	21.13	TSCSB	0.0113	49.4	TSPSK	0.0006	29.33	TSSSB	0.0032
16	Riau	Kuantan Sengigi	6.12	TSCK	0.0015	72.3	TSPSB	0.0034	39.75	TSSSB	0.0032
17	Riau	Pelalawan		TSCSK	0.0008	61.3	TSPC	0.0019	14.89	TSSK	0.0009
18	Riau	Rokan Hulu	1.79	TSCSK	0.0008	61.2	TSPC	0.0019	18.00	TSSC	0.0025
19	Jambi	Batanghari	5.07	TSCK	0.0015	62.4	TSPC	0.0019	32.43	TSSSB	0.0032
20	Jambi	Bungo	4.24	TSCSK	0.0008	62.4	TSPC	0.0019	21.46	TSSC	0.0025
21	Jambi	Kerinci	10.49	TSCC	0.0031	60.7	TSPC	0.0019	20.98	TSSC	0.0025
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	7.82	TSCC	0.0031	62.1	TSPC	0.0019	30.36	TSSSB	0.0032
23	Jambi	Tebo	4.62	TSCK	0.0015	61.0	TSPC	0.0019	21.66	TSSC	0.0025
24	Sumsel	Muara Enim	6.04	TSCK	0.0015	61.1	TSPC	0.0019	23.09	TSSC	0.0025
25	Sumsel	Musi Banyuasin	1.45	TSCSK	0.0008	66.4	TSPC	0.0019	30.30	TSSSB	0.0032
26	Sumsel	Musi Rawas	4.55	TSCK	0.0015	60.4	TSPC	0.0019	21.71	TSSC	0.0025
27	Sumsel	Ogan Komiring Ilir	10.91	TSCC	0.0031	60.1	TSPC	0.0019	14.64	TSSK	0.0009
28	Sumsel	Lahat	18.11	TSCSB	0.0113	62.3	TSPC	0.0019	23.76	TSSC	0.0025
29	Babel	Bangka	4.93	TSCK	0.0015	60.5	TSPC	0.0019	20.63	TSSC	0.0025
30	Babel	Belitung	7.13	TSCC	0.0031	64.4	TSPC	0.0019	20.90	TSSC	0.0025
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	9.36	TSCC	0.0031	57.6	TSPK	0.0015	20.19	TSSC	0.0025
32	Bengkulu	Rejang Lebong	5.04	TSCK	0.0015	63.7	TSPC	0.0019	19.51	TSSC	0.0025
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	4.56	TSCK	0.0015	59.6	TSPC	0.0019	22.47	TSSC	0.0025
34	Lampung	Lampung Barat	7.64	TSCC	0.0031	61.7	TSPC	0.0019	18.09	TSSC	0.0025
35	Lampung	Lampung Selatan	9.25	TSCC	0.0031	62.5	TSPC	0.0019	27.47	TSSB	0.0027
36	Lampung	Lampung Timur	6.12	TSCK	0.0015	63.1	TSPC	0.0019	26.65	TSSB	0.0027
37	Lampung	Lampung Utara	6.99	TSCK	0.0015	57.6	TSPK	0.0015	19.66	TSSC	0.0025
38	Lampung	Way Kanan	3.95	TSCSK	0.0008	60.4	TSPC	0.0019	29.31	TSSSB	0.0032
39	Banten	Lebak	9.18	TSCC	0.0031	59.2	TSPC	0.0019	12.76	TSSSK	0.0004
40	Banten	Serang	19.61	TSCSB	0.0113	59.2	TSPC	0.0019	19.32	TSSC	0.0025
41	Banten	Tangerang	24.07	TSCSB	0.0113	74.7	TSPSB	0.0034	30.65	TSSSB	0.0032
42	Jabar	Bekasi	10.37	TSCC	0.0031	63.8	TSPC	0.0019	19.06	TSSC	0.0025
43	Jabar	Bogor	14.31	TSCB	0.0068	61.5	TSPC	0.0019	16.28	TSSK	0.0009
44	Jabar	Ciamis	5.89	TSCK	0.0015	65.0	TSPC	0.0019	18.54	TSSC	0.0025
45	Jabar	Tasikmalaya	9.83	TSCC	0.0031	62.0	TSPC	0.0019	9.72	TSSSK	0.0004
46	Jabar	Garut	13.57	TSCB	0.0068	59.9	TSPC	0.0019	15.78	TSSK	0.0009
47	Jabar	Sumedang	12.92	TSCB	0.0068	63.4	TSPC	0.0019	22.89	TSSC	0.0025
48	Jabar	Bandung	15.85	TSCSB	0.0113	61.9	TSPC	0.0019	21.27	TSSC	0.0025
49	Jabar	Cianjur	14.85	TSCB	0.0068	59.8	TSPC	0.0019	12.26	TSSSK	0.0004
50	Jabar	Sukabumi	11.01	TSCC	0.0031	60.2	TSPC	0.0019	12.77	TSSSK	0.0004
51	Jabar	Cirebon	11.41	TSCC	0.0031	60.6	TSPC	0.0019	15.16	TSSK	0.0009
52	Jabar	Kuningan	5.62	TSCK	0.0015	63.5	TSPC	0.0019	10.18	TSSSK	0.0004
53	Jabar	Indramayu	10.46	TSCC	0.0031	62.8	TSPC	0.0019	8.77	TSSSK	0.0004
54	Jabar	Purwakarta	11.90	TSCC	0.0031	57.4	TSPK	0.0015	10.91	TSSSK	0.0004
55	Jabar	Karawang	17.60	TSCSB	0.0113	62.6	TSPC	0.0019	19.26	TSSC	0.0025
56	Jabar	Subang	6.78	TSCK	0.0015	65.0	TSPC	0.0019	20.36	TSSC	0.0025
57	Jateng	Kendal	4.56	TSCK	0.0015	63.5	TSPC	0.0019	18.52	TSSC	0.0025

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja			Indikator Ketersediaan TK Usia Produktif			Indikator Ketersediaan TK Berpendidikan Min SLTP		
			% Pencari Kerja thd Angkatan Kerja	Intensitas	Score	% Usia Produktif	Intensitas	Score	% TK Berpendidikan SLTP	Intensitas	Score
58	Jateng	Pekalongan	7.40	TSCC	0.0031	60.1	TSPC	0.0019	13.26	TSSSK	0.0004
59	Jateng	Pemalang	9.33	TSCC	0.0031	60.0	TSPC	0.0019	11.88	TSSSK	0.0004
60	Jateng	Tegal	9.16	TSCC	0.0031	60.8	TSPC	0.0019	15.70	TSSK	0.0009
61	Jateng	Jepara	2.80	TSCSK	0.0008	63.7	TSPC	0.0019	29.52	TSSSB	0.0032
62	Jateng	Kudus	5.81	TSCC	0.0015	66.1	TSPC	0.0019	29.03	TSSSB	0.0032
63	Jateng	Banyumas	9.11	TSCC	0.0031	61.7	TSPC	0.0019	19.06	TSSC	0.0025
64	Jateng	Cilacap	10.44	TSCC	0.0031	61.0	TSPC	0.0019	17.95	TSSC	0.0025
65	Jateng	Wonosobo	2.27	TSCSK	0.0008	61.1	TSPC	0.0019	15.64	TSSK	0.0009
66	Jateng	Kebumen	7.77	TSCC	0.0031	57.2	TSPK	0.0015	17.24	TSSK	0.0009
67	Jateng	Boyolali	3.68	TSCSK	0.0008	61.7	TSPC	0.0019	26.12	TSSB	0.0027
68	Jateng	Sukoharjo	7.33	TSCC	0.0031	63.2	TSPC	0.0019	19.95	TSSC	0.0025
69	Jateng	Karanganyar	0.82	TSCSK	0.0008	64.2	TSPC	0.0019	15.92	TSSK	0.0009
70	Jateng	Klaten	8.83	TSCC	0.0031	63.1	TSPC	0.0019	23.44	TSSC	0.0025
71	Jateng	Magelang	4.52	TSCC	0.0015	62.5	TSPC	0.0019	19.58	TSSC	0.0025
72	DIY	Bantul	5.92	TSCC	0.0015	64.8	TSPC	0.0019	20.27	TSSC	0.0025
73	DIY	Gunung Kidul	2.26	TSCSK	0.0008	60.0	TSPC	0.0019	20.45	TSSC	0.0025
74	Jatim	Blitar	6.32	TSCC	0.0015	62.3	TSPC	0.0019	16.66	TSSK	0.0009
75	Jatim	Kediri	10.75	TSCC	0.0031	63.6	TSPC	0.0019	24.90	TSSB	0.0027
76	Jatim	Magetan	7.43	TSCC	0.0031	63.3	TSPC	0.0019	20.04	TSSC	0.0025
77	Jatim	Ponorogo	3.84	TSCSK	0.0008	63.1	TSPC	0.0019	21.20	TSSC	0.0025
78	Jatim	Tulungagung	11.23	TSCC	0.0031	64.5	TSPC	0.0019	20.13	TSSC	0.0025
79	Jatim	Mojokerto	8.75	TSCC	0.0031	64.7	TSPC	0.0019	25.45	TSSB	0.0027
80	Jatim	Pamekasan	5.32	TSCC	0.0015	66.3	TSPC	0.0019	20.70	TSSC	0.0025
81	Jatim	Bangkalan	10.44	TSCC	0.0031	58.2	TSPC	0.0019	3.07	TSSSK	0.0004
82	Jatim	Pasuruhan	8.35	TSCC	0.0031	67.1	TSPB	0.0025	17.03	TSSK	0.0009
83	Jatim	Sidoarjo	10.50	TSCC	0.0031	66.1	TSPC	0.0019	25.42	TSSB	0.0027
84	Jatim	Gresik	15.88	TSCSB	0.0113	64.9	TSPC	0.0019	25.11	TSSB	0.0027
85	Jatim	Jombang	11.21	TSCC	0.0031	62.7	TSPC	0.0019	21.82	TSSC	0.0025
86	Jatim	Lamongan	9.25	TSCC	0.0031	65.6	TSPC	0.0019	22.17	TSSC	0.0025
87	Jatim	Banyuwangi	7.87	TSCC	0.0031	64.2	TSPC	0.0019	21.20	TSSC	0.0025
88	Jatim	Bondowoso	4.84	TSCC	0.0015	63.8	TSPC	0.0019	10.52	TSSSK	0.0004
89	Jatim	Situbondo	4.56	TSCC	0.0015	69.9	TSPB	0.0025	15.37	TSSK	0.0009
90	Jatim	Jember	7.04	TSCC	0.0015	64.8	TSPC	0.0019	15.06	TSSK	0.0009
91	Bali	Badung	7.11	TSCC	0.0031	68.0	TSPB	0.0025	14.54	TSSK	0.0009
92	Bali	Bangli	1.23	TSCSK	0.0008	62.1	TSPC	0.0019	15.54	TSSK	0.0009
93	Bali	Buleleng	3.59	TSCSK	0.0008	62.3	TSPC	0.0019	23.43	TSSC	0.0025
94	Bali	Gianyar	4.35	TSCC	0.0015	64.7	TSPC	0.0019	20.01	TSSC	0.0025
95	Bali	Jembrana	9.24	TSCC	0.0031	66.6	TSPC	0.0019	15.75	TSSK	0.0009
96	Bali	Tabanan	3.13	TSCSK	0.0008	63.1	TSPC	0.0019	15.59	TSSK	0.0009
97	Bali	Klungkung	11.16	TSCC	0.0031	60.4	TSPC	0.0019	14.95	TSSK	0.0009
98	Bali	Karang Asem	1.94	TSCSK	0.0008	61.2	TSPC	0.0019	14.68	TSSK	0.0009
99	Kalbar	Kapuas Hulu	3.89	TSCSK	0.0008	62.2	TSPC	0.0019	20.89	TSSC	0.0025
100	Kalbar	Ketapang	9.29	TSCC	0.0031	58.8	TSPC	0.0019	17.96	TSSC	0.0025
101	Kalbar	Pontianak	6.18	TSCC	0.0015	56.0	TSPK	0.0015	22.19	TSSC	0.0025
102	Kalbar	Sambas	4.97	TSCC	0.0015	59.5	TSPC	0.0019	18.65	TSSC	0.0025
103	Kalbar	Sanggau	5.77	TSCC	0.0015	63.1	TSPC	0.0019	26.50	TSSB	0.0027
104	Kalteng	Barito Selatan	0.67	TSCSK	0.0008	61.5	TSPC	0.0019	31.39	TSSSB	0.0032
105	Kalteng	Barito Utara	3.35	TSCSK	0.0008	60.0	TSPC	0.0019	35.84	TSSSB	0.0032
106	Kalteng	Kapuas	5.81	TSCC	0.0015	62.3	TSPC	0.0019	22.43	TSSC	0.0025
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	15.62	TSCSB	0.0113	65.5	TSPC	0.0019	16.04	TSSK	0.0009
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	17.41	TSCSB	0.0113	69.2	TSPB	0.0025	24.70	TSSB	0.0027
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	1.68	TSCSK	0.0008	60.4	TSPC	0.0019	14.58	TSSK	0.0009
110	Kalsel	Tabalong	8.70	TSCC	0.0031	62.8	TSPC	0.0019	21.17	TSSC	0.0025
111	Kalsel	Tanah Laut	3.71	TSCSK	0.0008	64.8	TSPC	0.0019	18.83	TSSC	0.0025
112	Kalsel	Tapin	4.82	TSCC	0.0015	64.2	TSPC	0.0019	22.57	TSSC	0.0025
113	Kaltim	Berau	0.77	TSCSK	0.0008	63.8	TSPC	0.0019	27.93	TSSB	0.0027
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	3.13	TSCSK	0.0008	65.7	TSPC	0.0019	27.79	TSSB	0.0027

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja			Indikator Ketersediaan TK Usia Produktif			Indikator Ketersediaan TK Berpendidikan Min SLTP		
			% Pencari Kerja thd Angkatan Kerja	Intensitas	Score	% Usia Produktif	Intensitas	Score	% TK Berpendidikan SLTP	Intensitas	Score
115	Kaltim	Pasir	0.62	TSCSK	0.0008	65.2	TSPC	0.0019	22.73	TSSC	0.0025
116	Kaltim	Kab.Bulongan	1.18	TSCSK	0.0008	60.2	TSPC	0.0019	22.13	TSSC	0.0025
117	Kaltim	Kutai Timur	2.17	TSCSK	0.0008	62.6	TSPC	0.0019	18.89	TSSC	0.0025
118	Kaltim	Nunukan	9.97	TSCC	0.0031	71.1	TSPSB	0.0034	20.70	TSSC	0.0025
119	Sulut	Minahasa	8.84	TSCC	0.0031	65.4	TSPC	0.0019	38.97	TSSSB	0.0032
120	Sulut	Sangihe Talaut	3.90	TSCSK	0.0008	62.7	TSPC	0.0019	21.94	TSSC	0.0025
121	Gorontalo	Gorontalo	8.22	TSCC	0.0031	59.8	TSPC	0.0019	14.97	TSSK	0.0009
122	Sulteng	Banggai	1.86	TSCSK	0.0008	60.6	TSPC	0.0019	19.97	TSSC	0.0025
123	Sulteng	Toli Toli	4.67	TSCC	0.0015	60.2	TSPC	0.0019	23.48	TSSC	0.0025
124	Sulteng	Donggala	2.77	TSCSK	0.0008	61.0	TSPC	0.0019	17.21	TSSK	0.0009
125	Sulteng	Morowali	12.78	TSCB	0.0068	56.5	TSPK	0.0015	18.97	TSSC	0.0025
126	Sulteng	Poso	2.41	TSCSK	0.0008	61.3	TSPC	0.0019	25.59	TSSB	0.0027
127	Sultra	Buton	12.52	TSCC	0.0031	53.1	TSPSK	0.0006	18.17	TSSC	0.0025
128	Sultra	Kolaka	7.04	TSCC	0.0015	61.2	TSPC	0.0019	34.36	TSSSB	0.0032
129	Sulsel	Gowa	25.36	TSCSB	0.0113	62.3	TSPC	0.0019	19.85	TSSC	0.0025
130	Sulsel	Takalar	17.09	TSCSB	0.0113	54.7	TSPK	0.0015	17.23	TSSK	0.0009
131	Sulsel	Jeneponto	16.40	TSCSB	0.0113	55.7	TSPK	0.0015	16.65	TSSK	0.0009
132	Sulsel	Bantaeng	10.47	TSCC	0.0031	61.0	TSPC	0.0019	7.41	TSSSK	0.0004
133	Sulsel	Sinjai	4.41	TSCC	0.0015	60.0	TSPC	0.0019	20.29	TSSC	0.0025
134	Sulsel	Selayar	27.27	TSCSB	0.0113	60.6	TSPC	0.0019	13.13	TSSSK	0.0004
135	Sulsel	Bone	16.06	TSCSB	0.0113	58.7	TSPC	0.0019	17.69	TSSC	0.0025
136	Sulsel	Maros	16.54	TSCSB	0.0113	61.9	TSPC	0.0019	14.94	TSSK	0.0009
137	Sulsel	Pangkep	4.21	TSCSK	0.0008	59.1	TSPC	0.0019	16.15	TSSK	0.0009
138	Sulsel	Barru	21.23	TSCSB	0.0113	55.5	TSPK	0.0015	10.90	TSSSK	0.0004
139	Sulsel	Pinrang	26.29	TSCSB	0.0113	59.0	TSPC	0.0019	25.92	TSSB	0.0027
140	Sulsel	Majene	15.87	TSCSB	0.0113	54.2	TSPK	0.0015	23.20	TSSC	0.0025
141	Sulsel	Enrekang	15.15	TSCB	0.0068	60.4	TSPC	0.0019	15.33	TSSK	0.0009
142	Sulsel	Tanah Toraja	19.96	TSCSB	0.0113	51.6	TSPSK	0.0006	16.10	TSSK	0.0009
143	Sulsel	Luwu	20.53	TSCSB	0.0113	52.7	TSPSK	0.0006	25.83	TSSB	0.0027
144	Sulsel	Luwu Utara	14.80	TSCB	0.0068	61.6	TSPC	0.0019	20.99	TSSC	0.0025
145	NTB	Bima	9.60	TSCC	0.0031	55.8	TSPK	0.0015	15.04	TSSK	0.0009
146	NTB	Lombok Barat	4.21	TSCSK	0.0008	59.6	TSPC	0.0019	12.21	TSSSK	0.0004
147	NTB	Dompu	7.91	TSCC	0.0031	57.3	TSPK	0.0015	21.17	TSSC	0.0025
148	NTB	Lombok Timur	6.97	TSCC	0.0015	58.7	TSPC	0.0019	13.76	TSSSK	0.0004
149	NTT	Ende	6.73	TSCC	0.0015	57.9	TSPC	0.0019	13.96	TSSSK	0.0004
150	NTT	Flores Timur	1.14	TSCSK	0.0008	57.2	TSPK	0.0015	7.52	TSSSK	0.0004
151	NTT	Manggarai	2.73	TSCSK	0.0008	54.1	TSPK	0.0015	10.62	TSSSK	0.0004
152	NTT	Ngada		TSCSK	0.0008	57.0	TSPK	0.0015	20.96	TSSC	0.0025
153	NTT	TTS	0.63	TSCSK	0.0008	58.2	TSPC	0.0019	9.88	TSSSK	0.0004
154	NTT	TTU	1.18	TSCSK	0.0008	57.8	TSPK	0.0015	9.32	TSSSK	0.0004
155	NTT	Belu	0.82	TSCSK	0.0008	49.8	TSPSK	0.0006	16.23	TSSK	0.0009
156	NTT	Sumba Barat	2.71	TSCSK	0.0008	48.0	TSPSK	0.0006	14.63	TSSK	0.0009
157	Irjabar	Fakfak									
158	Irjabar	Manokwari	1.45	TSCSK	0.0008	58.4	TSPC	0.0019	11.40	TSSSK	0.0004
159	Irjabar	Sorong	5.88	TSCC	0.0015	59.3	TSPC	0.0019	25.71	TSSB	0.0027
160	Papua	Jayawijaya	0.73	TSCSK	0.0008	64.6	TSPC	0.0019	5.89	TSSSK	0.0004
161	Irjabar	Mimika	18.92	TSCSB	0.0113	74.6	TSPSB	0.0034	43.10	TSSSB	0.0032

Keterangan :**TSC** : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Pencari Kerja**TSP** : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Usia Produktif**TSS** : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Berpendidikan SLTPDibelakang **TSC/TSP/TSS** - **ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Rata-rata	9.90		Rata-rata	62.31		Rata-rata	17.40	
Standev	5.61		Standev	4.39		Standev	11.60	
Skew	0.51		Skew	0.02		Skew	1.11	
Kuortis	(0.47)		Kuortis	0.72		Kuortis	0.55	
TSCSB	15.5	-	TSPSB	71.09	-	TSSSB	29.0	-
TSCB	12.7	15.5	TSPB	66.70	71.09	TSSB	23.2	29.0
TSCC	7.1	12.7	TSCB	57.92	66.70	TSSC	11.6	23.2
TSCC	4.3	7.1	TSCB	53.53	57.92	TSSK	5.8	11.6
TSCSK	-	4.3	TSCB	-	53.53	TSSSK	-	5.8

Sumber : Data Sakernas Th.2003, dari BPS Pusat, yang telah diolah

Lampiran 15.2 : Variabel Biaya Tenaga Kerja/Labour Cost
Lampiran 15.2.A : Variabel Biaya Tenaga Kerja 53 Kota
Labour Cost of 53 Cities

NO	PROPINSI	KOTA	Indikator Biaya Tenaga Kerja Aturan Formal			Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual		
			UMP/UMK Tahun 2003	Intensitas	Score	Rata-Rata Upah Aktual	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	549,549	TBRST	0.0015	673,108	TBDSD	0.0020
2	Sumut	Medan	549,549	TBRST	0.0015	922,278	TBDT	0.0020
3	Sumut	Pematang Siantar	549,549	TBRST	0.0015	807,869	TBDSD	0.0020
4	Sumut	Sibolga	549,549	TBRST	0.0015	640,500	TBDSD	0.0020
5	Sumut	Tanjung Balai	549,549	TBRST	0.0015	726,469	TBDSD	0.0020
6	Sumut	Tebing Tinggi	549,549	TBRST	0.0015	563,667	TBDR	0.0021
7	Sumbar	Padang	435,000	TBRSD	0.0029	978,795	TBDST	0.0014
8	Sumbar	Sawahlunto	435,000	TBRSD	0.0029	943,750	TBDT	0.0020
9	Riau	Pekanbaru	437,500	TBRSD	0.0029	978,037	TBDST	0.0014
10	Riau	Dumai	510,000	TBRT	0.0022	728,290	TBDSD	0.0020
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	510,000	TBRT	0.0022	936,780	TBDT	0.0020
12	Kep. Riau	Batam	621,667	TBRST	0.0015	1,043,372	TBDST	0.0014
13	Jambi	Jambi	390,000	TBRR	0.0060	759,079	TBDSD	0.0020
14	Sumsel	Palembang	472,494	TBRSD	0.0029	913,168	TBDT	0.0020
15	Babel	Pangkal Pinang	437,165	TBRSD	0.0029	759,329	TBDSD	0.0020
16	Bengkulu	Bengkulu	330,000	TBRSR	0.0088	1,031,724	TBDST	0.0014
17	Lampung	Bandar Lampung	350,000	TBRSR	0.0088	702,465	TBDSD	0.0020
18	Banten	Cilegon	628,675	TBRST	0.0015	965,760	TBDST	0.0014
19	Banten	Tangerang	628,675	TBRST	0.0015	898,876	TBDT	0.0020
20	DKI	Jakarta	631,554	TBRST	0.0015	1,003,677	TBDST	0.0014
21	Jabar	Bekasi	631,000	TBRST	0.0015	1,030,507	TBDST	0.0014
22	Jabar	Bogor	576,169	TBRST	0.0015	1,073,979	TBDST	0.0014
23	Jabar	Bandung	538,000	TBRST	0.0015	856,537	TBDT	0.0020
24	Jabar	Sukabumi	395,500	TBRR	0.0060	592,051	TBDR	0.0021
25	Jabar	Cirebon	375,000	TBRR	0.0060	628,475	TBDSD	0.0020
26	Jateng	Semarang	400,000	TBRSD	0.0029	695,259	TBDSD	0.0020
27	Jateng	Tegal	364,000	TBRR	0.0060	585,594	TBDR	0.0021
28	Jateng	Pekalongan	375,000	TBRR	0.0060	524,730	TBDR	0.0021
29	Jateng	Surakarta	378,000	TBRR	0.0060	701,514	TBDSD	0.0020
30	DIY	Yogyakarta	360,000	TBRR	0.0060	668,540	TBDSD	0.0020
31	Jatim	Kediri	415,000	TBRSD	0.0029	563,434	TBDR	0.0021
32	Jatim	Malang	497,100	TBRT	0.0022	699,274	TBDSD	0.0020
33	Jatim	Madiun	305,000	TBRSR	0.0088	637,352	TBDSD	0.0020
34	Jatim	Mojokerto	478,500	TBRSD	0.0029	772,413	TBDSD	0.0020
35	Jatim	Surabaya	516,750	TBRT	0.0022	842,419	TBDT	0.0020
36	Jatim	Probolinggo	445,000	TBRSD	0.0029	863,351	TBDT	0.0020
37	Bali	Denpasar	427,500	TBRSD	0.0029	783,507	TBDSD	0.0020
38	Kalbar	Pontianak	400,000	TBRSD	0.0029	851,032	TBDT	0.0020
39	Kalteng	Palangkaraya	452,763	TBRSD	0.0029	1,063,450	TBDST	0.0014
40	Kalsel	Banjarmasin	459,172	TBRSD	0.0029	764,092	TBDSD	0.0020
41	Kaltim	Balikpapan	618,333	TBRST	0.0015	1,308,651	TBDST	0.0014
42	Kaltim	Samarinda	618,333	TBRST	0.0015	1,077,721	TBDST	0.0014
43	Sulut	Bitung	495,000	TBRT	0.0022	1,176,618	TBDST	0.0014
44	Sulut	Manado	495,000	TBRT	0.0022	1,099,434	TBDST	0.0014
45	Gorontalo	Gorontalo	410,000	TBRSD	0.0029	737,158	TBDSD	0.0020
46	Sulteng	Palu	410,000	TBRSD	0.0029	1,085,550	TBDST	0.0014
47	Sultra	Kendari	405,000	TBRSD	0.0029	982,625	TBDST	0.0014
48	Sulsel	Makasar	415,000	TBRSD	0.0029	1,038,010	TBDST	0.0014
49	Sulsel	Pare Pare	415,000	TBRSD	0.0029	716,250	TBDSD	0.0020
50	NTB	Mataram	375,000	TBRR	0.0060	550,920	TBDR	0.0021
51	NTT	Kupang	375,000	TBRR	0.0060	924,883	TBDT	0.0020
52	Irjabar	Sorong	530,000	TBRST	0.0015	2,085,455	TBDST	0.0014
53	Papua	Jayapura	530,000	TBRST	0.0015	1,436,128	TBDST	0.0014

Keterangan :

TBR : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Formal

TBD : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Aktual

Dibelakang **TBR/TBD - ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	439,765		Rata-rata	718,194	
TBRST	522,551	-	TBDST	953,459	-
TBRT	481,158	522,551	TBDT	835,827	953,459
TBRSD	398,372	481,158	TBDSD	600,561	835,827
TBRR	356,978	398,372	TBDR	482,928	600,561
TBRSR	-	356,978	TBDSR	-	482,928

Sumber : Asosiasi Pengusaha Indonesia telah diolah dan Sakernas BPS Pusat

Lampiran 15.2. B : Variabel Biaya Tenaga Kerja 161 Kabupaten
Labour Cost of 161 Regencies

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Biaya Tenaga Kerja Aturan Formal			Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual		
			UMP/UMK Tahun 2003	Intensitas	Score	Rata-Rata Upah Aktual	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	549,549	TBRST	0.0015	690,187	TBDS	0.0020
2	Sumut	Dairi	549,549	TBRST	0.0015	792,053	TBDS	0.0020
3	Sumut	Deliserdang	549,549	TBRST	0.0015	586,114	TBDR	0.0021
4	Sumut	Langkat	549,549	TBRST	0.0015	651,321	TBDS	0.0020
5	Sumut	Simalungun	549,549	TBRST	0.0015	488,755	TBDR	0.0021
6	Sumut	Karo	549,549	TBRST	0.0015	1,056,667	TBDS	0.0014
7	Sumut	Labuhan Batu	549,549	TBRST	0.0015	759,158	TBDS	0.0020
8	Sumut	Tapaneli Utara	549,549	TBRST	0.0015	1,006,760	TBDS	0.0014
9	Sumbar	Pesisir Selatan	435,000	TBRSD	0.0029	572,688	TBDR	0.0021
10	Sumbar	Sawalunto/Sijunjung	435,000	TBRSD	0.0029	843,047	TBDT	0.0020
11	Sumbar	Pasaman	435,000	TBRSD	0.0029	716,763	TBDS	0.0020
12	Sumbar	Solok	435,000	TBRSD	0.0029	707,060	TBDS	0.0020
13	Riau	Bengkalis	437,500	TBRSD	0.0029	684,695	TBDS	0.0020
14	Riau	Indragiri Hilir	437,500	TBRSD	0.0029	777,857	TBDS	0.0020
15	Riau	Kampar	437,500	TBRSD	0.0029	802,200	TBDS	0.0020
16	Riau	Kuantan Sengigi	437,500	TBRSD	0.0029	564,951	TBDR	0.0021
17	Riau	Pelalawan	437,500	TBRSD	0.0029	1,482,500	TBDS	0.0014
18	Riau	Rokan Hulu	437,500	TBRSD	0.0029	737,500	TBDS	0.0020
19	Jambi	Batanghari	390,000	TBR	0.0060	677,632	TBDS	0.0020
20	Jambi	Bungo	390,000	TBR	0.0060	743,684	TBDS	0.0020
21	Jambi	Kerinci	390,000	TBR	0.0060	718,727	TBDS	0.0020
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	390,000	TBR	0.0060	716,874	TBDS	0.0020
23	Jambi	Tebo	390,000	TBR	0.0060	417,188	TBDS	0.0088
24	Sumsel	Muara Enim	472,494	TBRSD	0.0029	778,485	TBDS	0.0020
25	Sumsel	Musi Banyuasin	472,494	TBRSD	0.0029	469,656	TBDS	0.0088
26	Sumsel	Musi Rawas	472,494	TBRSD	0.0029	512,667	TBDR	0.0021
27	Sumsel	Ogan Komering Ilir	472,494	TBRSD	0.0029	586,264	TBDR	0.0021
28	Sumsel	Lahat	472,494	TBRSD	0.0029	437,295	TBDS	0.0088
29	Babel	Bangka	393,254	TBR	0.0060	800,512	TBDS	0.0020
30	Babel	Belitung	396,750	TBR	0.0060	668,600	TBDS	0.0020
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	330,000	TBR	0.0088	917,385	TBDT	0.0020
32	Bengkulu	Rejang Lebong	330,000	TBR	0.0088	550,892	TBDR	0.0021
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	330,000	TBR	0.0088	558,775	TBDR	0.0021
34	Lampung	Lampung Barat	350,000	TBR	0.0088	585,600	TBDR	0.0021
35	Lampung	Lampung Selatan	350,000	TBR	0.0088	545,188	TBDR	0.0021
36	Lampung	Lampung Timur	350,000	TBR	0.0088	687,377	TBDS	0.0020
37	Lampung	Lampung Utara	350,000	TBR	0.0088	473,245	TBDS	0.0088
38	Lampung	Way Kanan	350,000	TBR	0.0088	444,667	TBDS	0.0088
39	Banten	Lebak	475,000	TBRSD	0.0029	512,724	TBDR	0.0021
40	Banten	Serang	606,000	TBRST	0.0015	795,834	TBDS	0.0020
41	Banten	Tangerang	635,000	TBRST	0.0015	1,248,860	TBDS	0.0014
42	Jabar	Bekasi	631,000	TBRST	0.0015	954,632	TBDS	0.0014
43	Jabar	Bogor	600,944	TBRST	0.0015	716,290	TBDS	0.0020
44	Jabar	Ciamis	337,000	TBR	0.0088	568,520	TBDR	0.0021
45	Jabar	Tasikmalaya	345,000	TBR	0.0088	269,528	TBDS	0.0088
46	Jabar	Garut	330,000	TBR	0.0088	343,327	TBDS	0.0088
47	Jabar	Sumedang	537,000	TBRST	0.0015	887,618	TBDT	0.0020
48	Jabar	Bandung	537,500	TBRST	0.0015	604,656	TBDS	0.0020
49	Jabar	Cianjur	346,625	TBR	0.0088	408,632	TBDS	0.0088
50	Jabar	Sukabumi	352,365	TBR	0.0088	464,021	TBDS	0.0088
51	Jabar	Cirebon	370,000	TBR	0.0060	441,413	TBDS	0.0088
52	Jabar	Kuningan	325,000	TBR	0.0088	696,033	TBDS	0.0020
53	Jabar	Indramayu	420,000	TBRSD	0.0029	437,970	TBDS	0.0088
54	Jabar	Purwakarta	524,000	TBRST	0.0015	651,468	TBDS	0.0020
55	Jabar	Karawang	585,000	TBRST	0.0015	730,615	TBDS	0.0020
56	Jabar	Subang	405,000	TBRSD	0.0029	424,692	TBDS	0.0088
57	Jateng	Kendal	377,500	TBR	0.0060	423,076	TBDS	0.0088
58	Jateng	Pekalongan	375,000	TBR	0.0060	450,553	TBDS	0.0088
59	Jateng	Pemalang	380,000	TBR	0.0060	495,389	TBDR	0.0021

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Biaya Tenaga Kerja Aturan Formal			Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual		
			UMP/UMK Tahun 2003	Intensitas	Score	Rata-Rata Upah Aktual	Intensitas	Score
60	Jateng	Tegal	365,000	TBRR	0.0060	382,736	TBDSR	0.0088
61	Jateng	Jepara	376,000	TBRR	0.0060	506,124	TBDR	0.0021
62	Jateng	Kudus	384,000	TBRR	0.0060	446,103	TBDSR	0.0088
63	Jateng	Banyumas	372,600	TBRR	0.0060	434,552	TBDSR	0.0088
64	Jateng	Cilacap	402,500	TBRSD	0.0029	459,666	TBDSR	0.0088
65	Jateng	Wonosobo	360,000	TBRR	0.0060	294,268	TBDSR	0.0088
66	Jateng	Kebumen	348,800	TBRSR	0.0088	340,684	TBDSR	0.0088
67	Jateng	Boyolali	357,500	TBRR	0.0060	560,673	TBDR	0.0021
68	Jateng	Sukoharjo	370,500	TBRR	0.0060	710,698	TBDSR	0.0020
69	Jateng	Karanganyar	375,000	TBRR	0.0060	666,747	TBDSR	0.0020
70	Jateng	Klaten	358,000	TBRR	0.0060	543,437	TBDR	0.0021
71	Jateng	Magelang	362,000	TBRR	0.0060	491,601	TBDR	0.0021
72	DIY	Bantul	360,000	TBRR	0.0060	548,275	TBDR	0.0021
73	DIY	Gunung Kidul	360,000	TBRR	0.0060	481,551	TBDSR	0.0088
74	Jatim	Blitar	295,000	TBRSR	0.0088	382,300	TBDSR	0.0088
75	Jatim	Kediri	415,000	TBRSD	0.0029	486,464	TBDR	0.0021
76	Jatim	Magetan	292,500	TBRSR	0.0088	584,209	TBDR	0.0021
77	Jatim	Ponorogo	282,000	TBRSR	0.0088	617,975	TBDSR	0.0020
78	Jatim	Tulungagung	332,500	TBRSR	0.0088	434,722	TBDSR	0.0088
79	Jatim	Mojokerto	400,000	TBRSD	0.0029	648,693	TBDSR	0.0020
80	Jatim	Pamekasan	390,000	TBRR	0.0060	410,255	TBDSR	0.0088
81	Jatim	Bangkalan	430,000	TBRSD	0.0029	658,722	TBDSR	0.0020
82	Jatim	Pasuruhan	516,500	TBRT	0.0022	558,725	TBDR	0.0021
83	Jatim	Sidoarjo	516,500	TBRT	0.0022	694,028	TBDSR	0.0020
84	Jatim	Gresik	398,000	TBRR	0.0060	675,445	TBDSR	0.0020
85	Jatim	Lamongan	328,450	TBRSR	0.0088	434,709	TBDSR	0.0088
86	Jatim	Jombang	516,500	TBRT	0.0022	553,485	TBDR	0.0021
87	Jatim	Banyuwangi	319,400	TBRSR	0.0088	365,442	TBDSR	0.0088
88	Jatim	Bondowoso	300,000	TBRSR	0.0088	332,917	TBDSR	0.0088
89	Jatim	Situbondo	311,000	TBRSR	0.0088	509,912	TBDR	0.0021
90	Jatim	Jember	384,000	TBRR	0.0060	392,664	TBDSR	0.0088
91	Bali	Badung	430,000	TBRSD	0.0029	756,227	TBDSR	0.0020
92	Bali	Bangli	410,000	TBRSD	0.0029	852,336	TBDR	0.0021
93	Bali	Buleleng	410,000	TBRSD	0.0029	581,220	TBDR	0.0021
94	Bali	Gianyar	423,000	TBRSD	0.0029	603,702	TBDSR	0.0020
95	Bali	Jembrana	417,500	TBRSD	0.0029	523,875	TBDR	0.0021
96	Bali	Tabanan	410,000	TBRSD	0.0029	745,981	TBDSR	0.0020
97	Bali	Klungkung	410,000	TBRSD	0.0029	740,786	TBDSR	0.0020
98	Bali	Karang Asem	410,000	TBRSD	0.0029	677,985	TBDSR	0.0020
99	Kalbar	Kapuas Hulu	400,000	TBRSD	0.0029	1,292,402	TBDSR	0.0014
100	Kalbar	Ketapang	400,000	TBRSD	0.0029	798,938	TBDSR	0.0020
101	Kalbar	Pontianak	400,000	TBRSD	0.0029	732,453	TBDSR	0.0020
102	Kalbar	Sambas	400,000	TBRSD	0.0029	531,036	TBDR	0.0021
103	Kalbar	Sanggau	400,000	TBRSD	0.0029	884,728	TBDR	0.0020
104	Kalteng	Barito Selatan	452,763	TBRSD	0.0029	1,096,190	TBDSR	0.0014
105	Kalteng	Barito Utara	452,763	TBRSD	0.0029	1,196,230	TBDSR	0.0014
106	Kalteng	Kapuas	452,763	TBRSD	0.0029	728,698	TBDSR	0.0020
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	459,172	TBRSD	0.0029	659,383	TBDSR	0.0020
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	459,172	TBRSD	0.0029	762,932	TBDSR	0.0020
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	459,172	TBRSD	0.0029	723,483	TBDSR	0.0020
110	Kalsel	Tabalong	459,172	TBRSD	0.0029	1,259,967	TBDSR	0.0014
111	Kalsel	Tanah Laut	459,172	TBRSD	0.0029	637,246	TBDSR	0.0020
112	Kalsel	Tapin	459,172	TBRSD	0.0029	903,558	TBDR	0.0020
113	Kaltim	Berau	618,333	TBRST	0.0015	1,178,334	TBDSR	0.0014
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	618,333	TBRST	0.0015	768,293	TBDSR	0.0020
115	Kaltim	Pasir	618,333	TBRST	0.0015	1,342,462	TBDSR	0.0014
116	Kaltim	Kab.Bulungan	618,333	TBRST	0.0015	843,082	TBDR	0.0020
117	Kaltim	Kutai Timur	618,333	TBRST	0.0015	1,651,761	TBDSR	0.0014
118	Kaltim	Nunukan	618,333	TBRST	0.0015	647,939	TBDSR	0.0020

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Indikator Biaya Tenaga Kerja Aturan Formal			Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual		
			UMP/UMK Tahun 2003	Intensitas	Score	Rata-Rata Upah Aktual	Intensitas	Score
119	Sulut	Minahasa	495,000	TBRT	0.0022	782,293	TBDS	0.0020
120	Sulut	Sangihe Talaut	495,000	TBRT	0.0022	704,414	TBDS	0.0020
121	Gorontalo	Gorontalo	410,000	TBRSD	0.0029	631,608	TBDS	0.0020
122	Sulteng	Banggai	410,000	TBRSD	0.0029	688,129	TBDS	0.0020
123	Sulteng	Toli Toli	410,000	TBRSD	0.0029	596,463	TBDR	0.0021
124	Sulteng	Donggala	410,000	TBRSD	0.0029	478,274	TBDSR	0.0088
125	Sulteng	Morowali	410,000	TBRSD	0.0029	563,784	TBDR	0.0021
126	Sulteng	Poso	410,000	TBRSD	0.0029	643,991	TBDS	0.0020
127	Sultra	Buton	405,000	TBRSD	0.0029	807,904	TBDS	0.0020
128	Sultra	Kolaka	405,000	TBRSD	0.0029	930,293	TBDT	0.0020
129	Sulsel	Gowa	415,000	TBRSD	0.0029	885,103	TBDT	0.0020
130	Sulsel	Takalar	415,000	TBRSD	0.0029	451,748	TBDSR	0.0088
131	Sulsel	Jeneponto	415,000	TBRSD	0.0029	988,742	TBDST	0.0014
132	Sulsel	Bantaeng	415,000	TBRSD	0.0029	649,050	TBDS	0.0020
133	Sulsel	Sinjai	415,000	TBRSD	0.0029	779,369	TBDS	0.0020
134	Sulsel	Selayar	415,000	TBRSD	0.0029	558,438	TBDR	0.0021
135	Sulsel	Bone	415,000	TBRSD	0.0029	479,113	TBDSR	0.0088
136	Sulsel	Maros	415,000	TBRSD	0.0029	516,813	TBDR	0.0021
137	Sulsel	Pangkep	415,000	TBRSD	0.0029	483,953	TBDR	0.0021
138	Sulsel	Barru	415,000	TBRSD	0.0029	906,166	TBDT	0.0020
139	Sulsel	Pinrang	415,000	TBRSD	0.0029	967,605	TBDST	0.0014
140	Sulsel	Majene	415,000	TBRSD	0.0029	724,498	TBDS	0.0020
141	Sulsel	Enrekang	415,000	TBRSD	0.0029	546,154	TBDR	0.0021
142	Sulsel	Tanah Toraja	415,000	TBRSD	0.0029	960,823	TBDST	0.0014
143	Sulsel	Luwu	415,000	TBRSD	0.0029	880,319	TBDT	0.0020
144	Sulsel	Luwu Utara	415,000	TBRSD	0.0029	729,446	TBDS	0.0020
145	NTB	Bima	375,000	TBRR	0.0060	624,617	TBDS	0.0020
146	NTB	Lombok Barat	375,000	TBRR	0.0060	462,405	TBDSR	0.0088
147	NTB	Dompu	375,000	TBRR	0.0060	679,385	TBDS	0.0020
148	NTB	Lombok Timur	375,000	TBRR	0.0060	409,514	TBDSR	0.0088
149	NTT	Ende	375,000	TBRR	0.0060	436,537	TBDSR	0.0088
150	NTT	Flores Timur	375,000	TBRR	0.0060	732,798	TBDS	0.0020
151	NTT	Manggarai	375,000	TBRR	0.0060	667,656	TBDS	0.0020
152	NTT	Ngada	375,000	TBRR	0.0060	654,094	TBDS	0.0020
153	NTT	TTS	375,000	TBRR	0.0060	868,307	TBDT	0.0020
154	NTT	TTU	375,000	TBRR	0.0060	967,469	TBDST	0.0014
155	NTT	Belu	375,000	TBRR	0.0060	525,337	TBDR	0.0021
156	NTT	Sumba Barat	375,000	TBRR	0.0060	839,316	TBDT	0.0020
157	Irjabar	Fakfak	530,000	TBRST	0.0015	1,328,610	TBDST	0.0014
158	Irjabar	Manokwari	530,000	TBRST	0.0015	2,515,385	TBDST	0.0014
159	Irjabar	Sorong	530,000	TBRST	0.0015	1,322,976	TBDST	0.0014
160	Papua	Jayawijaya	530,000	TBRST	0.0015	253,833	TBDSR	0.0088
161	Irjabar	Mimika	530,000	TBRST	0.0015	2,085,455	TBDST	0.0014

Keterangan :**TBR** : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Formal**TBD** : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya AktualDibelakang **TBR/TBD** - **ST** : Sangat Tinggi**T** : Tinggi**SD** : Sedang**R** : Rendah**SR** : Sangat Rendah

Rata-rata	439,765		Rata-rata	718,194	
TBRST	522,551	-	TBDST	953,459	-
TBRT	481,158	522,551	TBDT	835,827	953,459
TBRSD	398,372	481,158	TBDS	600,561	835,827
TBRR	356,978	398,372	TBDR	482,928	600,561
TBRSR	-	356,978	TBDSR	-	482,928

Sumber : Asosiasi Pengusaha Indonesia telah diolah dan Sakernas BPS Pusat

Lampiran 15.3 : Variabel / Indikator Produktivitas Tenaga Kerja/Productivity of Labour**Lampiran 15.3.A : Variabel Indikator Produktivitas Tenaga Kerja 53 Kota***Productivity of Labour of 53 Cities*

NO	PROPINSI	KOTA	Nilai Tambah Manufaktur (Rp)	Jumlah TK Manufaktur (Orang)	Produktivitas Tenaga Kerja	Intensitas	Score
1	Sumut	Binjai	371,746	16,739	22,208,364	TPPSD	0.0066
2	Sumut	Medan	4,225,604	122,459	34,506,277	TPPSD	0.0066
3	Sumut	Pematang Siantar	819,534	7,048	116,279,008	TPPST	0.0273
4	Sumut	Sibolga	65,880	1,762	37,389,092	TPPT	0.0140
5	Sumut	Tanjung Balai	300,362	958	313,530,626	TPPST	0.0273
6	Sumut	Tebing Tinggi	224,432	11,453	19,595,948	TPPSD	0.0066
7	Sumbar	Padang	1,482,028	12,936	114,566,170	TPPST	0.0273
8	Sumbar	Sawahlunto	61,831	616	100,375,519	TPPST	0.0273
9	Riau	Pekanbaru	288,689	15,584	18,524,698	TPPSD	0.0066
10	Riau	Dumai	2,669,830	6,497	4,393,503	TPPR	0.0028
11	Kep. Riau	Tanjung Pinang	171,224	2,922	58,598,268	TPPST	0.0273
12	Kep. Riau	Batam	6,604,882	131,490	50,231,059	TPPST	0.0273
13	Jambi	Jambi	525,196	17,610	29,823,761	TPPSD	0.0066
14	Sumsel	Palembang	6,040,344	32,760	103,231,441	TPPST	0.0273
15	Babel	Pangkal Pinang	97,516	7,992	12,201,650	TPPR	0.0028
16	Bengkulu	Bengkulu	73,070	2,373	30,792,246	TPPSD	0.0066
17	Lampung	Bandar Lampung	1,772,760	31,458	56,353,233	TPPST	0.0273
18	Banten	Cilegon	5,969,298	337,912	17,665,244	TPPSD	0.0066
19	Banten	Tangerang	13,940,587	172,992	80,585,155	TPPST	0.0273
20	DKI	Jakarta	60,154,115	661,768	90,899,099	TPPST	0.0273
21	Jabar	Bekasi	5,307,519	166,617	31,854,607	TPPSD	0.0066
22	Jabar	Bogor	963,910	60,588	15,909,255	TPPSD	0.0066
23	Jabar	Bandung	7,225,546	234,090	30,866,530	TPPSD	0.0066
24	Jabar	Sukabumi	63,372	13,770	4,602,168	TPPR	0.0028
25	Jabar	Cirebon	2,013,785	5,508	365,610,911	TPPST	0.0273
26	Jateng	Semarang	5,552,262	147,436	37,658,797	TPPT	0.0140
27	Jateng	Tegal	260,189	7,434	34,999,884	TPPSD	0.0066
28	Jateng	Pekalongan	532,155	27,612	19,272,603	TPPSD	0.0066
29	Jateng	Surakarta	1,217,411	48,852	24,920,401	TPPSD	0.0066
30	DIY	Yogyakarta	551,025	19,056	28,916,089	TPPSD	0.0066
31	Jatim	Kediri	17,184,249	30,508	563,270,268	TPPST	0.0273
32	Jatim	Malang	3,571,598	34,716	102,880,470	TPPST	0.0273
33	Jatim	Madiun	285,910	8,416	33,972,241	TPPSD	0.0066
34	Jatim	Mojokerto	126,989	16,832	7,544,481	TPPR	0.0028
35	Jatim	Surabaya	20,170,713	223,024	90,441,893	TPPST	0.0273
36	Jatim	Probolinggo	328,926	7,364	44,666,710	TPPT	0.0140
37	Bali	Denpasar	550,340	39,006	14,109,117	TPPSD	0.0066
38	Kalbar	Pontianak	210,556	27,317	7,707,868	TPPR	0.0028
39	Kalteng	Palangkaraya	66,309	1,845	35,939,827	TPPSD	0.0066
40	Kalsel	Banjarmasin	274,972	27,180	42,538,775	TPPT	0.0140
41	Kaltim	Balikpapan	5,153,787	13,226	22,797,912	TPPSD	0.0066
42	Kaltim	Samarinda	2,420,966	32,790	73,832,450	TPPST	0.0273
43	Sulut	Bitung	332,157	7,269	45,695,006	TPPT	0.0140
44	Sulut	Manado	244,648	7,212	33,922,352	TPPSD	0.0066
45	Gorontalo	Gorontalo	37,743	2,349	16,067,501	TPPSD	0.0066
46	Sulteng	Palu	286,661	5,110	56,098,043	TPPST	0.0273
47	Sultra	Kendari	110,681	4,292	25,787,796	TPPSD	0.0066
48	Sulsel	Makasar	2,388,712	35,860	66,612,154	TPPST	0.0273
49	Sulsel	Pare Pare	20,017	3,260	6,140,181	TPPR	0.0028
50	NTB	Mataram	163,837	8,797	18,624,183	TPPSD	0.0066
51	NTT	Kupang	64,938	2,555	25,416,144	TPPSD	0.0066
52	Iriabar	Sorong	176,236	1,830	96,303,689	TPPST	0.0273
53	Papua	Jayapura	96,137	1,830	52,534,011	TPPST	0.0273

Keterangan :

TPP : Tenaga Kerja - Produktivitas - Tenaga Kerja

Dibelakang **TPP - ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rasio antara Nilai Tambah Manufaktur terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur

Sumber : Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku th 2003, dan Data Sakernas Th.2003, BPS, yang telah diolah

Rata-rata	24,891,997	
Standev	22,495,586	
Skew	1	
Kuortis	1	
TPPST	47,387,583	-
TPPT	36,139,790	47,387,583
TPPSD	13,644,204	36,139,790
TPPR	2,396,411	13,644,204
TPPSR	-	2,396,411

Lampiran 15.3.B : Variabel Indikator Produktivitas Tenaga Kerja 161 Kabupaten
Productivity of Labour of 161 Regencies

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Nilai Tambah Manufaktur (Rp)	Jumlah TK Manufaktur (Orang)	Produktivitas Tenaga Kerja	Intensitas	Score
1	Sumut	Asahan	4,563,941	31,263	145,985,389	TPPST	0.0273
2	Sumut	Dairi	6,342	2,643	2,399,467	TPPR	0.0028
3	Sumut	Deliserdang	3,511,648	91,094	38,549,712	TPPT	0.0140
4	Sumut	Langkat	905,070	7,587	89,146,093	TPPST	0.0273
5	Sumut	Simalungun	811,035	4,713	172,084,649	TPPST	0.0273
6	Sumut	Karo	41,649	1,762	23,637,395	TPPSD	0.0066
7	Sumut	Labuhan Batu	3,840,727	13,226	290,392,157	TPPST	0.0273
8	Sumut	Tapanuli Utara	19,612	16,286	1,204,207	TPPSR	0.0019
9	Sumbar	Pesisir Selatan	238,429	5,544	43,006,600	TPPT	0.0140
10	Sumbar	Sawalunto/Sijunjung	50,516	8,400	6,013,774	TPPR	0.0028
11	Sumbar	Pasaman	69,559	1,232	56,460,008	TPPST	0.0273
12	Sumbar	Solok	123,705	1,232	100,409,505	TPPST	0.0273
13	Riau	Bengkalis	1,262,141	20,251	11,135,180	TPPR	0.0028
14	Riau	Indragiri Hilir	317,077	7,364	43,057,723	TPPT	0.0140
15	Riau	Kampar	105,946	5,523	19,182,763	TPPSD	0.0066
16	Riau	Kuantan Sengigi	72,600	25,774	2,816,811	TPPR	0.0028
17	Riau	Pelalawan	197,749	1,841	107,413,900	TPPST	0.0273
18	Riau	Rokan Hulu	71,509	1,841	38,842,504	TPPT	0.0140
19	Jambi	Batanghari	181,904	1,196	152,093,981	TPPST	0.0273
20	Jambi	Bungo	53,863	2,968	18,147,939	TPPSD	0.0066
21	Jambi	Kerinci	62,023	3,566	17,392,860	TPPSD	0.0066
22	Jambi	Tanjung Jabung Timur	155,506	15,471	10,051,466	TPPR	0.0028
23	Jambi	Tebo	26,830	4,186	6,409,561	TPPR	0.0028
24	Sumsel	Muara Enim	169,367	5,152	32,874,030	TPPSD	0.0066
25	Sumsel	Musi Banyuasin	948,525	12,075	78,552,795	TPPST	0.0273
26	Sumsel	Musi Rawas	269,675	1,876	143,750,000	TPPST	0.0273
27	Sumsel	Ogan Komiring Ilir	424,632	23,793	17,846,930	TPPSD	0.0066
28	Sumsel	Lahat	231,747	1,757	131,899,260	TPPST	0.0273
29	Babel	Bangka	236,167	5,368	43,995,343	TPPT	0.0140
30	Babel	Belitung	225,946	4,440	50,888,739	TPPST	0.0273
31	Bengkulu	Bengkulu Selatan	7,518	1,436	5,235,376	TPPR	0.0028
32	Bengkulu	Rejang Lebong	49,747	4,108	12,109,723	TPPR	0.0028
33	Bengkulu	Bengkulu Utara	28,881	2,872	10,056,058	TPPR	0.0028
34	Lampung	Lampung Barat	32,838	871	37,701,493	TPPT	0.0140
35	Lampung	Lampung Selatan	524,235	4,684	111,920,367	TPPST	0.0273
36	Lampung	Lampung Timur	240,830	3,309	72,780,296	TPPST	0.0273
37	Lampung	Lampung Utara	82,983	2,491	33,313,127	TPPSD	0.0066
38	Lampung	Way Kanan	50,317	4,355	11,553,846	TPPR	0.0028
39	Banten	Lebak	359,594	32,388	11,102,694	TPPR	0.0028
40	Banten	Serang	4,428,399	58,572	75,606,078	TPPST	0.0273
41	Banten	Tangerang	10,007,593	20,352	491,725,299	TPPST	0.0273
42	Jabar	Bekasi	31,081,817	122,249	254,250,068	TPPST	0.0273
43	Jabar	Bogor	7,127,729	267,253	26,670,341	TPPSD	0.0066
44	Jabar	Ciamis	493,029	21,728	22,690,933	TPPSD	0.0066
45	Jabar	Tasikmalaya	332,644	107,065	3,106,937	TPPR	0.0028
46	Jabar	Garut	789,972	58,778	13,439,919	TPPR	0.0028
47	Jabar	Sumedang	648,212	56,830	11,406,154	TPPR	0.0028
48	Jabar	Bandung	12,808,041	335,076	38,224,286	TPPT	0.0140
49	Jabar	Cianjur	218,185	39,302	5,551,495	TPPR	0.0028
50	Jabar	Sukabumi	1,394,414	82,712	16,858,666	TPPSD	0.0066
51	Jabar	Cirebon	684,766	113,485	6,033,976	TPPR	0.0028
52	Jabar	Kuningan	110,297	10,689	10,318,784	TPPR	0.0028
53	Jabar	Indramayu	275,131	37,575	7,322,178	TPPR	0.0028
54	Jabar	Purwakarta	2,677,420	38,579	69,400,974	TPPST	0.0273
55	Jabar	Karawang	4,673,454	161,726	28,897,357	TPPSD	0.0066
56	Jabar	Subang	301,563	14,995	20,110,904	TPPSD	0.0066
57	Jateng	Kendal	2,195,645	37,538	58,491,249	TPPST	0.0273
58	Jateng	Pekalongan	1,093,879	134,624	8,125,436	TPPR	0.0028

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Nilai Tambah Manufaktur (Rp)	Jumlah TK Manufaktur (Orang)	Produktivitas Tenaga Kerja	Intensitas	Score
59	Jateng	Pemalang	685,635	27,028	25,367,587	TPPSD	0.0066
60	Jateng	Tegal	778,346	145,718	5,341,457	TPPR	0.0028
61	Jateng	Jepara	1,047,699	251,122	4,172,071	TPPR	0.0028
62	Jateng	Kudus	7,596,721	175,090	43,387,523	TPPT	0.0140
63	Jateng	Banyumas	746,833	158,618	4,708,373	TPPR	0.0028
64	Jateng	Cilacap	15,909,569	117,784	15,078,479	TPPSD	0.0066
65	Jateng	Wonosobo	171,991	30,032	5,726,912	TPPR	0.0028
66	Jateng	Kebumen	276,638	137,962	2,005,173	TPPSR	0.0019
67	Jateng	Boyolali	432,575	93,024	4,650,142	TPPR	0.0028
68	Jateng	Sukoharjo	960,635	79,028	12,155,631	TPPR	0.0028
69	Jateng	Karanganyar	1,416,667	128,472	11,027,045	TPPR	0.0028
70	Jateng	Klaten	973,052	172,928	5,626,919	TPPR	0.0028
71	Jateng	Magelang	701,949	61,676	11,381,240	TPPR	0.0028
72	DIY	Bantul	578,682	91,554	6,320,663	TPPR	0.0028
73	DIY	Gunung Kidul	371,537	21,614	17,189,646	TPPSD	0.0066
74	Jatim	Blitar	106,520	40,793	2,611,228	TPPR	0.0028
75	Jatim	Kediri	548,909	64,155	8,555,987	TPPR	0.0028
76	Jatim	Magetan	176,352	9,468	18,626,074	TPPSD	0.0066
77	Jatim	Ponorogo	215,802	22,056	9,784,289	TPPR	0.0028
78	Jatim	Tulungagung	837,372	80,352	10,421,302	TPPR	0.0028
79	Jatim	Mojokerto	1,206,813	104,404	11,559,067	TPPR	0.0028
80	Jatim	Pamekasan	20,330	4,716	4,310,825	TPPR	0.0028
81	Jatim	Bangkalan	97,886	11,953	8,189,239	TPPR	0.0028
82	Jatim	Pasuruhan	1,701,145	107,886	15,767,989	TPPSD	0.0066
83	Jatim	Sidoarjo	8,160,841	238,279	34,249,100	TPPSD	0.0066
84	Jatim	Gresik	6,665,043	94,191	70,760,930	TPPST	0.0273
85	Jatim	Jombang	509,833	87,680	5,814,696	TPPR	0.0028
86	Jatim	Lamongan	218,816	33,175	6,595,824	TPPR	0.0028
87	Jatim	Banyuwangi	339,952	57,172	5,946,127	TPPR	0.0028
88	Jatim	Bondowoso	132,124	21,639	6,105,834	TPPR	0.0028
89	Jatim	Situbondo	258,529	28,749	8,992,629	TPPR	0.0028
90	Jatim	Jember	591,890	114,090	5,187,924	TPPR	0.0028
91	Bali	Badung	145,565	17,047	8,539,036	TPPR	0.0028
92	Bali	Bangli	80,964	11,500	7,040,346	TPPR	0.0028
93	Bali	Buleleng	302,045	45,090	6,698,707	TPPR	0.0028
94	Bali	Gianyar	511,199	78,599	6,503,887	TPPR	0.0028
95	Bali	Jembrana	109,085	28,843	3,782,015	TPPR	0.0028
96	Bali	Tabanan	136,122	13,458	10,114,588	TPPR	0.0028
97	Bali	Klungkung	107,098	1,022	104,792,162	TPPST	0.0273
98	Bali	Karang Asem	124,346	63,450	1,959,753	TPPSR	0.0019
99	Kalbar	Kapuas Hulu	19,774	4,684	4,221,623	TPPR	0.0028
100	Kalbar	Ketapang	212,219	13,126	16,167,850	TPPSD	0.0066
101	Kalbar	Pontianak	2,223,482	27,115	82,001,932	TPPST	0.0273
102	Kalbar	Sambas	271,738	6,118	44,416,134	TPPT	0.0140
103	Kalbar	Sanggau	660,524	7,080	93,294,286	TPPST	0.0273
104	Kalteng	Barito Selatan	51,328	488	105,180,881	TPPST	0.0273
105	Kalteng	Barito Utara	46,562	3,309	14,071,188	TPPSD	0.0066
106	Kalteng	Kapuas	99,908	15,140	6,598,927	TPPR	0.0028
107	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	68,719	17,803	3,859,980	TPPR	0.0028
108	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	75,012	8,306	9,031,053	TPPR	0.0028
109	Kalsel	Hulu Sungai Utara	81,373	28,773	2,828,089	TPPR	0.0028
110	Kalsel	Tabalong	25,937	453	57,255,810	TPPST	0.0273
111	Kalsel	Tanah Laut	347,157	12,706	27,322,305	TPPSD	0.0066
112	Kalsel	Tapin	23,602	3,738	6,314,146	TPPR	0.0028
113	Kaltim	Berau	442,321	2,804	157,746,469	TPPST	0.0273
114	Kaltim	Kutai Kertanegara	702,649	19,200	36,596,302	TPPT	0.0140
115	Kaltim	Pasir	58,367	3,962	14,731,751	TPPSD	0.0066
116	Kaltim	Kab.Bulongan	299,341	1,402	213,509,986	TPPST	0.0273

NO	PROPINSI	KABUPATEN	Nilai Tambah Manufaktur (Rp)	Jumlah TK Manufaktur (Orang)	Produktivitas Tenaga Kerja	Intensitas	Score
117	Kaltim	Kutai Timur	39,718	701	56,659,130	TPPST	0.0273
118	Kaltim	Nunukan	367	579	633,851	TPPSR	0.0019
119	Sulut	Minahasa	113,719	11,178	10,173,451	TPPR	0.0028
120	Sulut	Sangihe Talaut	35,124	4,158	8,447,330	TPPR	0.0028
121	Gorontalo	Gorontalo	102,643	11,165	9,193,283	TPPR	0.0028
122	Sulteng	Banggai	102,781	7,839	13,111,494	TPPR	0.0028
123	Sulteng	Toli Toli	77,818	2,290	33,981,659	TPPSD	0.0066
124	Sulteng	Donggala	99,309	4,580	21,683,188	TPPSD	0.0066
125	Sulteng	Morowali	38,524	916	42,056,769	TPPT	0.0140
126	Sulteng	Poso	68,443	916	74,719,228	TPPST	0.0273
127	Sultra	Buton	35,937	10,476	3,430,367	TPPR	0.0028
128	Sultra	Kolaka	331,650	1,564	212,052,308	TPPST	0.0273
129	Sulsel	Gowa	107,162	6,592	16,256,390	TPPSD	0.0066
130	Sulsel	Takalar	69,415	2,499	27,777,283	TPPSD	0.0066
131	Sulsel	Jeneponto	18,363	815	22,530,957	TPPSD	0.0066
132	Sulsel	Bantaeng	21,693	833	26,042,233	TPPSD	0.0066
133	Sulsel	Sinjai	15,381	833	18,465,018	TPPSD	0.0066
134	Sulsel	Selayar	20,187	833	24,233,866	TPPSD	0.0066
135	Sulsel	Bone	193,937	4,998	38,802,881	TPPT	0.0140
136	Sulsel	Maros	205,505	5,741	35,796,070	TPPSD	0.0066
137	Sulsel	Pangkep	812,623	4,998	162,589,684	TPPST	0.0273
138	Sulsel	Barra	28,586	833	34,317,155	TPPSD	0.0066
139	Sulsel	Pinrang	76,436	3,260	23,446,660	TPPSD	0.0066
140	Sulsel	Majene	21,404	2,499	8,564,938	TPPR	0.0028
141	Sulsel	Enrekang	27,755	833	33,319,232	TPPSD	0.0066
142	Sulsel	Tanah Toraja	47,234		NA		
143	Sulsel	Luwu	122,033	2,481	49,186,884	TPPST	0.0273
144	Sulsel	Luwu Utara	21,936	3,332	6,583,364	TPPR	0.0028
145	NTB	Bima	37,476	10,602	3,534,775	TPPR	0.0028
146	NTB	Lombok Barat	71,411	28,481	2,507,316	TPPR	0.0028
147	NTB	Dompu	28,817	9,296	3,099,930	TPPR	0.0028
148	NTB	Lombok Timur	179,839	31,544	5,701,212	TPPR	0.0028
149	NTT	Ende	11,919	28,147	423,447	TPPSR	0.0019
150	NTT	Flores Timur	6,604	1,022	6,461,903	TPPR	0.0028
151	NTT	Manggarai	8,138	15,764	516,239	TPPSR	0.0019
152	NTT	Ngada	9,705	3,822	2,539,197	TPPR	0.0028
153	NTT	TTS	6,676	546	12,227,595	TPPR	0.0028
154	NTT	TTU	6,910	8,736	791,019	TPPSR	0.0019
155	NTT	Belu	9,673	15,253	634,202	TPPSR	0.0019
156	NTT	Sumba Barat	8,233	8,701	946,158	TPPSR	0.0019
157	Irjabar	Fakfak	44,821		NA		
158	Irjabar	Manokwari	28,586	678	42,162,345	TPPT	0.0140
159	Irjabar	Sorong	138,830	2,712	51,190,863	TPPST	0.0273
160	Papua	Jayawijaya	1,520	551	2,761,418	TPPR	0.0028
161	Irjabar	Mimika	4,583	678	6,760,285	TPPR	0.0028

Keterangan :

TPP : Tenaga Kerja - Produktivitas - Tenaga Kerja

Dibelakang **TPP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rasio antara Nilai Tambah Manufaktur terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur

Sumber : Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku th 2003, dan Data Sakernas Th.2003, BPS, yang telah diolah

Rata-rata	24,891,997	
Standev	22,495,586	
Skew	1	
Kuortis	1	
TPPST	47,387,583	-
TPPT	36,139,790	47,387,583
TPPSD	13,644,204	36,139,790
TPPR	2,396,411	13,644,204
TPPSR	-	2,396,411

*KPPOD mengucapkan terimakasih kepada
The Asia Foundation, USAID, Kadin-Indonesia,
CSIS, LPEM-FEUI, Sekolah Tinggi Manajemen
Prasetiya Mulya, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia,
Suara Pembaharuan dan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam
atas bantuannya
dalam penyelenggaraan acara penganugerahan
'KPPOD Award' kepada Kabupaten/ Kota
yang mendapat peringkat terbaik dalam hal "Daya
Tarik Investasi Kabupaten/ Kota Tahun 2004"
yang diselenggarakan tanggal 24 Pebruari 2005
di Jakarta.*



The Jakarta Post

SUARA PEMBARUAN

Bisnis Indonesia

